



2022

LAPORAN PEREKONOMIAN INDONESIA



<https://www.bps.go.id>



2022

LAPORAN PEREKONOMIAN INDONESIA



<https://www.bps.go.id>



LAPORAN PEREKONOMIAN INDONESIA 2022

Indonesian Economic Report, 2022

ISSN : 1858-0963

No. Publikasi/*Publication Number* : 07300.2216

Katalog/*Catalog* : 9199007

Ukuran Buku/*Book Size* : 17,6x25 cm

Jumlah Halaman/*Number of Pages* : xx+186 halaman/*pages*

Naskah/*Manuscript*:

Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik

Directorate of Statistical Analysis and Development

Penyunting/*Editor*:

Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik

Directorate of Statistical Analysis and Development

Desain Kover oleh/*Cover Designed by*:

Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik

Directorate of Statistical Analysis and Development

Penerbit/*Published by* :

Badan Pusat Statistik

©BPS RI/*BPS-Statistics Indonesia*

Dicetak oleh/*Printed by* :

CV Daffa Putra/ CV Daffa Putra

Sumber Ilustrasi/*Graphics by* : www.freepik.com

Dilarang mengumumkan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

Prohibited to announce, distribute, communicate, and/or copy part of all this book for commercial purposes without permission from BPS-Statistics Indonesia

TIM PENYUSUN

Pengarah :
Muchammad Romzi

Editor :
Sofaria Ayuni

Penulis :
Sofaria Ayuni
Nia Setiyawati
Muhammad Ihsan
Erna Yulianingsih
Tika Meilaningsih

Infografis :
Nia Setiyawati
Muhammad Ihsan
Erna Yulianingsih
Tika Meilaningsih

Desain/layout :
Chairul Anam

Kontributor Data :
- Direktorat Neraca Produksi
- Direktorat Neraca Pengeluaran
- Direktorat Statistik Harga
- Direktorat Statistik Distribusi
- Direktorat Statistik Keuangan, TI dan Pariwisata
- Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan

KATA PENGANTAR

LAPORAN PEREKONOMIAN INDONESIA 2022 merupakan publikasi rutin tahunan Badan Pusat Statistik (BPS). Publikasi ini memberikan gambaran perkembangan kinerja perekonomian Indonesia. Publikasi ini mengulas kondisi perekonomian pasca terjadi Pandemi Covid-19 dan perkembangan perekonomian di tahun berjalan atau selama tahun 2022, yang dicerminkan melalui indikator makro terpilih.

Statistik yang disajikan dalam publikasi ini diperoleh dari data yang dihimpun oleh BPS maupun institusi lain seperti Bank Indonesia (BI), Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Kementerian Keuangan, dan Kementerian/Lembaga lainnya yang dapat memberikan gambaran perekonomian Indonesia secara menyeluruh. Publikasi ini menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran negara, pertumbuhan ekonomi, Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), laju inflasi, perdagangan luar negeri, investasi, pariwisata, dan ketenagakerjaan.

Akhirnya, penghargaan dan terima kasih disampaikan kepada tim penyusun dan semua pihak yang telah berpartisipasi dalam mewujudkan publikasi ini. Saran membangun dari pembaca sangat diharapkan guna penyempurnaan publikasi sejenis di masa mendatang, dan semoga publikasi ini bermanfaat.

Jakarta, Agustus 2022

Kepala Badan Pusat Statistik



Dr. Margo Yuwono, S.Si, M.Si

DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	ix
Daftar Gambar	xii
Penjelasan Umum	xv
Penjelasan Teknis	xvi
Singkatan	xix
BAB I. TINJAUAN PEREKONOMIAN INDONESIA	1
Momentum Kebangkitan Nasional 2021	4
Percepatan Pemulihan Ekonomi di Tahun 2022	10
BAB II. PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL DAN REGIONAL	15
PDB Menurut Lapangan Usaha	17
PDB Menurut Penggunaan	21
Pertumbuhan Bali Masih Rendah, Maluku dan Papua Melesat	29
Pendapatan Per Kapita	32
BAB III. APBN SEBAGAI INSTRUMEN PENTING DALAM PENANGANAN DAMPAK PANDEMI	35
Peran Penting APBN dalam Penanganan Dampak Pandemi	37
APBN 2022 untuk Melanjutkan Dukungan Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural	38
Realisasi Pendapatan Negara Tahun 2021 Melebihi Target yang ditetapkan pada APBN	40
Belanja Negara Tahun 2021 yang Responsif dengan Pendekatan <i>Spending Better</i>	43
Utang Negara masih Menjadi Komponen Utama Pembiayaan	47
Tantangan dalam Pengelolaan Fiskal Demi Terwujudnya APBN yang Berkelanjutan	49
BAB IV. PROGRAM PEMERINTAH DALAM PENANGANAN COVID-19 DAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL (PC-PEN)	53
Gelombang Penyebaran Covid-19 di Tengah Upaya Mengakselerasi Pemulihan Ekonomi Nasional	55
Klasterisasi, Alokasi, dan Realisasi Anggaran Program PC-PEN	57
Kolaborasi Pemerintah dalam Mendukung PC-PEN; Bauran Kebijakan untuk Mewujudkan Stabilitas Sistem Keuangan (SSK)	60
Optimisme Pemulihan Ekonomi Diprediksi Masih Terjaga di Tahun 2022	62
Tantangan, Strategi, dan Peluang dalam Pemulihan Ekonomi Nasional	65

BAB V. INFLASI DAN DAYA BELI MASYARAKAT	69
Pergerakan Inflasi Inti dan Non Inti di Masa Pandemi	71
Pergerakan Laju Inflasi Indonesia Menurut Kelompok Pengeluaran di Saat Pandemi.....	76
Pergerakan Inflasi Berdasarkan Kelompok Pengeluaran dan Sumbangannya	80
Laju Inflasi Kota-Kota di Indonesia	81
Inflasi, Daya Beli dan Pertumbuhan Ekonomi di Masa Pandemi	86
BAB VI. PERDAGANGAN INDONESIA DALAM BEBERAPA TAHUN TERAKHIR	89
Surplus Neraca Perdagangan Tertinggi dalam 15 Tahun Terakhir	92
Ekspor Indonesia Naik Hingga 41,87 Persen	94
Ekspor Hasil Industri Menjadi Tumpuan Ekspor Indonesia	96
Negara-Negara Tujuan Ekspor Indonesia	100
Kinerja Impor Indonesia Tumbuh Positif	101
Negara Pemasok Barang Impor ke Indonesia.....	105
BAB VII. INVESTASI INDONESIA DAN PERDAGANGAN SAHAM	109
Kekuatan Investasi Dalam Negeri Didukung Berbagai Program Pemerintah	111
PMDN Menurut Sektor	113
PMDN Menurut Wilayah.....	115
Cara Indonesia Menarik Penanam Modal Asing	118
Investasi PMA Menurut Sektor	119
Investasi PMA Menurut Wilayah.....	121
Investasi PMA Menurut Negara Asal.....	123
Perdagangan Saham Di Bursa Efek Indonesia	126
Investasi Asing yang masuk ke Indonesia.....	128
BAB VIII. PARIWISATA	131
Situasi Pariwisata di Tengah Pemulihan Ekonomi	133
Okupansi Hotel Berbintang Meningkat dengan Lama Menginap Semakin Pendek.....	146
Prospek Pariwisata Pada 2022	150
BAB IX. KETENAGAKERJAAN	153
Angkatan Kerja di Indonesia.....	155
Kondisi Ketenagakerjaan di Provinsi	161
Tingkat Pendidikan Tenaga Kerja	163
Peralihan Sektor Pekerjaan di Masa Pandemi	164
Upah Pekerja	165
Pertumbuhan Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja	168
Produktivitas Tenaga Kerja di Indonesia.....	170
Pekerja Sektor Informal Masih Mendominasi	173
Daftar Pustaka	177

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1. Proyeksi Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Laju Inflasi Indonesia, 2022-2023	12
Tabel 2.1. PDB Harga Konstan 2010 (Miliar Rupiah) dan Pertumbuhan PDB (Persen) Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2018-2021	18
Tabel 2.2. PDB Harga Berlaku (Miliar Rupiah) dan Distribusi PDB (Persen) Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2018-2021.....	20
Tabel 2.3. PDB Harga Konstan 2010 (Miliar Rupiah) dan Pertumbuhan PDB (Persen) Menurut Penggunaan, Tahun 2018-2021.....	22
Tabel 2.4. PDB Harga Berlaku (Miliar Rupiah) dan Distribusi PDB (Persen) Menurut Penggunaan, Tahun 2018-2021	28
Tabel 2.5. Pertumbuhan dan Kontribusi Ekonomi Menurut Provinsi (Persen), Tahun 2019-2021	31
Tabel 2.6. PDB Per Kapita dan GNI Per Kapita Tahun 2019-2021	33
Tabel 2.7. Klasifikasi Bank Dunia Berdasarkan Tingkat Pendapatan (US\$)	33
Tabel 3.1. Ringkasan APBN Tahun 2021 dan APBN Tahun 2022 (Triliun Rupiah)	39
Tabel 3.2. Realisasi Pendapatan Negara (dalam Triliun Rupiah), 2017-2021.....	41
Tabel 3.3. Realisasi Penerimaan Pajak Dalam Negeri (dalam Triliun Rupiah), 2017-2021.....	42
Tabel 3.4. Realisasi Belanja Negara (dalam Triliun Rupiah), 2017-2021.....	43
Tabel 3.5. Realisasi Defisit Anggaran dan Rincian Pembiayaan Tahun 2021 (dalam Triliun Rupiah)	47
Tabel 4.1. Klasterisasi, Alokasi, dan Realisasi Anggaran Program PC-PEN 2022	59
Tabel 5.1. Inflasi, Sumbangan Inflasi Inti dan Non Inti, Tahun 2020–2022 (Januari-Juni).....	73
Tabel 5.2. Laju Inflasi Indonesia Gabungan 90 Kota Menurut Kelompok Pengeluaran, Januari 2020-Juni 2022 (2018=100).....	78
Tabel 5.3. Sumbangan/Andil Kelompok Pengeluaran Terhadap Inflasi Nasional (Persen), Tahun 2020 dan 2021	81
Tabel 5.4. Laju Inflasi 90 Kota di Indonesia (2018=100), Tahun 2020–2022 (Januari-Juni).....	83

Tabel 6.1.	Neraca Perdagangan Indonesia (Juta US\$), 2019 – Triwulan II 2022	92
Tabel 6.2.	Nilai Ekspor Migas dan Nonmigas Indonesia (Juta US\$), 2019 – Triwulan II 2022.....	95
Tabel 6.3.	Nilai Ekspor Indonesia Menurut Komoditas Penting (Juta US\$), 2019 – Triwulan II 2022	97
Tabel 6.4.	Nilai Ekspor Indonesia Menurut Golongan Barang SITC (Juta US\$), 2019 – Triwulan II 2022	99
Tabel 6.5.	Nilai Ekspor Indonesia Menurut Negara Tujuan (Juta US\$), 2019 – Triwulan II 2022.....	100
Tabel 6.6.	Nilai Impor Migas dan Nonmigas Indonesia (Juta US\$), 2019 – Triwulan II 2022	102
Tabel 6.7.	Nilai Impor Indonesia Menurut Golongan Barang SITC (Juta US\$), 2019 – Triwulan II 2022	105
Tabel 6.8.	Nilai Impor Indonesia Menurut Negara Asal (Juta US\$), 2019 – Triwulan II 2022	106
Tabel 7.1.	Perkembangan Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Menurut Sektor (Miliar Rupiah), Tahun 2019-2021.....	114
Tabel 7.2.	Perkembangan Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Menurut Pulau (Miliar Rupiah), Tahun 2019-2021	116
Tabel 7.3.	Perkembangan Realisasi Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) Menurut Sektor (Juta US\$), Tahun 2019-2021	119
Tabel 7.4.	Perkembangan Realisasi Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) Menurut Pulau (Juta US\$), Tahun 2019-2021	121
Tabel 7.5.	Perkembangan Realisasi Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) Menurut Negara Asal (Juta US\$), Tahun 2019-2021	124
Tabel 7.6.	Transaksi dan Indeks Saham di Bursa Efek Indonesia, 2016-2022 (Januari-Mei).....	127
Tabel 7.7.	Jumlah dan Nilai Perdagangan Saham yang Dilakukan oleh Investor Asing di Bursa Efek Indonesia, 2018-2022 (Januari-Mei).....	130
Tabel 8.1.	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara yang Datang ke Indonesia Menurut Pintu Masuk Utama (Kunjungan), 2019-2022	139
Tabel 8.2.	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara yang Datang ke Indonesia Menurut Kebangsaan (Kunjungan), 2019-2021	140
Tabel 8.3.	Jumlah Akomodasi, Kamar, dan Tempat Tidur yang Tersedia pada Hotel Berbintang Menurut Provinsi, 2020-2021	145

Tabel 8.4.	Tingkat Penghunian Kamar pada Hotel Berbintang Menurut Provinsi (Persen), 2017-2021	146
Tabel 9.1.	Jumlah Angkatan Kerja Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kelamin, 2018-2022	157
Tabel 9.2.	Indikator Ketenagakerjaan Menurut Jenis Kelamin, 2018-2022	159
Tabel 9.3.	Indikator Ketenagakerjaan Menurut Daerah Tempat Tinggal, 2018-2022.....	160
Tabel 9.4.	Indikator Ketenagakerjaan Menurut Provinsi, 2018-2022 .	162
Tabel 9.5.	Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan, 2018-2022	163
Tabel 9.6.	Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan, 2018-2022	165
Tabel 9.7.	Rata-Rata UMP (Ribu Rupiah) dan Pertumbuhan Rata-Rata UMP (Persen), 2009–2022	166
Tabel 9.8.	Distribusi Pekerja* Menurut Upah dan Daerah Tempat Tinggal (Persen), 2018-2022	167
Tabel 9.9.	Distribusi Pekerja* Menurut Upah dan Jenis Kelamin (Persen), 2018-2022.....	168
Tabel 9.10.	Elastisitas Tenaga Kerja Menurut Kategori Lapangan Usaha, 2019-2021	169
Tabel 9.11.	Produktivitas Menurut Provinsi (Juta Rupiah per Penduduk yang Bekerja), 2019-2021.....	171
Tabel 9.12.	Produktivitas Menurut Kategori Lapangan Usaha (Juta Rupiah per Penduduk yang Bekerja), 2019-2021.....	173
Tabel 9.13.	Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Sektor Formal/Informal dan Jenis Kelamin, 2018–2022	174

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi Beberapa Lapangan Usaha (Persen), 2019-2021	5
Gambar 1.2.	Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Pengeluaran (Persen), 2019-2021	6
Gambar 1.3.	Laju Pertumbuhan Ekonomi, Persentase Penduduk Miskin, dan Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen), 2011-2021..	7
Gambar 1.4.	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, Tahun 2019-2021.....	8
Gambar 1.5.	TPAK, TPT, dan Tingkat Setengah Penganggur (Persen), 2017-2021.....	9
Gambar 2.1.	Kontribusi Subkomponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (Persen), Tahun 2021.....	24
Gambar 2.2.	Pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga (Persen), Tahun 2018-2021.....	24
Gambar 2.3.	Kontribusi Subkomponen <i>Leisure</i> dan <i>Lifestyle</i> serta <i>Non Leisure</i> pada Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (Persen), Tahun 2018-2021	25
Gambar 2.4.	Pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (Persen), Tahun 2018-2021	26
Gambar 2.5.	Kontribusi Subkomponen Bangunan dan Non Bangunan pada Komponen Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (Persen), Tahun 2018-2021.....	27
Gambar 2.6.	Pertumbuhan Ekspor dan Impor Barang dan Jasa (Persen) Tahun 2018-2021.....	27
Gambar 2.7.	Pertumbuhan Ekonomi Menurut Wilayah (Persen), Tahun 2018-2021.....	29
Gambar 2.8.	Kontribusi Ekonomi Menurut Wilayah (Persen), Tahun 2021.....	30
Gambar 3.1.	Kontribusi Penerimaan Pajak, Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan Penerimaan Hibah Pada Realisasi Pendapatan Negara, 2021	41
Gambar 3.2.	Lima Kementerian Lembaga (K/L) dengan Realisasi Anggaran Terbesar (dalam Triliun Rupiah), 2020-2021.....	44
Gambar 3.3.	Persentase Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Menurut Jenis Belanja, 2021	45
Gambar 3.4.	Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi Tahun Anggaran 2021 (dalam Triliun Rupiah)	46
Gambar 3.5.	Realisasi Tranfer ke Daerah dan Dana Desa (dalam Triliun Rupiah), 2017-2021	46
Gambar 3.6.	Realisasi Komponen Pembiayaan Utang (dalam Triliun Rupiah), 2021	48
Gambar 3.7.	Pembiayaan Utang (dalam Triliun Rupiah), 2017-2022	48

Gambar 3.8.	Perkembangan Persentase Defisit Anggaran terhadap PDB, 2010-2021.....	49
Gambar 3.9.	Rasio Utang Negara Terhadap PDB, 2010-2021.....	50
Gambar 3.10.	Rasio Pendapatan dan Belanja Negara terhadap PDB, 2010-2021	51
Gambar 4.1.	Grafik Perkembangan Kasus Terkonfirmasi Positif Covid-19 Per Hari.....	55
Gambar 4.2.	Pertumbuhan Beberapa Lapangan Usaha, Triwulan II dan III 2021	56
Gambar 4.3.	Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis 1, Dosis 2, dan Dosis 3, 2021-2022	56
Gambar 4.4.	Pagu Anggaran Program PC-PEN (Trilliun Rupiah), 2020-2022.....	58
Gambar 4.5.	Klasterisasi, Alokasi, dan Realisasi *) Anggaran Program PC-PEN 2021	58
Gambar 4.6.	Perkembangan Nilai Tukar Rupiah Terhadap US\$, 2020-2022	60
Gambar 4.7.	Perkembangan Bulanan BI 7-Days Reverse Repo Rate (BI7DRR), 2020-2022.....	61
Gambar 4.8.	Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (yoy), 2019-2022.....	63
Gambar 4.9.	Indeks Keyakinan Konsumen, Juli 2021- Maret 2022.....	64
Gambar 4.10.	<i>Purchasing Managers' Index</i> (PMI) Industri Manufaktur, Juli 2021- Mei 2022	64
Gambar 4.11.	Jumlah Kasus Terkonfirmasi Positif Covid-19 pada Juni 2022.....	67
Gambar 4.12.	Enam Negara dengan Jumlah Perusahaan <i>Start Up</i> Terbanyak di Dunia ¹).....	67
Gambar 5.1.	Inflasi Inti dan Non Inti, Januari 2021-Juni 2022	75
Gambar 6.1.	Nilai Ekspor-Impor dan Neraca Perdagangan Indonesia (Juta US\$), 2020 – Triwulan II 2022.....	93
Gambar 6.2.	Pertumbuhan Nilai Ekspor Indonesia (Persen), 2018 – 2021	94
Gambar 6.3.	Pertumbuhan Nilai Impor Indonesia (Persen), 2018 – 2021	102
Gambar 6.4.	Perkembangan Nilai Impor Migas dan Nonmigas (Juta US\$), Januari 2021 – Juni 2022	103
Gambar 6.5.	Nilai Impor Indonesia Menurut Golongan Penggunaan Barang (Juta US\$), 2021	104
Gambar 7.1.	Realisasi PMDN Menurut Sektor Tw I - Tw II 2022	115
Gambar 7.2.	Realisasi PMDN Menurut Pulau Tw I - Tw II 2022.....	117
Gambar 7.3.	Realisasi PMA Menurut Sektor Tw I - Tw II 2022	121
Gambar 7.4.	Realisasi PMA Menurut Pulau Tw I - Tw II 2022	122
Gambar 7.5.	Realisasi PMA Menurut Negara Asal Tw I - TW II 2022.....	125

Gambar 8.1.	Perkembangan Kontribusi Pariwisata Terhadap PDB Indonesia, 2016-2020	133
Gambar 8.2.	Laju Pertumbuhan Ekonomi Triwulanan (y-o-y), 2019-2022	135
Gambar 8.3.	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Indonesia (Ribu Kunjungan), 2019-2022.....	138
Gambar 8.4.	Perkembangan Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara Dari Beberapa Kebangsaan, 2021-2022.....	141
Gambar 8.5.	Jumlah Keberangkatan Penumpang Penerbangan Domestik (Ribu Orang), 2020-2022	142
Gambar 8.6.	Jumlah Keberangkatan Penumpang Penerbangan Internasional (Ribu Orang), 2020-2022	143
Gambar 8.7.	Perkembangan Tingkat Penghunian Kamar pada Hotel Berbintang Menurut Provinsi (Bulanan), 2020-2022.....	148
Gambar 8.8.	Rata-rata Lama Menginap Tamu pada Hotel Berbintang Menurut Provinsi, 2021	149
Gambar 9.1.	Persentase Pekerja Sektor Formal dan Informal Menurut Jenis Kelamin, 2018-2022	175

PENJELASAN UMUM

Tanda-tanda yang digunakan dalam publikasi ini, adalah sebagai berikut :

Data belum tersedia : ...

Data tidak tersedia : -

Data dapat diabaikan : 0

Tanda desimal : ,

<https://www.bps.go.id>

PENJELASAN TEKNIS

1. Penghitungan PDB atas dasar harga konstan yang sebelumnya menggunakan tahun dasar 2000, sejak tahun 2015 menggunakan tahun dasar 2010. Penghitungan PDB dengan tahun dasar baru tersebut telah dihitung mundur sampai dengan tahun 2010.
2. PDB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi.
3. Penghitungan Indeks Harga Konsumen (IHK) sejak bulan Januari 2020 mencakup sekitar 248-473 komoditas dihitung berdasarkan pola konsumsi hasil Survei Biaya Hidup (SBH) di 90 kota tahun 2018. Dalam penyajian IHK metode baru, jenis barang/jasa dikelompokkan menjadi 11 kelompok yang sebelumnya 9 kelompok pada metode lama.
4. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) adalah kebijakan pemerintah untuk mengendalikan penyebaran pandemi Covid-19 dengan melakukan pembatasan mobilitas masyarakat, seperti membatasi aktivitas di tempat kerja/perkantoran, kegiatan mengajar di sekolah, pusat perbelanjaan, dan tempat ibadah.
5. Covid-19 atau *Coronavirus Disease-2019* adalah penyakit yang disebabkan *Coronavirus* jenis baru (*Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2/SARS-COV2*) yang ditemukan pertama kali di Wuhan Cina pada Desember 2019. *Coronavirus* pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang serius seperti *Middle East Respiratory Syndrome (MERS)* dan Sindrom Pernafasan Akut Berat/*Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)*.
6. Program PEN: program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) adalah rangkaian kegiatan untuk pemulihan perekonomian nasional yang merupakan bagian dari kebijakan keuangan negara yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk mempercepat penanganan pandemi Covid-19 dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional (PP nomor 23 Tahun 2020).
7. *Physical Distancing* : upaya yang dilakukan untuk mencegah penyebaran virus corona di masyarakat dengan menjaga jarak fisik lebih dari 1 meter dengan orang lain, atau istilah lainnya yaitu tidak berdekatan dan tidak berkumpul atau berkerumun.
8. Pencatatan Statistik Ekspor berdasarkan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dan Pemberitahuan Ekspor Barang tertentu (PEBT), dan pencatatan Statistik Impor berdasarkan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB), yang diterima BPS dari kantor-kantor Bea dan Cukai.

9. Sistem pengolahan adalah *Carry over* yaitu dokumen dari satu bulan tertentu penerimaannya ditutup setelah satu bulan pada bulan berikutnya, dokumen yang datang sesudah tanggal penutupan dianggap sebagai transaksi bulan berikutnya.
10. Beberapa Klasifikasi jenis/kelompok barang yang digunakan dalam statistik Ekspor dan Impor adalah:
 - a. *Harmonized System* (HS), untuk keperluan pengenaan tariff.
 - b. *Standard International Trade Classification* (SITC), penyusunannya ditekankan untuk keperluan Statistik Ekonomi.
 - c. *International Standard Industrial Classification* (ISIC), untuk mengelompokkan lapangan usaha yang ada dalam kegiatan ekonomi atau asal lapangan usaha suatu komoditi dihasilkan.
 - d. *Broad Economic Category* (BEC), untuk mengetahui penggunaan akhir dari suatu barang yaitu barang konsumsi, bahan baku dan penolong, dan barang modal.
11. Sejak September 2007, Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan Bursa Efek Surabaya (BES) digabung (*merger*) menjadi Bursa Efek Indonesia (BEI).
12. Tamu Asing adalah setiap orang yang mengunjungi suatu negara di luar tempat tinggalnya, didorong oleh suatu atau beberapa keperluan tanpa bermaksud memperoleh penghasilan di tempat yang dikunjungi.
13. Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel adalah banyaknya malam kamar yang dihuni dibagi dengan banyaknya malam yang tersedia dikalikan 100 persen.
14. Rata-rata lamanya tamu menginap adalah banyaknya malam tempat tidur yang dipakai dibagi dengan banyaknya tamu yang datang menginap ke akomodasi.
15. Penduduk usia kerja adalah penduduk yang berusia 15 tahun lebih.
16. Bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam (tidak terputus) dalam seminggu terakhir. Kegiatan tersebut termasuk pula kegiatan pekerja tidak dibayar yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi.
17. Pengangguran terbuka adalah mereka yang mencari pekerjaan atau mempersiapkan usaha, atau mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa sudah tidak mungkin mendapatkan pekerjaan dan mereka yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.
18. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengindikasikan besarnya penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara atau wilayah. TPAK diukur sebagai persentase angkatan kerja (pekerja dan pengangguran) terhadap jumlah penduduk usia kerja.

19. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mengindikasikan tentang penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran. TPT diukur sebagai persentase pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja.
20. Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) mengindikasikan besarnya penduduk usia kerja yang bekerja atau sementara tidak bekerja di suatu negara atau wilayah. TKK diukur sebagai persentase orang yang bekerja terhadap jumlah penduduk yang termasuk angkatan kerja.
21. Produktivitas pekerja menurut provinsi diukur dengan membagi PDRB dengan jumlah penduduk yang bekerja di setiap provinsi.
22. Produktivitas pekerja menurut kategori lapangan usaha diukur dengan membagi PDB pada masing-masing kategori lapangan usaha dengan jumlah penduduk yang bekerja di setiap kategori lapangan usaha.
23. Penduduk yang bekerja menurut sektor formal/informal, ditentukan berdasarkan status dalam pekerjaan utama, yaitu;
 - a. Sektor Formal: Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar dan buruh/karyawan/pegawai.
 - b. Sektor informal : Berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar, pekerja bebas di pertanian, pekerja bebas di nonpertanian dan pekerja keluarga/tidak dibayar.

SINGKATAN

3A	: Atraksi, Aksesibilitas, dan Amenitas
3T	: <i>Tracing, Tracking, and Treatment</i>
ADB	: <i>Asian Development Bank</i>
Alutsista	: Alat Utama Sistem Senjata
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
ASEAN	: <i>Association South East Asia Nation</i>
Askrindo	: Asuransi Kredit Indonesia
ATMR	: Aset Tertimbang Menurut Risiko
BA BUN	: Belanja Anggaran Bendahara Umum Negara
BBM	: Bahan Bakar Minyak
BEI	: Bursa Efek Indonesia
BI	: Bank Indonesia
BKPM	: Badan Koordinasi Penanaman Modal
BLU	: Badan Layanan Umum
BMPK	: Batas Maksimum Penyaluran Kredit
BPUM	: Bantuan Produktif Usaha Mikro
BPUM	: Bantuan Produktif Usaha Mikro
BTS	: <i>Base Transceiver Station</i>
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
CBR	: <i>Cultivated Biological Resources</i>
CHSE	: <i>Cleanliness, Health, Safety, and Environmental Sustainability</i>
CPO	: <i>Crude Palm Oil</i>
DMO	: <i>Domestic Market Obligation</i>
DRI	: <i>Danareksa Research Institute</i>
DTP	: Ditanggung Pemerintah
GNI	: <i>Gross National Income</i>
GWM	: Giro Wajib Minimum
HBU	: <i>Highest and Best Use</i>
HET	: Harga Eceran Tertinggi
IHK	: Indeks Harga Konsumen
IHSG	: Indeks Harga Saham Gabungan
IKK	: Indeks Keyakinan Konsumen
ILO	: <i>International Labour Organization</i>
IMF	: <i>International Monetary Fund</i>
INSW	: <i>Indonesia National Single Window</i>
IPR	: Indeks Penjualan Riil
Jamkrindo	: Jaminan Kredit Indonesia
JKN	: Jaminan Kesehatan Nasional
KEM PPKF	: Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal
KL	: Kementerian/Lembaga
KSSK	: Komite Stabilitas Sistem Keuangan
KUR	: Kredit Usaha Rakyat
LMAN	: Lembaga Manajemen Aset Negara
LNPRT	: Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga
LPS	: Lembaga Penjamin Simpanan
OJK	: Otoritas Jasa Keuangan
PBB	: Pajak Bumi dan Bangunan
PC-PEN	: Penanganan Covid dan Pemulihan Ekonomi Nasional

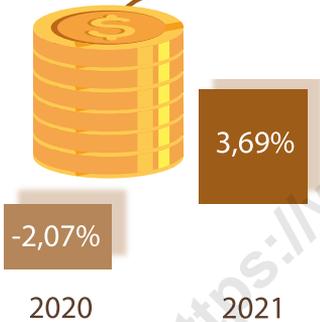
PDB	: Produk Domestik Bruto
PHK	: Pemutusan Hubungan Kerja
PKH	: Program Keluarga Harapan
PKL	: Pedagang Kaki Lima
PMA	: Penanaman Modal Asing
PMDN	: Penanaman Modal Dalam Negeri
PMI	: <i>Purchasing Managers Index</i>
PMN	: Penyertaan Modal Negara
PMTB	: Pembentukan Modal Tetap Bruto
PNB	: Pendapatan Nasional Bruto
PNBP	: Pendapatan Negara Bukan Pajak
PP	: Peraturan Pemerintah
PPh	: Pajak Penghasilan
PPKM	: Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat
PPN	: Pajak Pertambahan Nilai
PPnBM	: Pajak Penjualan atas Barang Mewah
PSBB	: Pembatasan Sosial Berskala Besar
QRIS	: <i>Quick Response Code Indonesian Standard</i>
SBH	: Survei Biaya Hidup
SBN	: Surat Berharga Negara
SDA	: Sumber Daya Alam
SDM	: Sumber Daya Manusia
SITC	: <i>Standard International Trade Classification</i>
SSK	: Stabilitas Sistem Keuangan
TA	: Tahun Anggaran
TBP	: Tingkat Bunga Penjaminan
TDGDP	: <i>Tourism Direct Gross Domestic Product</i>
TI	: Teknologi dan Informasi
TIK	: Teknologi, Informasi, dan Komunikasi
TKDD	: Transfer ke Daerah dan Dana Desa
TKK	: Tingkat Kesempatan Kerja
TPAK	: Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
TPID	: Tim Pengendali Inflasi Daerah
TPIP	: Tim Pengendali Inflasi Pusat
TPK	: Tingkat Penghunian Kamar
TPT	: Tingkat Pengangguran Terbuka
TTCI	: <i>Travel and Tourism Competitiveness Index</i>
TTDI	: <i>Travel and Tourism Development Index</i>
UMKM	: Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
UMP	: Upah Minimum Provinsi
UNWTO	: <i>United Nations World Tourism Organization</i>
UU	: Undang-Undang
Valas	: Valuta Asing (<i>Foreign Currency</i>)
WEF	: <i>World Economic Forum</i>
WFH	: <i>Work From Home</i>
WEO	: <i>World Economic Outlook</i>
WFO	: <i>Work From Office</i>
WHO	: <i>World Health Organization</i>
WNA	: Warga Negara Asing
Wisman	: Wisatawan Mancanegara

TINJAUAN PEREKONOMIAN INDONESIA



Sinyal positif pemulihan ekonomi Indonesia tahun 2021

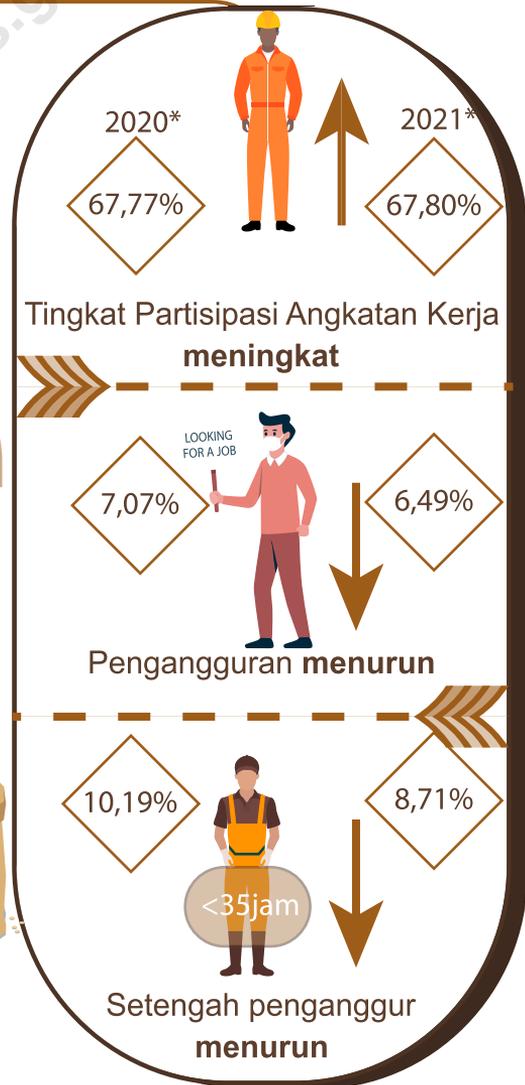
*Kondisi Agustus



Ekonomi berhasil **tumbuh positif** pada 2021 setelah berkontraksi pada 2020 akibat pandemi



Persentase penduduk miskin **menurun**



Covid-19 ditetapkan sebagai pandemi global oleh *World Health Organization (WHO)* sejak 11 Maret 2020 (WHO, 2020). Status pandemi diambil karena Covid-19 menyebar secara cepat dan melingkupi area yang luas. Tercatat hingga Juni 2022 Covid-19 sudah menyebar di lebih dari 200 negara. Virus SARS-CoV-2 yang menyebabkan Covid-19 bermula dari Tiongkok dan menyebar secara masif ke sejumlah negara di seluruh dunia. Setelah WHO menetapkan status pandemi, pemerintah Indonesia mengambil langkah dengan menetapkan Covid-19 sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat dan bencana nasional nonalam. Covid-19 merupakan penyakit yang mudah menular melalui kontak langsung dengan penderita sehingga kerumunan atau keramaian yang melibatkan interaksi fisik harus dihindari karena menjadi pemicu penularan. Terlebih, Indonesia merupakan negara berpenduduk keempat terbesar di dunia setelah Tiongkok, India, dan Amerika Serikat. Hasil Sensus Penduduk 2020 menunjukkan jumlah penduduk Indonesia mencapai 270,2 juta jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk per tahun (2010-2020) sebesar 1,25 persen. Laju pertumbuhan ini lebih rendah jika dibandingkan dengan periode 2000-2010 hasil Sensus Penduduk 2010 sebesar 1,49 persen (Badan Pusat Statistik, 2021). Saat pandemi seperti ini, jumlah penduduk yang besar dengan kepadatan penduduk dan mobilitas yang tinggi terutama Pulau Jawa berpotensi menjadi zona merah penyebaran Covid-19. Hal ini berkaitan dengan kemampuan penyediaan infrastruktur dan anggaran kesehatan yang harus disiapkan pemerintah untuk menangani dan mengantisipasi lonjakan kasus mengingat risiko kesakitan dan kematian yang tinggi akibat virus ini (Jaya, 2021).

Guna memutus mata rantai penyebaran Covid-19, pemerintah Indonesia menetapkan kebijakan berupa pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Di satu sisi, kebijakan ini dipilih untuk menekan laju kenaikan kasus Covid-19. Namun di sisi lain, kebijakan ini menimbulkan efek domino pada segala aspek kehidupan, terutama ekonomi, sosial, dan politik. Pada tahun 2020, laju ekonomi merosot tajam yang diikuti peningkatan kemiskinan dan pengangguran. Aktivitas ekonomi yang menurun menyebabkan daya beli masyarakat menurun dan permintaan produksi berkurang. Penurunan permintaan membuat perusahaan/usaha harus menekan kebutuhan operasional, seperti dengan mengurangi jumlah tenaga kerja melalui Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), pekerja dirumahkan, atau penurunan upah pekerja. Bahkan perusahaan/usaha yang tidak mampu menahan dampak pandemi terpaksa gulung tikar.

Ditinjau dari lapangan usaha, peraturan PSBB telah membuat berbagai aktivitas usaha terpuruk. Pariwisata dan transportasi menjadi sektor yang paling terdampak. Tahun 2020, laju pertumbuhan lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan mengalami kontraksi terparah sebesar -15,05 persen, diikuti Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (-10,26 persen). Pembatasan mobilitas penduduk menyebabkan jumlah kunjungan wisatawan menurun signifikan. Hal ini berdampak pula pada penurunan tingkat hunian hotel dan penyediaan akomodasi dan makan minum yang biasanya diperuntukkan bagi wisatawan. Bagi wilayah yang mengandalkan sektor pariwisata sebagai penopang ekonomi seperti Bali, adanya PSBB menyebabkan ekonomi menurun signifikan. Provinsi Bali merupakan provinsi

dengan kontraksi ekonomi tertinggi di Indonesia pada tahun 2020 yaitu sebesar -9,33 persen (Badan Pusat Statistik, 2022). Sementara itu dari sisi pengeluaran, hampir seluruh komponen mengalami kontraksi kecuali pengeluaran konsumsi pemerintah (Badan Pusat Statistik, 2021). Pandemi menyebabkan penduduk menekan pengeluaran konsumsi rumah tangga dan daya beli melemah. Penurunan daya beli menyebabkan keraguan investor untuk menanamkan modalnya dan investasi melambat. Ekspor dan impor berkontraksi seiring pembatasan aktivitas perdagangan global. Berbagai kondisi ini menyebabkan ekonomi berkontraksi dan pertumbuhan menjadi negatif (Pratiwi, 2022).

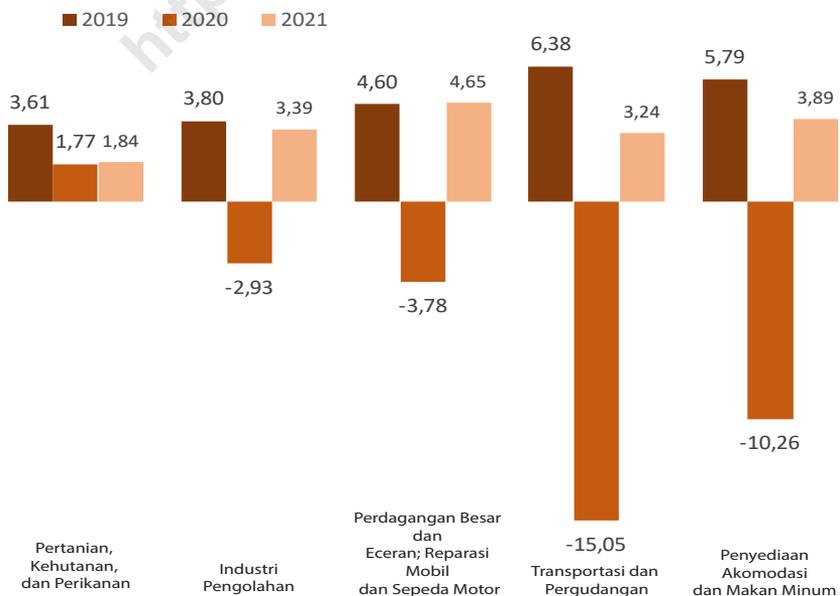
Momentum Kebangkitan Nasional 2021

Tak dapat dipungkiri, pandemi Covid-19 membawa dampak besar bagi perekonomian dengan ekonomi yang melambat dan sistem keuangan yang memburuk akibat penurunan aktivitas ekonomi domestik. Pemerintah bergerak cepat merespon pandemi dengan menggenjot sektor-sektor prioritas untuk menopang perekonomian dan menetapkan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal untuk pemulihan ekonomi nasional. Stimulus fiskal yang ditempuh antara lain dengan percepatan belanja pemerintah, relaksasi pajak, dan relaksasi APBN, sementara stimulus moneter dengan akselerasi digitalisasi sistem pembayaran (Pratiwi, 2022).

Pada tahun 2021, momentum pemulihan ekonomi mulai nampak dan menunjukkan hasil. Pasar global yang rapuh akibat guncangan pandemi perlahan namun pasti merangkak naik. Pembatasan mobilitas dan perjalanan mulai diperlonggar. Aktivitas perdagangan meningkat. Masa transisi yang semakin terkendali mendorong ekonomi global dan nasional semakin membaik ditengah ketidakpastian pasar keuangan global. Hal ini ditunjukkan dari peningkatan *Purchasing Managers' Index* (PMI), Indeks Keyakinan Konsumen (IKK), dan tingkat penjualan ritel (Bank Indonesia, 2022). Pemerintah membentuk Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang dimulai sejak 2020 untuk membantu masyarakat rentan dan sektor-sektor yang terdampak pandemi. Pada tahun 2021, alokasi anggaran penanganan kesehatan pada program PEN menjadi prioritas dengan nilai mencapai tiga kali lebih besar dari anggaran tahun 2020. Penanganan kesehatan melalui program vaksinasi Covid-19 dilakukan pemerintah untuk meningkatkan layanan kesehatan dan mendorong pemulihan kesehatan masyarakat. Vaksinasi merupakan salah satu program prioritas dengan tujuan menekan transmisi Covid-19, menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat Covid-19, membentuk kekebalan kelompok (*herd immunity*), dan mendorong penduduk agar tetap sehat dan produktif (Dewi, 2021). Selanjutnya, anggaran PEN terbesar difokuskan pada program perlindungan sosial yang diperuntukkan bagi penduduk miskin dan rentan untuk meningkatkan daya beli. Sebagai salah satu sektor ekonomi yang paling terdampak akibat pandemi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) juga menjadi prioritas untuk memperoleh bantuan dukungan finansial sebagai stimulus ekonomi (Pasaribu, 2022).

Ekonomi 2021 sempat tertahan pada triwulan III karena munculnya varian baru Covid-19 yaitu varian Delta. Varian baru ini lebih cepat menular dan risiko kematian lebih tinggi dibanding varian Beta sebelumnya. Hal ini mengancam ketidakpastian pasar keuangan global dan tekanan inflasi. Pembatasan mobilitas yang dilakukan sempat menurunkan permintaan domestik. Namun pada triwulan IV, ekonomi kembali membaik seiring mobilitas yang juga semakin bertambah dan kasus Covid-19 mereda, serta ekspor yang semakin menguat (Bank Indonesia, 2022). Secara keseluruhan, indikator makro pada tahun 2021 menunjukkan arah yang positif. Dari sisi lapangan usaha, hampir seluruh lapangan usaha mencatatkan pertumbuhan positif kecuali kategori O (Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib) yang berkontraksi -0,33 persen. Lapangan usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial mencatatkan pertumbuhan tertinggi sebesar 10,46 persen. Secara struktur, tidak terdapat perubahan berarti dari komponen pembentuk Produk Domestik Bruto (PDB) yang didominasi Industri Pengolahan, Pertanian, dan Perdagangan. Pertanian sebagai salah satu penopang ekonomi domestik berhasil mempertahankan eksistensinya dengan tumbuh positif pada tahun 2020 dan 2021. Hal ini dipengaruhi kebutuhan pangan yang terus ada sehingga tidak terlalu berdampak pada sektor pertanian. Sebagai lapangan usaha yang memberi kontribusi terbesar pada PDB, lapangan usaha Industri Pengolahan dan Perdagangan berhasil tumbuh positif setelah sebelumnya mencatatkan pertumbuhan negatif akibat pandemi. Lapangan usaha seperti Transportasi dan Pergudangan serta Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yang berkontraksi paling dalam juga berhasil mencatatkan pertumbuhan positif pada 2021 (Badan Pusat Statistik, 2022).

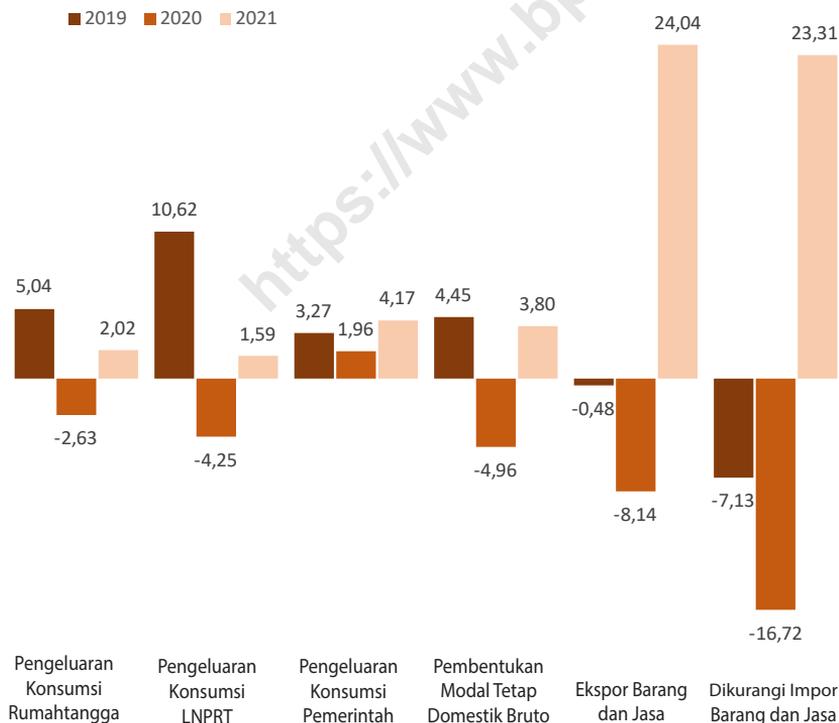
Gambar 1.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi Beberapa Lapangan Usaha (Persen), 2019-2021



Catatan: tahun 2020 adalah angka sementara dan 2021 adalah angka sangat sementara
Sumber: Badan Pusat Statistik

Dari sisi pengeluaran, ekonomi pada 2021 tercatat mengalami pertumbuhan di seluruh komponen dengan pertumbuhan tertinggi pada komponen ekspor barang dan jasa. Konsumsi rumah tangga sudah menunjukkan perbaikan meskipun belum pulih sepenuhnya seperti periode sebelum pandemi. Output produksi meningkat untuk memenuhi kenaikan permintaan konsumsi. Konsumsi pemerintah tumbuh 4,17 persen sebagai dampak stimulus fiskal yang dimulai pada pertengahan tahun (*Asian Development Bank, 2021*). Ekonomi domestik yang semakin menggeliat menciptakan iklim investasi yang semakin kondusif dan tercermin dari pertumbuhan positif Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). Investasi yang meningkat didorong oleh ekonomi yang semakin pulih, ekspor menguat, dan kebijakan moneter yang akomodatif. Ekonomi global yang semakin terkendali juga berhasil mendorong peningkatan aktivitas perdagangan luar negeri seiring kenaikan permintaan global terhadap komoditas unggulan tanah air. Ekspor berhasil mencatatkan pertumbuhan tertinggi dengan tumbuh melesit 24,04 persen pada tahun 2021 dibanding tahun 2020 (*Asian Development Bank, 2021*).

Gambar 1.2. Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Pengeluaran (Persen), 2019-2021



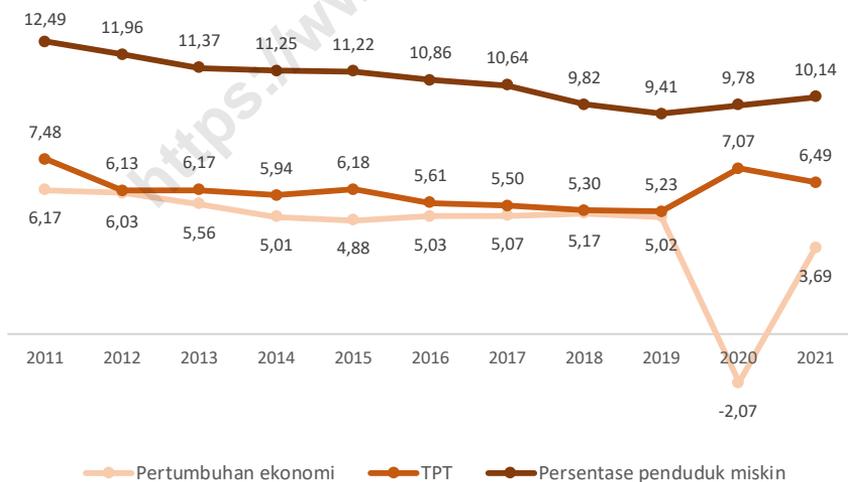
Catatan: tahun 2020 adalah angka sementara dan 2021 adalah angka sangat sementara
Sumber: Badan Pusat Statistik

Konsumsi yang meningkat dapat menjadi indikator perbaikan daya beli masyarakat. Pada tahun 2021, inflasi tercatat menunjukkan peningkatan

meskipun masih dalam level yang rendah sebagai dampak pemulihan ekonomi yang masih berlangsung. Daya beli masyarakat yang belum sepenuhnya kembali akibat pandemi menyebabkan inflasi masih rendah dibawah target pemerintah sebesar 3 ± 1 persen sesuai PMK No.124/PMK.010/2017 (Pratiwi, 2022). Inflasi pada tahun 2021 tercatat berada di level 1,87 persen setelah sebelumnya berada di level 1,68 persen pada tahun 2020 (Badan Pusat Statistik, 2022).

Laju pertumbuhan ekonomi berhasil tumbuh 3,69 persen pada tahun 2021 setelah sebelumnya berkontraksi sebesar -2,07 persen. Kelesuan ekonomi pada tahun 2020 merupakan konsekuensi yang tak terhindarkan dari pembatasan aktivitas masyarakat yang menyebabkan penurunan permintaan barang dan jasa. Akibatnya, penawaran barang dan jasa menurun dan produsen mengurangi faktor produksi seperti tenaga kerja yang menyebabkan pengangguran. Pengangguran yang meningkat menurunkan pendapatan masyarakat. Pendapatan yang menurun menyebabkan daya beli masyarakat menurun dan penduduk miskin semakin bertambah. Namun pada 2021, ekonomi menguat seiring perbaikan kondisi global dan mobilitas berangsur pulih. Konsumsi dan daya beli masyarakat yang meningkat direspon dengan peningkatan produksi yang menyerap tenaga kerja lebih banyak. Kondisi ini mendorong keyakinan pelaku usaha untuk kembali berinvestasi.

Gambar 1.3. Laju Pertumbuhan Ekonomi, Persentase Penduduk Miskin, dan Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen), 2011-2021



Catatan: laju pertumbuhan ekonomi tahun 2020 adalah angka sementara dan tahun 2021 adalah angka sangat sementara
 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah hasil Sakernas Agustus
 Persentase Penduduk Miskin adalah hasil Susenas Maret
 Sumber: Badan Pusat Statistik

Pada awal pandemi terjadi, banyak penduduk kehilangan pekerjaan seiring pembatasan dan penutupan beberapa sektor ekonomi. Akibatnya, pekerja kekurangan jam kerja dan lapangan pekerjaan sehingga pengangguran

dan setengah penganggur meningkat. Tingkat pengangguran dan setengah penganggur yang meningkat menyebabkan kemiskinan juga meningkat. Seiring pemulihan ekonomi pada tahun 2021, tingkat kesejahteraan mengalami perbaikan yang salah satunya tercermin dari penurunan tingkat kemiskinan. Secara persentase, penduduk miskin di Indonesia pada September 2021 berada di level 9,71 persen atau menurun dari kondisi September 2020 sebesar 10,19 persen dan Maret 2021 sebesar 10,14 persen. Dari segi jumlah, penduduk miskin pada September 2021 menurun 1,05 juta jiwa jika dibandingkan dengan September 2020 dan menurun 1,04 juta jiwa jika dibandingkan Maret 2021 (Badan Pusat Statistik, 2022). Penurunan penduduk miskin ini tidak lepas dari program perlindungan sosial yang dikeluarkan pemerintah untuk membantu masyarakat rentan yang terdampak pandemi (Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2022).

Gambar 1.4. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, Tahun 2019-2021

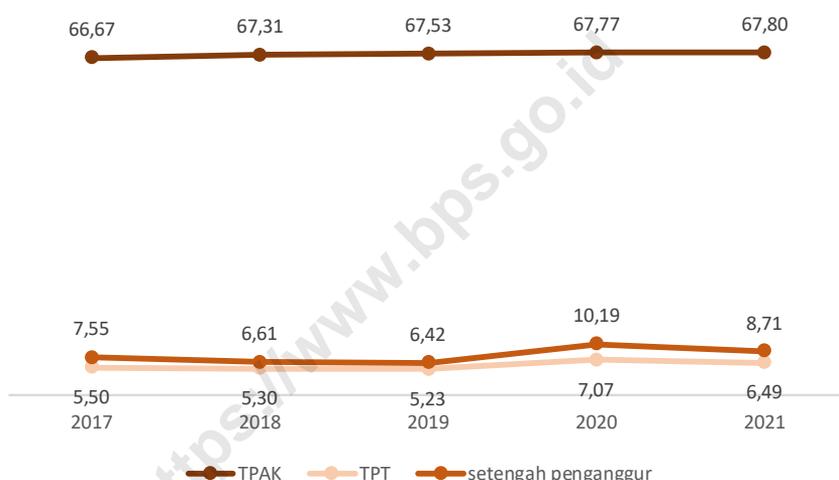


Sumber: Badan Pusat Statistik

Saat pandemi berlangsung pada tahun 2020, jumlah pengangguran meningkat dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menembus angka 7,07 persen, dimana sebelumnya pada tahun 2019 berada di level 5,23 persen. Dengan pelonggaran yang diberikan pada 2021, aktivitas ekonomi yang sempat terpuruk kembali terangkat dan memberikan dampak positif pada aspek ketenagakerjaan. Ekonomi yang tumbuh disertai perbaikan kondisi ketenagakerjaan seperti Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang meningkat dan angka pengangguran menurun. Hasil Sakernas Agustus 2021 menunjukkan TPAK naik 0,03 persen poin dan tingkat pengangguran menurun 0,58 persen poin dibanding pada kondisi Agustus 2020. Peningkatan aktivitas ekonomi mendorong penyerapan tenaga kerja setelah sebelumnya cukup banyak penduduk bekerja yang mengalami penurunan jam kerja, penurunan upah, pemutusan hubungan kerja (PHK), dirumahkan, ataupun kehilangan

pekerjaan akibat pandemi. Jika dibandingkan Agustus 2020, jumlah angkatan kerja pada Agustus 2021 berhasil meningkat 1,93 juta orang dan pengangguran menurun 670 ribu orang (Badan Pusat Statistik, 2021). Jumlah pekerja yang dirumahkan juga menurun dari 1,8 juta jiwa pada Agustus 2020 menjadi 1,4 juta jiwa pada Agustus 2021 (Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2022). Pemulihan ekonomi juga berhasil menurunkan tingkat setengah penganggur menjadi 8,71 persen setelah sebelumnya melonjak signifikan dari 10,19 persen pada 2020.

Gambar 1.5. TPAK, TPT, dan Tingkat Setengah Penganggur (Persen), 2017-2021



Sumber: Sakernas Agustus, BPS

Di sisi lain, pandemi telah mendorong transformasi ketenagakerjaan menuju revolusi industri 4.0. Aturan PSBB yang ditetapkan pemerintah di awal pandemi dengan pembatasan aktivitas bekerja di luar rumah kecuali untuk sektor kritikal dan esensial serta aturan bekerja dari rumah mendorong penduduk bekerja untuk beradaptasi dengan kebiasaan kerja baru melalui pemanfaatan teknologi informasi.

Berdasarkan lapangan pekerjaan, penyerapan tenaga kerja pada tahun 2021 didominasi lapangan usaha Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan yang menyerap 37,13 juta jiwa atau 28,33 persen dari total penduduk bekerja, disusul lapangan usaha Perdagangan yang menyerap 25,74 juta jiwa (19,64 persen), dan lapangan usaha Industri Pengolahan yang menyerap 18,70 juta jiwa (14,26 persen). Ketiga lapangan usaha ini merupakan kontributor utama penyerapan tenaga kerja pada Agustus 2021 (Badan Pusat Statistik, 2021).

Salah satu ukuran tingkat kesejahteraan lain yang menunjukkan arah positif tergambar dari Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita. PDB per

kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan peningkatan pada 2021 menjadi Rp 62,24 juta setelah sebelumnya berada di angka Rp 57,27 juta. Secara riil dengan menggunakan harga konstan 2010, PDB per kapita pada tahun 2021 berhasil tumbuh positif 2,51 persen, dimana sebelumnya pada tahun 2020 PDB per kapita mengalami pertumbuhan negatif sebesar -3,03 persen (Badan Pusat Statistik, 2022). Peningkatan dan capaian pertumbuhan PDB per kapita menunjukkan adanya kenaikan nilai tambah yang mampu diciptakan setiap penduduk Indonesia.

Berkat keberhasilan penanganan pandemi pada tahun 2021, Indonesia diprediksi dapat kembali ke kelompok negara berpendapatan menengah ke atas (Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2022) setelah setahun sebelumnya turun peringkat akibat ekonomi yang berkontraksi. ADB juga menyebutkan hal serupa dimana Indonesia dapat direklasifikasi untuk naik level menjadi kelompok negara berpendapatan menengah ke atas pada penilaian Bank Dunia Juli 2022 mendatang jika pemulihan ekonomi konsisten bergerak naik (*Asian Development Bank, 2021*). Bank Dunia membagi perekonomian dunia menjadi empat kategori, yaitu negara berpendapatan rendah, negara berpendapatan menengah ke bawah, negara berpendapatan menengah ke atas, dan negara berpendapatan tinggi. Berdasarkan klasifikasi yang dirilis pada Juli 2021, Bank Dunia mengelompokkan negara masuk dalam kelompok negara berpendapatan rendah jika Pendapatan Nasional Bruto (PNB) per kapita US\$ 1.045 atau kurang, kelompok negara berpendapatan menengah ke bawah jika PNB per kapita US\$ 1.046-4.095, kelompok negara berpendapatan menengah ke atas jika PNB per kapita US\$ 4.096-12.695, dan kelompok negara berpendapatan tinggi jika PNB per kapita US\$ 12.696 atau lebih (*World Bank, 2021*).

Hasil penilaian Bank Dunia dalam laporan "*World Bank Country Classifications by Income Level: 2021-2022*" menyebutkan PNB per kapita Indonesia mengalami penurunan dari US\$ 4.050 pada 2019 menjadi US\$ 3.870 pada tahun 2020. Berdasarkan nilai tersebut, Indonesia mengalami penurunan peringkat dari kelompok negara berpendapatan menengah ke atas menjadi kelompok menengah ke bawah. Hal ini dipengaruhi Indonesia berada pada ambang batas bawah klasifikasi negara berpendapatan menengah ke atas pada tahun 2019, dimana nilai PNB per kapita metode Atlas sebesar US\$ 4.050 sementara nilai batas bawah untuk kategori tersebut saat tahun 2020 adalah US\$ 4.046. Selain itu, dampak pandemi Covid-19 dirasakan hampir seluruh negara yang menyebabkan penurunan nilai pendapatan per kapita sebagai konsekuensi yang harus tidak dapat dihindari pada tahun 2020 (*World Bank, 2021*).

Percepatan Pemulihan Ekonomi di Tahun 2022

Pandemi Covid-19 menyebar sangat luas di dunia dan menimbulkan dampak signifikan di berbagai dimensi. Di Indonesia sendiri selama pandemi, terjadi perubahan pola kebiasaan hidup di masyarakat dan diberlakukan penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dalam

berbagai level di beberapa daerah. Aktivitas yang melibatkan interaksi fisik diperketat dan bergeser menjadi aktivitas yang dilakukan secara daring (*online*), seperti pola bekerja, belajar/sekolah, dan usaha perdagangan. Sebagian pekerja mengalami penyesuaian aturan bekerja seperti bekerja dari kantor/*Work From Office (WFO)* menjadi bekerja dari rumah/*Work From Home (WFH)*. Pembelajaran tatap muka yang biasa dilakukan di sekolah juga bergeser menjadi belajar dari rumah. Pola perdagangan bergeser dengan peningkatan transaksi elektronik dan sistem pembayaran digital. Dari sisi lapangan usaha, terjadi kenaikan tenaga kerja terutama industri kesehatan, seperti usaha produksi masker, *hand sanitizer*, disinfektan, obat-obatan/farmasi, dan alat kesehatan. Industri makanan siap saji dan makanan beku juga semakin menggeliat di tengah pembatasan aktivitas di luar rumah. Industri Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) juga mengalami akselerasi pertumbuhan seiring peningkatan kebutuhan dan literasi digital masyarakat untuk menunjang aktivitas sejak pandemi berlangsung.

Momentum pemulihan ekonomi mencatatkan hasil positif pada tahun 2021 meskipun sempat tertahan akibat penyebaran Covid-19 varian baru yaitu varian Delta di kuartal ketiga. Laju pertumbuhan ekonomi kembali positif, diikuti kemiskinan dan pengangguran yang semakin menurun. Sistem pembayaran antarnegara semakin berkembang dan terhubung. Investasi meningkat dengan semakin banyaknya investor yang melanjutkan kegiatan konstruksi. Nilai tukar rupiah semakin menguat sebagai dampak aliran modal asing yang masuk dan keyakinan positif terhadap ekonomi domestik. Inflasi tahun 2021 tercatat pada level yang rendah dan mendukung tercapainya stabilitas ekonomi. Digitalisasi sistem pembayaran mengalami percepatan sehingga menciptakan integrasi ekonomi dan keuangan yang inklusif (Bank Indonesia, 2022).

Bank Indonesia memproyeksikan ekonomi Indonesia semakin solid dengan tumbuh di kisaran 4,7-5,5 persen pada tahun 2022 dan berada di kisaran 4,8-5,6 persen pada tahun 2023. Kestabilan geopolitik global dan nasional diharapkan tetap terjaga untuk mengejar level pertumbuhan ekonomi Indonesia seperti sebelum pandemi. Ekonomi Indonesia tumbuh seiring permintaan domestik yang semakin membaik, ekspor yang menguat, dan stabilitas yang terjaga. Stimulus moneter yang ditempuh Bank Indonesia antara lain dengan menjaga suku bunga tetap rendah dan stabilitas nilai tukar. Mobilitas penduduk yang kembali berjalan normal diikuti akselerasi vaksinasi turut serta berkontribusi dalam membentuk iklim usaha yang kondusif dalam menopang perekonomian. Peningkatan permintaan domestik juga mendorong kenaikan inflasi yang diproyeksikan berada di kisaran 3 ± 1 persen pada tahun 2022-2023 (Bank Indonesia, 2022). Inflasi pada tahun 2022 diperkirakan meningkat seiring penghapusan subsidi energi dan beberapa komoditas utama serta penerapan skenario *low-base*. Hambatan dari sisi pasokan juga menyebabkan kenaikan harga bahan baku, energi, transportasi, dan makanan yang mendorong inflasi. Proyeksi kenaikan inflasi pada tahun 2022 dan 2023 bergantung pada pemulihan ekonomi dan perkembangan harga komoditas global (Kementerian Keuangan, 2022). Pada tahun 2022 ini ekonomi Indonesia diharapkan mampu berakselerasi sejalan kebijakan yang ditetapkan pemerintah

seperti percepatan transformasi sektor riil, sinergi stimulus moneter dengan fiskal, transformasi sektor keuangan, digitalisasi ekonomi dan keuangan, dan *green economy* (Bank Indonesia, 2022).

Tabel 1.1. Proyeksi Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Laju Inflasi Indonesia, 2022-2023

Indikator	Hasil Proyeksi	2022	2023
Pertumbuhan Ekonomi	BI	4,7-5,5	4,8-5,6
	IMF	5,4	6,0
	ADB	5,0	5,2
Inflasi	BI	3±1	3±1
	IMF	3,3	3,3
	ADB	3,6	3,0

Sumber: 1. Publikasi Laporan Perekonomian Indonesia 2021, Bank Indonesia
 2. Publikasi *World Economic Outlook Database April 2022*, International Monetary Fund (IMF)
 3. Publikasi *Asian Development Outlook (ADO) 2022*, Asian Development Bank (ADB)

International Monetary Fund (IMF) memproyeksikan ekonomi Indonesia dapat pulih dengan lebih cepat pada tahun 2022 dan 2023. Hal ini tercermin dari proyeksi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022 sebesar 5,4 persen dan semakin menguat di tahun 2023 menjadi 6,0 persen. Harga komoditas global yang semakin membaik, adanya pelonggaran pembatasan aktivitas, dukungan kebijakan yang berkesinambungan, peningkatan mobilitas, dan keyakinan pasar dengan adanya percepatan vaksinasi menjadi pendorong ekonomi semakin bergairah. Inflasi diproyeksikan meningkat pada tahun 2022-2023 di level 3,3 persen seiring kebijakan moneter yang akomodatif untuk mendukung pemulihan (*International Monetary Fund*, 2022).

Sejalan dengan Bank Indonesia dan IMF, *Asian Development Bank* (ADB) memproyeksikan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia semakin menguat di tahun 2022 dan 2023. Pada tahun 2022, pertumbuhan ekonomi diproyeksikan tumbuh 5,0 persen dan meningkat 0,2 persen poin pada tahun 2023. Pelonggaran pembatasan mobilitas, cakupan vaksinasi yang semakin luas, peningkatan pendapatan dan lapangan pekerjaan, serta perbaikan harga komoditas mendorong peningkatan aktivitas ekonomi yang pada akhirnya akan menaikkan permintaan konsumen. Permintaan yang terus pulih dan iklim bisnis yang kondusif berperan dalam penciptaan pertumbuhan investasi. Harga komoditas yang kembali terangkat dan ekonomi domestik yang tumbuh lebih cepat mendorong peningkatan inflasi nasional. Inflasi Indonesia diproyeksikan sebesar 3,6 persen pada tahun 2022. Namun pada tahun 2023, kenaikan harga komoditas yang melandai menyebabkan inflasi diproyeksikan menurun pada level moderat di angka 3,0 persen. Hasil proyeksi ini lebih tinggi dari kondisi tahun 2021 dimana inflasi berada di bawah 2 persen (*Asian Development Bank*, 2021).

Kinerja ekonomi pada tahun 2022 diperkirakan akan ditopang dari peningkatan konsumsi serta investasi dan ekspor yang semakin menguat. Namun Indonesia tetap harus bersiap menghadapi segala risiko ketidakpastian global di tengah ketegangan geopolitik yang terjadi saat ini dan ancaman gelombang varian Omicron (Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2022). Tahun ini, Indonesia menjadi *Presidensi Group of Twenty (G20)*. Momen ini dimanfaatkan negara-negara anggota untuk bekerja sama mendorong pemulihan ekonomi di berbagai sektor pasca pandemi. Tema yang diusung pada G20 yaitu *“Recover Together Recover Stronger”*, dengan fokus pada peningkatan produktivitas, ketahanan dan stabilitas ekonomi, serta mencapai pertumbuhan inklusif yang berkelanjutan.

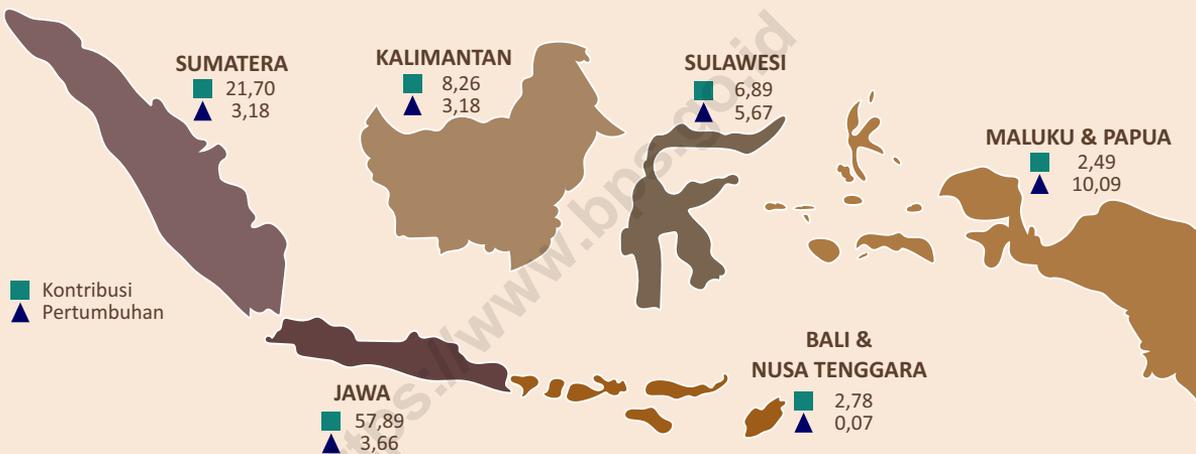
Keterlibatan Indonesia di G20 pada tahun 2022 merupakan bentuk kerjasama internasional sebagai bentuk kontribusi Indonesia dalam pemulihan ekonomi nasional maupun global. Pemulihan ekonomi global ditunjukkan salah satunya dengan peningkatan aktivitas perdagangan yang dibuktikan dengan kenaikan ekspor dan diversifikasi produk ekspor. Dari sisi investasi, situasi yang semakin membaik telah mendorong kepercayaan investor untuk kembali menanamkan modalnya di negeri ini. Penguatan industri sebagai motor utama untuk menggerakkan perekonomian juga semakin menunjukkan akselerasi perbaikan (Bank Indonesia, 2022).

Tak dapat dipungkiri, akselerasi transformasi digital di Indonesia semakin berkembang sejak adanya pandemi. Pembatasan mobilitas sosial membuat interaksi langsung terhambat dan digantikan oleh digitalisasi dan otomatisasi. Kehidupan yang erat dengan digitalisasi diprediksi akan terus bertahan dan berkembang ke depannya. Momentum ini perlu direspon pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk berkolaborasi mempercepat pemulihan ekonomi yang sedang berlangsung. Strategi kebijakan yang dapat ditempuh untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi antara lain melalui akselerasi transformasi sektor riil, sektor keuangan, digitalisasi ekonomi dan keuangan, sinergi stimulus moneter dan fiskal, serta ekonomi dan keuangan hijau (Bank Indonesia, 2022).

PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL DAN REGIONAL



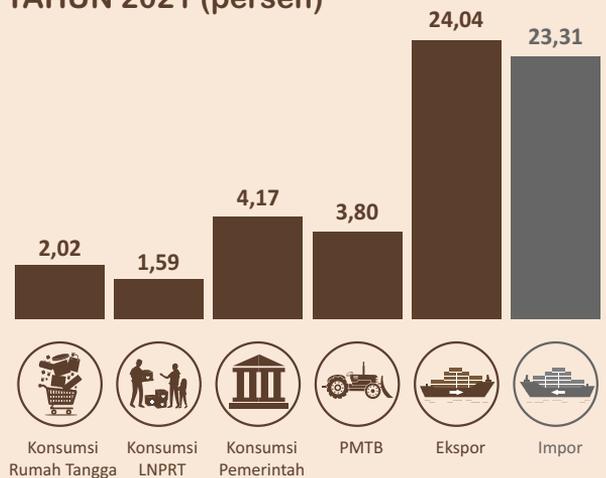
KONTRIBUSI DAN PERTUMBUHAN PDB MENURUT PULAU TAHUN 2021 (persen)



PERTUMBUHAN PDB MENURUT LAPANGAN USAHA UTAMA TAHUN 2021 (persen)



PERTUMBUHAN PDB MENURUT PENGELUARAN TAHUN 2021 (persen)



Dua tahun terakhir merupakan tahun terberat dalam perekonomian Indonesia. Sejak pandemi Covid-19 mulai terdeteksi, berbagai kebijakan Pemerintah dilakukan untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Sayangnya, kebijakan tersebut kontradiktif terhadap upaya peningkatan ekonomi. Berbagai kebijakan pembatasan sosial menyebabkan roda perekonomian melambat. Aktivitas jual beli pada sektor ekonomi mikro seketika menurun. Pasar tradisional maupun swalayan terpaksa dibatasi aktivitasnya. Akibatnya, pada tahun 2020 Indonesia mengalami resesi ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat minus 2,07 persen. Ini merupakan resesi ekonomi kedua yang sebelumnya pernah terjadi pada tahun 1998.

Meskipun sempat mengalami resesi, ekonomi Indonesia mengalami penguatan pada tahun 2021 dengan pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 3,69 persen. Hal ini tidak terlepas dari keberhasilan Indonesia dalam menangani pandemi sehingga pemulihan ekonomi Indonesia relatif cepat. Kebijakan penanganan pandemi dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) cukup efektif dalam memacu pertumbuhan ekonomi.

Jika dilihat berdasarkan wilayahnya, pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi di Provinsi Maluku Utara sebesar 16,40 persen pada tahun 2021. Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Maluku Utara ini didorong oleh kinerja industri pengolahan yang mampu meningkatkan ekonomi masyarakat melalui industri hilirisasi nikel di Halmahera. Sedangkan provinsi yang masih mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi adalah Provinsi Bali sebesar -2,47 persen. Adanya kebijakan pembatasan wilayah dan akses masuk Bali menjadikan pukulan besar pada perekonomian di provinsi ini. Hal ini berakibat pada tempat wisata, hotel, dan restoran yang sebelumnya ramai oleh pengunjung menjadi sepi.

PDB Menurut Lapangan Usaha

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2021 terjadi di hampir seluruh lapangan usaha, hanya lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib yang masih mengalami kontraksi pertumbuhan pada tahun 2021. Hal ini memberikan sinyal bahwa terjadi pemulihan perekonomian pasca pandemi Covid-19. Tiga lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan paling tinggi adalah Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; diikuti Informasi dan Komunikasi; dan Pengadaan Listrik dan Gas.

Jasa kesehatan dan kegiatan sosial tumbuh 10,46 persen pada tahun 2021. Sektor ini masih menjadi sektor dengan pertumbuhan tertinggi sejak pandemi tahun 2020. Tingginya pertumbuhan sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial didorong oleh meningkatnya permintaan terhadap obat-obatan dan peralatan kesehatan untuk pasien yang terinfeksi Covid-19. Kebijakan vaksinasi yang dilakukan Pemerintah juga turut mendorong pertumbuhan pada sektor ini. Sektor ini juga masih menjadi garda terdepan dalam upaya

penanganan pandemi Covid-19. Meskipun pada tahun 2021 perekonomian sudah mulai membaik, sektor ini masih menunjukkan kinerja terbaiknya dibandingkan sektor lain. Sektor ini memiliki kontribusi sebesar 1,34 persen dari total PDB dan selalu mengalami peningkatan selama 4 tahun terakhir.

Sektor berikutnya yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah sektor Informasi dan Komunikasi. Pada sektor ini, tercatat tumbuh sebesar 6,81 persen dibandingkan tahun 2020. Pertumbuhan pada sektor ini didorong oleh meningkatnya penggunaan teknologi informasi dan komunikasi selama masa pandemi. Aktivitas masyarakat berubah dari ruang fisik ke ruang digital. Adaptasi normal baru mendorong masyarakat untuk memanfaatkan teknologi yang tersedia. Pemerintah juga melakukan upaya untuk meningkatkan infrastruktur digital yang memadai, seperti fiber optik, satelit, hingga *Base Transceiver Station* (BTS) di wilayah yang belum terjangkau akses telekomunikasi. Jika dilihat kontribusinya, sektor ini memiliki kontribusi sebesar 4,41 persen dari total PDB. Meskipun memiliki kontribusi yang kecil, namun kinerja sektor ini terbukti kuat dan salah satu sektor yang mampu bertahan di tengah pandemi.

Sektor berikutnya yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah pengadaan listrik dan gas. Sektor ini mengalami pertumbuhan sebesar 5,55 persen menjadi Rp 114,86 triliun pada tahun 2021 dibandingkan tahun sebelumnya. Capaian kinerja pada sektor ini lebih baik dibandingkan capaian pada tahun sebelumnya yang mengalami kontraksi sebesar 2,34 persen. Sektor pengadaan listrik dan gas memiliki kontribusi sebesar 1,12 persen terhadap total PDB. Jumlah ini menurun setiap tahunnya selama empat tahun terakhir. Dari seluruh sektor, hanya satu sektor yang masih mengalami kontraksi pertumbuhan pada tahun 2021, yaitu sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib. Sektor ini mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar -0,33 persen menjadi Rp 364,23 triliun.

Tabel 2.1. PDB Harga Konstan 2010 (Miliar Rupiah) dan Pertumbuhan PDB (Persen) Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2018-2021

Lapangan Usaha	2018	2019	2020*	2021**
PDB Harga Konstan Tahun 2010 (Miliar Rupiah) dan Pertumbuhan PDB (%)				
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1 307 253,0	1 354 399,1	1 378 331,4	1 403 710,0
	3,88	3,61	1,77	1,84
B. Pertambangan dan Penggalian	796 505,0	806 206,2	790 475,2	822 099,5
	2,16	1,22	-1,95	4,00
C. Industri Pengolahan	2 193 368,4	2 276 667,8	2 209 920,3	2 284 821,7
	4,27	3,80	-2,93	3,39
D. Pengadaan Listrik dan Gas	107 108,6	111 436,7	108 826,4	114 861,1
	5,47	4,04	-2,34	5,55
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, limbah dan Daur Ulang	8 429,4	9 004,9	9 449,3	9 919,2
	5,56	6,83	4,94	4,97
F. Konstruksi	1 048 082,8	1 108 425,0	1 072 334,8	1 102 517,7
	6,09	5,76	-3,26	2,81

lanjutan

Lapangan Usaha	2018	2019	2020*	2021**
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1 376 878,7	1 440 185,7	1 385 747,4	1 450 226,3
	4,97	4,60	-3,78	4,65
H. Transportasi dan Pergudangan	435 336,5	463 125,9	393 437,9	406 187,6
	7,05	6,38	-15,05	3,24
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	315 068,6	333 304,6	299 122,4	310 754,7
	5,68	5,79	-10,26	3,89
J. Informasi dan Komunikasi	538 762,7	589 536,1	652 062,9	696 460,4
	7,02	9,42	10,61	6,81
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	415 620,6	443 093,1	457 482,9	464 638,6
	4,17	6,61	3,25	1,56
L. Real Estat	299 648,2	316 901,1	324 259,4	333 282,9
	3,48	5,76	2,32	2,78
M, N. Jasa Perusahaan	187 691,1	206 936,2	195 671,1	197 106,7
	8,64	10,25	-5,44	0,73
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	349 277,6	365 538,8	365 439,3	364 233,4
	6,97	4,66	-0,03	-0,33
P. Jasa Pendidikan	321 133,8	341 349,9	350 264,6	350 655,3
	5,36	6,30	2,61	0,11
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	117 322,2	127 487,9	142 228,4	157 104,7
	7,15	8,66	11,56	10,46
R, S, T, U. Jasa lainnya	185 405,6	205 011,4	196 608,7	200 772,9
	8,95	10,57	-4,10	2,12
A. NILAI TAMBAH BRUTO ATAS HARGA DASAR	10 002 892,8	10 498 610,4	10 331 662,4	10 669 352,7
	4,95	4,96	-1,59	3,27
B. PAJAK DIKURANG SUBSIDI ATAS PRODUK	422 959,1	450 545,0	391 392,4	449 515,8
	10,82	6,52	-13,13	14,85
C. PRODUK DOMESTIK BRUTO	10 425 851,9	10 949 155,4	10 723 054,8	11 118 868,5
	5,17	5,02	-2,07	3,69

Catatan: * Angka Sementara
 ** Angka Sangat Sementara
 Sumber: Badan Pusat Statistik

Sektor industri pengolahan memiliki kontribusi terbesar terhadap total PDB yaitu sebesar 19,25 persen juga mengalami pertumbuhan yang positif. Sektor ini mengalami pertumbuhan 3,39 persen menjadi Rp 2.284,82 triliun pada tahun 2021. Besarnya kontribusi pada sektor ini juga berakibat pada perekonomian nasional. Tercapainya pemulihan ekonomi nasional pada tahun 2021 juga didukung oleh pemulihan pada sektor industri pengolahan. Pada masa pandemi ini, pemerintah fokus pada pengembangan industri sektor kesehatan, yang di dalamnya termasuk industri farmasi. Dalam upaya mendukung pengembangan industri kesehatan, pemerintah telah menyusun peta jalan dengan tujuan untuk meningkatkan produksi bahan baku berteknologi tinggi (Airlangga, 2022).

Sektor berikutnya yang memiliki kontribusi terbesar kedua adalah sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Sektor ini memiliki kontribusi sebesar 13,28 persen terhadap total PDB. Pertumbuhan sektor ini mencapai 1,84 persen menjadi Rp 1.404,71 triliun pada tahun 2021. Sektor ini merupakan salah satu sektor yang mampu bertahan di tengah hantaman

Tabel 2.2. PDB Harga Berlaku (Miliar Rupiah) dan Distribusi PDB (Persen) Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2018-2021

Lapangan Usaha	2018	2019	2020*	2021**
PDB Harga Berlaku (Miliar Rupiah) dan Distribusi PDB (%)				
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1 900 621,7 12,81	2 012 742,8 12,71	2 115 389,1 13,70	2 253 836,8 13,28
B. Pertambangan dan Penggalan	1 198 987,1 8,08	1 149 913,5 7,26	993 541,9 6,44	1 523 650,1 8,98
C. Industri Pengolahan	2 947 450,8 19,86	3 119 593,8 19,70	3 068 041,7 19,87	3 266 903,5 19,25
D. Pengadaan Listrik dan Gas	176 640,3 1,19	185 115,3 1,17	179 741,6 1,16	190 047,2 1,12
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, limbah dan Daur Ulang	10 023,6 0,07	10 736,1 0,07	11 304,7 0,07	12 024,9 0,07
F. Konstruksi	1 562 297,0 10,53	1 701 741,2 10,75	1 652 659,6 10,71	1 771 726,7 10,44
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1 931 813,0 13,02	2 060 268,9 13,01	1 994 125,3 12,92	2 200 528,9 12,97
H. Transportasi dan Pergudangan	797 777,0 5,38	881 505,4 5,57	689 577,8 4,47	719 632,6 4,24
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	412 709,7 2,78	440 207,7 2,78	394 055,0 2,55	412 260,6 2,43
J. Informasi dan Komunikasi	558 938,0 3,77	626 532,6 3,96	695 964,0 4,51	748 754,7 4,41
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	616 315,1 4,15	671 433,8 4,24	696 067,2 4,51	736 188,8 4,34
L. Real Estat	406 013,7 2,74	439 455,9 2,78	453 780,9 2,94	468 221,7 2,76
M, N. Jasa Perusahaan	267 094,0 1,80	304 285,5 1,92	294 255,5 1,91	301 085,2 1,77
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	541 685,6 3,65	571 584,1 3,61	582 628,3 3,77	584 361,0 3,44
P. Jasa Pendidikan	481 747,0 3,25	522 354,2 3,30	549 625,9 3,56	556 317,8 3,28
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	158 070,1 1,07	174 689,0 1,10	201 191,5 1,30	226 970,8 1,34
R, S, T, U. Jasa lainnya	268 574,7 1,81	309 002,0 1,95	302 578,4 1,96	312 179,5 1,84
A. NILAI TAMBAH BRUTO ATAS HARGA DASAR	14 236 758,4 95,94	15 181 161,8 95,89	14 874 528,4 96,35	16 284 690,8 95,96
B. PAJAK DIKURANG SUBSIDI ATAS PRODUK	601 997,6 4,06	651 495,4 4,11	563 489,1 3,65	686 098,4 4,04
C. PRODUK DOMESTIK BRUTO	14 838 756,0 100,00	15 832 657,2 100,00	15 438 017,5 100,00	16 970 789,2 100,00

Catatan: * Angka Sementara
** Angka Sangat Sementara

Sumber: Badan Pusat Statistik

pandemi Covid-19. Terbukti saat perekonomian Indonesia mengalami resesi pada tahun 2020, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan masih mampu tumbuh sebesar 1,77 persen. Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil

dan sepeda motor merupakan sektor berikutnya yang memiliki kontribusi ekonomi terbesar ketiga. Sektor ini memiliki kontribusi sebesar 12,97 persen terhadap total PDB. Sektor ini juga mengalami pertumbuhan sebesar 4,65 persen pada tahun 2021.

PDB Menurut Penggunaan

Jika dilihat dari sisi penggunaan, seluruh komponen PDB mengalami pertumbuhan. Komponen-komponen yang pada tahun sebelumnya mengalami kontraksi saat ini sudah mulai mengalami pertumbuhan positif. Komponen tersebut adalah pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran konsumsi LNPRT, pembentukan modal tetap bruto, perubahan inventori, dan ekspor impor barang dan jasa. Hanya satu komponen yang mampu bertahan pada kondisi pandemi. Meskipun sempat mengalami perlambatan pertumbuhan pada tahun 2020, komponen pengeluaran pemerintah mengalami pertumbuhan yang lebih baik pada tahun 2021 sebesar 4,17 persen. Pengeluaran konsumsi pemerintah memiliki peranan yang cukup besar pada masa pandemi terutama dalam upaya penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Pemerintah melakukan *refocusing* anggaran untuk menangani dampak pandemi Covid-19 dan berbagai kebijakan pemulihan ekonomi. Hal ini menunjukkan komponen pengeluaran pemerintah memiliki peranan yang cukup kuat dalam pemulihan ekonomi.

Berdasarkan Tabel 2.3, komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga sempat mengalami kontraksi pada tahun 2020 sebesar 2,63 persen. Kontraksi ini disebabkan oleh rendahnya daya beli masyarakat akibat dampak pandemi Covid-19. Komponen ini mengalami pertumbuhan positif pada tahun 2021 sebesar 2,02 persen. Pertumbuhan pada komponen ini didorong oleh tumbuhnya di hampir seluruh subkomponen pada tahun 2021. Hanya subkomponen pakaian, alas kaki dan jasa perawatan yang masih mengalami kontraksi pertumbuhan. Subkomponen ini mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,06 persen. Subkomponen restoran dan hotel memiliki pertumbuhan yang paling tinggi dibandingkan subkomponen lain, yaitu sebesar 3,87 persen. Meningkatnya subkomponen ini tidak terlepas dari upaya pemerintah dalam pemulihan ekonomi di sektor pariwisata.

Komponen pengeluaran konsumsi LNPRT tercatat mengalami pertumbuhan sebesar 1,59 persen menjadi Rp 132,32 triliun pada tahun 2021. Pertumbuhan ini termasuk lebih lambat dibandingkan kondisi sebelum masa pandemi yang mencapai 10,62 persen pada tahun 2019. Kemudian pada komponen pengeluaran konsumsi pemerintah tercatat mengalami pertumbuhan sebesar 4,17 persen. Pertumbuhan pada komponen ini disebabkan oleh meningkatnya subkomponen konsumsi individu mencapai Rp 387,33 triliun, atau mengalami pertumbuhan sebesar 11,56 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan subkomponen konsumsi kolektif mengalami kontraksi sebesar -0,71 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Tabel 2.3. PDB Harga Konstan 2010 (Miliar Rupiah) dan Pertumbuhan PDB (Persen) Menurut Penggunaan, Tahun 2018-2021

PDB Penggunaan	2018	2019	2020*	2021**
1. Pengeluaran Konsumsi	5 651 456,27	5 936 399,47	5 780 223,44	5 896 697,43
Rumah tangga	5,05	5,04	-2,63	2,02
a. Makanan dan Minuman,	2 072 120,58	2 179 119,14	2 190 250,95	2 221 746,50
Selain Restoran	5,22	5,16	0,51	1,44
b. Pakaian, Alas Kaki dan Jasa	221 470,07	230 920,53	221 190,80	221 059,01
Perawatannya	4,30	4,27	-4,21	-0,06
c. Perumahan dan Perlengkapan	760 931,91	796 376,16	814 540,29	832 381,76
Rumah tangga	4,63	4,66	2,28	2,19
d. Kesehatan dan Pendidikan	391 786,66	417 643,65	430 533,98	437 838,50
	5,00	6,60	3,09	1,70
e. Transportasi dan Komunikasi	1 407 373,01	1 474 685,11	1 333 608,96	1 368 561,28
	5,47	4,78	-9,57	2,62
f. Restoran dan Hotel	530 343,78	561 967,47	516 212,06	536 199,62
	5,63	5,96	-8,14	3,87
g. Lainnya	267 430,25	275 687,39	273 886,40	278 910,75
	2,38	3,09	-0,65	1,83
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	122 969,84	136 027,41	130 248,66	132 316,75
	9,15	10,62	-4,25	1,59
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	828 876,59	855 962,99	872 774,06	909 173,25
	4,82	3,27	1,96	4,17
a. Konsumsi Kolektif	508 010,61	531 495,22	525 576,95	521 844,82
	4,65	4,62	-1,11	-0,71
b. Konsumsi Individu	320 865,98	324 467,77	347 197,11	387 328,43
	5,10	1,12	7,01	11,56
4. Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	3 444 310,25	3 597 664,13	3 419 181,61	3 549 218,80
	6,68	4,45	-4,96	3,80
a. Bangunan	2 55 0271,59	2 687 303,09	2 585 622,97	2 645 502,22
	5,41	5,37	-3,78	2,32
b. Mesin dan Perlengkapan	369 427,38	387 001,88	342 342,23	382 273,44
	19,73	4,76	-11,54	11,66
c. Kendaraan	201 829,66	193 520,20	168 223,66	187 893,93
	8,24	-4,12	-13,07	11,69
d. Peralatan Lainnya	59 995,51	58 113,51	51 979,25	56 790,14
	8,34	-3,14	-10,56	9,26
e. CBR	180 624,14	189 751,10	195 075,90	197 336,28
	2,72	5,05	2,81	1,16
f. Produk Kekayaan Intelektual	82 161,98	81 974,36	75 937,60	79 422,79
	-1,35	-0,23	-7,36	4,59
5. Perubahan Inventori	197 369,64	129 953,84	513 34,13	627 09,09
	55,55	-34,16	-60,50	22,16
6. Ekspor Barang dan Jasa	2 286 394,89	2 27 5 488,26	2 090 273,36	2 592 682,34
	6,51	-0,48	-8,14	24,04
a. Barang	2 038 478,44	2 026 847,84	1 963 139,40	2 481 821,82
	6,41	-0,57	-3,14	26,42
a.1. Barang Non-migas	1 805 236,00	1 829 521,44	1 775 129,85	2 262 981,67
	8,44	1,35	-2,97	27,48
a.2. Barang migas	233 242,43	197 326,40	188 009,55	218 840,15
	-7,07	-15,40	-4,72	16,40
b. Jasa	247 916,46	248 640,42	127 133,95	110 860,51
	7,40	0,29	-48,87	-12,80

lanjutan

PDB Penggunaan	2018	2019	2020*	2021**
7. Dikurangi Impor Barang dan Jasa	2 203 269,94 12,14	2 046 244,20 -7,13	1 704 165,01 -16,72	2 101 351,67 23,31
a. Barang	1 915 577,84 13,05	1 756 455,93 -8,31	1 519 895,45 -13,47	1 892 980,32 24,55
a.1. Barang Non-migas	1 584 931,21 16,93	1 485 562,23 -6,27	1 294 207,82 -12,88	1 623 580,14 25,45
a.2. Barang migas	330 646,63 -2,44	270 893,69 -18,07	225 687,62 -16,69	269 400,18 19,37
b. Jasa	287 692,10 6,39	289 788,27 0,73	184 269,57 -36,41	208 371,35 13,08
Diskrepani Statistik	97 744,36	63 903,51	83 184,56	77 422,51
8. PRODUK DOMESTIK BRUTO	10 425 851,90 5,17	10 949 155,40 5,02	10 723 054,80 -2,07	11 118 868,50 3,69

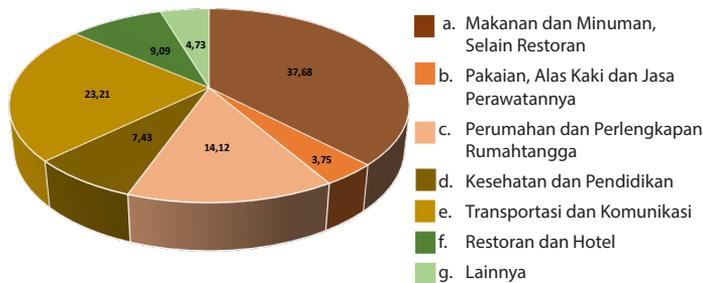
Catatan: * Angka Sementara
 ** Angka Sangat Sementara
 Sumber: Badan Pusat Statistik

Pada komponen pembentukan modal tetap domestik bruto tercatat mengalami pertumbuhan sebesar 3,80 persen pada tahun 2021. Seluruh subkomponen pada komponen ini tercatat mengalami pertumbuhan pada tahun 2021. Subkomponen kendaraan serta subkomponen mesin dan perlengkapan mengalami pertumbuhan paling tinggi dibandingkan subkomponen lainnya dengan nilai masing-masing 11,69 persen dan 11,66 persen. Kemudian komponen perubahan inventori juga tercatat mengalami pertumbuhan sebesar 22,16 persen pada tahun 2021.

Komponen ekspor dan impor barang dan jasa tercatat mengalami pertumbuhan sebesar 24,04 persen dan 23,31 persen pada tahun 2021. Pada komponen ekspor, hampir seluruh subkomponen mengalami pertumbuhan, hanya subkomponen jasa saja yang mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar -12,80 persen. Hal ini karena masih diberlakukannya pembatasan wilayah oleh berbagai negara. Kemudian pada komponen impor barang dan jasa, seluruh subkomponennya mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan paling tinggi tercatat pada subkomponen barang sebesar 24,55 persen.

Jika dilihat dari sisi kontribusi pada komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga, subkomponen makanan dan minuman, selain restoran memiliki kontribusi paling besar. Subkomponen ini tercatat berkontribusi sebesar 37,68 persen dari total pengeluaran konsumsi rumah tangga. Kontribusi terbesar kedua adalah subkomponen transportasi dan komunikasi sebesar 23,21 persen. Karena besarnya kontribusi pada kedua subkomponen ini, maka pertumbuhan pada subkomponen ini sangat memiliki pengaruh yang besar terhadap komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga.

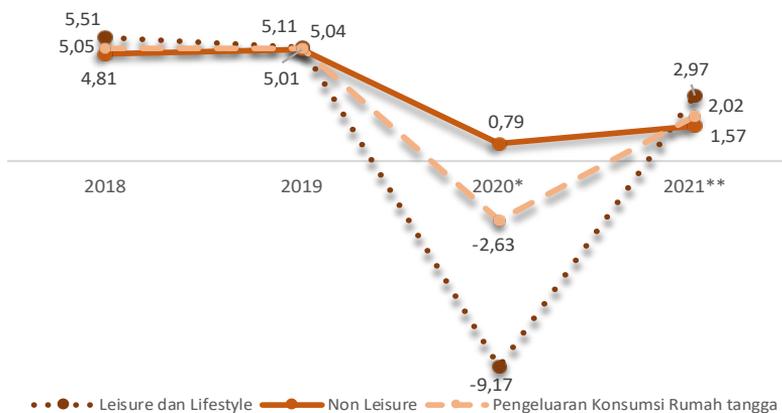
Gambar 2.1. Kontribusi Subkomponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (Persen), Tahun 2021



Subkomponen berikutnya adalah subkomponen perumahan dan perlengkapan rumah tangga (14,12 persen), subkomponen restoran dan hotel (9,09 persen), subkomponen kesehatan dan pendidikan (7,43 persen), subkomponen lainnya (4,73 persen), dan subkomponen pakaian, alas kaki dan jasa perawatannya (3,75 persen).

Pengeluaran untuk konsumsi rumah tangga dapat dibedakan menurut sifatnya, pengeluaran konsumsi yang bersifat *leisure* dan *lifestyle* yang terdiri dari subkomponen transportasi dan komunikasi serta subkomponen restoran dan hotel, dan pengeluaran konsumsi yang bersifat *non leisure* yang terdiri dari subkomponen makanan dan minuman, selain restoran; subkomponen pakaian, alas kaki dan jasa perawatannya; subkomponen perumahan dan perlengkapan rumah tangga; subkomponen kesehatan dan pendidikan; subkomponen lainnya.

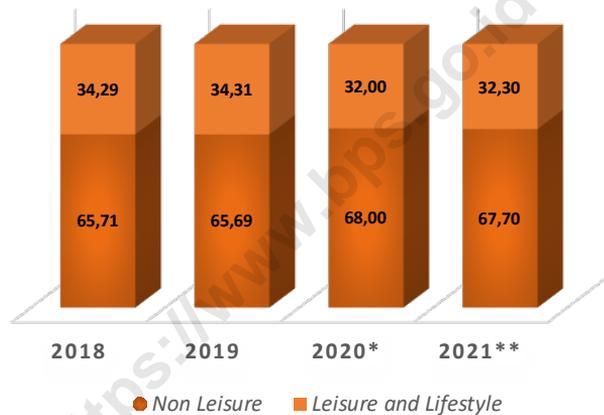
Gambar 2.2. Pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga (Persen), Tahun 2018-2021



Catatan: * Angka Sementara
** Angka Sangat Sementara
Sumber: Badan Pusat Statistik

Meskipun sempat mengalami kontraksi yang dalam pada tahun 2020, pengeluaran untuk konsumsi rumah tangga yang bersifat *leisure* dan *lifestyle* mengalami pertumbuhan positif pada tahun 2021 sebesar 2,97 persen. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi pemulihan yang cukup baik selama tahun 2021. Adaptasi normal baru yang diterapkan mampu untuk mendorong konsumsi rumah tangga yang bersifat *leisure* dan *lifestyle*. Sedangkan pada pengeluaran untuk konsumsi rumah tangga yang bersifat *non leisure* juga mengalami pertumbuhan, namun tidak sebesar *leisure* dan *lifestyle*. Pertumbuhan pengeluaran untuk konsumsi ini tercatat sebesar sebesar 1,57 persen pada tahun 2021.

Gambar 2.3. Kontribusi Subkomponen *Leisure* dan *Lifestyle* serta *Non Leisure* pada Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (Persen), Tahun 2018-2021

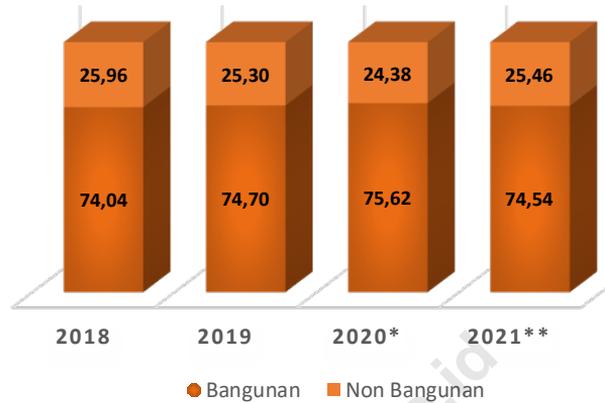


Catatan: * Angka Sementara
 ** Angka Sangat Sementara
 Sumber: Badan Pusat Statistik

Dari sisi kontribusi, pengeluaran untuk konsumsi rumah tangga yang bersifat *Non Leisure* memiliki kontribusi yang lebih besar dibandingkan *Leisure* dan *Lifestyle*. Kontribusi pengeluaran untuk konsumsi yang bersifat *Non Leisure* mencapai hampir dua kali lipat dibandingkan kontribusi pengeluaran untuk konsumsi yang bersifat *Leisure* dan *Lifestyle*. Pada beberapa tahun terakhir, pengeluaran untuk konsumsi rumah tangga mengalami *shifting* atau pergeseran dari *Non Leisure* ke *Leisure* dan *Lifestyle*. Namun, pada tahun 2020 *shifting* tersebut terjadi sebaliknya. Pengeluaran untuk konsumsi bergeser kembali ke *Non Leisure*. Hal ini disebabkan karena pada masa pandemi, rumah tangga memilih untuk mengkonsumsi kebutuhan-kebutuhan pokok terlebih dahulu dan mengurangi kegiatan yang bersifat gaya hidup karena adanya kebijakan pembatasan mobilitas penduduk.

Pada tahun 2021, terjadi pergeseran kembali yang dapat terlihat dari nilai kontribusinya. Kontribusi pengeluaran untuk konsumsi rumah tangga yang bersifat *Leisure* dan *Lifestyle* mengalami peningkatan mencapai 32,30

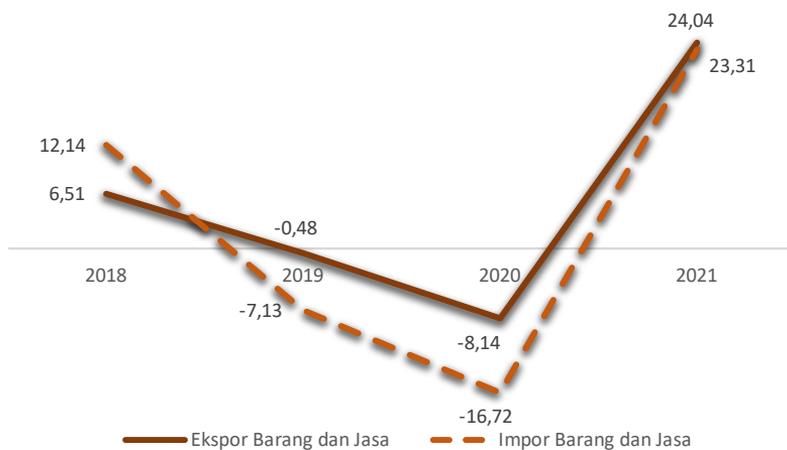
Gambar 2.5. Kontribusi Subkomponen Bangunan dan Non Bangunan pada Komponen Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (Persen), Tahun 2018-2021



Catatan: * Angka Sementara
 ** Angka Sangat Sementara
 Sumber: Badan Pusat Statistik

Selama empat tahun terakhir, perdagangan internasional Indonesia sempat mengalami kontraksi pertumbuhan pada tahun 2019-2020. Pada tahun 2021 perdagangan internasional menunjukkan kinerja terbaiknya dengan mencatat pertumbuhan pada sisi ekspor barang dan jasa sebesar 24,04 persen serta impor barang dan jasa sebesar 23,31 persen. Tingginya pertumbuhan ini disebabkan karena adanya intervensi Pemerintah dengan menjaga daya beli masyarakat dan memberikan dukungan pada pelaku usaha dan industri yang terdampak melalui kemudahan ekspor dan impor.

Gambar 2.6. Pertumbuhan Ekspor dan Impor Barang dan Jasa (persen) Tahun 2018-2021



Catatan: * Angka Sementara
 ** Angka Sangat Sementara
 Sumber: Badan Pusat Statistik

Pada komponen ekspor, hampir seluruh subkomponen mengalami pertumbuhan. Hanya subkomponen jasa saja yang mengalami kontraksi pertumbuhan yaitu sebesar -12,80 persen pada tahun 2021. Hal ini disebabkan karena masih diberlakukannya pembatasan wilayah di berbagai negara, sehingga permintaan dunia terhadap sektor jasa mengalami penurunan. Sedangkan pada komponen impor, seluruh subkomponennya mengalami pertumbuhan yang positif. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada subkomponen barang non migas sebesar 25,45 persen pada tahun 2021.

Tabel 2.4. PDB Harga Berlaku (Miliar Rupiah) dan Distribusi PDB (Persen) Menurut Penggunaan, Tahun 2018-2021

PDB Penggunaan	2018	2019	2020*	2021**
1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	8 274 214,43	8 965 837,39	8 899 917,58	9 236 010,03
	55,76	56,63	57,65	54,42
a. Makanan dan Minuman, Selain Restoran	3 255 945,89	3 529 891,68	3 669 993,47	3 803 177,52
	21,94	22,30	23,77	22,41
b. Pakaian, Alas Kaki dan Jasa Perawatannya	296 092,19	321 705,24	316 446,60	319 910,75
	2,00	2,03	2,05	1,89
c. Perumahan dan Perlengkapan Rumahtangga	1 060 517,02	1 144 776,68	1 186 899,96	1 223 144,65
	7,15	7,23	7,69	7,21
d. Kesehatan dan Pendidikan	558 969,26	616 504,64	652 831,63	677 164,25
	3,77	3,89	4,23	3,99
e. Transportasi dan Komunikasi	1 894 012,58	2 042 268,50	1 796 642,85	1 861 938,03
	12,76	12,90	11,64	10,97
f. Restoran dan Hotel	826 225,85	903 979,63	853 216,32	909 175,63
	5,57	5,71	5,53	5,36
g. Lainnya	382 451,64	406 711,02	423 886,75	441 499,20
	2,58	2,57	2,75	2,60
2. Pengeluaran Konsumsi LNPR	180 893,25	206 094,49	201 361,88	207 766,67
	1,22	1,30	1,30	1,22
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1 338 638,58	1 394 615,06	1 474 067,68	1 551 706,55
	9,02	8,81	9,55	9,14
a. Konsumsi Kolektif	821 700,18	868 092,34	885 666,55	891 773,34
	5,54	5,48	5,74	5,25
b. Konsumsi Individu	516 938,40	526 522,72	588 401,13	659 933,21
	3,48	3,33	3,81	3,89
4. Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	4 791 211,30	5 121 371,35	4 897 049,69	5 227 853,94
	32,29	32,35	31,72	30,81
a. Bangunan	3 566 926,73	3 841 446,57	3 719 738,79	3 933 012,08
	24,04	24,26	24,09	23,18
b. Mesin dan Perlengkapan	499 902,52	543 300,59	477 468,14	535 062,48
	3,37	3,43	3,09	3,15
c. Kendaraan	256 440,49	253 821,43	223 484,72	258 006,92
	1,73	1,60	1,45	1,52
d. Peralatan Lainnya	86 978,22	84 941,32	75 728,97	84 536,96
	0,59	0,54	0,49	0,50
e. CBR	264 525,33	278 745,22	282 565,06	292 469,93
	1,78	1,76	1,83	1,72
f. Produk Kekayaan Intelektual	116 438,01	119 116,22	118 064,01	124 765,59
	0,78	0,75	0,76	0,74
5. Perubahan Inventori	338 633,58	226 922,80	97 857,67	111 142,96
	2,28	1,43	0,63	0,65
6. Ekspor Barang dan Jasa	3 116 546,31	2 943 532,86	2 666 365,05	3 659 039,79
	21,00	18,59	17,27	21,56
a. Barang	2 708 682,46	2 525 395,98	2 453 882,17	3 464 808,27
	18,25	15,95	15,90	20,42

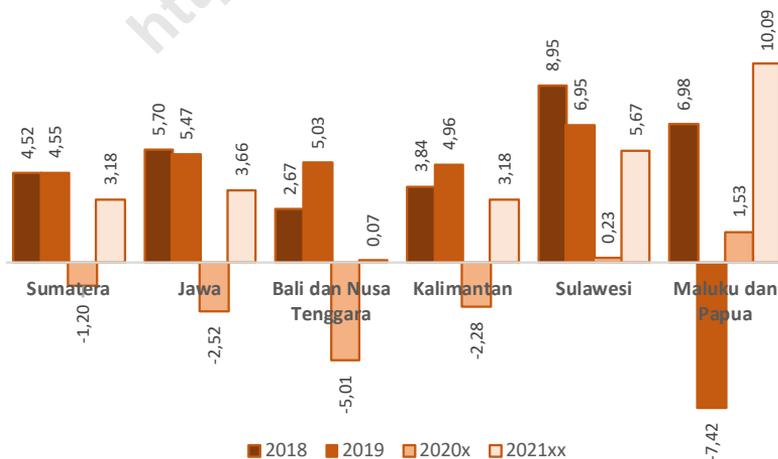
lanjutan

PDB Penggunaan	2018	2019	2020*	2021**
a.1. Barang Non-migas	2 465 166,50 16,61	2 344 034,79 14,81	2 325 698,50 15,06	3 274 470,66 19,29
a.2. Barang migas	243 515,95 1,64	181 361,19 1,15	128 183,67 0,83	190 337,61 1,12
b. Jasa	407 863,85 2,75	418 136,88 2,64	212 482,88 1,38	194 231,52 1,14
7. Dikurangi Impor Barang dan Jasa	3 275 145,30 22,07	3 013 944,16 19,04	2 424 413,17 15,70	3 201 022,91 18,86
a. Barang	2 753 480,50 18,56	2 479 523,51 15,66	2 071 090,61 13,42	2 791 731,58 16,45
a.1. Barang Non-migas	2 317 267,91 15,62	2 162 656,21 13,66	1 867 270,09 12,10	2 429 969,42 14,32
a.2. Barang migas	436 212,59 2,94	316 867,29 2,00	203 820,52 1,32	361 762,16 2,13
b. Jasa	521 664,80 3,52	534 420,66 3,38	353 322,56 2,29	409 291,33 2,41
Diskrepani Statistik	73 763,85	-11 772,58	-374 188,88	178 292,18
8. PRODUK DOMESTIK BRUTO	14 838 756,00 100,00	15 832 657,20 100,00	15 438 017,50 100,00	16 970 789,20 100,00

Catatan: * Angka Sementara
 ** Angka Sangat Sementara
 Sumber: Badan Pusat Statistik

Pertumbuhan Bali Masih Rendah, Maluku dan Papua Melesat

Gambar 2.7. Pertumbuhan Ekonomi Menurut Wilayah (Persen), Tahun 2018-2021



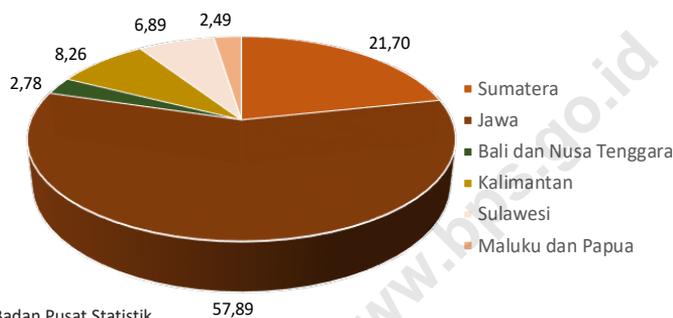
Catatan: * Angka Sementara
 ** Angka Sangat Sementara
 Sumber: Badan Pusat Statistik

Jika dilihat berdasarkan wilayahnya, pemulihan ekonomi juga terjadi di seluruh wilayah. Meskipun sempat mengalami kontraksi pada tahun 2019 dan 2020, peningkatan kinerja ekonomi pada tahun 2021 tercatat cukup baik di

seluruh wilayah. Pertumbuhan tertinggi terjadi di wilayah Maluku dan Papua sebesar 10,09 persen. Sedangkan Bali dan Nusa Tenggara masih terpuuk dan hanya mengalami pertumbuhan sebesar 0,07 persen.

Pertumbuhan positif juga dialami oleh empat wilayah lainnya, yaitu Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. Meskipun pertumbuhan pada tahun 2021 masih lebih rendah dibandingkan kondisi sebelum pandemi, namun kinerja ekonomi pada empat wilayah ini dapat dikatakan cukup baik, karena nilai pertumbuhannya hanya sedikit lebih kecil dibandingkan pada kondisi sebelum pandemi. Pertumbuhan ekonomi pada wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi masing-masing sebesar 3,18 persen; 3,66 persen; 3,18 persen dan 5,67 persen.

Gambar 2.8. Kontribusi Ekonomi Menurut Wilayah (Persen), Tahun 2021



Sumber: Badan Pusat Statistik

Berdasarkan kontribusinya, wilayah Jawa masih mendominasi perekonomian nasional. Dari Gambar 2.8 dapat dilihat bahwa sebesar 57,89 persen ekonomi nasional masih ditopang oleh ekonomi di wilayah Jawa. Kemudian 21,70 persen berasal dari Sumatera, 8,26 persen dari Kalimantan, 6,89 persen dari Sulawesi, 2,78 persen dari Bali dan Nusa Tenggara, serta 2,49 persen dari Maluku dan Papua. Tingginya kontribusi ekonomi di wilayah Jawa bersumber dari industri dan pertanian. Selain itu wilayah Jawa juga termasuk wilayah terpadat penduduknya dibandingkan wilayah lain di luar Jawa. Hal ini menyebabkan perputaran ekonomi di wilayah Jawa menjadi sangat tinggi.

Jika dilihat menurut provinsi, hampir seluruh provinsi mengalami pertumbuhan yang positif pada tahun 2021. Provinsi dengan pertumbuhan paling tinggi terjadi pada Provinsi Maluku Utara. Provinsi Maluku Utara tercatat mengalami pertumbuhan sebesar 16,40 persen pada tahun 2021 dengan kontribusi sebesar 0,31 persen terhadap total perekonomian nasional. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, pertumbuhan ekonomi di Maluku Utara disebabkan karena adanya industri hilirisasi nikel di Halmahera. Industri ini mampu meningkatkan ekonomi masyarakat setempat.

Provinsi Papua menjadi provinsi tertinggi kedua dengan tingkat pertumbuhan mencapai 15,11 persen pada tahun 2021 dan kontribusi perekonomian Papua sebesar 1,39 persen terhadap perekonomian nasional. Tingginya pertumbuhan ekonomi di Provinsi Papua tidak terlepas dari kinerja sektor pertambangan dan penggalian yang ada di Provinsi Papua.

Tabel 2.5. Pertumbuhan dan Kontribusi Ekonomi Menurut Provinsi (Persen), Tahun 2019-2021

Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi			Kontribusi Ekonomi		
	2019	2020*	2021**	2019	2020*	2021**
Aceh	4,14	-0,37	2,79	1,02	1,05	1,09
Sumatera Utara	5,22	-1,07	2,61	4,99	5,14	5,07
Sumatera Barat	5,01	-1,62	3,29	1,53	1,53	1,49
Riau	2,81	-1,13	3,36	4,74	4,62	4,97
Jambi	4,35	-0,44	3,66	1,35	1,31	1,38
Sumatera Selatan	5,69	-0,11	3,58	2,83	2,90	2,90
Bengkulu	4,94	-0,02	3,24	0,45	0,46	0,47
Lampung	5,26	-1,67	2,79	2,22	2,24	2,19
Kep. Bangka Belitung	3,32	-2,30	5,05	0,47	0,48	0,51
Kep. Riau	4,83	-3,80	3,43	1,67	1,61	1,63
DKI Jakarta	5,82	-2,39	3,56	17,55	17,55	17,19
Jawa Barat	5,02	-2,52	3,74	13,24	13,22	13,03
Jawa Tengah	5,36	-2,65	3,32	8,48	8,55	8,38
DI Yogyakarta	6,59	-2,68	5,53	0,88	0,88	0,88
Jawa Timur	5,53	-2,33	3,57	14,62	14,58	14,48
Banten	5,26	-3,39	4,44	4,12	3,97	3,93
Bali	5,60	-9,33	-2,47	1,57	1,42	1,30
Nusa Tenggara Barat	3,90	-0,62	2,30	0,83	0,85	0,83
Nusa Tenggara Timur	5,25	-0,84	2,51	0,67	0,68	0,65
Kalimantan Barat	5,09	-1,82	4,78	1,32	1,36	1,36
Kalimantan Tengah	6,12	-1,41	3,40	0,94	0,96	1,00
Kalimantan Selatan	4,09	-1,82	3,48	1,13	1,14	1,14
Kalimantan Timur	4,70	-2,87	2,48	4,07	3,85	4,10
Kalimantan Utara	6,89	-1,09	3,98	0,60	0,64	0,65
Sulawesi Utara	5,65	-0,99	4,16	0,81	0,84	0,84
Sulawesi Tengah	8,83	4,86	11,70	1,16	1,25	1,46
Sulawesi Selatan	6,91	-0,71	4,65	3,14	3,20	3,22
Sulawesi Tenggara	6,50	-0,65	4,10	0,81	0,83	0,82
Gorontalo	6,40	-0,02	2,41	0,26	0,26	0,26
Sulawesi Barat	5,56	-2,40	2,56	0,29	0,29	0,30
Maluku	5,41	-0,92	3,04	0,29	0,29	0,29
Maluku Utara	6,25	5,35	16,40	0,25	0,27	0,31
Papua Barat	2,66	-0,76	-0,51	0,53	0,53	0,50
Papua	-15,74	2,39	15,11	1,18	1,26	1,39

Catatan: * Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Sumber: Badan Pusat Statistik

Setelah itu, diikuti oleh Provinsi Sulawesi Tengah dengan tingkat pertumbuhan mencapai 11,70 persen dengan kontribusi sebesar 1,46 persen pada tahun 2021. Provinsi Sulawesi Tengah juga menjadi salah satu provinsi yang cukup kuat saat awal pandemi melanda pada tahun 2020 bersama dengan Maluku Utara. Hal ini tercermin dari pertumbuhan yang bernilai positif pada tahun 2020. Tingginya pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Tengah terjadi karena adanya peningkatan pada sektor industri pengolahan, pertambangan, dan konstruksi yang didorong oleh aktivitas hilirisasi nikel baik dari penyediaan bahan baku, produksi, maupun pembangunan smelter dan kawasan industri.

Berbeda dengan provinsi lain yang mengalami pertumbuhan, Provinsi Bali justru masih mengalami kontraksi pertumbuhan pada tahun 2021. Provinsi Bali tercatat mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar -2,47 persen pada tahun 2021. Hal ini disebabkan karena perekonomian Bali masih bergantung pada sektor pariwisata. Penutupan akses masuk dan penutupan tempat wisata juga menyebabkan berbagai jenis usaha yang berhubungan dengan sektor pariwisata mengalami dampaknya seperti perdagangan, hotel, restoran, industri pengolahan, serta penyediaan jasa. Tercatat pada tahun 2021, wisatawan mancanegara yang masuk melalui Bandara Ngurah Rai hanya sebanyak 43 orang.

Jika dilihat dari sisi kontribusinya, provinsi DKI Jakarta masih merupakan provinsi dengan kontribusi tertinggi, yaitu sebesar 17,19 persen pada tahun 2021. Pertumbuhan ekonomi di Provinsi DKI Jakarta tercatat sebesar 3,56 persen pada tahun 2021. Kemudian Provinsi Jawa Timur menjadi provinsi dengan kontribusi kedua tertinggi, yaitu sebesar 14,48 persen dan memiliki pertumbuhan ekonomi sebesar 3,57 persen pada tahun 2021. Setelah itu dilanjutkan oleh Provinsi Jawa Barat dengan kontribusi sebesar 13,03 persen dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 3,74 persen.

Pendapatan Per Kapita

Pendapatan per kapita adalah salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan suatu negara. Semakin tinggi pendapatan per kapita, maka akan semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu negara. Pendapatan per kapita juga digunakan untuk melihat apakah suatu negara dikategorikan sebagai negara dengan pendapatan rendah, pendapatan menengah bawah, pendapatan menengah atas, maupun pendapatan tinggi. Pada dasarnya, pendapatan per kapita merupakan hasil bagi antara nilai PDB dibagi dengan jumlah penduduknya.

Selama tiga tahun terakhir, PDB per kapita di Indonesia sempat mengalami penurunan. PDB per kapita yang pada tahun 2019 sebesar Rp 59,3 juta atau sekitar US\$ 4.192,8, turun pada tahun 2020 menjadi Rp 57,3 juta atau sekitar US\$ 3.934,5. Penurunan PDB per kapita pada tahun 2020 disebabkan karena adanya pembatasan wilayah dan mobilitas masyarakat yang diterapkan

Tabel 2.6. PDB Per Kapita dan GNI Per Kapita Tahun 2019-2021

Tahun	PDB Per Kapita (Berlaku) ¹		GNI Per Kapita ²
	Nilai (Juta Rupiah)	Nilai (US\$)	Nilai (US\$)
2019	59,3	4192,8	4050
2020*	57,3	3934,5	3870
2021**	62,2	4349,5	4140

Catatan: * Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Sumber: ¹Badan Pusat Statistik, ²Bank Dunia

dalam upaya pencegahan penyebaran covid-19. Kebijakan ini ternyata sangat berdampak pada perputaran ekonomi di masyarakat. Nilai ini sejalan dengan indikator GNI per kapita yang dikeluarkan oleh Bank Dunia. GNI per kapita Indonesia juga mengalami penurunan dari US\$ 4.050 menjadi US\$ 3.870 pada tahun 2020. Pada tahun 2021, PDB per kapita Indonesia mengalami peningkatan yang cukup baik. PDB per kapita meningkat menjadi Rp 62,2 juta atau setara dengan US\$ 4.349,5. Peningkatan ini juga sejalan dengan indikator GNI per kapita yang meningkat menjadi US\$ 4.140.

Bank Dunia setiap tahunnya memiliki klasifikasi dalam menentukan suatu negara berdasarkan GNI (*Gross National Income*) per kapita. Klasifikasi tingkat pendapatan yang terakhir dimutakhirkan pada tanggal 1 Juli 2022 seperti yang ditampilkan pada Tabel 2.7 di bawah ini. Berdasarkan klasifikasi tersebut, suatu negara dapat dikategorikan apakah masuk ke dalam negara dengan pendapatan rendah, pendapatan menengah bawah, pendapatan menengah atas, maupun pendapatan tinggi. Indonesia sempat masuk ke dalam negara dengan pendapatan menengah atas (*upper-middle income*) pada tahun 2019 dengan nilai GNI sebesar US\$ 4.050.

Tabel 2.7. Klasifikasi Bank Dunia Berdasarkan Tingkat Pendapatan (US\$)

Klasifikasi	Lama (1 Juli 2021)	Baru (1 Juli 2022)
Pendapatan rendah (<i>low income</i>)	<1046	<1085
Pendapatan menengah bawah (<i>lower-middle income</i>)	1046-4095	1086-4255
Pendapatan menengah atas (<i>upper-middle income</i>)	4096-12695	4256-13205
Pendapatan tinggi (<i>high income</i>)	>12695	>13205

Sumber: Bank Dunia

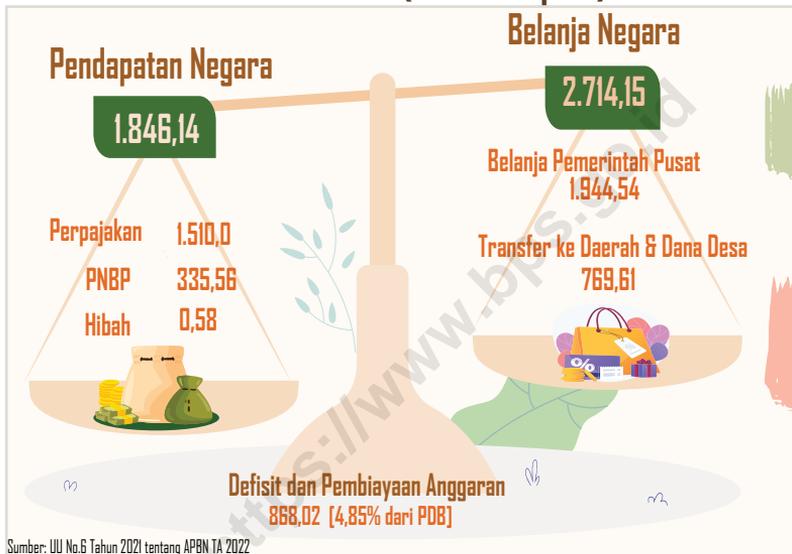
Meskipun Indonesia sempat naik kelas ke kelompok negara dengan pendapatan menengah atas, pada tahun 2020 Indonesia kembali turun kelas menjadi negara dengan pendapatan menengah bawah (*lower-middle income*) dengan GNI per kapita sebesar US\$ 3.870. Pada tahun 2021, meskipun terdapat kenaikan GNI per kapita menjadi US\$ 4.140, hal tersebut belum bisa menaikkan kelas Indonesia menjadi negara dengan pendapatan menengah atas. Hal ini disebabkan per 1 Juli 2022, Bank Dunia merilis kembali klasifikasi pendapatan yang terbaru. Pada klasifikasi ini, Indonesia masih masuk dalam kelas negara dengan pendapatan menengah bawah.

<https://www.bps.go.id>

APBN SEBAGAI INSTRUMEN PENTING PENANGANAN DAMPAK PANDEMI



Postur APBN 2022 (Triliun Rupiah)



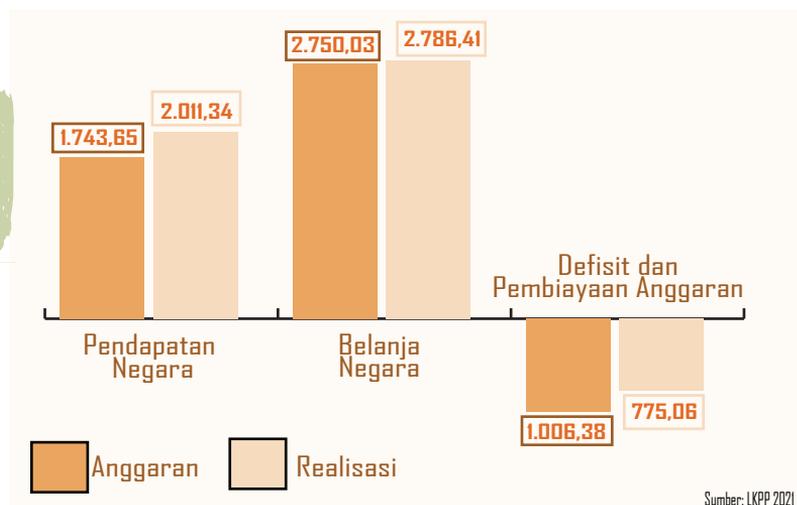
APBN 2022 masih menjadi instrumen penting dalam penanganan pandemi dan dukungan pemulihan ekonomi serta reformasi struktural

Namun, APBN 2022 juga menjadi jembatan transisi dalam menyongsong konsolidasi fiskal di tahun 2023 (batas defisit anggaran kembali menjadi 3 persen terhadap PDB)

Sumber: UU No.6 Tahun 2021 tentang APBN TA 2022

Kinerja Realisasi APBN 2021 (Triliun Rupiah)

Kinerja positif Realisasi Penerimaan Pajak Tahun Anggaran 2021 yang melebihi target APBN mengakhiri kondisi *shortfall* selama 12 tahun terakhir



Sumber: LKPP 2021

Peran Penting APBN dalam Penanganan Dampak Pandemi

Memasuki tahun ketiga pandemi Covid-19, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih menjadi instrumen penting dalam penanganan pandemi dan menjadi penyokong utama perekonomian nasional. Komponen belanja pemerintah dalam APBN berperan sebagai *countercyclical* dari kontraksi ekonomi ketika konsumsi masyarakat, investasi, dan kegiatan ekspor impor terkena dampak negatif pandemi. Lebih lanjut, paket kebijakan stimulus fiskal Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) yang merupakan bagian dari APBN berfungsi untuk memulihkan ekonomi baik dari sisi konsumen (permintaan) maupun dari sisi dunia usaha (penawaran). Dari sisi permintaan, program perlindungan sosial seperti Bantuan Sosial Tunai, Program Keluarga Harapan (PKH), dan Kartu Sembako berfungsi menjaga daya beli masyarakat terutama masyarakat miskin dan rentan. Sementara dari sisi penawaran, program diarahkan untuk melindungi keberlangsungan dunia usaha melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan subsidi bunga untuk Usaha Menengah, Kecil, dan Mikro (UMKM) dan Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk melindungi Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Selain menahan perekonomian nasional dari kontraksi yang lebih dalam, APBN juga menjadi tumpuan dalam memulihkan sistem kesehatan masyarakat yang porak poranda akibat pandemi Covid-19. Mengingat pandemi yang terkendali merupakan prasyarat tercapainya proses pemulihan ekonomi yang optimal, kluster kesehatan menjadi salah satu prioritas pada PC-PEN setiap tahunnya. Bahkan, pada PC-PEN 2021, kluster kesehatan mendapat kucuran anggaran terbanyak dibandingkan dengan empat kluster pemulihan ekonomi lainnya, yakni sebesar 28 persen dari total pagu PC-PEN. Anggaran dialokasikan diantaranya untuk perawatan pasien Covid-19, penyediaan vaksin, dan pemberian insentif untuk tenaga kesehatan.

Selama krisis melanda, APBN terbukti menjadi instrumen yang bergerak dinamis mengikuti perkembangan pandemi, situasi ekonomi yang berlaku, dan respon kebijakan dari pemerintah. Peranan APBN yang fleksibel mampu mengakomodir kebutuhan intervensi pemerintah dalam penanganan kesehatan, perlindungan masyarakat, dan dukungan dunia usaha. Hal ini dapat terlihat salah satunya dari fokus kebijakan yang berbeda-beda di setiap tahunnya. Di tahun 2020 ketika Covid-19 pertama kali melanda Indonesia, pemerintah menerapkan kebijakan fiskal yang bersifat *extraordinary* sebagai respon cepat dalam penanganan pandemi. Salah satu kebijakan luar biasa yang ditempuh pemerintah yakni dengan menerbitkan PERPPU No.1/2020 yakni tentang revisi besaran defisit APBN 2020 hingga APBN 2022 yang diizinkan dapat melebihi tiga persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Sementara untuk tahun 2021 dan 2022, APBN difokuskan pada kebijakan-kebijakan untuk pemulihan (*recovery*) ekonomi dan melakukan reformasi (*reform*) struktural. Selanjutnya, pemerintah berkomitmen untuk melakukan konsolidasi fiskal (*fiscal consolidation*) di tahun 2023.

APBN 2022 untuk Melanjutkan Dukungan Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural

Di tengah optimisme yang kian tumbuh, kondisi perekonomian tahun 2022 masih dihadapkan pada tantangan ketidakpastian yang berasal dari potensi munculnya varian baru Covid-19 dan kondisi global yang memengaruhi perekonomian nasional seperti normalisasi kebijakan yang dilakukan oleh negara-negara maju. Oleh sebab itu, APBN 2022 masih menjadi instrumen penting dalam menangani Covid-19, memulihkan konsumsi masyarakat, melindungi keberlangsungan sektor usaha terutama UMKM, dan melanjutkan reformasi struktural.

Seperti yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam sidang paripurna DPR, Kebijakan APBN 2022 diarahkan pada enam fokus utama, yaitu sebagai berikut:

1. Melanjutkan upaya pengendalian Covid-19 dengan tetap memprioritaskan sektor kesehatan,
2. Menjaga keberlanjutan program perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan,
3. Memperkuat agenda peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul, berintegritas, dan berdaya saing,
4. Melanjutkan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan adaptasi teknologi,
5. Penguatan desentralisasi fiskal untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan antar daerah,
6. Melanjutkan reformasi penganggaran dengan menerapkan *zero-based budgeting* untuk mendorong agar belanja lebih efisien.

Meskipun APBN masih bekerja keras dalam mengatasi dampak pandemi di tahun 2022, upaya penyehatan APBN mulai dilakukan dalam rangka menyongsong konsolidasi fiskal (batas defisit anggaran kembali menjadi kurang dari 3 persen terhadap PDB) tahun 2023. Upaya mewujudkan pengelolaan fiskal yang semakin sehat dicapai melalui reformasi fiskal yang diimplementasikan melalui optimalisasi pendapatan negara, penguatan belanja yang berkualitas (*spending better*), dan pembiayaan yang efisien dan berkelanjutan. Hal ini menjadi penting agar konsolidasi fiskal tidak mendisrupsi upaya melanjutkan pemulihan ekonomi dan percepatan reformasi struktural.

Kebijakan fiskal pada tahun 2022 masih bersifat ekspansif yang ditandai dengan defisit anggaran dalam postur APBN. Defisit ini berperan sebagai *countercyclical* untuk menstimulasi pertumbuhan ekonomi dengan tetap mempertahankan pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan. Pendapatan Negara ditargetkan sebesar Rp 1.846,14 triliun sedangkan

anggaran Belanja Negara ditetapkan sebesar Rp 2.714,16 triliun, sehingga terdapat defisit anggaran sebesar Rp 868,02 triliun. Sebagai upaya penyehatan APBN dalam rangka transisi penerapan konsolidasi fiskal 2023, rasio defisit anggaran terhadap PDB ditetapkan lebih rendah menjadi 4,85 persen dibandingkan dengan postur APBN Tahun Anggaran 2021 yang ditetapkan sebesar 5,70 persen.

Tabel 3.1. Ringkasan APBN Tahun 2021 dan APBN Tahun 2022 (Triliun Rupiah)

Uraian	APBN 2021 (UU No.9 2020)	APBN 2022 (UU No.6 2021)
Pendapatan Negara dan Hibah	1 743,65	1 846,14
Penerimaan Perpajakan	1 444,54	1 510
Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)	298,20	335,56
Penerimaan Hibah	0,90	0,58
Belanja Negara	2 750,03	2 714,15
Belanja Pemerintah Pusat	1 954,55	1 944,54
Transfer ke Daerah dan Dana Desa	795,48	769,61
Surplus/(Defisit) Keseimbangan Primer	(633,12)	(462,15)
Surplus/(Defisit) Anggaran	(1 006,38)	(868,02)
Surplus/(Defisit) Terhadap PDB	5,70	4,85
Pembiayaan Anggaran	1 006,38	868,02
Pembiayaan Utang	1 177,35	973,58
Pembiayaan Investasi	(184,46)	(182,32)
Pemberian Pinjaman	0,45	0,59
Kewajiban Penjaminan	(2,72)	(1,13)
Pembiayaan Lainnya	15,76	77,30

Sumber: UU No.9 2020 tentang APBN 2021 dan UU No.6 2021 tentang APBN TA 2022

Sumber utama yakni sekitar 81 persen target pendapatan negara TA 2022 berasal dari penerimaan perpajakan yang diperkirakan mencapai Rp 1.510 triliun. Target penerimaan perpajakan ini ditetapkan dengan pertimbangan pulihnya dunia usaha, upaya penguatan sistem perpajakan, optimalisasi potensi perpajakan, dan penyesuaian tarif cukai, serta potensi perluasan basis cukai. Selanjutnya, sebesar Rp 335,56 triliun pendapatan negara pada APBN 2022 ditargetkan dari PNBP yakni penerimaan dari Sumber Daya Alam (SDA), penerimaan dari kekayaan negara dipisahkan, dan Badan Layanan Umum (BLU). Sementara, penerimaan hibah diproyeksikan sebesar Rp 580 miliar sesuai dengan hibah terencana pada Kementerian/Lembaga.

Kebijakan belanja negara pada APBN 2022 masih dirancang secara responsif dan fleksibel dalam merespon perkembangan ekonomi dan

penanganan pandemi. Pada saat yang bersamaan belanja negara juga dilakukan secara konsolidatif mengingat tahun 2022 adalah tahun terakhir relaksasi pelebaran defisit anggaran menuju konsolidasi fiskal di tahun 2023. Sebesar Rp 1.944,54 triliun belanja negara pada APBN 2022 dialokasikan untuk belanja pemerintah pusat yang diarahkan untuk melanjutkan penanganan pandemi Covid-19, mendukung pelaksanaan reformasi struktural, dan mendukung percepatan penyelesaian infrastruktur strategis. Sementara anggaran untuk Transfer ke Daerah dan Dana Desa masing-masing dialokasikan sebesar Rp 701,61 triliun dan Rp 68 triliun. Kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) difokuskan untuk penguatan desentralisasi fiskal guna mendukung pemulihan ekonomi dan peningkatan kualitas pelaksanaan guna mendukung kinerja daerah. Lebih khusus lagi, TKDD tahun 2022 diarahkan untuk mendukung program percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem dan belanja-belanja strategis seperti peningkatan kualitas infrastruktur publik, pembangunan SDM, serta kualitas pelayanan publik.

Realisasi Pendapatan Negara Tahun 2021 Melebihi Target yang ditetapkan pada APBN

Kebijakan fiskal pada Tahun Anggaran (TA) 2021 ditetapkan bersifat ekspansif-konsolidatif dan dilakukan dalam kerangka tema “Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi”. Implementasi dari kebijakan ekspansif tercermin dari adanya defisit anggaran pada APBN yang mana komponen belanja fiskal diarahkan untuk mengatasi dampak pandemi baik pada sektor ekonomi maupun kesehatan masyarakat. Meskipun belanja pemerintah tinggi, namun tetap harus konsolidatif artinya defisit anggaran terkendali, rasio utang terhadap PDB terjaga, dan mendorong negatif keseimbangan primer ke arah positif sebagai upaya pengendalian atas berbagai risiko.

Berbagai stimulus fiskal yang digelontorkan pemerintah dari APBN 2021 memperlihatkan kinerja yang optimal, diindikasikan dengan berbagai indikator ekonomi yang bergerak secara positif. Secara kumulatif, perekonomian nasional tumbuh 3,69 persen di tahun 2021 dengan nilai total penciptaan Produk Domestik Bruto (PDB) melampaui capaian nilai sebelum terjadinya pandemi. Selain itu, tingkat inflasi terjaga di level yang rendah, nilai tukar rupiah yang tetap stabil, yang secara simultan diikuti dengan optimisme konsumen yang semakin baik.

Pemulihan ekonomi di tahun 2021 pada sisi produksi atau dunia usaha dan sisi permintaan melalui konsumsi masyarakat ditransmisikan pada sisi fiskal yang ditandai oleh peningkatan pendapatan negara. Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Tahun 2021 kembali tumbuh sebesar 22,06 persen (yoy) atau lebih tinggi Rp 363,56 triliun dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya menjadi Rp 2.011,34 triliun. Angka ini juga melampaui nilai yang ditargetkan pada APBN 2021 (UU No.9 Tahun 2020) dengan persentase realisasi sebesar 115,35 persen. Jika dilihat perkembangan sejak 2018, Pendapatan Negara konsisten mengalami peningkatan, kecuali di tahun 2020 saat pandemi Covid-19 mulai mewabah di

Indonesia, dimana pendapatan negara mengalami kontraksi yang cukup signifikan sebesar 15,96 persen dari realisasi tahun sebelumnya.

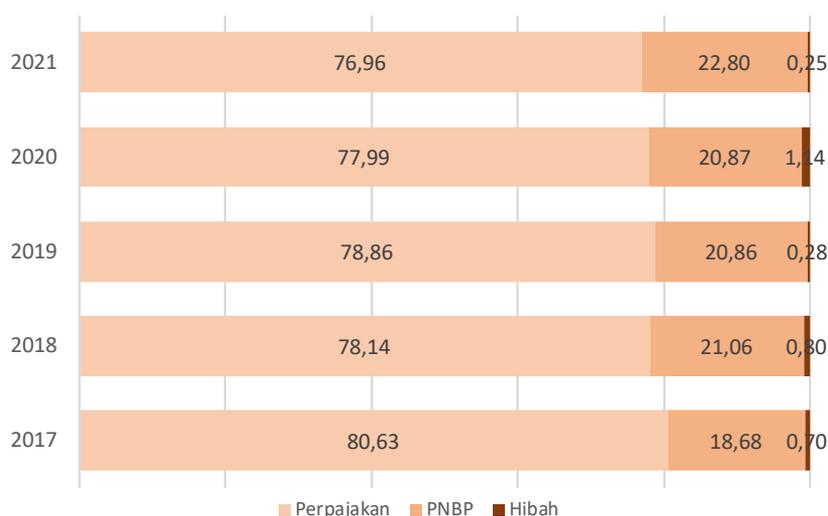
Tabel 3.2. Realisasi Pendapatan Negara (dalam Triliun Rupiah), 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Pendapatan Negara	1 666,38	1 943,67	1 960,63	1 647,78	2 011,34
1. Penerimaan Perpajakan	1 343,53	1 518,79	1 546,14	1 285,14	1 547,84
1.1 Pajak Dalam Negeri	1 304,32	1 472,91	1 505,09	1 248,42	1 474,15
1.2 Pajak Perdagangan Internasional	39,21	45,88	41,05	36,72	73,70
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	311,22	409,32	408,99	343,81	458,49
3. Penerimaan Hibah	11,63	15,56	5,50	18,83	5,01

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2017 -2021

Dalam struktur APBN, Pendapatan Negara berasal dari tiga sumber yakni Penerimaan Pajak, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan Hibah. Pada realisasi APBN 2021, Penerimaan Pajak masih menjadi kontributor utama bagi pendapatan negara yakni mencapai 76,96 persen, sedangkan 22,80 persen disumbang oleh PNBP dan sisanya sebesar 0,2 persen berasal dari Penerimaan Hibah. Kinerja positif Pendapatan Negara TA 2021 tidak terlepas dari capaian cemerlang pertumbuhan dua komponen utama penyusunnya yakni Penerimaan Pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), sementara realisasi Penerimaan Hibah mengalami penurunan. Sementara itu, kontribusi penerimaan perpajakan cenderung mengalami penurunan sejak tahun 2017 sebaliknya kontribusi PNBP terus mengalami peningkatan.

Gambar 3.1. Kontribusi Penerimaan Pajak, Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan Penerimaan Hibah Pada Realisasi Pendapatan Negara, 2021



Sumber: Kementerian Keuangan

Sebagai sumber utama Pendapatan Negara, Penerimaan Perpajakan TA 2021 terealisasi 107,15 persen dari target yang ditetapkan pada APBN atau tumbuh sebesar 20,44 persen (yoy) menjadi Rp 1.547,84 triliun. Capaian ini mengakhiri kondisi *shortfall* atau penerimaan pajak di bawah target selama 12 tahun terakhir. Prestasi yang dicapai pada penerimaan pajak tahun 2021 merupakan dampak positif dari perekonomian nasional yang semakin pulih dan diikuti dengan semakin baiknya penerimaan dari sektor penyumbang penerimaan pajak.

Sebesar 95,24 persen penerimaan pajak berasal dari pajak dalam negeri sedangkan sisanya berasal dari pajak perdagangan internasional. Dilihat lebih rinci lagi menurut komponen penyusunnya, kontributor utama pajak dalam negeri adalah pajak penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM) yang masing-masing berkontribusi sebesar 47,26 persen dan 37,44 persen. Pada TA 2021, realisasi hampir semua jenis pajak dalam negeri mengalami peningkatan kecuali Pajak Bumi Bangunan (PBB). Kenaikan paling signifikan terjadi pada komponen PPN dan PPnBM yang naik sebesar 22,56 persen dari realisasi tahun sebelumnya diikuti oleh PPh yang naik sebesar 17,28 persen. Realisasi penerimaan pajak yang melebihi target merupakan manifestasi dari perekonomian nasional yang bergerak ke arah yang positif. Hal ini dapat terlihat dari PPN yang menjadi komponen penerimaan pajak yang mengalami peningkatan paling besar. PPN merupakan jenis pajak yang dikenakan pada setiap barang dan jasa yang diproduksi dalam ekonomi kecuali barang dan jasa yang dikecualikan undang-undang sehingga cenderung bersifat sangat responsif terhadap perkembangan ekonomi. Dengan kata lain, realisasi PPN yang meningkat dapat menjadi salah satu indikator geliat ekonomi yang kian bertambah.

**Tabel 3.3. Realisasi Penerimaan Pajak Dalam Negeri
(dalam Triliun Rupiah), 2017-2021**

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Pajak Penghasilan (PPh)	646,79	749,98	772,26	594,03	696,68
PPh Migas	50,32	64,70	59,15	33,03	52,84
PPh Nonmigas	596,48	685,28	713,11	561,01	643,84
PPN dan PPnBM	480,72	537,27	531,58	450,32	551,90
Pajak Bumi dan Bangunan	16,77	19,44	21,15	20,95	18,92
Cukai	153,29	159,59	172,42	176,31	195,52
Pajak Lainnya	6,74	6,63	7,68	6,79	11,13
Total Pajak Dalam Negeri	1.304,31	1.472,91	1.505,09	1.248,41	1.474,14

Sumber: Kementerian Keuangan

Selain dari perpajakan, penerimaan pendapatan negara tahun 2021 juga melambung didorong oleh PNBPN yang terealisasi sebesar 153,75 persen dari target dalam APBN 2021 yakni sebesar Rp 458,49 triliun atau lebih tinggi 33,35 persen jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya. Pemerintah terus berupaya untuk melakukan optimalisasi pendapatan negara yang ditempuh baik dari sisi penerimaan pajak maupun PNBPN. Beberapa kebijakan yang ditempuh pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan pajak diantaranya perluasan basis pajak yang

disertai dengan perbaikan tata kelola dan administrasi perpajakan, serta melakukan reformasi perpajakan dengan penerapan *Omnibus Law* Perpajakan. Sementara upaya optimalisasi pendapatan negara dari sisi PNBPN dilakukan dengan membuat regulasi turunan berupa Peraturan Pemerintah (PP) dari UU No.9 Tahun 2018 tentang PNBPN. Dengan dibuatnya regulasi turunan ini diharapkan tercapainya tata kelola PNBPN yang lebih baik, optimalisasi penerimaan dari dividen BUMN, perbaikan kinerja pelayanan Badan Layanan Umum (BLU), dan peningkatan pengelolaan aset agar lebih produktif dengan penerapan *Highest and Best Use* (HBU).

Belanja Negara Tahun 2021 yang Responsif dengan Pendekatan *Spending Better*

Dalam kondisi krisis akibat pandemi, peran belanja negara menjadi semakin krusial dalam hal perlindungan kesehatan masyarakat dari Covid-19, pelaksanaan program-program perlindungan sosial untuk menjaga daya beli, dan dukungan pada dunia usaha terutama UMKM dalam menopang pemulihan ekonomi nasional. Agar lebih efektif dalam melaksanakan perannya, belanja negara tahun 2021 dilaksanakan secara responsif dan fleksibel dalam mengikuti perkembangan situasi pandemi. Hal ini tercermin dari kebijakan efisiensi, realokasi, dan *refocusing* anggaran pada prioritas penanganan Covid-19 (*survival*) dan akselerasi pemulihan sosial-ekonomi (*recovery*). Di saat yang bersamaan, belanja negara juga diupayakan agar lebih optimal dengan menerapkan pendekatan *spending better* yang fokus pada pelaksanaan program prioritas, berbasis hasil (*result based*), dan efisiensi kebutuhan dasar.

Tabel 3.4. Realisasi Belanja Negara (dalam Triliun Rupiah), 2017-2021

Rincian	2017	2018	2019	2020	2021
Belanja Negara	2 007,35	2 213,12	2 309,28	2 595,48	2 786,41
Belanja Pemerintah Pusat	1 265,36	1 455,32	1 496,31	1 832,95	2 000,70
Belanja Kementrian/Lembaga (K/L)	765,13	846,56	873,43	1 059,62	1 190,81
Belanja Non Kementrian/Lembaga (Non K/L)	500,22	608,76	622,89	773,33	809,89
Transfer ke Daerah dan Dana Desa	741,99	757,79	812,97	762,53	785,71
Transfer ke Daerah	682,23	697,93	743,16	691,43	713,85
Dana Desa	59,77	59,86	69,81	71,10	71,85

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2017-2021

Belanja Negara Tahun 2021 terealisasi sebesar 101,32 persen atau Rp 2.786,41 triliun, sedikit lebih tinggi dari yang dianggarkan pada APBN 2021. Dari nominal tersebut, sebesar 71,8 persen atau sebesar Rp 2.000,70 triliun merupakan Belanja Pemerintah Pusat dan 28,20 persen atau sebesar Rp 785,71 triliun untuk Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Realisasi Belanja Negara yang lebih besar dari yang dianggarkan disebabkan antara lain oleh dampak dari sumber dana PNBPN dan BLU yang lebih tinggi dari target APBN, meningkatnya

realisasi belanja subsidi energi karena harga minyak yang naik di atas asumsi APBN, dan konsekuensi pencatatan tambahan Realisasi Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) ke dalam Belanja Modal. Sebaliknya, komponen Transfer ke Daerah dan Dana Desa terealisasi lebih rendah dari APBN 2021.

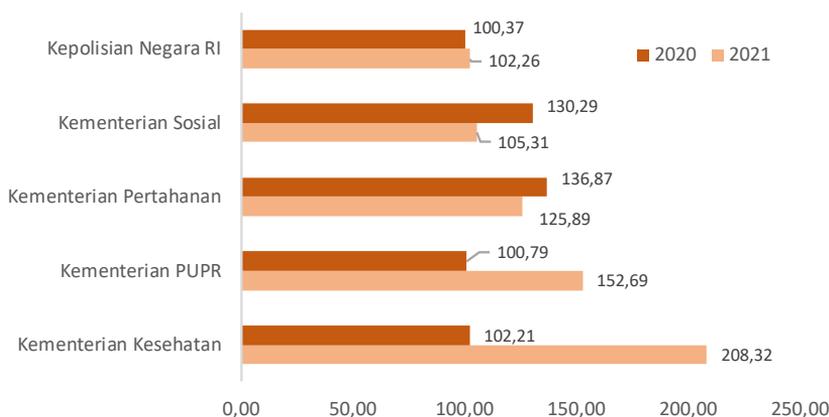
Secara umum, Belanja Pemerintah Pusat TA 2021 dilakukan dalam kerangka penanganan pandemi, pemulihan ekonomi, dan percepatan reformasi struktural. Setidaknya terdapat empat area yang menjadi fokus Belanja Pemerintah Pusat TA 2021. Pertama, melakukan efisiensi belanja melalui penajaman biaya operasional yang sejalan dengan proses kerja. Kedua, mendukung prioritas pembangunan untuk percepatan pemulihan ekonomi. Ketiga, optimalisasi teknologi dan informasi dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan dan penyediaan pelayanan. Yang terakhir adalah merancang ulang Sistem Perencanaan dan Penganggaran melalui peningkatan integrasi dan konvergensi kegiatan pembangunan antar Kementerian/Lembaga (K/L), pengurangan potensi duplikasi kegiatan antar K/L, dan penajaman rumusan program.

Belanja pemerintah pusat dikelompokkan menurut tiga klasifikasi yakni menurut organisasi/bagian anggaran, menurut jenis belanja, dan menurut fungsi. Realisasi belanja pemerintah pusat TA 2021 untuk setiap klasifikasi dijabarkan sebagai berikut:

1) Belanja Pemerintah Pusat menurut Organisasi/ Bagian Anggaran

Menurut organisasi atau bagian anggaran, belanja pemerintah pusat TA 2021 terbesar terealisasi untuk belanja non kementerian/lembaga yakni pada Belanja Anggaran Bendahara Umum negara (BA BUN) sebesar Rp 809,89 triliun, sementara sisanya untuk belanja kementerian/Lembaga dengan total realisasi sebesar Rp 1.190,81 triliun. Dari total realisasi belanja pada K/L selain BA BUN, terlihat lima K/L dengan realisasi belanja terbesar pada TA 2021 (Gambar 3.2) yakni

Gambar 3.2. Lima Kementerian Lembaga (K/L) dengan Realisasi Anggaran Terbesar (dalam Triliun Rupiah), 2020-2021



Sumber: Kementerian Keuangan

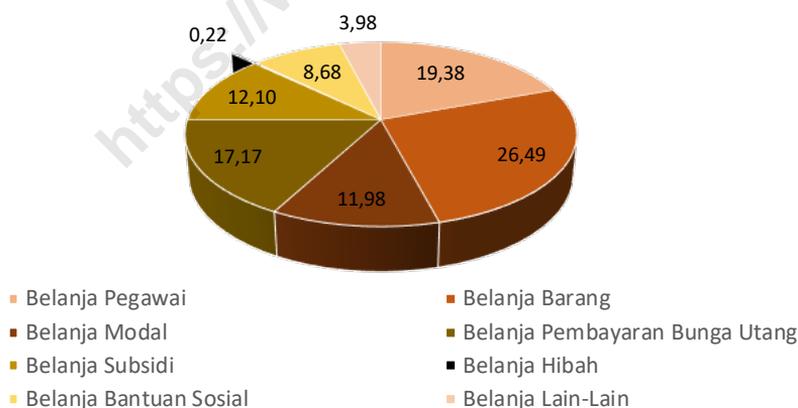
Kementerian Kesehatan (Rp 208,32 triliun), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Rp 152,69 triliun), Kementerian Pertahanan (Rp 125,89 triliun), Kementerian Sosial (Rp 105,30 triliun), dan Kepolisian Negara RI (Rp 102,26 triliun).

Sementara itu, jika dibandingkan dengan TA 2020, realisasi belanja dari Kementerian Kesehatan mengalami peningkatan yang signifikan yakni mencapai 247,12 persen dari pagu anggaran sebesar Rp 84,30 triliun. Hal tersebut membuat Kementerian Kesehatan menjadi kementerian dengan realisasi belanja terbesar menggeser Kementerian Pertahanan yang menjadi kementerian dengan realisasi belanja terbanyak di TA 2020. Belanja negara pada Kementerian Kesehatan masih difokuskan untuk penanganan pandemi yang selama tahun 2021 terjadi beberapa kali gelombang puncak penyebaran Covid-19.

2) Belanja Pemerintah Pusat menurut Jenis Belanja

Belanja pemerintah pusat menurut jenis belanja terdiri atas delapan kelompok seperti terlihat pada Gambar 3.3. Sekitar 63 persen belanja pemerintah pusat dilakukan untuk tiga jenis belanja yakni Belanja Barang sebesar 26,49 persen, Belanja Pegawai sebesar 19,38 persen, dan Pembayaran Bunga Utang sebesar 17,17 persen.

Gambar 3.3. Persentase Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Menurut Jenis Belanja, 2021



Sumber: Kementerian Keuangan

3) Belanja Pemerintah Pusat menurut Fungsi

Fungsi adalah perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional yang terdiri atas 11 kelompok fungsi. Realisasi belanja pemerintah pusat per fungsi pada TA 2021 dapat dilihat pada Gambar 3.4 dimana Fungsi Pelayanan Umum dan Fungsi Ekonomi merupakan fungsi dengan realisasi belanja terbesar yakni sebesar Rp 550,93 triliun dan Rp 461,42 triliun.

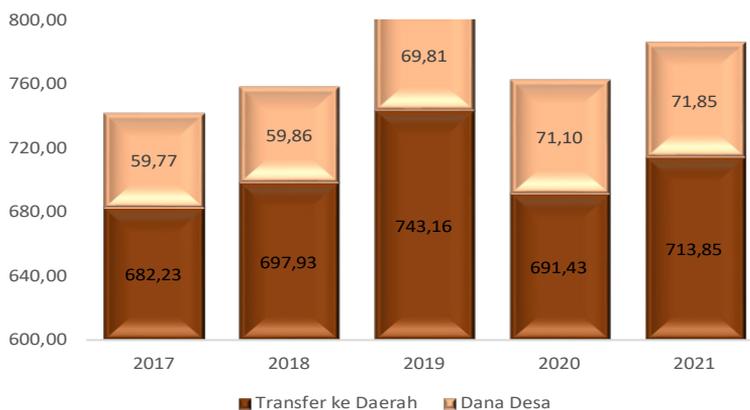
Gambar 3.4. Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi Tahun Anggaran 2021 (dalam Triliun Rupiah)



Sumber: Kementerian Keuangan

Selain untuk belanja pemerintah pusat, Belanja Negara juga digunakan untuk Transfer ke Daerah sebagai instrumen penting pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Selain itu, belanja negara untuk daerah juga dialokasikan untuk Dana Desa yang merupakan amanat undang-undang tentang desa dimana pelaksanaannya sudah dimulai sejak 2015. Dalam kurun waktu 2017 hingga 2021, belanja untuk daerah cenderung meningkat, kecuali di tahun 2020. Untuk TA 2021, realisasi Transfer ke Daerah sebesar Rp 713,85 triliun atau 98,67 persen dari jumlah yang ditetapkan dalam APBN sedangkan Dana Desa terealisasi sebesar Rp 71,85 triliun atau sebesar 99,80 persen dari jumlah yang ditetapkan dalam APBN.

Gambar 3.5. Realisasi Tranfer ke Daerah dan Dana Desa (dalam Triliun Rupiah), 2017-2021



Sumber: Kementerian Keuangan

Utang Negara masih Menjadi Komponen Utama Pembiayaan

Realisasi Pendapatan Negara TA 2021 yang melampaui target disertai dengan Belanja Negara yang dilakukan dalam kerangka *spending better* membuat defisit anggaran terealisasi lebih kecil dari jumlah defisit yang dianggarkan dalam APBN, yakni sebesar Rp775,06 triliun atau 77,02 persen dari nominal defisit pada APBN. Kebijakan defisit APBN sejalan dengan kerangka kebijakan fiskal tahun 2021 yang bersifat ekspansif dalam rangka mempercepat pemulihan ekonomi namun tetap konsolidatif dengan memperhatikan kondisi APBN yang sehat dan berkesinambungan. Defisit APBN Tahun 2021 berada pada level 5,70 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Dalam struktur APBN, Defisit Anggaran ditutupi dengan komponen Pembiayaan yang berdasarkan format dan struktur UU APBN 2021 terdiri dari enam jenis pembiayaan yakni Pembiayaan utang, Pembiayaan Investasi, Pemberian Pinjaman, Kewajiban Penjaminan, dan Pembiayaan Lainnya. Seperti terlihat pada Tabel 3.5, Pembiayaan Utang merupakan sumber utama pembiayaan dalam menutup defisit fiskal. Meskipun sering kali mendapat stigma negatif dari publik, utang merupakan alat untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, menjaga momentum, mengembangkan pasar keuangan, dan melibatkan peran generasi berikutnya. Dalam tatanan negara, utang merupakan hal yang lazim dilakukan baik oleh negara berkembang maupun maju dengan tujuan yang sama yakni mempercepat pembangunan di negaranya. Tentu saja, utang dapat menjadi alat untuk mencapai tujuan jika dikelola sesuai dengan prinsip pengelolaan utang yakni hati-hati, efisien, dan produktif.

Tabel 3.5. Realisasi Defisit Anggaran dan Rincian Pembiayaan Tahun 2021 (dalam Triliun Rupiah)

Uraian	Realisasi
Pendapatan Negara dan Hibah	2 011,34
Belanja Negara	2 786,41
Surplus (Defisit) Anggaran	(775,06)
Pembiayaan Utang	870,53
Pembiayaan Investasi	(142,46)
Pemberian Pinjaman	1,94
Kewajiban Penjaminan	(2,72)
Pembiayaan Lainnya	144,43
Pembiayaan Netto	871,72

Realisasi Pembiayaan Neto TA 2021 yakni sebesar Rp 871,72 triliun atau 86,62 persen dari jumlah yang ditetapkan dalam APBN. Sumber pembiayaan utama dalam menutup defisit dalam anggaran adalah pembiayaan utang yang sebesar Rp 870,53 triliun atau mencapai hampir seratus persen dari total

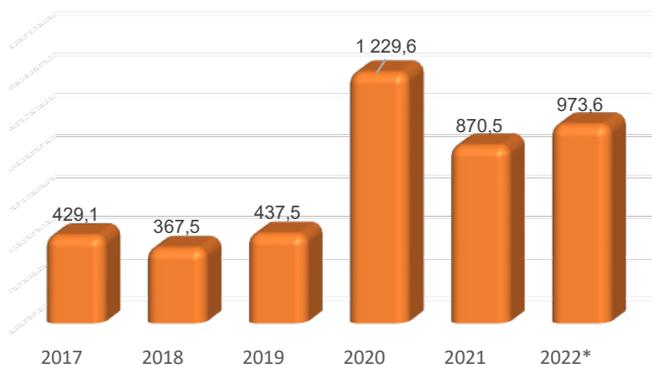
Pembiayaan Netto. Sumber utang utamanya berasal dari dalam negeri melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp 877,506 triliun. Selain itu, Utang Negara TA 2021 juga berasal dari Pinjaman Dalam Negeri dan Pinjaman Luar Negeri dengan nilai yang relatif kecil. Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri TA 2021 diarahkan untuk membiayai pengadaan Alutsista (Alat Utama Sistem Senjata) TNI dan kegiatan pengadaan Alat Material Khusus Polri.

Gambar 3.6. Realisasi Komponen Pembiayaan Utang (dalam Triliun Rupiah), 2021



Selama periode 2017 hingga 2021, realisasi pembiayaan utang negara mencapai puncaknya pada tahun 2020 yang mencapai hampir tiga kali lipat dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya. Di tahun 2021, Pembiayaan Utang menurun 29,2 persen menjadi 870,5 triliun. Penurunan persentase utang ini salah satunya dilatarbelakangi oleh Pendapatan Negara TA 2021 yang melebihi target. Kemudian untuk APBN 2022, Pembiayaan Utang dianggarkan sedikit meningkat menjadi Rp 973,6 triliun.

Gambar 3.7. Pembiayaan Utang (dalam Triliun Rupiah), 2017-2022*



Catatan: * Angka Sementara
Sumber: Kementerian Keuangan

Tantangan dalam Pengelolaan Fiskal Demi Terwujudnya APBN yang Berkelanjutan

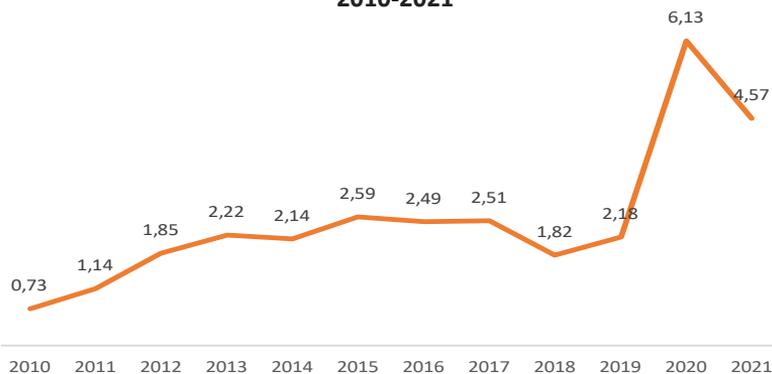
Kebijakan fiskal selama ini didesain untuk mendukung tercapainya target-target pembangunan demi terciptanya derajat kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Untuk mewujudkannya, pemerintah secara konsisten menerapkan kebijakan fiskal yang bersifat ekspansif yang terukur dan terarah untuk menstimulasi perekonomian nasional terutama akibat dampak pandemi. Konsekuensi logis dari implementasi kebijakan fiskal ekspansif tersebut yakni terdapatnya defisit anggaran pada APBN untuk membiayai pelaksanaan program-program prioritas demi tercapainya target-target pembangunan di tengah pendapatan negara yang belum memadai sepenuhnya untuk membiayai.

Berkaitan dengan hal tersebut, muncul beberapa tantangan pengelolaan fiskal yang perlu mendapat perhatian demi tercapainya pengelolaan fiskal yang berkelanjutan dan minim risiko baik jangka pendek, menengah, maupun panjang. Tantangan tersebut meliputi pelebaran defisit anggaran, rasio utang negara terhadap PDB yang menunjukkan tren yang meningkat, ruang fiskal yang terbatas, dan pelaksanaan konsolidasi fiskal di tahun 2023.

1. Pelebaran Defisit Anggaran

Seperti yang terlihat pada Gambar 3.8, sebelum terjadinya pandemi defisit anggaran masih berada dalam batasan yang diizinkan oleh undang-undang yakni kurang dari 3 persen dari PDB. Namun, secara umum terjadi tren pelebaran defisit anggaran sejak tahun 2010 dan mencapai puncaknya tahun 2020 ketika pandemi Covid-19 mulai melanda Indonesia. Meskipun di tahun 2020 hingga 2022 berlaku relaksasi batas defisit yang diizinkan melebihi 3 persen dari PDB, pelebaran defisit ini tetap saja meningkatkan risiko fiskal di masa yang akan datang. Realisasi defisit yang kian melebar diakibatkan oleh kebutuhan belanja negara yang terus meningkat ditengah tren menurunnya pertumbuhan pendapatan negara.

Gambar 3.8. Perkembangan Persentase Defisit Anggaran terhadap PDB, 2010-2021



Sumber: Kementerian Keuangan

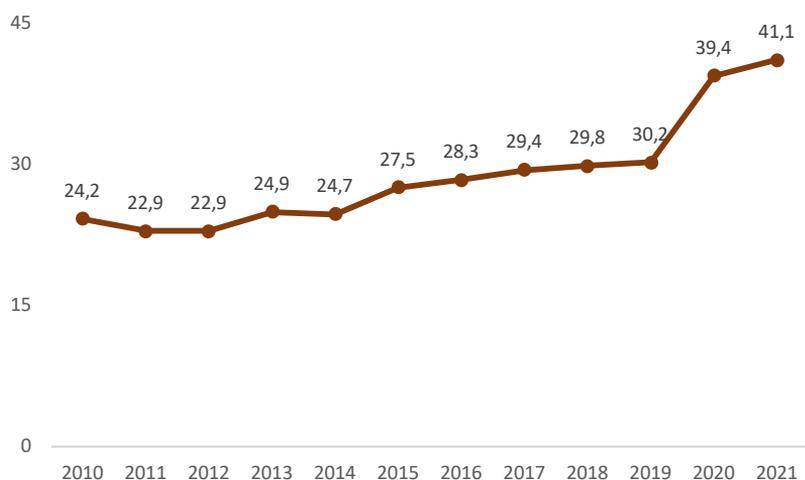
Ketidakmampuan pendapatan negara mengakomodir belanja negara yang terus meningkat juga ditunjukkan oleh keseimbangan primer yang terus menurun bahkan defisit. Keseimbangan primer merupakan selisih dari pendapatan negara dengan belanja negara diluar pembayaran bunga utang. Jika terjadi defisit keseimbangan primer maka tidak terdapat anggaran untuk membayar bunga utang sehingga sebagian atau seluruh bunga utang dibayar dengan penambahan utang baru. Keseimbangan primer mencapai negatif di tahun 2012 (-0,7 persen terhadap PDB). Pandemi membawa keseimbangan primer ke dalam defisit yang lebih dalam hingga mencapai -4,09 persen PDB di tahun 2020 (Kementerian Keuangan, 2021).

Defisit keseimbangan primer perlu diwaspadai karena jika berlangsung terus menerus berdampak pada penambahan stok utang negara. Jika stok utang negara semakin bertambah maka biaya utang baik berupa cicilan pokok maupun pembayaran bunga akan menambah risiko fiskal dan mengurangi ruang fiskal di masa yang akan datang. Oleh karena itu, penting untuk mendorong keseimbangan primer menuju ke arah yang positif dengan optimalisasi pendapatan dan efisiensi belanja.

2. Rasio Utang Terhadap PDB

Rasio utang negara terhadap PDB secara konsisten mengalami peningkatan setelah tahun 2012. Hal ini menunjukkan bahwa penambahan utang negara belum diikuti oleh pertumbuhan ekonomi yang optimal. Meskipun rasio utang masih berada dalam batas maksimal yang diamanatkan oleh undang-undang yakni kurang dari 60 persen, tren peningkatan rasio utang ini tentu saja akan menjadi beban fiskal di anggaran mendatang yang dapat mempersempit ruang fiskal.

Gambar 3.9. Rasio Utang Negara Terhadap PDB, 2010-2021



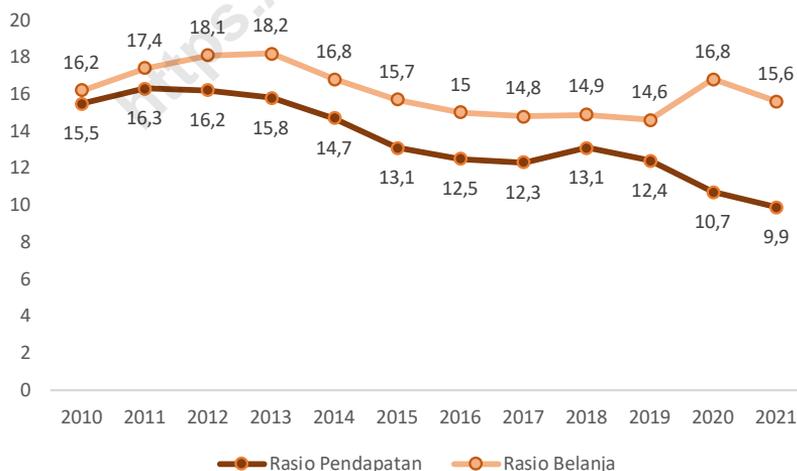
Sumber: Kementerian Keuangan

Terlihat pada Gambar 3.9 sejak tahun 2010, kenaikan rasio utang terhadap PDB paling besar terjadi pada tahun 2020 yakni meningkat sebesar 9,2 persen PDB dibandingkan dengan tahun 2019. Hal ini didorong oleh upaya pemerintah mengatasi krisis pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional yang mana terjadi relaksasi pelebaran defisit anggaran yang diizinkan di atas tiga persen terhadap PDB. Pembatasan mobilitas dalam pengendalian penyebaran virus berdampak pada penurunan aktivitas ekonomi yang signifikan sehingga menekan sumber-sumber pendapatan negara. Di saat yang bersamaan, belanja negara meningkat akibat adanya tambahan belanja pemerintah dalam upaya Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN).

3. Ruang Fiskal yang Terbatas

Selama periode 10 tahun terakhir kesenjangan fiskal (*fiscal gap*) Indonesia semakin melebar. Hal ini diindikasikan oleh menurunnya rasio pendapatan negara terhadap PDB sementara rasio belanja terhadap PDB cenderung stagnan. Pada tahun 2010, selisih rasio belanja dan pendapatan terhadap PDB sebesar 0,7 persen. Namun, di tahun 2021 kesenjangan fiskal telah mencapai 5,7 persen. Oleh sebab itu, optimalisasi pendapatan negara menjadi sangat penting untuk dilakukan karena melemahnya pendapatan negara berdampak pada terbatasnya ruang fiskal untuk mendukung pemberian stimulus dalam menjalankan program-program prioritas dan pencapaian target-target pembangunan.

Gambar 3.10. Rasio Pendapatan dan Belanja Negara terhadap PDB, 2010-2021



Sumber: Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal 2022

4. Pelaksanaan Konsolidasi Fiskal di Tahun 2023

Konsolidasi fiskal diartikan sebagai upaya pendisiplinan fiskal untuk menjaga keberlanjutan fiskal pada jangka menengah dan panjang. Untuk tahun 2023, konsolidasi fiskal dilakukan dalam rangka mengembalikan batas maksimum

defisit anggaran ke angka tiga persen terhadap PDB. Hal ini dilakukan pemerintah demi tercapainya pengelolaan APBN yang sehat dan berkesinambungan baik dalam jangka pendek, menengah, dan panjang.

Demi tercapainya konsolidasi fiskal, pemerintah berupaya untuk mengendalikan belanja, dan melakukan optimalisasi pendapatan negara, dan kreatif terhadap sumber-sumber pembiayaan. Sebagai langkah konkret, besaran belanja negara pada APBN 2022 ditargetkan berkurang sebesar 1,2 persen dibandingkan dengan APBN Tahun 2021. Belanja negara dilakukan dengan pendekatan *spending better* yang fokus terhadap program prioritas, berbasis hasil, efisiensi belanja kebutuhan dasar, dan mendorong sinergi antara kementerian lembaga. Sementara itu, Pendapatan negara dioptimalkan dengan melakukan reformasi perpajakan seperti perluasan basis pajak, perbaikan sistem perpajakan, dan menangkap aktivitas perekonomian yang berbasis Teknologi Informasi, dan Komunikasi (TIK). Dari sisi pembiayaan anggaran, pemerintah berupaya untuk inovatif dan fleksibel terhadap sumber-sumber pembiayaan serta menjaga komposisi utang dalam batas yang diizinkan oleh undang-undang.

<https://www.bps.go.id>

PROGRAM PEMERINTAH DALAM PENANGANAN COVID-19 DAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL (PC-PEN)



PAGU ALOKASI ANGGARAN PROGRAM PC-PEN 2020-2022



Sumber: Kementerian Keuangan



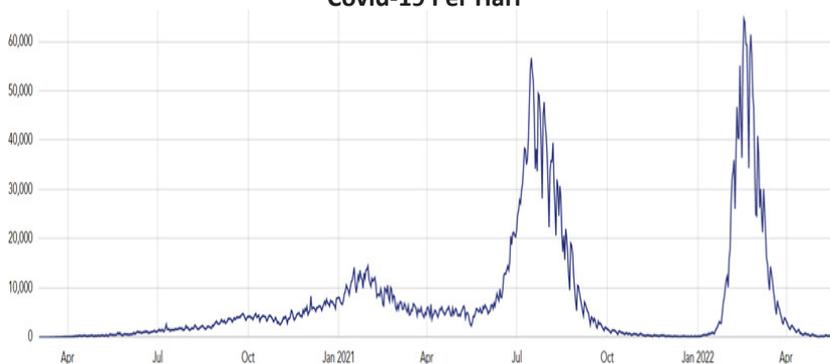
Sumber: Kementerian Keuangan

Gelombang Penyebaran Covid-19 di Tengah Upaya Mengakselerasi Pemulihan Ekonomi Nasional

Momentum pemulihan ekonomi nasional yang tercipta di akhir tahun 2020 menghadapi tantangan baru. Meskipun akselerasi program vaksin selama tahun 2021 membawa sentimen positif, munculnya gelombang penyebaran yang disebabkan virus Covid-19 varian baru membawa risiko ketidakpastian pada perekonomian nasional. Hingga pertengahan 2022 telah terjadi tiga gelombang penyebaran kasus Covid-19. Seperti yang terlihat pada Gambar 4.1, kasus Covid-19 di Indonesia kembali meningkat pada Desember 2020 dan mencapai puncak pada akhir Januari 2021 sebagai efek peningkatan mobilitas penduduk saat libur natal dan tahun baru. Memasuki bulan berikutnya, kurva penyebaran Covid-19 menurun dan kemudian mendarat hingga pertengahan tahun 2021 yang mana sejalan dengan implementasi kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang sebelumnya menggunakan istilah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Munculnya virus varian baru Delta yang jauh lebih cepat menular dan diikuti dengan meningkatnya mobilitas penduduk saat libur Idul Fitri memacu gelombang kedua penyebaran Covid-19. Bahkan, penambahan kasus jauh lebih cepat dengan puncaknya mencapai lebih dari 50 ribu kasus per hari pada sekitar pertengahan Juli 2021. Untuk menurunkan tingkat penularan virus, pemerintah menerapkan kebijakan 'PPKM Darurat' dan percepatan program vaksin yang berhasil membuat kurva penularan Covid-19 mendarat hingga awal tahun 2022. Namun, jumlah kasus harian terkonfirmasi positif Covid-19 kembali mencapai puncak pada Februari 2022 yang merupakan gelombang tiga akibat varian baru virus omicron dan ditambah adanya peningkatan mobilitas akibat libur natal dan tahun baru.

Gambar 4.1. Grafik Perkembangan Kasus Terkonfirmasi Positif Covid-19 Per Hari



Sumber: covid19.go.id

Peningkatan mobilitas penduduk selalu diikuti gelombang tinggi penyebaran Covid-19 di tengah masyarakat yang kemudian selalu diiringi oleh penerapan kebijakan pembatasan mobilitas. Kebijakan yang bertujuan untuk

menyelamatkan sektor kesehatan ini, tentu saja mendisrupsi proses pemulihan ekonomi yang sedang terjadi, Secara keseluruhan, ekonomi Indonesia tumbuh melambat di triwulan III 2021 saat terjadi gelombang tinggi penyebaran virus varian delta dan pemberlakuan 'PPKM darurat'. Sejumlah lapangan usaha kembali berkontraksi terutama yang bertumpu pada mobilitas penduduk seperti transportasi dan pergudangan dan penyediaan akomodasi dan makan minum.

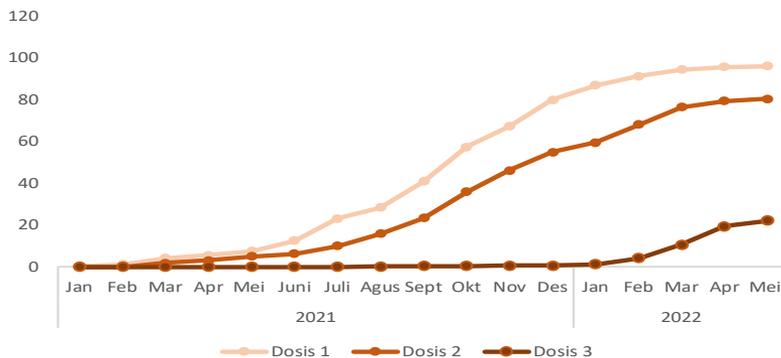
Gambar 4.2. Pertumbuhan Beberapa Lapangan Usaha, Triwulan II dan III 2021



Sumber: Badan Pusat Statistik

Meskipun terjadi tiga gelombang besar penyebaran Covid-19, percepatan program vaksinasi yang dimulai pada awal tahun 2021 menjadi strategi kunci pengendalian pandemi. Hingga Mei 2022, pelaksanaan vaksinasi dosis pertama hampir mencapai target yakni sebesar 96 persen. Sementara untuk cakupan vaksin dosis kedua telah mencapai 80,37 persen, dan vaksin dosis ketiga atau booster mencapai 22,14 persen. Cakupan vaksin yang semakin luas mendorong terciptanya kekebalan kelompok (*herd immunity*) yang berfungsi untuk mencegah penularan dan menurunkan kesakitan dan kematian akibat Covid-19, serta melindungi dan memperkuat sistem kesehatan secara menyeluruh.

Gambar 4.3. Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis 1, Dosis 2, dan Dosis 3, 2021-2022



Sumber: Kementerian Kesehatan

Kesuksesan percepatan vaksinasi tidak terlepas dari adanya dukungan anggaran yang berasal dari paket stimulus fiskal Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) 2021. Program ini merupakan kelanjutan dari tahun 2020 yang merupakan komitmen dan upaya pemerintah dalam menangani krisis kesehatan, ekonomi, dan sosial akibat pandemi Covid-19 dengan menggunakan instrumen Anggaran dan Pendapatan Belanja (APBN). Namun, jika di tahun 2020 tujuan utama kebijakan ini yakni penyelamatan kesehatan dan perekonomian, di tahun-tahun berikutnya lebih ditekankan kepada akselerasi pemulihan ekonomi nasional dan pengendalian pandemi.

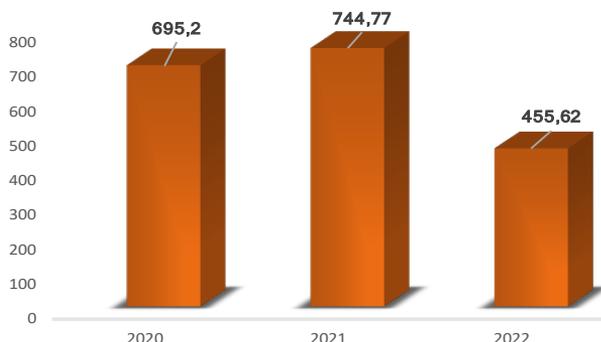
Klasterisasi, Alokasi, dan Realisasi Anggaran Program PC-PEN

Paket stimulus fiskal program PC-PEN diluncurkan pemerintah untuk memastikan bahwa penanganan krisis di sektor kesehatan dan pemulihan ekonomi masyarakat diimplementasikan secara proporsional. Hal ini mengingat kebijakan pembatasan pergerakan masyarakat untuk pengendalian penyebaran virus berdampak negatif pada menurunnya kegiatan ekonomi. Sebaliknya, segala pelonggaran untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional juga membawa konsekuensi pada meningkatnya penyebaran virus dan tingkat fatalitas penduduk. Program PC-PEN mengakomodir kedua sasaran tersebut dalam klasterisasi program-programnya yang secara garis besar memiliki tiga sasaran utama yakni:

1. Penanganan Covid-19, melalui Klaster Kesehatan.
2. Pemulihan ekonomi dari sisi permintaan (konsumsi) yang bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat terutama masyarakat rentan dan miskin melalui Klaster Perlindungan Sosial.
3. Pemulihan ekonomi dari sisi penawaran (produksi) yang bertujuan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kapasitas para pelaku usaha melalui Klaster Dukungan UMKM dan Korporasi, Insentif Usaha, dan Program Prioritas.

Program PC-PEN tahun 2021 menerima alokasi anggaran sebesar Rp 744,77 triliun, meningkat sebanyak 28 persen dari realisasi anggaran PC-PEN tahun 2020. Anggaran ini naik lebih dari dua kali lipat dibandingkan yang ditetapkan dalam Undang-Undang APBN Tahun Anggaran 2021 yang sebesar Rp 372,3 triliun. Menteri Keuangan menjelaskan bahwa kenaikan anggaran ini ditujukan untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional dan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi terutama di triwulan pertama 2021 melalui percepatan realisasi bantuan sosial. Selain itu, lonjakan anggaran PC-PEN 2021 juga disebabkan adanya peningkatan kebutuhan belanja di sektor kesehatan melalui program akselerasi cakupan vaksin dan program 3T (*tracing, tracking, and treatment*). Sementara untuk tahun 2022, program PC-PEN dianggarkan sebesar Rp 455,62 triliun yang ditujukan untuk mengatasi persoalan pada sektor kesehatan, memberi perlindungan sosial bagi masyarakat rentan, dan penguatan ekonomi.

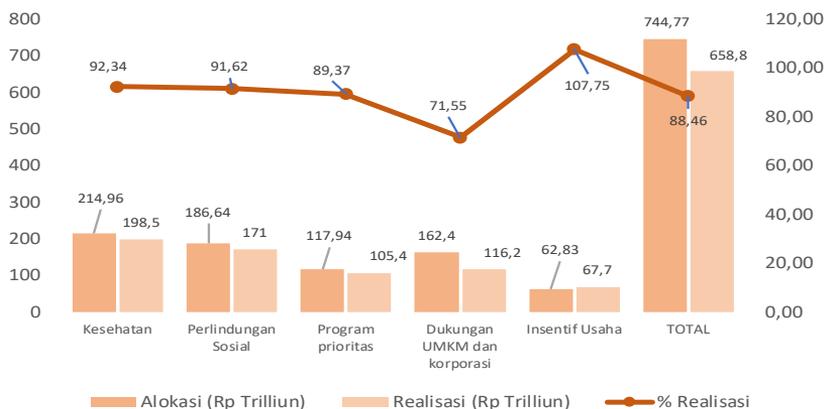
Gambar 4.4. Pagu Anggaran Program PC-PEN (Triliun Rupiah), 2020-2022



Sumber: Kementerian Keuangan

Anggaran yang dialokasikan pada program PC-PEN 2021 tidak terserap seratus persen yakni hanya sebesar 88,4 persen atau sebesar Rp 658,6 triliun. Mengutip pernyataan dari Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, ada beberapa alasan yang menjadi penyebab utama anggaran PC-PEN 2021 tidak terserap secara optimal. Pertama, implementasi program yang tidak berjalan sempurna dikarenakan respon yang rendah dari pihak penerima program. Sebagai contoh, program penjaminan kredit untuk korporasi tidak mendapat antusias yang terlalu baik dari mereka yang bisa memanfaatkan program ini. Selain itu, pengembalian dana sekitar Rp 30 triliun dari bank-bank yang menerima penempatan dana untuk penyaluran program PC-PEN dengan alasan kesulitan mencari orang yang membutuhkan dana juga membuat anggaran gagal terserap. Kedua, program yang tidak terlaksana karena pandemi Covid-19 itu sendiri. Gelombang penyebaran Covid-19 yang diakibatkan oleh varian Delta pada kuartal tiga 2021 menyebabkan banyak kegiatan yang dihentikan atau diperlambat untuk menurunkan tingkat penularan virus.

Gambar 4.5. Klasterisasi, Alokasi, dan Realisasi *) Anggaran Program PC-PEN 2021



Catatan : *) Data realisasi bersifat sementara berdasarkan transaksi harian berbasis kas dan akan final pada saat LKPP 2021

Sumber: Kementerian Keuangan

Klaster Penanganan Kesehatan mendapat alokasi anggaran PC-PEN paling tinggi yakni sebesar Rp 214,96 triliun dan terealisasi sebanyak 92,3 persen. Anggaran ini dialokasikan untuk membiayai perawatan pasien, pengadaan vaksin, insentif tenaga kesehatan, santunan kematian tenaga kesehatan, dan bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Selanjutnya ada program Perlindungan Sosial yang diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat terutama yang tergolong sangat miskin, miskin, dan hampir miskin. Dengan pagu anggaran sebesar Rp 186,64 triliun dan realisasi sebesar 91,62 persen, klaster ini mencakup Program Keluarga Harapan, kartu sembako, Bantuan Sosial Tunai, bantuan subsidi untuk kuota internet, diskon listrik, dan pengetasan kemiskinan ekstrim.

Anggaran untuk dukungan UMKM dan korporasi digelontorkan sebesar Rp 116,2 triliun dengan realisasi mencapai 71,5 persen dari pagu Rp 162,4 triliun yang diperuntukkan untuk membiayai BPUM (Bantuan Produktif Usaha Mikro), subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Non KUR, serta Penyertaan Modal Negara (PMN) pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Klaster Program Prioritas mencakup program padat karya Kementerian/Lembaga, pariwisata, dan fasilitas pinjaman daerah yang menyerap sebesar Rp 105,4 triliun atau 89,3 persen dari pagu Rp 117,94 triliun.

Dari lima klaster pada PC-PEN 2021, insentif usaha merupakan satu-satunya klaster yang memenuhi bahkan melebihi target penyerapan anggaran yakni sebesar 107,75 persen yang dipergunakan untuk Pajak Penghasilan (PPh) 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) kepada 106.000 pemberi kerja, PPh final DTP kepada 138.600 UMKM, pembebasan PPh 22 impor untuk 9.700 wajib pajak, pengurangan angsuran PPh 25 sebanyak 58.305 wajib pajak, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) properti DTP, PPnBM mobil, dan Bea Masuk DTP.

Program PC-PEN kembali dilanjutkan di tahun 2022 dengan alokasi anggaran Rp 455,62 triliun. Sementara klasterisasi mengerucut hanya menjadi tiga klaster yakni penanganan kesehatan, penguatan pemulihan ekonomi, dan perlindungan masyarakat.

Tabel 4.1. Klasterisasi, Alokasi, dan Realisasi Anggaran Program PC-PEN 2022

Klaster	Penanganan Kesehatan	Penguatan Pemulihan Ekonomi	Perlindungan Masyarakat
Pagu	Rp 122,54 triliun	Rp 178,32 triliun	Rp 154,76 triliun
Realisasi*	Rp 11,87 triliun (9,7 %)	Rp 9,22 triliun (5,2 %)	Rp 49,27 triliun (31,8 %)
Program	(1) Pembayaran klaim dan insentif tenaga kesehatan, serta klaim pasien (2) Insentif perpajakan vaksin/alat kesehatan (3) Penanganan Covid-19 melalui Dana Desa	(1) Sektor Pariwisata (2) Sektor Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) (3) Sektor Korporasi dan UMKM (4) Sektor Perpajakan	(1) Program Keluarga Harapan (PKH) Rp 14,15 triliun (2) Kartu Sembako: Rp 18,8 triliun untuk 18,8 juta KPM (3) BLT Minyak Goreng: Rp 5,8 triliun untuk 19,3 juta KPM (4) BLT Desa: Rp 7,47 triliun untuk 6,12 juta KPM (5) BT-PKLWN : Rp 1,7 triliun

Catatan : *) Realisasi per 28 April 2022.
Sumber : Kementerian Keuangan

Kolaborasi Pemerintah dalam Mendukung PC-PEN; Bauran Kebijakan untuk Mewujudkan Stabilitas Sistem Keuangan (SSK)

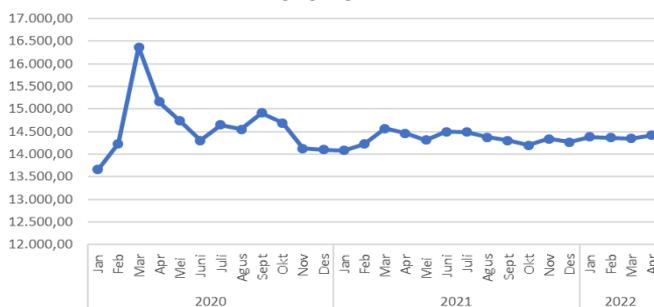
Kolaborasi dan sinergi pemerintah dalam proses pemulihan ekonomi nasional sangatlah krusial. Kementerian Keuangan selaku pemegang otoritas fiskal menggunakan instrumen APBN melalui program PC-PEN untuk menangani sektor kesehatan, melindungi para pelaku usaha, dan menjaga daya beli masyarakat terutama masyarakat miskin. Dengan kata lain, secara garis besar program PC-PEN memiliki sasaran yakni memulihkan dan menggerakkan kembali sektor riil.

Upaya mengembalikan gairah sektor riil dari dampak pandemi Covid-19 melalui program PC-PEN membutuhkan prasyarat kestabilan sistem keuangan nasional. Sistem keuangan yang tidak berfungsi dengan baik dapat menurunkan efektivitas kebijakan moneter, mengganggu kelancaran kegiatan perekonomian yang dapat berakibat pada perlambatan hingga kontraksi ekonomi. Untuk mewujudkannya, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan yang kemudian ditetapkan sebagai Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2020. Melalui UU ini, pemerintah memberi penguatan kewenangan kepada anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang terdiri dari Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Selaku anggota KSSK, Bank Indonesia menerapkan beberapa bauran kebijakan dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan demi mendorong percepatan pemulihan ekonomi, selama tahun 2021, diantaranya:

1. Memperkuat kebijakan nilai tukar rupiah untuk menjaga stabilitas nilai tukar. Seperti terlihat pada Gambar 4.5, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (US\$) bergerak lebih stabil di tahun 2021 dan 2022 dibandingkan saat pertama kali pandemi Covid-19 melanda Indonesia dimana nilai tukar rupiah turun signifikan ke level Rp 16.367 per US\$. Turunnya nilai tukar rupiah ini merupakan dampak kebijakan bank sentral AS (*The Fed*) yang secara mendadak memangkas suku bunga acuan ke level 0,25 persen.

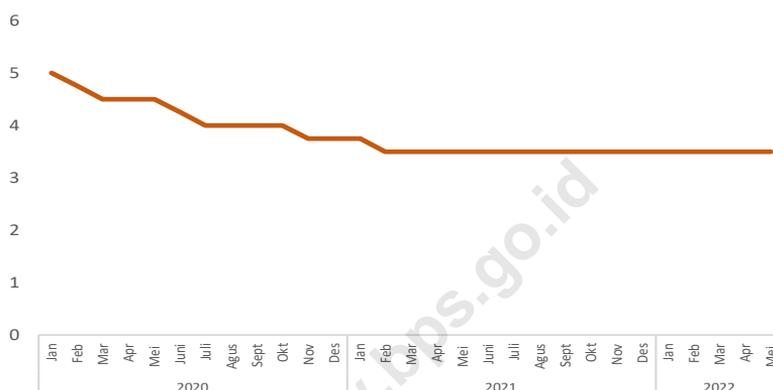
Gambar 4.6. Perkembangan Nilai Tukar Rupiah Terhadap US\$, 2020-2022



Sumber: satudata.kemendag.go.id

2. Melakukan pelonggaran likuiditas dengan menurunkan BI *7 Days Reverse Repo Rate* (BI7 DRR) yang diharapkan berdampak pada penurunan suku bunga perbankan. Sejak awal pandemi Covid-19 pada awal 2020, BI tercatat telah enam kali menurunkan suku bunga acuan BI7 DRR dan sejak Februari 2021 dijaga pada level 3,5 persen.

Gambar 4.7. Perkembangan Bulanan BI 7 Days Reverse Repo Rate (BI7DRR), 2020-2022



Sumber: Bank Indonesia

Selain dengan menurunkan BI7 DRR, Bank Indonesia juga berkomitmen mendukung pembiayaan APBN melalui pembelian Surat Berharga Negara (SBN). Diharapkan kebijakan ini dapat menjadi sinergi dan kolaborasi yang efektif dengan Kementerian Keuangan untuk mempercepat pemulihan ekonomi.

3. Menerapkan kebijakan makroprudensial akomodatif untuk mendorong pembiayaan kepada dunia usaha, pemulihan ekonomi nasional, dan Stabilitas Sistem Keuangan (SSK).
4. Mempercepat digitalisasi sistem pembayaran yang diharapkan dapat mendorong integrasi ekonomi dan keuangan digital nasional demi mendorong permintaan domestik khususnya dari sisi konsumsi rumah tangga. Beberapa langkah yang ditempuh BI dalam melakukan digitalisasi pembayaran diantaranya perluasan penggunaan QRIS (*Quick Response Code Indonesia Standard*), peningkatan peserta, perluasan layanan pemanfaatan BI-FAST untuk transaksi antar bank yang lebih efisien, dan intensifikasi program elektronifikasi melalui digitalisasi bansos, elektronifikasi layanan pemerintah daerah, dan lain-lain.

Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku regulator industri jasa keuangan juga berkomitmen mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional. Salah satu langkah yang ditempuh OJK adalah melakukan restrukturisasi kredit atau pembiayaan untuk mendorong peningkatan penyaluran kredit. OJK melakukan relaksasi Batas Maksimum Penyaluran Kredit (BMPK) khusus untuk sektor kesehatan dan relaksasi ATMR (Aset

Tertimbang Menurut Risiko) bagi kredit atau pembiayaan sektor properti, kendaraan bermotor, dan kesehatan. Langkah merestrukturisasi kredit ini juga merupakan kebijakan yang diterapkan untuk membantu UMKM dalam mendapatkan pembiayaan untuk usahanya.

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), sebagai anggota KSSK juga berkomitmen dalam mewujudkan stabilitas sistem keuangan untuk percepatan pemulihan ekonomi yakni melalui program penjaminan simpanan. Di tahun 2021, Tingkat Bunga Penjaminan (TBP) diturunkan oleh LPS ke tingkat paling rendah sejak LPS beroperasi yang mendorong penurunan suku bunga kredit perbankan. Selain itu, LPS juga memberikan keringanan kepada perbankan selama pandemi berupa pelonggaran denda keterlambatan pembayaran premi penjaminan dan pelonggaran batas waktu penyampaian laporan. LPS juga berperan dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perbankan dengan melakukan penjaminan dana nasabah sebanyak 99,92 persen dari total rekening simpanan di perbankan.

Optimisme Pemulihan Ekonomi Diprediksi Masih Terjaga di Tahun 2022

Setelah terkontraksi sebesar 2,07 persen secara kumulatif di tahun 2020, perekonomian Indonesia kembali tumbuh 3,69 persen di tahun 2021. Bahkan, di kuartal empat tahun 2021 pertumbuhan ekonomi telah mencapai ke level pertumbuhan sebelum terjadinya pandemi yakni dikisaran lima persen (yoy). Keberhasilan ini terkait erat dengan intervensi berbagai kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah baik pada sisi kesehatan dan ekonomi. Setidaknya terdapat tiga langkah strategis yang dilakukan pemerintah yang memberi dampak besar pada proses pemulihan ekonomi. Pertama, percepatan program vaksinasi untuk memulihkan sisi kesehatan, menciptakan kekebalan komunitas terhadap virus, dan menurunkan tingkat penyebaran dan fatalitas virus. Kedua, program PC-PEN dengan alokasi anggaran yang meningkat dibandingkan dengan tahun 2020. Ketiga, reformasi struktural yang salah satunya melalui Undang-Undang (UU) Cipta Kerja yang diharapkan dapat memperbaiki iklim investasi dan menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan.

Terlihat pada Gambar 4.8, pada triwulan II 2021 untuk pertama kalinya pasca pandemi Covid-19 perekonomian Indonesia tumbuh positif yakni mencapai 7,07 persen. Pertumbuhan ini juga membawa nilai PDB riil (PDB atas dasar harga konstan 2010) melampaui nilai PDB riil pada triwulan IV 2019, periode sebelum pandemi melanda dunia termasuk Indonesia. Momentum pemulihan ekonomi pada semester pertama 2021 ini tertahan oleh adanya gelombang kedua Covid-19 yang diakibatkan oleh virus varian Delta. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan sebesar 3,51 persen. Namun, menggeliatnya kegiatan ekonomi pasca merebaknya Covid-19 varian delta, program vaksinasi yang terus digalakkan, dan sinergi kebijakan fiskal melalui PC-PEN dan kebijakan moneter berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi di triwulan IV 2021 yang mencapai level sebelum terjadinya pandemi yakni sebesar 5,02 persen. Kinerja ekonomi yang positif ini berlanjut ke tahun 2022 triwulan I, dimana ekonomi Indonesia tumbuh 5,01 persen.

Gambar 4.8. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (yoy), 2019-2022



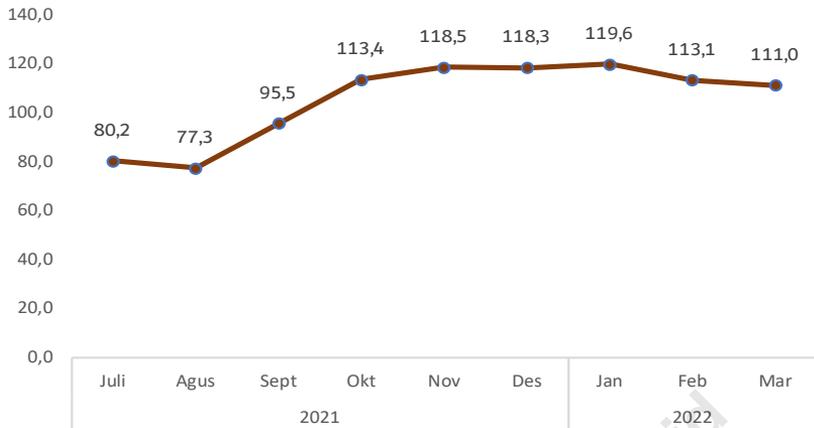
Sumber: Badan Pusat Statistik

Kinerja positif pemulihan ekonomi Indonesia di tahun 2021 diprediksi akan terus berlanjut di tahun mendatang. Berdasarkan laporan dari *Asian Development Bank* (ADB), perekonomian Indonesia diprediksi akan tumbuh 5,0 persen pada tahun 2022 dan 5,2 persen pada tahun 2023. Hal ini sejalan dengan angka pertumbuhan ekonomi triwulan I 2022 yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik yakni sebesar 5,01 persen. Laporan ADB juga menyebutkan bahwa konsumsi rumah tangga dan investasi terus tumbuh karena meningkatnya pendapatan dan pekerjaan serta perbaikan iklim investasi dan usaha. Kinerja positif juga diprediksi akan terlihat pada kegiatan manufaktur.

Kombinasi dua kebijakan kunci keberhasilan pengendalian kasus harian Covid-19, yakni PPKM dan percepatan cakupan vaksinasi, berdampak pada semakin pulihnya aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat sehingga mendukung berlanjutnya pemulihan ekonomi nasional. Sejalan dengan prediksi dari ADB atas ekonomi Indonesia, beberapa indikator yang biasanya digunakan sebagai informasi dini terhadap pergerakan PDB dan komponennya, seperti Indeks Keyakinan Konsumen (IKK), *Purchasing Managers' Index* (PMI) Manufaktur, dan Indeks Penjualan Riil (IPR) juga mencerminkan pemulihan ekonomi akan terus berlanjut di tahun 2022.

Optimisme konsumen terhadap kondisi perekonomian tetap terjaga di tahun 2022. Seperti terlihat pada Gambar 4.9, IKK yang merupakan salah satu indikator perkembangan konsumsi rumah tangga dalam Produk Domestik Bruto (PDB) sejak triwulan IV 2021 berada pada area optimis (indeks > 100). Hal ini dapat menjadi indikasi bahwa konsumsi rumah tangga yang memiliki share 55 persen terhadap PDB akan kembali menjadi komponen penggerak ekonomi untuk menciptakan proses pemulihan yang berkelanjutan.

Gambar 4.9. Indeks Keyakinan Konsumen, Juli 2021- Maret 2022



Sumber: Bank Indonesia

Tidak hanya konsumen, optimisme juga ditunjukkan oleh para pelaku usaha. *Purchasing Managers' Index* (PMI) yang menunjukkan optimisme pelaku bidang usaha manufaktur terhadap prospek perekonomian ke depan, sejak akhir tahun 2021 bernilai lebih dari 50 yang artinya sektor industri sedang bergerak ekspansif. Sebelumnya, pada kuartal 3 2021 kinerja industri manufaktur sempat tertahan oleh adanya gelombang virus varian delta yang diindikasikan dengan nilai PMI manufaktur dibawah 50.

Gambar 4.10. Purchasing Managers' Index (PMI) Industri Manufaktur, Juli 2021- Mei 2022



Sumber: HIS Market

Tantangan, Strategi, dan Peluang dalam Pemulihan Ekonomi Nasional

Vaksinasi menjadi kata kunci keberhasilan penanganan pandemi Covid-19 dan kinerja positif yang ditunjukkan oleh perekonomian nasional di tahun 2021. Jika catatan baik ini dipertahankan, di tahun mendatang bukan mustahil ekonomi Indonesia pulih dalam segala aspek dan sektor. Namun, status pandemi Covid-19 belum secara resmi dicabut oleh *World Health Organization* (WHO). Indonesia masih berpotensi akan menghadapi tantangan dalam melindungi kesehatan dan ekonomi masyarakat dari dampak pandemi Covid-19. Tantangan tersebut juga diiringi dengan beberapa peluang yang jika dimanfaatkan secara optimal dapat menjadi katalisator pemulihan ekonomi.

1. Tantangan dan Strategi dalam Pemulihan Ekonomi Nasional

a. Normalisasi Kebijakan Moneter dari Bank Sentral Amerika Serikat (*The Fed*)

Di penghujung tahun 2021, bank sentral Amerika Serikat mengumumkan akan melakukan normalisasi kebijakan moneter dengan menaikkan suku bunga acuan sebanyak empat kali di tahun 2022 dan dimulai pada akhir kuartal pertama. Kebijakan ini berpotensi membawa tekanan dan dilema bagi bank-bank sentral di negara berkembang, termasuk Indonesia. Jika BI selaku pemegang otoritas moneter mengambil langkah untuk tidak menaikkan suku bunga acuan maka muncul potensi aliran keluar modal asing (*Capital Outflow*) yang berakibat pada melemahnya nilai tukar rupiah. Namun, jika suku bunga acuan dinaikkan oleh BI maka berakibat pada pelemahan ekonomi yang kontradiktif dengan upaya pemerintah dalam melakukan percepatan pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19.

Mengutip pernyataan Gubernur Bank Indonesia, BI telah menyiapkan beberapa strategi untuk memitigasi dampak normalisasi kebijakan suku bunga oleh *The Fed*. Bank Indonesia akan mengurangi likuiditas secara bertahap terhadap perbankan.

Untuk memitigasi dampak normalisasi kebijakan *The Fed*, Bank Indonesia mengambil langkah awal pengetatan moneter dengan menaikkan Giro Wajib Minimum (GWM) secara bertahap pada Maret, Juni, dan September dari 3,5 persen menjadi 6,5 persen.

b. Penyerapan Anggaran PC-PEN yang Belum Optimal

Proses pemulihan ekonomi di tahun 2020 dan 2021 melalui program PC-PEN menghadapi tantangan dalam penyerapan anggaran PC-PEN. Hingga akhir tahun, realisasi anggaran PC-PEN tahun 2020 hanya mencapai 83,4 persen dari pagu anggaran sedangkan realisasi PC-PEN 2021 sedikit mengalami peningkatan yakni sebesar 88,4 persen. Beberapa faktor menjadi alasan akan hal ini mulai dari rendahnya antusiasme dari pihak yang berhak mendapat stimulus hingga faktor pandemi itu sendiri yang menghalangi beberapa program terlaksana akibat kebijakan PPKM.

Dalam program PC-PEN 2021, penyerapan paling rendah terjadi pada klaster dukungan UMKM dan korporasi yakni hanya 71,55 persen. Bantuan yang disalurkan melalui anggaran dalam klaster ini meliputi Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM), penempatan dana perbankan, subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan bantuan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang mayoritas berupa stimulus berkaitan dengan kemudahan mengakses kredit usaha. Rendahnya antusiasme dari para pelaku usaha UMKM untuk memanfaatkan bantuan ini salah satunya dikarenakan belum pulihnya permintaan barang dan jasa dari masyarakat yang membuat para pelaku usaha UMKM merasa belum perlu untuk menambah modal dalam menaikkan kapasitas produksi (data konsumsi masyarakat). Dengan kata lain, upaya untuk menciptakan daya ungkit ekonomi dari sisi permintaan (*demand*) harus lebih diintensifkan lagi.

Dilatarbelakangi oleh hal tersebut, pemerintah menerapkan beberapa strategi untuk mengoptimalkan realisasi penyerapan anggaran pada program PC-PEN 2021. Strategi pertama yakni dengan melakukan percepatan pelaksanaan program pada klaster perlindungan masyarakat untuk mendorong daya beli utamanya masyarakat rentan dan miskin. Per 28 April 2022, anggaran untuk perlindungan masyarakat telah terealisasi sebesar 31 persen. Diharapkan langkah ini dapat menjadi daya dorong untuk mengembalikan gairah dunia usaha termasuk UMKM untuk meningkatkan kapasitas produksi dan menambah modal usaha dengan memanfaatkan program yang ada pada PC-PEN.

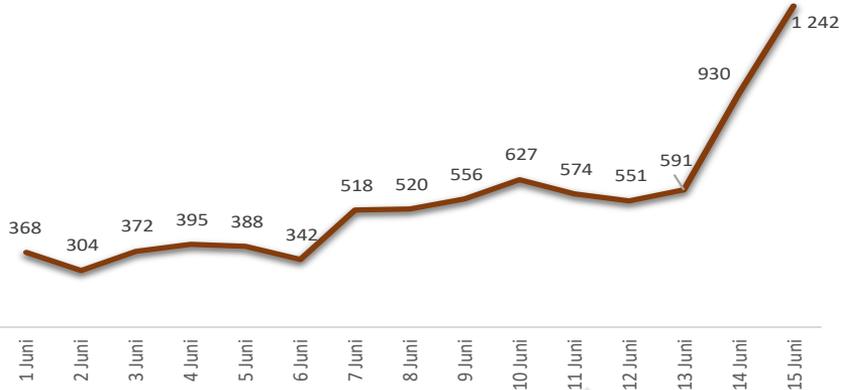
Sementara itu, pemerintah juga berusaha memutus keengganan perbankan dan dunia usaha dalam mengambil risiko penyaluran kredit dengan melakukan penjaminan pinjaman untuk sektor UMKM melalui PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) dan PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo). Dengan kebijakan ini, 80 persen risiko kredit ditanggung oleh perusahaan penjamin dan sisanya ditanggung perbankan. Melalui langkah ini diharapkan tidak terjadi lagi pengembalian oleh bank-bank yang mendapat penempatan dana untuk penyaluran PC-PEN.

c. Munculnya Virus Covid-19 Varian Baru

Proses pemulihan ekonomi nasional di tahun 2022 masih mendapat ancaman dari potensi munculnya virus varian baru. Setelah gelombang virus varian delta dan omicron, pada 6 Juni 2022 virus omicron subvarian baru BA.4 dan BA.5 pertama kali dilaporkan terdeteksi di Indonesia dimana terdapat empat kasus yang terdiri dari satu orang positif BA.4 dan tiga kasus positif BA.5.

Seperti terlihat pada Gambar 4.11, virus subvarian BA.4 dan BA.5 menyebabkan lonjakan kasus harian terkonfirmasi positif yang cukup signifikan. Meskipun virus subvarian baru ini tidak memiliki indikasi menyebabkan kesakitan yang lebih parah, hal ini tetap harus diwaspadai karena BA.4 dan BA.5 menyebar lebih cepat dibandingkan dengan subvarian sebelumnya, omicron BA.1 dan BA.2. Jika kasus positif semakin meningkat tidak terkendali, bukan tidak mungkin pemerintah akan kembali menaikkan level PPKM untuk membatasi pergerakan masyarakat yang pada akhirnya akan mendisrupsi proses pemulihan ekonomi.

Gambar 4.11. Jumlah Kasus Terkonfirmasi Positif Covid-19 pada Juni 2022



Sumber: covid19.go.id

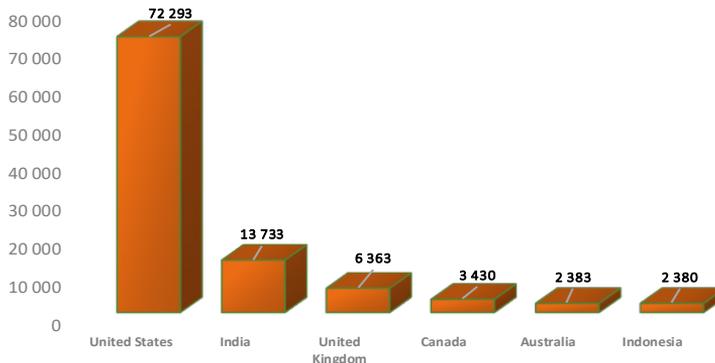
2. Peluang dalam Pemulihan Ekonomi Nasional

a. Momentum Percepatan Digitalisasi Ekonomi

Kebijakan pembatasan mobilitas selama pandemi Covid-19 mendorong percepatan adopsi Teknologi dan Informasi (TI) ke dalam berbagai sendi kehidupan termasuk kegiatan ekonomi. Munculnya momentum percepatan digitalisasi ekonomi ini dipicu oleh pergeseran perilaku konsumsi barang dan jasa masyarakat dan proses bisnis usaha dari konvensional menjadi berbasis teknologi. Jika dahulu konsumen lebih sering mengunjungi pusat-pusat perbelanjaan dalam melakukan pembelian barang dan jasa, saat ini kegiatan tersebut sudah beralih dalam jaringan (daring) internet.

Dari sisi dunia usaha, jumlah startup, yaitu perusahaan rintisan yang layanan maupun produknya berbasis teknologi, dapat menjadi indikator perkembangan ekonomi digital di Indonesia. Menurut data dari *Startup*

Gambar 4.12. Enam Negara dengan Jumlah Perusahaan *Start Up* Terbanyak di Dunia¹⁾



Catatan : 1) Data terakhir dibarukan pada 13 Juni 2022
Sumber : startupranking.com

Ranking, Indonesia menduduki peringkat keenam dengan jumlah startup terbanyak di dunia yang tentu saja memengaruhi aliran pendanaan dari investor. Pertumbuhan ekonomi digital dapat menjadi mesin pertumbuhan ekonomi yang potensial untuk pemulihan ekonomi pasca pandemi.

b. Reformasi Struktural

Sejarah mencatatkan bahwa momentum untuk melakukan reformasi sering kali tercipta di kala krisis melanda. Sebagai contoh krisis ekonomi 1998 memicu terjadinya reformasi sistem politik dari semi otoriter ke sistem yang lebih demokratis. Begitu juga di saat krisis akibat pandemi Covid-19, Indonesia berusaha mengambil momentum untuk melakukan reformasi struktural. Tujuannya untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang bersifat fundamental dan jangka panjang serta meningkatkan produktivitas dan daya saing.

Sejalan dengan hal tersebut, tema yang dipilih untuk Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) untuk APBN 2022 yakni Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural. Terdapat tiga poin yang menjadi fokus dari reformasi struktural. Pertama, pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui reformasi pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Kedua penyediaan infrastruktur yang meliputi pembangunan infrastruktur infrastruktur dasar, konektivitas digital, energi, pangan, industrialisasi. Terakhir, perbaikan institusi berupa reformasi birokrasi dan regulasi serta kemudahan berusaha.

Salah satu implementasi dari reformasi struktural secara besar-besaran yakni dengan disahkannya Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Tujuan disahkannya UU ini adalah untuk memperbaiki iklim investasi dan mewujudkan kepastian hukum. Dengan terobosan *Omnibus Law* sekitar 80 undang-undang disederhanakan dan direvisi menjadi satu UU Cipta Kerja yang berdampak positif pada penyederhanaan regulasi. Dengan semakin kondusifnya iklim investasi Indonesia maka akan lebih banyak tenaga kerja yang terserap, pengangguran berkurang, dan ekonomi dapat dipulihkan dan diakselerasi. Diperkirakan sekitar tiga juta lapangan kerja tercipta setiap tahun, yang sebelumnya hanya 2-2,5 juta lapangan kerja per tahun tanpa *Omnibus Law*.

INFLASI DAN DAYA BELI MASYARAKAT



ANDIL INFLASI MENURUT KELOMPOK PENGELUARAN TAHUN 2021 (persen)



KOTA DENGAN LAJU INFLASI TERTINGGI MENURUT PULAU TAHUN 2021 (persen)



Pemerintah merupakan salah satu pelaku kegiatan ekonomi. Mengutip dari buku “Ekonomi Publik” karangan Mohamad Khusaini (2019:17), terdapat 3 peran pemerintah dalam perekonomian. Peran pemerintah selaku penyelenggara pemerintahan dalam perekonomian yaitu pemerintah memiliki peran stabilisasi, peran lokasi, dan peran distribusi. Pemerintah sebagai pelaku ekonomi dalam peran stabilisasi adalah pemerintah sangat berperan dalam mengatur serta mengendalikan kegiatan ekonomi. Maka untuk mengendalikan keadaan dan kondisi ekonomi di dalam atau di luar negeri, pemerintah harus membuat kebijakan dan aturan. Dalam hal kebijakan moneter salah satunya adalah mengatur jumlah uang yang beredar. Uang beredar karena banyak atau sedikitnya uang yang beredar di masyarakat akan berdampak pada inflasi. Uang yang beredar sangat berpengaruh pada daya beli masyarakat karena jika uang yang beredar di masyarakat cukup besar maka daya beli masyarakat terjaga. Di samping itu, peran pemerintah yaitu untuk mengendalikan inflasi di dalam negeri dan menjaga agar harga kebutuhan masyarakat di dalam negeri selalu dalam keadaan stabil.

Dalam penghitungan inflasi sejak tahun 2020 terjadi perubahan dalam tahun dasar yang sebelumnya berpatokan pada tahun dasar 2012 saat ini digunakan tahun dasar 2018. Perubahan ini dikarenakan sudah terjadi pergeseran konsumsi dan kebutuhan di masyarakat yang lebih beraneka macam. Maka cakupan komoditas yang dipakai lebih banyak di tahun 2018 dibanding tahun 2012 terdiri dari 248-473 komoditas yang dikelompokkan ke dalam 11 kelompok pengeluaran rumah tangga dan 43 subkelompok pengeluaran. Sedangkan pada tahun 2012 hanya mencakup 225-462 komoditas yang dikelompokkan menjadi tujuh kelompok pengeluaran rumah tangga. Kota yang menjadi rujukan penghitungan inflasi juga berubah dari sebelumnya 82 kota maka pada tahun 2020 mencakup 90 kota terjadi penambahan 8 kota sebagai rujukan penghitungan angka inflasi.

Inflasi dihitung dari Indeks Harga Konsumen (IHK) yang merupakan salah satu indikator ekonomi yang digunakan untuk mengukur tingkat perubahan harga di tingkat konsumen. Inflasi sebagai salah satu indikator makro ekonomi untuk mengukur tingkat daya beli masyarakat. Tugas pemerintah selalu berusaha dan menjaga tingkat inflasi yang terjadi dimasyarakat, karena itu ketersediaan barang, distribusi dan harga barang selalu dijaga agar kebutuhan pokok masyarakat dapat terpenuhi.

Pergerakan Inflasi Inti dan Non Inti di Masa Pandemi

Terjadinya inflasi disebabkan karena terjadinya kenaikan harga barang kebutuhan penduduk di pasaran, dimana semakin tinggi tingkat kenaikan harga maka akan semakin dalam terjadi inflasi. Kondisi inflasi Indonesia dalam tiga tahun terakhir banyak dipengaruhi kondisi wabah Covid-19 yang terjadi hampir di semua negara di dunia yang begitu membawa dampak negatif di segala lini kehidupan.

Pada tahun 2020 terjadi perubahan dalam penghitungan IHK yang berdasarkan pada hasil Survei Biaya Hidup (SBH) 2018. Hasil tersebut selanjutnya digunakan untuk penghitungan inflasi dengan tahun dasar 2018. SBH tahun 2018 dengan SBH tahun-tahun sebelumnya terjadi perubahan dari segi cakupan komoditas, klasifikasi pengelompokan komoditas dan metodologi penghitungan IHK, serta cakupan kota. BPS melakukan perubahan penghitungan yang disesuaikan dengan kondisi yang terjadi di masyarakat. Karena penghitungan dengan model lama tidak lagi sesuai dan sudah terjadi pergeseran kebutuhan yang terjadi di masyarakat pada saat ini. Pada tahun 2020 cakupan kota menjadi sebanyak 90 kota dari sebelumnya 82 kota, pengelompokan komoditasnya berubah dari 7 kelompok menjadi 11 kelompok dan 43 subkelompok.

Gambaran kondisi angka inflasi yang terjadi di tahun 2020 saat kondisi negara dilanda wabah Covid-19 berdasarkan disagregasinya terlihat bahwa inflasi sangat rendah dipengaruhi oleh inflasi inti yang tercatat sebesar 1,60 persen, lebih rendah dibandingkan inflasi inti tahun sebelumnya. Rendahnya inflasi inti terutama dipengaruhi oleh menurunnya permintaan domestik seiring dengan kebijakan pembatasan mobilitas yang harus ditempuh untuk mencegah penyebaran Covid-19. Sumbangan inflasi inti di tahun 2020 sebesar 1,05 persen.

Pergerakan barang bergejolak sangat berfluktuasi, disebabkan karena bahan makanan tertentu harganya sewaktu-waktu dapat melambung tinggi. Usaha yang dilakukan pemerintah dalam menekan agar inflasi barang bergejolak tidak terlalu tinggi yaitu melakukan koordinasi dan penguatan kerjasama pusat dengan dan antar daerah. Pemerintah fokus untuk selalu menjaga pasokan bahan makanan sepanjang waktu dapat tersedia di setiap wilayah dan menjaga kelancaran distribusi antardaerah. Pada tahun 2020 komponen inflasi barang bergejolak mencapai 3,62 persen dan sumbangannya terhadap inflasi sebesar 0,59 persen.

Pada tahun 2020 inflasi komponen harga yang diatur pemerintah hanya mencapai 0,25 persen dan sumbangannya terhadap angka inflasi hanya 0,04 persen. Penurunan komponen harga yang diatur pemerintah disebabkan karena penurunan tarif angkutan udara, dan karena wabah Covid-19, banyak masyarakat yang mulai mengurangi/membatasi untuk bepergian antar kota/wilayah untuk berwisata. Selain itu harga solar dan bensin non subsidi juga diturunkan. Pemerintah menaikkan harga cukai rokok yang mengakibatkan kenaikan pada harga rokok kretek, rokok putih, dan rokok filter di pasaran yang berdampak pada penurunan konsumsi.

Pandemi Covid-19 masih terus berlanjut sampai memasuki tahun 2021 dapat dilihat dari uraian dibawah ini. Inflasi nasional yang terjadi di tahun 2021 meningkat dibandingkan inflasi yang terjadi di tahun 2020 walaupun masih rendah. Ini menandakan bahwa program vaksinasi dan mulai adanya pelonggaran mobilitas penduduk membuat kegiatan ekonomi mulai menggeliat. Capaian inflasi yang terjadi di sepanjang tahun 2021 setiap bulannya menunjukkan bahwa di bulan Februari, April, Mei, Juni, Juli, Agustus sampai dengan September banyak didorong oleh komponen inflasi inti. Terutama di bulan April dan Mei saat bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri kebutuhan masyarakat akan konsumsi atau permintaan bahan makanan

cukup tinggi membuat kelompok inflasi inti meningkat. Sumbangan di bulan April dan Mei komponen inflasi inti penyumbang andil tertinggi terhadap IHK masing-masing sebesar 0,09 persen dan 0,16 persen.

Inflasi yang terjadi di awal tahun 2021 tepatnya bulan Januari banyak dipengaruhi oleh komponen barang bergejolak yaitu mencapai 1,15 persen sumbangannya mencapai 1,19 persen. Tingginya komponen inflasi barang bergejolak karena terjadi kenaikan harga seperti daging sapi, cabe rawit, dan minyak goreng, selain itu juga diikuti dengan kenaikan bahan baku tahu dan tempe yaitu kacang kedelai. Menjelang akhir tahun pada bulan November dan Desember 2021 angka inflasi banyak didorong oleh komponen barang bergejolak karena adanya perkembangan atau kenaikan harga di berbagai komoditas, yang mana pada saat itu mengalami kenaikan, seperti harga telur ayam, cabe merah, minyak goreng, bawang merah, dan daging ayam. Inflasi komponen barang bergejolak di bulan November dan Desember 2021 masing-masing sebesar 1,19 persen dan 2,32 persen, dimana sumbangan dari komponen tersebut di 2 bulan terakhir masing-masing sebesar 0,20 persen dan 0,38 persen.

Pertumbuhan yang kuat di triwulan III dan IV tahun 2021 memberikan sinyal positif prospek ekonomi, disertai dengan adanya pelanggaran aktivitas penduduk membuat terjadinya peningkatan mobilitas masyarakat. Hal tersebut membuat komponen harga yang diatur pemerintah di bulan Oktober

Tabel 5.1. Inflasi, Sumbangan Inflasi Inti dan Non Inti, Tahun 2020-2022 (Januari-Juni)

Tahun dan Bulan	Inti		Harga yang diatur Pemerintah		Barang Bergejolak	
	Inflasi	Sumbangan	Inflasi	Sumbangan	Inflasi	Sumbangan
2020	1,60	1,05	0,25	0,04	3,62	0,59
2021	1,56		1,79		3,20	
Januari	0,14	0,10	-0,19	-0,03	1,15	1,19
Februari	0,11	0,07	0,21	0,03	-0,01	0,00
Maret	-0,03	-0,02	0,02	0,00	0,56	0,10
April	0,14	0,09	0,11	0,02	0,15	0,02
Mei	0,24	0,16	0,48	0,09	0,39	0,07
Juni	0,14	0,09	-0,21	-0,04	-1,23	-0,21
Juli	0,07	0,05	0,05	0,01	0,14	0,02
Agustus	0,21	0,14	0,02	0,00	-0,64	-0,11
September	0,13	0,09	0,14	0,02	-0,88	-0,15
Oktober	0,07	0,05	0,33	0,06	0,07	0,01
November	0,17	0,11	0,37	0,06	1,19	0,20
Desember	0,16	0,11	0,45	0,08	2,32	0,38
2022						
Januari	0,42	0,27	0,38	0,07	1,30	0,22
Februari	0,31	0,20	0,18	0,03	-1,50	-0,25
Maret	0,30	0,20	0,73	0,13	1,99	0,33
April	0,36	0,24	1,83	0,32	2,30	0,39
Mei	0,23	0,15	0,48	0,09	0,94	0,16
Juni	0,19	0,12	0,27	0,05	2,51	0,44

Sumber: Badan Pusat Statistik

mengalami inflasi sebesar 0,33 persen dengan sumbangannya 0,06 persen. Selain itu seiring dengan peningkatan permintaan angkutan udara menjelang akhir tahun dan hari Raya Natal, sejalan dengan peningkatan tarif transportasi, kondisi tersebut membuat komponen harga yang diatur pemerintah (*administered prices*) mendorong inflasi di bulan November dan Desember sebesar 0,37 persen dan 0,45 persen yang menyumbang sebesar 0,06 persen dan 0,08 persen pada akhir tahun 2021.

Wabah Covid-19 ternyata masih terus mewabah sampai memasuki tahun 2022, virus tersebut terus bermutasi sehingga muncul varian baru yaitu omicron. Varian baru ini tidak segenas varian delta tapi penularannya lebih cepat. Kondisi ini membuat perekonomian belum bisa sepenuhnya pulih dan berjalan normal seperti sedia kala. Pemerintah masih memberlakukan pembatasan tetapi tidak seketat saat di awal wabah dan protokol kesehatan masih terus dilakukan. Wabah Covid-19 yang masih bergerak, fenomena alam yang terjadi dan tidak bisa diprediksi, serta perang antara Rusia dan Ukraina menjadi hal yang harus diwaspadai di tahun 2022.

Selanjutnya, untuk menginvestigasi mengenai dampak dari kebijakan moneter terhadap inflasi di tahun 2022, tercatat angka inflasi masih aman dan cukup terkendali meskipun Indonesia belum bebas 100 persen dari wabah Covid-19. Capaian inflasi Januari 2022 dipengaruhi oleh pergerakan pada seluruh komponen inflasi dengan komponen inti menjadi penyumbang andil tertinggi terhadap inflasi Indeks Harga Konsumen. Komponen inti di bulan Januari 2022 mencapai 0,42 persen dan sumbangannya terhadap inflasi sebesar 0,27 persen. Tingginya inflasi di bulan tersebut dipengaruhi oleh pola musiman awal tahun dan terjadinya peningkatan mobilitas masyarakat. Komponen inflasi harga yang diatur pemerintah dan barang bergejolak pada bulan Januari 2022 masing-masing tercatat sebesar 0,38 persen dan 1,30 persen. Inflasi harga yang diatur pemerintah cukup rendah karena dipengaruhi oleh deflasi angkutan udara seiring harga pasca libur Natal dan Tahun Baru yang kembali normal. Selain itu juga dipengaruhi oleh kenaikan bahan bakar rumah tangga akibat penyesuaian harga LPG nonsubsidi. Sedangkan komponen inflasi barang bergejolak masih dipengaruhi oleh harga daging dan telur yang masih tinggi, termasuk minyak goreng.

Inflasi di bulan April 2022 lebih tinggi dibandingkan inflasi bulan sebelumnya, dan jika dilihat komponen inflasinya juga menunjukkan kenaikan semuanya dibandingkan bulan lalu. Komponen inflasi inti meningkat dibandingkan periode bulan sebelumnya, walaupun nilai inflasinya inti masih tinggi kondisi di bulan Januari 2022. Pola yang selalu berulang menjelang Ramadhan dan hari raya Idul Fitri dimana permintaan domestik selalu meningkat. Walaupun inflasi inti naik tetapi tetap terjaga di tengah permintaan domestik yang meningkat.

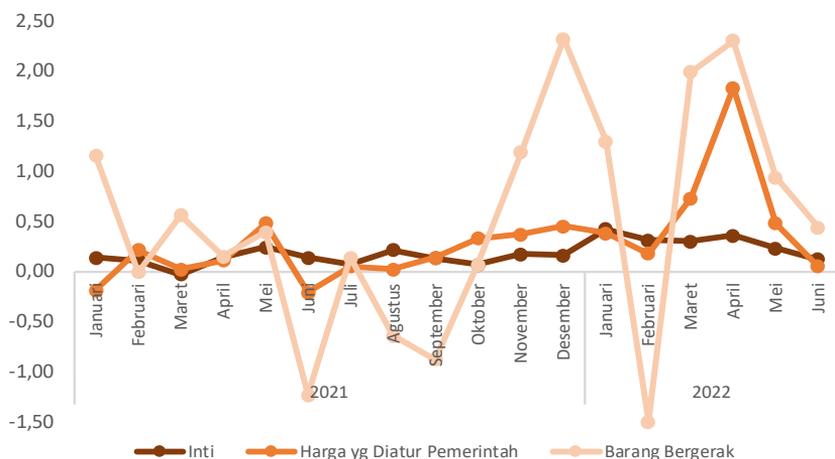
Komponen inflasi harga yang diatur pemerintah dan komponen harga bergejolak di bulan April 2022 juga mengalami kenaikan dibanding

bulan lalu masing-masing sebesar 1,83 persen dan 2,30 persen. Sumbangan kedua komponen tersebut terhadap inflasi nasional masing-masing sebesar 0,32 persen dan 0,39 persen. Inflasi komponen harga diatur pemerintah (*administered price*) sangat tinggi karena dipengaruhi harga minyak mendorong naiknya harga energi non subsidi seperti gas LPG 12 kilogram dan Pertamina. Selain itu, diizinkan mudik Lebaran setelah dua tahun dilakukan pembatasan menyebabkan terjadi mobilitas yang tinggi dan mendorong kenaikan tarif angkutan udara dan antarkota. Kenaikan inflasi pada komponen harga bergejolak disebabkan oleh meningkatnya permintaan seiring dengan peningkatan perayaan Hari Besar Keagamaan dan tingginya mobilitas sehingga banyak bahan makanan yang harganya melambung naik yaitu harga minyak goreng, daging dan telur ayam ras, serta ikan segar, peningkatan biaya pakan, dan kendala kondisi cuaca.

Indeks Harga Konsumen di bulan Mei 2022 mengalami inflasi sebesar 0,40, terjadi penurunan inflasi di bulan Mei 2022 dibanding bulan sebelumnya. Komponen inflasi inti dan non inti di bulan Mei 2022 mengalami penurunan semua dibanding bulan lalu. Inflasi komponen inti mencapai 0,23 persen dan menyumbang inflasi sebesar 0,15 persen, komponen harga yang diatur pemerintah mencapai 0,48 persen dan menyumbang inflasi sebesar 0,09 persen, selanjutnya untuk komponen barang bergejolak mengalami inflasi 0,94 persen dan menyumbang inflasi sebesar 0,16 persen.

Memasuki akhir bulan triwulan II 2022 tepatnya di bulan Juni 2022 terjadi peningkatan inflasi di bulan Juni 2022 dibandingkan dengan inflasi pada bulan sebelumnya. Meningkatnya inflasi di bulan Juni 2022 dipengaruhi oleh peningkatan inflasi kelompok barang bergejolak (*volatile food*) yaitu sebesar 2,51 persen, kenaikan utamanya karena masih tingginya harga minyak

Gambar 5.1. Inflasi Inti dan Non Inti Januari 2021 - Juni 2022



Sumber: Badan Pusat Statistik

goreng dan beberapa komoditas makanan dan hortikultura yang mengalami kenaikan/lonjakan harga. Sementara itu, komponen inflasi inti dan kelompok harga yang diatur pemerintah (*administered prices*) mengalami penurunan dibanding bulan lalu. Bank Indonesia terus mewaspadai risiko tekanan inflasi ke depan, khususnya terkait perkembangan harga komoditas global dan pangan dan dampaknya pada ekspektasi inflasi maka diperlukan kebijakan-kebijakan yang diperlukan untuk dapat mengendalikan inflasi. Bank Indonesia juga terus memperkuat koordinasi kebijakan dengan Pemerintah melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID).

Pergerakan Laju Inflasi Indonesia menurut Kelompok Pengeluaran di Saat Pandemi

Target inflasi yang ditetapkan pemerintah di tahun 2020 sebesar 3 persen, sedangkan inflasi yang dicapai dengan metode baru dan dengan kondisi yang terjadi saat itu hanya mencapai 1,68 persen dibawah dari target pemerintah. Rendahnya realisasi inflasi didukung oleh capaian inflasi seluruh kelompok pengeluaran yang terkendali. Inflasi yang rendah tersebut dipengaruhi oleh menurunnya aktivitas ekonomi sebagai dampak pandemi Covid-19 yang berakibat pada penurunan pendapatan yang pada gilirannya berimbas pada penurunan tingkat konsumsi masyarakat. Pasokan bahan makanan di dalam negeri sangat memadai dan harga juga cukup stabil.

Inflasi tahun 2020 menurut kelompok pengeluaran menunjukkan sebagian besar komponen kelompok pengeluaran mengalami inflasi. Kelompok pengeluaran yang mengalami inflasi tertinggi adalah kelompok pengeluaran untuk Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya mencapai 5,80 persen. Disusul oleh komponen pengeluaran Makan, Minum dan Tembakau sebesar 3,63 persen, komponen Kesehatan dan komponen Penyedia Makan dan Minum/Restoran masing-masing mengalami inflasi sebesar 2,79 persen dan 2,26 persen. Terdapat komponen kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi pada tahun 2020 yaitu komponen kelompok Transportasi dan kelompok Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan masing-masing mengalami deflasi sebesar 0,85 persen dan 0,35 persen.

Memasuki tahun 2021 wabah Covid-19 belum berakhir bahkan muncul varian baru sehingga pemerintah menetapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) kembali pada 11 Januari 2021 hingga 25 Januari 2021 dan dilanjutkan pada 26 Januari 2021 hingga 8 Februari 2021.

Inflasi yang terjadi di tahun 2021 mengalami sedikit kenaikan dibanding inflasi tahun 2020 yaitu menjadi 1,87 persen meningkat dibandingkan dengan inflasi IHK 2020 sebesar 1,68 persen (yoy). Target yang disepakati antara pemerintah dan BI untuk inflasi tahun 2021 adalah 3 ± 1 persen dan yang terjadi inflasi masih dibawah target pemerintah. Inflasi yang cukup rendah pada tahun 2021 tersebut dipengaruhi oleh permintaan domestik yang belum

kuat, pasokan bahan makanan yang memadai, dan beberapa harga kebutuhan pokok mengalami kenaikan seperti minyak goreng, daging sapi, telur ayam, cabe merah, dan cabe rawit.

Perkembangan inflasi yang terjadi di sepanjang tahun 2021 jika dilihat perkembangan per bulan, sempat mengalami deflasi di bulan Juni, dan September. Deflasi yang terjadi di bulan Juni mencapai 0,16 persen, melambat dibanding bulan sebelumnya. Deflasi yang terjadi di bulan Juni disebabkan karena permintaan bahan makanan dan kebutuhan lainnya menurun, beberapa komoditas mengalami penurunan harga atau harga kembali normal setelah perayaan Hari Besar Keagamaan Nasional. Tidak terlepas dari pengaruh permintaan domestik yang belum kuat, terjadi deflasi di bulan Juni 2021 diikuti pula kelompok pengeluaran yang juga mengalami deflasi yaitu Kelompok pakaian dan alas kaki (-0,12), kelompok pengeluaran transportasi (-0,35) dan kelompok pengeluaran Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan (-0,01).

Selanjutnya deflasi juga terjadi di bulan September 2021 mencapai 0,04 persen, disebabkan karena pengaruh permintaan domestik yang belum kuat dan juga penurunan tarif angkutan udara yang membuat kelompok pengeluaran Makanan, Minuman dan Tembakau dan kelompok pengeluaran Informasi, Komunikasi dan jasa keuangan juga mengalami deflasi. Deflasi kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 0,47 persen dan kelompok pengeluaran Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan 0,01 persen. Kelompok pengeluaran yang lain mengalami inflasi, dimana kelompok pengeluaran yang cukup tinggi angka inflasinya yaitu kelompok pengeluaran pakaian dan alas kaki (0,27 persen) dan kelompok pengeluaran makan dan minuman/restoran (0,25 persen).

IHK Desember 2021 meningkat sesuai pola musiman akhir tahun membuat inflasi naik. IHK Desember 2021 secara bulanan mengalami inflasi sebesar 0,57 persen, lebih tinggi dibandingkan realisasi inflasi bulan sebelumnya sebesar 0,37 persen. Perkembangan inflasi yang lebih tinggi di bulan Desember tersebut dipengaruhi oleh pergerakan kelompok pengeluaran inflasi barang bergejolak disebabkan peningkatan harga sejumlah bahan pangan, antara lain cabai merah, cabai rawit, daging dan telur ayam ras, serta minyak goreng. Selain itu juga dipengaruhi harga yang diatur pemerintah yaitu meningkatnya tarif aneka angkutan.

Inflasi Januari 2022 lebih rendah dibanding bulan Desember tahun 2021 yaitu mencapai 0,56 persen. Hampir semua kelompok pengeluaran mengalami inflasi kecuali kelompok pengeluaran Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan yang mengalami deflasi sebesar 0,13 persen. Memasuki tahun 2022 konsumsi masyarakat masih relatif lambat akibat daya beli masyarakat rendah walaupun masih didukung oleh program bantuan sosial penanganan Covid-19 yang masih terus berjalan.

Pada bulan Februari 2022 terjadi deflasi sebesar 0,02 persen yang dipengaruhi turunnya beberapa komoditas pangan, salah satunya harga minyak goreng dimana pemerintah menerbitkan peraturan tentang penetapan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng dan peningkatan produksi di tengah kenaikan harga CPO di pasar global.

Pergerakan angka inflasi di bulan Maret 2022 mencapai 0,66 persen dan tiga penyumbang terbesar inflasi Maret 2022 berdasarkan kelompok pengeluaran, yaitu kelompok makanan, minuman, dan tembakau (1,47 persen), kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya (1,14 persen), serta kelompok transportasi (0,42 persen). Tingginya angka inflasi berlanjut sampai bulan April 2022 dengan angka inflasi mencapai 0,95 persen. Inflasi yang terjadi di bulan April adalah yang tertinggi sejak Januari 2022. Penyumbang terbesar dari inflasi di bulan April 2022 adalah komoditas minyak goreng, bensin, daging ayam ras, tarif angkutan udara, serta ikan segar.

Inflasi yang terjadi di bulan Mei 2022 mencapai 0,40 persen, lebih rendah dibanding inflasi di bulan April 2022. Hal ini disebabkan adanya kenaikan permintaan di bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri terutama untuk komoditas makanan. Hampir semua kelompok pengeluaran mengalami inflasi di bulan Mei. Kelompok Pengeluaran yang mengalami inflasi tertinggi adalah Makanan, Minuman dan Tembakau mengalami inflasi sebesar 0,78

Tabel 5.2. Laju Inflasi Indonesia Gabungan 90 Kota Menurut Kelompok Pengeluaran Januari 2020 - Juni 2022 (2018=100)

Tahun/Bulan	Makanan, Minuman, dan Tembakau	Pakaian dan Alas Kaki	Perumahan, Air, Listrik dan Bahan Bakar Rumah Tangga	Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	Kesehatan	Transportasi
2020	3,63	1,01	0,35	1,03	2,79	-0,85
2021	3,09	1,53	0,76	2,66	1,68	1,58
Januari	0,81	0,11	0,03	0,15	0,19	-0,30
Februari	0,07	0,06	0,04	0,36	0,19	0,30
Maret	0,40	0,02	0,04	0,10	0,08	-0,25
April	0,20	0,19	0,07	0,26	0,18	0,00
Mei	0,38	0,52	0,03	0,27	0,07	0,71
Juni	-0,71	-0,12	0,07	0,17	0,03	-0,35
Juli	0,15	0,08	0,05	0,11	0,24	-0,01
Agustus	-0,32	-0,07	0,05	0,27	0,32	-0,05
September	-0,47	0,27	0,08	0,20	0,12	0,07
Oktober	0,10	0,15	0,08	0,13	0,06	0,33
November	0,84	0,09	0,14	0,35	0,01	0,51
Desember	1,61	0,22	0,10	0,24	0,16	0,62
2022						
Januari	1,17	0,43	0,51	0,79	0,24	0,02
Februari	-0,84	0,09	0,25	0,45	0,33	0,07
Maret	1,47	0,17	0,41	0,50	0,28	0,42
April	1,76	-0,01	0,28	0,66	0,31	2,42
Mei	0,78	-0,20	0,10	0,43	0,19	0,65
Juni	1,77	0,16	0,10	0,53	0,17	0,30

Lanjutan

Tahun/Bulan	Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	Pendidikan	Penyedia Makanan dan Minuman/ Restoran	Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	Umum
2020	-0,35	0,73	1,40	2,26	5,80	1,68
2021	-0,07	1,13	1,60	2,68	1,70	1,87
Januari	0,04	0,05	0,04	0,33	0,23	0,26
Februari	-0,03	0,06	0,00	0,28	-0,14	0,10
Maret	-0,03	0,05	0,01	0,17	-0,39	0,08
April	0,00	0,20	0,01	0,21	0,29	0,13
Mei	0,01	0,12	0,01	0,44	0,59	0,32
Juni	-0,01	0,23	0,03	0,24	0,35	-0,16
Juli	0,03	0,05	0,18	0,05	-0,07	0,08
Agustus	-0,01	-0,07	1,20	0,10	0,15	0,03
September	-0,01	0,11	0,10	0,25	0,04	-0,04
Oktober	0,04	0,04	0,02	0,12	0,02	0,12
November	0,00	0,18	0,00	0,22	0,37	0,37
Desember	-0,10	0,10	0,00	0,24	0,25	0,57
2022						
Januari	-0,13	0,41	0,08	0,36	0,62	0,56
Februari	-0,04	0,34	0,07	0,53	0,60	-0,02
Maret	0,00	0,17	0,01	0,32	1,14	0,66
April	0,00	0,20	0,00	0,55	0,75	0,95
Mei	0,03	0,30	0,01	0,51	0,32	0,40
Juni	-0,04	0,12	0,01	0,33	0,16	0,61

Catatan : Sejak Januari 2020, IHK berdasarkan pola konsumsi didapat dari Survei Biaya Hidup 2018 (2018=100) di 90 kota

Sumber : Badan Pusat Statistik

persen. Inflasi tertinggi kedua adalah kelompok pengeluaran untuk transportasi mencapai 0,65 persen. Selain itu satu-satunya kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi adalah kelompok Pakaian dan Alas Kaki mencapai 0,20 persen.

Laju inflasi di bulan Juni 2022 mencapai 0,61 persen. Penyumbang utama tingkat inflasi Juni 2022 berasal dari kelompok pengeluaran makanan, minuman dan tembakau dengan angka inflasi sebesar 1,77 persen. Tingginya inflasi pada kelompok makanan, minuman dan tembakau disebabkan karena kenaikan harga pada beberapa komoditas pangan seperti cabai merah, cabai rawit, dan bawang merah. Kenaikan harga pada komoditas pangan akibat gagal panen disebabkan karena curah hujan tinggi. Kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi yaitu kelompok Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan sebesar 0,04 persen. Dalam rangka mengantisipasi kenaikan komoditas pangan, pemerintah akan terus memantau dan mengantisipasi serta memitigasi risiko dari kenaikan harga kelompok pangan bergejolak melalui berbagai kebijakan untuk menjamin kecukupan pasokan dan keterjangkauan harga pangan bagi masyarakat.

Pergerakan Inflasi Berdasarkan Kelompok Pengeluaran dan Sumbangannya

Ketidakpastian yang tinggi di bidang perekonomian membawa kekhawatiran pemerintah dalam menangani inflasi di tahun 2020, namun pemerintah tetap berusaha agar inflasi dapat dikendalikan dan masih berada pada kisaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan BI. Berdasarkan angka inflasi yang terjadi di tahun 2020, ternyata sumbangan terbesar berasal dari kelompok pengeluaran untuk makanan, minuman dan tembakau yang menyumbang sebesar 0,91 persen dengan angka inflasi pada kelompok pengeluaran tersebut sebesar 3,63 persen. Sumbangan terbesar kedua adalah kelompok pengeluaran Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya mencapai 0,35 persen dengan angka inflasi sebesar 5,80 persen. Selain itu untuk kelompok pengeluaran Penyedia makan, dan minum/restoran menyumbang angka inflasi sebesar 0,20 persen dengan angka inflasi sebesar 2,26 persen. Pada tahun 2020 kelompok pengeluaran transportasi dan kelompok pengeluaran Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan mengalami deflasi masing-masing sebesar 0,85 persen dan 0,35 persen.

Beberapa kelompok pengeluaran di tahun 2020 mengalami deflasi yaitu kelompok pengeluaran transportasi mencapai 0,85 persen dan sumbangannya terhadap angka inflasi -0,11 persen. Kelompok pengeluaran lainnya yang mengalami deflasi adalah kelompok Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan sebesar 0,35 persen dan sumbangannya pada angka inflasi nasional -0,02 persen.

Laju inflasi Indonesia di tahun 2021 masih terkendali di tengah wabah Covid-19, pelanggaran PPKM beberapa daerah, dan mulai dilakukannya program vaksinasi bagi semua penduduk usia 18 tahun ke atas. Sepanjang tahun 2021 inflasi masih banyak dipengaruhi oleh beberapa komoditas bahan pangan yang harganya melambung yang dipicu oleh kondisi alam yang menyebabkan gagal panen. Selain itu komoditas lain yang cukup berperan penting menyumbang inflasi nasional di tahun 2021 yakni minyak goreng, dimana sejak Juli 2020, minyak goreng telah menunjukkan kenaikan harga hingga pemerintah harus mengendalikan harga jual minyak goreng di masyarakat.

Inflasi yang terjadi di tahun 2021 tidak berbeda jauh dengan kondisi inflasi di tahun 2020, dimana sumbangan terbesar adalah pada kelompok pengeluaran makanan, minuman dan tembakau menyumbang angka inflasi sebesar 0,79 persen dengan angka inflasi mencapai 3,09 persen. Sumbangan terbesar kedua berasal dari kelompok pengeluaran untuk penyedia makanan, minuman/restoran yang menyumbang sebesar 0,24 persen dengan angka inflasi pada kelompok pengeluaran tersebut sebesar 2,68 persen.

Kelompok pengeluaran yang menyumbang angka inflasi cukup tinggi adalah kelompok pengeluaran transportasi, dan kelompok pengeluaran perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan masing-masing menyumbang angka inflasi sebesar 0,19 persen dan 0,16 persen. Selain itu untuk kelompok

pengeluaran informasi, komunikasi dan jasa keuangan pada tahun 2021 mengalami deflasi sebesar 0,07 dan kelompok pengeluaran tersebut menyumbang angka inflasi tetap dari tahun lalu. Angka inflasi yang tetap terkendali di tahun 2020 dan 2021 tidak terlepas dari hasil pengendalian atas koordinasi yang kuat antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan dan kecukupan atas komoditi di setiap daerah.

Tabel 5.3. Sumbangan/Andil Kelompok Pengeluaran Terhadap Inflasi, Tahun 2020 dan 2021

Kelompok Pengeluaran	2020		2021	
	Inflasi	sumbangan	Inflasi	sumbangan
Umum	1,68		1,87	
Makanan, Minuman, Tembakau	3,63	0,91	3,09	0,79
Pakaian dan Alas Kaki	1,01	0,05	1,53	0,08
Perumahan, Air, Listrik dan Bahan Bakar Rumah Tangga	0,35	0,07	0,76	0,15
Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	1,03	0,06	2,66	0,16
Kesehatan	2,79	0,07	1,68	0,04
Transportasi	-0,85	-0,11	1,58	0,19
Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	-0,35	-0,02	-0,07	0,00
Rekreasi, Olah Raga dan Budaya	0,73	0,02	1,13	0,02
Pendidikan	1,40	0,08	1,60	0,09
Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	2,26	0,20	2,68	0,24
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	5,80	0,35	1,70	0,11

Sumber : Berita Resmi Statistik (BRS)

Laju Inflasi Kota-Kota di Indonesia

Di saat penghitungan inflasi menggunakan tahun dasar baru pada tahun 2020, dibarengi dengan terjadinya wabah Covid-19 di Indonesia yang sangat cepat penularan dan penyebarannya, membuat pemerintah mulai melakukan pembatasan kegiatan di masyarakat dan mulai berkurangnya mobilitas dan aktivitas masyarakat, konsumsi, produksi, dan distribusi menjadi terbatas. Namun pemerintah terus berupaya menjaga harga komoditas di masyarakat dengan cara menjaga ketersediaan pasokan bahan makanan di masyarakat meningkatkan kelancaran arus produksi dan distribusi bahan pangan. Dampak pada inflasi Indonesia di tahun 2020 terlihat rendah

dibanding inflasi tahun-tahun sebelumnya. Penggunaan tahun dasar baru dan diikuti dengan cakupan kota IHK pada tahun 2020 menjadi 90 kota ada penambahan 8 kota.

Penghitungan inflasi di tahun 2020 menggunakan tahun dasar baru dengan cakupan komoditi lebih banyak, dengan penghitungan tahun dasar baru, menunjukkan bahwa ada dua kota mengalami deflasi yaitu Kota Manado (-0,18 persen) dan Kota Manokwari (-0,89 persen). Namun, di tengah angka inflasi nasional yang rendah masih terjadi di beberapa kota mengalami inflasi cukup tinggi. Kota-kota dengan angka inflasi di atas 4 persen yaitu Kota Gunung Sitoli (5,32 persen), Kota Sintang (4,68 persen), Kota Meulaboh (4,24 persen), dan Kota Timika (4,12 persen).

Pulau Jawa menjadi pulau yang paling rawan dan sangat tinggi penyebaran wabah Covid-19, dari 26 kota di Pulau Jawa, 16 kota mengalami inflasi di atas angka inflasi nasional. Sisanya, 10 kota di Pulau Jawa memiliki angka inflasi di bawah angka nasional, salah satunya adalah Kota Jakarta, dimana selama ini Jakarta selalu mengalami inflasi di atas angka nasional di tahun 2020 mengalami inflasi di bawah angka nasional yaitu hanya mencapai 1,59 persen.

Gangguan Covid-19 pada inflasi Indonesia sebelumnya juga sudah terlihat pada rendahnya inflasi yang terjadi di tahun 2020. Memasuki tahun 2021 kondisi di dalam negeri masih disibukkan penularan wabah Covid-19 yang mana lonjakan kasus aktif varian Delta yang sangat cepat penularannya. Belum terkendalinya wabah tersebut membuat pemerintah melakukan langkah vaksinasi bagi semua penduduk tetapi tidak serta merta dapat dilakukan serempak. Vaksinasi Covid-19 sementara dilakukan secara bertahap karena Indonesia belum mampu membuat vaksin sendiri sehingga harus mengimpor dari beberapa negara, seperti vaksin pertama yang diimpor dari Negara Tiongkok. Selain itu perekonomian Indonesia dihadapkan pada berbagai tantangan mulai dari kenaikan *energyi disruptsi supply chain*, dan krisis *evergrande China*.

Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah serta BI dalam menangani inflasi agar tidak terlalu tinggi membuahkan hasil, dimana inflasi tahun 2021 tetap rendah dan berada di kisaran sasaran $3,0 \pm 1$, yaitu tercatat sebesar 1,87 persen. Inflasi yang rendah pada tahun 2021 dipengaruhi oleh permintaan domestik yang belum kuat sebagai dampak pandemi Covid-19. Kondisi yang terjadi di tahun 2021 di 90 kota di Indonesia menunjukkan bahwa semua kota mengalami inflasi. Sebagian besar kota-kota terutama yang berada di wilayah Timur Indonesia angka inflasinya di atas angka inflasi nasional.

Kota-kota dengan angka inflasi di tahun 2021 di atas 4 persen adalah Kota Sampit (4,62 persen), Kota Mamuju (4,39 persen), Kota Pare-Pare (4,09 persen), Kota Ambon (4,05 persen) dan Kota Tanjung Pandan (4,01 persen). Namun ada juga kota-kota dengan angka inflasi di bawah 1 persen yaitu Kota Tanjung Pinang (0,86 persen), Kota Maumere (0,55 persen) dan Kota Gunung Sitoli (0,54 persen).

Tabel 5.4. Laju Inflasi 90 Kota di Indonesia (2018=100), Tahun 2020-2022 (Januari-Juni)

Kota	2020	2021	2022					
			Jan	Feb	Mar	April	Mei	Juni
Meulaboh	4,24	2,07	0,95	-0,87	0,69	1,22	1,26	1,33
Banda Aceh	3,46	2,41	1,01	-0,34	0,59	1,23	0,92	0,76
Lhokseumawe	3,55	1,97	1,12	-0,99	0,85	1,25	1,03	0,45
Sibolga	2,42	1,86	1,53	-0,21	0,93	0,38	0,85	1,12
Pematang Siantar	2,78	2,12	0,96	0,18	0,77	0,39	0,62	1,36
Medan	1,76	1,70	1,04	-0,28	0,68	0,43	0,76	1,39
Padangsidempuan	3,27	1,49	0,90	0,37	1,11	0,78	0,77	1,29
Gunungsitoli	5,32	0,54	0,93	0,43	0,39	0,22	0,05	2,72
Padangsidempuan	2,12	1,37	1,03	0,09	0,72	0,60	1,38	1,16
Bukittinggi	2,02	1,69	0,95	-0,09	1,18	1,10	1,55	1,28
Tembilahan	3,30	1,09	1,37	-0,78	1,18	0,55	0,95	0,79
Pekanbaru	2,24	1,55	0,71	0,43	0,93	0,57	0,73	2,00
Dumai	2,88	1,66	0,68	-0,38	0,66	0,74	1,51	1,56
Bungo	2,32	1,65	1,39	-0,38	1,10	1,25	0,91	1,43
Jambi	3,09	1,67	1,13	-0,85	1,35	1,53	0,78	1,55
Palembang	1,50	1,84	0,94	-0,01	0,70	0,96	0,81	0,90
Lubuklinggau	1,97	1,63	0,83	-0,05	0,66	0,88	0,98	0,85
Bengkulu	0,89	2,42	0,54	-0,10	0,74	1,45	0,53	0,60
Bandarlampung	1,93	2,13	0,38	-0,40	0,93	0,81	0,58	1,22
Metro	2,53	2,74	0,55	-0,20	0,86	1,23	0,64	1,07
Tanjung Pandan	2,11	4,01	0,54	-2,08	1,29	2,58	2,24	-0,03
Pangkal Pinang	0,52	3,60	1,22	-0,53	1,10	1,82	0,85	-0,22
Batam	1,12	2,45	0,74	-0,48	0,73	1,12	0,79	0,84
Tanjung Pinang	1,66	0,86	0,38	0,08	0,36	0,84	1,02	0,80
DKI Jakarta	1,59	1,53	0,46	-0,05	0,44	0,70	0,06	0,32
Bogor	2,18	1,93	0,53	0,13	0,97	0,68	0,55	0,75
Sukabumi	1,84	1,71	0,59	0,11	0,67	0,78	0,25	0,58
Bandung	1,75	1,65	0,46	0,14	0,84	1,12	0,37	0,74
Cirebon	1,16	1,81	0,55	0,15	0,64	0,72	0,42	0,48
Bekasi	2,81	1,61	0,39	0,31	0,38	0,96	0,29	0,49
Depok	1,78	1,81	0,49	0,28	0,85	1,37	0,26	0,53
Tasikmalaya	1,61	1,17	0,45	0,48	1,04	1,36	0,76	0,41
Cilacap	1,71	1,88	0,66	0,07	1,19	1,68	0,59	0,71
Purwokerto	1,90	2,18	0,67	0,03	0,82	1,65	0,63	0,59
Kudus	1,24	1,59	0,77	0,06	0,81	1,27	0,38	0,66
Surakarta	1,38	2,58	0,41	0,32	0,93	1,47	0,71	0,89

Lanjutan

Kota	2020	2021	2022					
			Jan	Feb	Mar	April	Mei	Juni
Semarang	1,49	1,49	0,31	-0,08	0,66	0,86	0,53	0,93
Tegal	2,36	1,53	0,70	0,19	0,89	0,90	1,03	0,63
Yogyakarta	1,40	2,29	0,59	0,05	0,77	1,14	0,75	0,52
Jember	2,08	2,09	0,46	0,06	1,07	1,43	0,52	0,71
Banyuwangi	1,74	1,59	0,40	-0,15	0,92	1,06	0,49	0,61
Semenep	2,37	2,57	0,24	-0,16	1,09	0,95	1,10	0,45
Kediri	1,93	1,64	0,43	0,20	0,43	1,15	0,08	0,78
Malang	1,42	1,75	0,52	0,18	0,63	1,44	0,51	0,61
Probolinggo	1,88	1,76	0,45	-0,18	0,72	1,08	0,47	0,74
Madiun	1,86	2,00	0,44	0,03	0,78	0,97	0,58	0,66
Surabaya	1,33	2,71	0,45	0,04	0,70	0,96	0,49	0,46
Tangerang	1,18	1,81	0,46	0,11	1,00	0,97	0,05	0,59
Cilegon	2,62	2,19	1,00	-0,34	1,14	1,16	0,26	0,89
Serang	1,91	2,23	0,97	0,28	1,12	0,79	0,84	0,77
Singaraja	2,48	2,39	0,63	-0,84	1,27	0,89	0,58	2,20
Denpasar	0,55	2,01	1,09	-0,36	0,85	1,02	0,73	0,72
Mataram	0,58	2,28	0,66	-0,02	1,08	1,10	0,70	0,86
Bima	0,64	1,57	0,85	-0,25	0,59	1,37	0,48	1,11
Waingapu	1,51	1,28	0,92	0,47	0,19	1,05	0,28	0,20
Maumere	2,24	0,55	1,31	-0,53	0,59	0,54	0,87	0,83
Kupang	0,29	1,86	0,99	0,65	0,09	1,46	0,15	0,51
Sintang	4,68	1,88	0,86	0,32	0,88	1,58	1,07	0,49
Pontianak	2,11	1,16	0,87	0,28	0,43	1,05	0,71	0,07
Singkawang	2,72	2,55	0,66	0,15	0,20	1,30	1,04	-0,09
Sampit	1,62	4,62	0,58	-0,03	0,97	0,97	0,94	0,89
Palangkaraya	0,71	2,58	0,62	-0,01	0,69	0,97	0,93	0,87
Baru	1,44	2,68	0,92	-0,04	1,06	0,90	1,23	1,32
Tanjung	2,05	2,43	0,43	0,24	0,64	0,68	1,17	0,85
Banjarmasin	1,67	2,54	1,04	-0,49	0,94	1,22	0,53	0,71
Balikpapan	0,65	2,28	0,81	-0,51	1,09	1,33	0,52	0,53
Samarinda	0,86	2,05	0,91	-0,20	0,40	1,05	0,64	0,42
Tanjung Selor	1,96	2,33	1,35	0,01	1,50	0,60	0,77	1,78
Tarakan	1,15	2,83	0,25	-0,01	0,52	0,73	0,76	0,22
Manado	-0,18	2,65	0,17	-0,81	0,40	1,55	0,18	0,85
Kotamobagu	3,67	2,51	-0,66	0,16	0,87	1,43	-0,21	1,47
Luwuk	0,83	2,48	0,62	-0,04	0,92	1,31	0,88	1,01
Palu	1,81	2,14	1,11	-0,52	1,11	1,42	-0,19	0,29

Lanjutan

Kota	2020	2021	2022					
			Jan	Feb	Mar	April	Mei	Juni
Bulukumba	2,30	2,16	0,51	-0,26	1,12	0,62	0,19	0,46
Watampone	1,89	2,26	0,41	0,15	1,11	1,21	0,79	1,06
Makassar	2,13	2,26	0,56	-0,06	0,49	1,27	0,13	0,29
Pare-Pare	1,61	4,09	1,18	-0,02	0,55	0,71	1,88	0,11
Lapopo	1,21	2,96	0,36	-0,03	0,45	1,16	0,41	0,40
Kendari	1,37	3,05	0,29	-0,09	-0,07	1,80	1,39	-0,61
Bau-Bau	1,25	1,05	1,14	0,15	0,95	1,12	0,65	0,97
Gorontalo	0,81	2,59	-0,22	-0,37	1,25	1,22	0,37	1,65
Mamuju	1,78	4,39	1,21	-0,12	0,68	0,71	0,69	0,69
Ambon	0,09	4,05	0,34	-0,44	0,48	0,72	0,69	0,08
Tual	2,06	3,45	0,20	-1,12	-0,27	1,74	1,22	0,65
Ternate	2,13	2,38	-0,22	-1,11	0,34	0,82	0,27	0,33
Manokwari	-0,89	3,39	0,02	-1,43	1,34	1,07	1,54	0,71
Sorong	1,17	3,49	0,99	-1,30	0,22	1,02	0,61	0,39
Merauke	1,06	1,68	0,88	0,35	1,86	0,74	-0,02	-0,19
Timika	4,12	2,09	-0,42	-0,24	0,63	0,92	0,59	1,04
Jayapura	0,75	1,70	-0,04	-0,78	0,90	2,38	0,96	0,89
Indonesia	1,68	1,87	0,56	-0,02	0,66	0,95	0,40	0,61

Sumber : Badan Pusat Statistik

Tahun 2022 pemulihan ekonomi Indonesia mulai terjadi pergerakan, kondisi ini membuat angka inflasi di dalam negeri bergerak walaupun masih lambat, dimana pada Januari 2022 inflasi hanya mencapai 0,56 persen. Secara wilayah dari 90 kota ternyata 5 kota mengalami deflasi, dengan deflasi tertinggi terjadi di Kotamobagu mencapai 0,66 persen dan kedua adalah Kota Timika dengan deflasi mencapai 0,42 persen. Sedangkan untuk inflasi tertinggi terjadi di Kota Sibolga sebesar 1,53 persen, Selain itu juga di Kota Tembilahan dan Kota Bungo masing-masing sebesar 1,37 persen dan 1,39 persen.

Pada bulan Februari 2022 dari 90 kota ternyata sebagian besar kota tepatnya 53 kota mengalami deflasi dan sisanya mengalami inflasi. Kota-kota inflasi yang ada di Pulau Sumatera, sebagian besar dari 24 kota IHK yaitu sebanyak 18 kota mengalami deflasi. Deflasi terbesar terjadi di Kota Tanjung Pandan sebesar 2,08 persen. Inflasi tertinggi terjadi di Kota Kupang sebesar 0,65 persen. Jika dilihat dari 90 IHK kota di bulan Maret 2022 ternyata 88 kota mengalami inflasi dan kota sisanya mengalami deflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Kota Merauke sebesar 1,86 persen dan deflasi tertinggi terjadi di Kota Tual sebesar 0,27 persen.

Inflasi di bulan Maret dan April 2022 mulai merangkak naik. Kenaikan ini disebabkan pengaruh periodik yang terjadi setiap tahun di saat menjelang

bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri dimana beberapa bahan komoditi harganya merangkak naik dan permintaan masyarakat juga meningkat. Inflasi kota-kota IHK juga mengalami kenaikan, dari 90 kota IHK di bulan April, 57 kota IHK mengalami inflasi di atas angka nasional dan tidak ada kota yang mengalami deflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Kota Tanjung Pandan. Pada bulan Mei 2022 dari 90 kota IHK sebagian besar mengalami inflasi, dimana 70 kota mengalami inflasi di atas angka inflasi nasional dan 3 kota mengalami deflasi. Bulan Juni 2022, dari 90 kota IHK terdapat 85 kota yang mengalami inflasi dan 5 kota mengalami deflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Kota Gunungsitoli sebesar 2,72 persen dan deflasi tertinggi terjadi di Kota Kendari sebesar 0,61 persen.

Inflasi, Daya Beli dan Pertumbuhan Ekonomi di Masa Pandemi

Covid-19 menjadi wabah yang terlama sehingga membawa dampak negatif yang dalam di setiap negara termasuk Indonesia. Hampir semua sektor perekonomian terkena dampak. Indonesia berhasil menahan kontraksi ekonomi yang terjadi di tahun 2020 dan berlanjut di awal tahun 2021. Memasuki tahun 2021, upaya pemerintah dalam pengendalian pandemi berhasil mendorong ekonomi Indonesia di triwulan ke II-IV tahun 2021 mulai terjadi pergerakan perekonomian. Pertumbuhan ekonomi disokong oleh konsumsi pemerintah. Pertumbuhan ekonomi yang terjadi mulai menggerakkan dan mendorong peningkatan pada komponen konsumsi rumah tangga dan investasi. Perbaikan di sisi ekonomi terus diiringi dengan perbaikan di sisi kesehatan.

Kondisi kesehatan dan perekonomian yang terpuruk membuat pemerintah selalu berusaha agar daya beli masyarakat selama pandemi dapat terjaga. Upaya pengendalian inflasi yang melibatkan pemerintah dan seluruh stakeholder terkait berhasil menjaga inflasi di level 1,68 persen pada tahun 2020. Hingga tahun 2021, inflasi masih cukup rendah dan harga kebutuhan pokok cukup stabil.

Sektor informasi dan komunikasi tumbuh positif karena adanya pembatasan *physical distancing* dimana sebagian besar kegiatan dilakukan di rumah sehingga banyak masyarakat mengandalkan *handphone* sebagai alat komunikasi dan informasi yang membuat permintaan dan pembelian pulsa meningkat. Begitu juga yang terjadi pada sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial yang juga mengalami peningkatan disebabkan karena banyak masyarakat yang sakit akibat wabah Covid-19 membuat sektor tersebut mengalami peningkatan yang tinggi.

Sementara itu dalam hal investasi, PMDN dan PMA menunjukkan kinerja yang memuaskan karena pada saat pandemi hingga tahun 2021 masih terus tumbuh. Berbagai usaha yang dilakukan pemerintah dalam mendorong kegiatan investasi di Indonesia dengan mengeluarkan berbagai kebijakan yang intinya dapat memberikan kemudahan bagi investor dalam berinvestasi di Indonesia, seperti memberikan insentif pajak, bantuan kredit dan pinjaman, bahkan sampai diciptakannya Undang-Undang Cipta Kerja (*Omnibus Law*), pembentukan satgas khusus investasi luar negeri, dan kemudahan proses pengajuan izin usaha dan investasi di BKPM.

Masyarakat dan pelaku usaha juga memiliki peran strategis dalam pergerakan pemulihan ekonomi Indonesia. Pemerintah memberikan kemudahan dalam kebijakan fiskal maupun kebijakan moneter, kedua kebijakan ini dapat disambut dengan positif oleh masyarakat dan pelaku usaha serta dapat bergerak maju sesuai rancangan pemerintah guna memulihkan ekonomi Indonesia yang telah mengalami kontraksi.

Kebijakan dari pemerintah adalah mengalokasikan dana APBN untuk pemulihan ekonomi Indonesia bertujuan agar perekonomian dapat pulih dan kesejahteraan masyarakat terjaga. Kebijakan ini dilakukan dengan meningkatkan konsumsi dalam negeri, peningkatan aktivitas dunia usaha, serta menjaga kestabilan ekonomi dan ekspansi moneter.

Pemerintah lebih fokus kepada kebijakan fiskal dan moneter. Kebijakan fiskal yang dilakukan pemerintah mempunyai banyak ragamnya salah satunya insentif pajak yang sangat berpengaruh. Insentif pajak membuat masyarakat merasa keringanan akan kewajiban mereka dan tidak memengaruhi perekonomian masyarakat sehingga masyarakat tetap bisa memenuhi kebutuhan hidupnya.

Di awal tahun 2022 pemerintah sangat optimis akan pertumbuhan ekonomi yang akan lebih baik dibandingkan tahun 2021, dimana indikator ekonomi global menunjukkan arah perbaikan diperkirakan dapat menjadi faktor positif pendorong kinerja perekonomian nasional di tahun 2022. Perekonomian nasional terus menguat dengan PDB triwulan I-II 2022 tumbuh positif. Penyebaran varian baru Omicron yang sempat dikhawatirkan akan menjadi kendala perekonomian nasional, dapat diatasi dengan mulai dilakukan vaksin tahap ke 3 yaitu booster. Keberhasilan percepatan vaksinasi, turut berperan besar meminimalisasi dampak penyebaran tersebut terhadap perekonomian. Faktor eksternal yang perlu diwaspadai oleh pemerintah adalah dampak peningkatan harga komoditas dunia, termasuk eskalasinya akibat konflik Rusia-Ukraina. Kinerja perekonomian Indonesia sampai dengan kuartal ini menjadi bekal penting untuk perekonomian yang lebih kuat di tahun 2022 secara keseluruhan dan ke depannya.

Daya beli masyarakat terus membaik, ditandai dengan semakin kuatnya pertumbuhan konsumsi rumah tangga serta kondisi ketenagakerjaan nasional. Pada Triwulan I-2022, konsumsi rumah tangga mampu tumbuh 4,34 persen (yoy). Jika dibandingkan dengan Triwulan IV-2021 (q to q), konsumsi rumah tangga yang merupakan kontributor terbesar PDB nasional masih mencatatkan pertumbuhan positif.

Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha dan perbaikan ekonomi yang berkesinambungan juga turut mendorong aktivitas investasi, khususnya oleh sektor swasta. Optimisme dunia usaha yang membaik mampu mendorong pertumbuhan Penanaman Modal Domestik.

Pertumbuhan aktivitas investasi turut mendorong pemulihan sektor konstruksi sejalan dengan percepatan penyelesaian proyek strategis nasional dan proyek prioritas. Selain itu, upaya pemerintah melalui kebijakan PEN dalam meningkatkan lapangan kerja melalui program padat karya juga memperkuat tren pertumbuhan sektor konstruksi di daerah. Sementara itu, aktivitas pengerjaan proyek konstruksi oleh swasta juga semakin membaik.

Pengembangan hilirisasi manufaktur juga menstimulus pembangunan pabrik-pabrik baru di kawasan industri. Laju pemulihan sektor pariwisata semakin kuat. Kinerja sektor penunjang pariwisata seperti Sektor Transportasi serta Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum menunjukkan perbaikan.

Pemerintah dan BI serta pemerintah daerah selalu berusaha agar inflasi yang terjadi setiap tahun berada pada koridor yang telah disepakati oleh BI. Agar inflasi dapat terjaga dan terkendali, pemerintah pusat dan daerah selalu berkoordinasi dalam penyediaan pasokan bahan makanan dan pendistribusiannya, seperti selalu menjaga agar pasokan bahan makanan selalu tersedia atau terpenuhi di masing-masing wilayah, pengendalian harga untuk setiap bahan makanan dan komoditas barang tertentu, serta pendistribusian yang selalu dapat berjalan lancar.

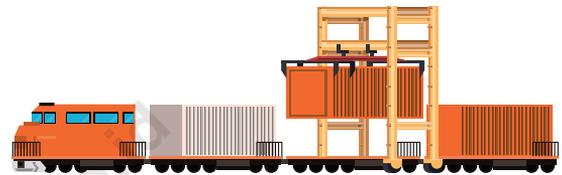
<https://www.bps.go.id>

PERDAGANGAN INDONESIA DALAM BEBERAPA TAHUN TERAKHIR

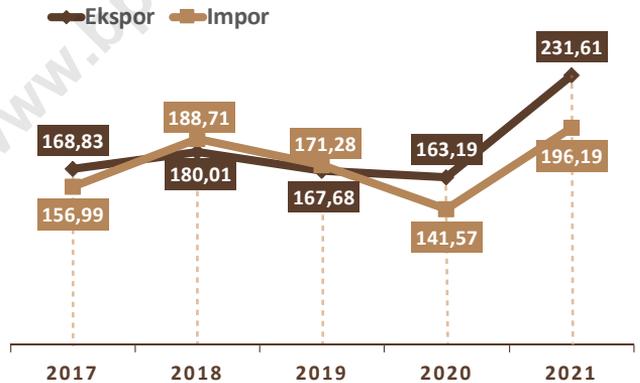


Neraca Perdagangan Indonesia 2021 surplus US\$ 35.419,6

menjadi surplus tertinggi dalam 15 tahun terakhir



Tren Nilai Ekspor dan Impor Indonesia (miliar US\$)



Kinerja ekspor dan impor Indonesia tahun 2021 tumbuh positif 41,92 persen dan 38,58 persen dibanding tahun sebelumnya

TIGA NEGARA TERBESAR

Impor (2021)



Ekspor (2021)



Setelah terpuruk di tahun 2020, perekonomian dunia kembali tumbuh positif seiring dengan penanganan penyebaran kasus pandemi Covid-19 dengan vaksinasi serta stimulus perekonomian. Nilai perdagangan internasional di tingkat global naik cukup tinggi mencapai US\$ 28,5 triliun, tumbuh positif sekitar 25 persen dibandingkan tahun 2020. Bahkan, angka tersebut juga naik sekitar 13 persen dibandingkan angka sebelum pandemi Covid-19 tahun 2019. Tren positif dari perdagangan global di tahun 2021 dipengaruhi oleh kenaikan harga komoditas, pelonggaran pembatasan akibat pandemi Covid-19, serta karena pemulihan permintaan yang kuat akibat stimulus ekonomi (UNCTAD, Februari 2022).

Perkembangan pandemi Covid-19 di Indonesia pada 2021 mengalami lonjakan hingga lebih dari 50 ribu kasus per hari pada pertengahan Juli 2021 akibat merebaknya varian delta. Kondisi tersebut memaksa pemerintah untuk menarik kembali rem darurat dengan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat 2021 yang membatasi aktivitas masyarakat secara lebih ketat. Kondisi tersebut berpengaruh pada melambatnya perekonomian Indonesia khususnya di triwulan III. Namun demikian, dengan akselerasi program vaksinasi nasional dan terus berlangsungnya stimulus program pemulihan ekonomi nasional, perekonomian Indonesia di tahun 2021 secara keseluruhan meningkat dibandingkan tahun 2020. Pertumbuhan tersebut tidak terlepas dari peran kinerja perdagangan internasional Indonesia yang impresif di tahun 2021.

Kinerja ekspor Indonesia yang baik berpengaruh pada meningkatnya surplus neraca perdagangan yang memperkuat perekonomian Indonesia secara keseluruhan. Pertumbuhan ekspor dan impor menjadi komponen PDB yang mengalami pertumbuhan tertinggi pada tahun 2021. Tumbuhnya nilai ekspor maupun impor dipengaruhi oleh faktor rendahnya nilai tahun lalu (*low base effect*) di saat awal pandemi Covid-19, serta kenaikan akibat pemulihan perekonomian dunia. Pulihnya ekonomi dunia berdampak pada permintaan dari berbagai negara. Di sisi lain, kondisi produksi masih berusaha pulih setelah tertekan pandemi Covid-19. Ketidakseimbangan pasar tersebut menyebabkan meroketnya harga-harga komoditas seperti batu bara, minyak kelapa sawit dan besi/baja. Secara umum, kenaikan harga komoditas di pasar global sangat berperan dalam meningkatnya nilai ekspor dan impor Indonesia.

Menjelang akhir 2021, pemerintah menerbitkan kebijakan untuk mempermudah pengurusan izin ekspor dan impor, yaitu Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor dan Permendag Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor. Dari dua kebijakan tersebut, mekanisme *single submission* melalui integrasi sistem *Indonesia National Single Window (INSW)* dan sistem *Intrade* mulai diterapkan. Kedua kebijakan tersebut merupakan produk hukum turunan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Diharapkan dengan integrasi tersebut menghasilkan data ekspor dan impor yang terintegrasi.

Memasuki tahun 2022, Indonesia kembali dihadapkan dengan lonjakan kasus Covid-19 akibat varian omicron yang lebih cepat penularannya. Selain masih menghadapi pandemi Covid-19, Indonesia juga mengalami tantangan lain dalam perdagangan internasional, misalkan tantangan untuk menjaga ketersediaan pasokan dalam negeri di tengah tingginya harga dan permintaan dari pasar global. Kondisi tersebut menyebabkan pemerintah sempat memberlakukan kebijakan larangan ekspor, antara lain untuk komoditas batu bara dan minyak sawit mentah. Di sisi lain, tantangan juga datang dari eksternal yaitu ketegangan geopolitik Rusia-Ukraina (merdeka.com, 21 Maret 2022). Namun demikian, kinerja ekspor dan impor Indonesia di triwulan I 2022 masih tercatat tumbuh positif dibanding periode yang sama di tahun sebelumnya, dipengaruhi oleh kenaikan harga komoditas.

Surplus Neraca Perdagangan Tertinggi dalam 15 Tahun Terakhir

**Tabel 6.1. Neraca Perdagangan Indonesia (Juta US\$),
2019 – Triwulan II 2022**

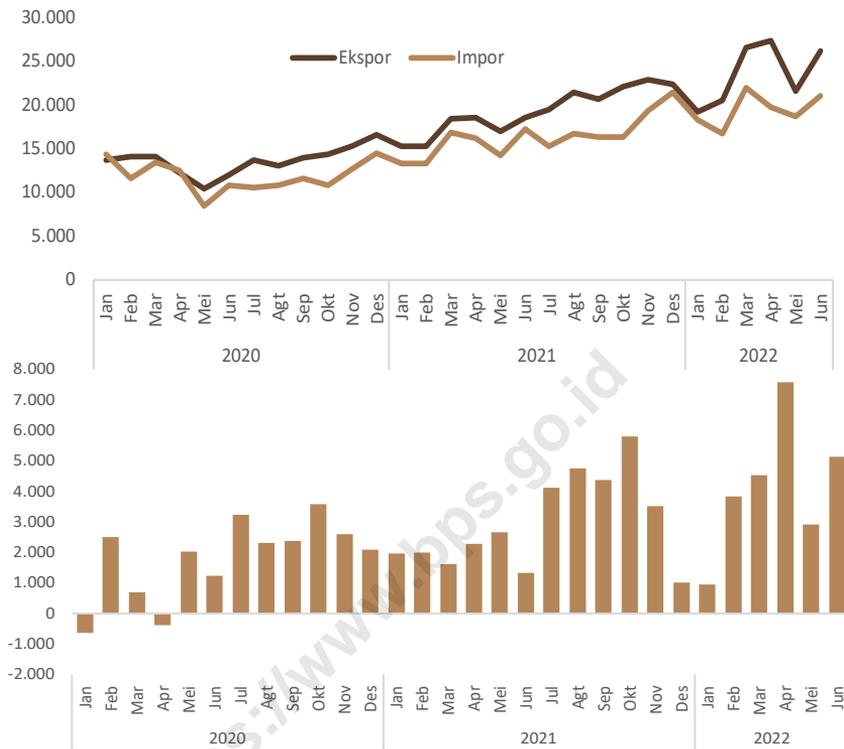
Komoditas	2019	2020	2021	Tw I 2022	Tw II 2022
Migas	- 10 096,0	- 6 005,7	- 13 281,7	- 5 322,6	- 6 361,8
Nonmigas	6 503,3	27 628,7	48 701,3	14 654,7	21 973,4
Jumlah	- 3 592,7	21 623,0	35 419,6	9 332,1	15 611,6

Sumber: Indikator Ekonomi, BPS

Kinerja perdagangan internasional Indonesia kembali mencatatkan surplus di tahun 2021. Neraca perdagangan Indonesia di sepanjang tahun 2021 mengalami surplus hingga US\$ 35,42 miliar. Angka tersebut naik 63,80 persen dibanding tahun sebelumnya dan menjadi surplus tertinggi dalam lima belas tahun terakhir. Namun, neraca perdagangan migas mengalami defisit hingga US\$ 13,28 miliar. Defisit neraca perdagangan migas tersebut lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Indonesia memang masih bergantung pada impor untuk memenuhi kebutuhan migas dalam negeri. Naiknya harga komoditas migas berpengaruh pada meningkatnya defisit neraca perdagangan migas tahun 2021.

Meskipun defisit neraca perdagangan migas lebih dalam dibanding tahun sebelumnya, surplus neraca perdagangan nonmigas yang mencapai US\$ 48,70 miliar dapat mengoreksi defisit tersebut. Berdasarkan analisis tren yang dilakukan Kemendag, diperkirakan neraca perdagangan Indonesia di tahun 2022 masih mengalami surplus tetapi nilainya lebih rendah dibanding 2021. Nilainya diprediksi antara US\$ 19,10 dan US\$ 19,60 miliar (Kemendagri, 2021).

Gambar 6.1. Nilai Ekspor-Impor dan Neraca Perdagangan Indonesia (Juta US\$), 2020 – Triwulan II 2022



Sumber: Indikator Ekonomi, BPS

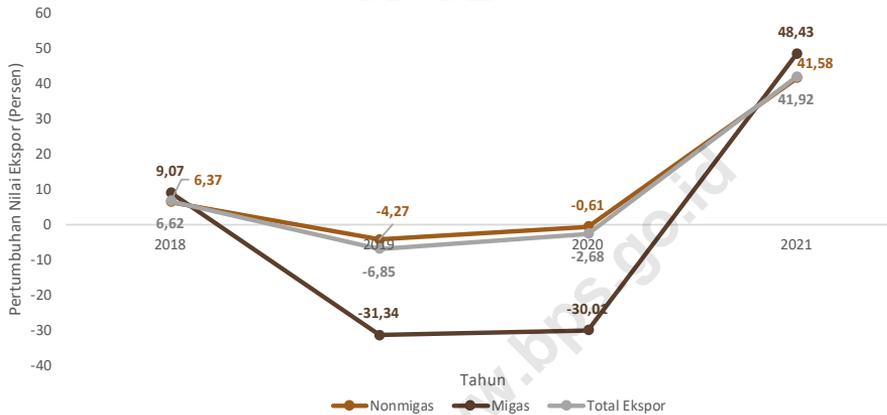
Nilai ekspor dan impor di sepanjang 2021 menunjukkan tren positif, mengindikasikan kinerja ekonomi Indonesia di masa pandemi Covid-19 tahun 2021 membaik dibanding ketika pandemi tahun 2020. Pertumbuhan nilai ekspor yang lebih tinggi dibanding impor berdampak pada neraca perdagangan yang terus tercatat surplus di sepanjang bulan di tahun 2021. Dari Gambar 6.1 dapat dilihat bahwa defisit neraca perdagangan terakhir tercatat pada bulan April 2020. Surplus neraca perdagangan tertinggi terjadi pada Bulan Oktober 2021 mencapai US\$ 5,80 miliar, didorong oleh peningkatan kinerja ekspor produk manufaktur dan tingginya harga komoditas unggulan Indonesia. Selain itu, pelonggaran PPKM juga mendorong pertumbuhan ekonomi di dalam negeri (Kemendagri, 2021).

Surplus neraca perdagangan masih berlanjut hingga memasuki tahun 2022. Tercatat pada triwulan I 2022 surplus neraca perdagangan Indonesia mencapai US\$ 9,33 miliar, lebih tinggi dibanding periode yang sama di tahun 2021 yaitu sebesar US\$ 5,52 miliar. Tren surplus masih berlanjut hingga triwulan II 2022 hingga mencapai US\$ 15,61 miliar dan diprediksi masih akan terus berlanjut di bulan-bulan berikutnya seiring dengan masih berlanjutnya

tren kenaikan harga komoditas. Namun demikian, terdapat beberapa faktor yang membatasi surplus tersebut, antara lain lonjakan harga minyak, larangan ekspor kelapa sawit, dan meningkatnya impor seiring dengan pelonggaran PPKM (bisnis.com, 14 Juni 2022).

Ekspor Indonesia Naik Hingga 41,87 Persen

Gambar 6.2. Pertumbuhan Nilai Ekspor Indonesia (Persen), 2018 – 2021



Sumber: Indikator Ekonomi, BPS

Capaian nilai ekspor Indonesia sepanjang tahun 2021 tercatat US\$ 231,61 miliar, memecahkan rekor nilai ekspor tertinggi dalam sejarah. Sebelumnya, nilai ekspor tertinggi tercatat US\$ 203,50 miliar pada tahun 2011. Nilai ekspor Indonesia di tahun 2021 secara total naik hingga 41,92 persen dibanding tahun sebelumnya. Pertumbuhan tersebut disumbangkan oleh pertumbuhan ekspor nonmigas dan migas yang keduanya naik masing-masing sebesar 41,58 persen dan 48,43 persen. Pertumbuhan ekspor nonmigas tersebut berhasil melampaui target yang sebelumnya ditetapkan sebesar 6,3 persen oleh pemerintah. Tingginya pertumbuhan ekspor nonmigas tersebut dipengaruhi oleh rendahnya nilai ekspor tahun lalu (*low base effect*) dan juga naiknya harga komoditas unggulan nonmigas, seperti hasil industri minyak kelapa sawit, besi/baja, serta hasil tambang nonmigas batu bara.

Memasuki tahun 2022, Kementerian Perdagangan berkomitmen untuk menjaga momentum pertumbuhan ekspor dan menargetkan ekspor nonmigas masih tumbuh positif antara 5,40 persen sampai 5,79 persen. Perhatian utama pemerintah di tahun 2022 adalah kebijakan *tapering off* oleh Amerika Serikat, hambatan logistik dunia, krisis energi dalam perekonomian global, serta upaya dalam mengendalikan pandemi Covid-19. Sementara untuk pasar dalam negeri, beberapa hal yang menjadi perhatian utama pemerintah adalah harga *volatile food*, kenaikan harga pangan yang selalu terjadi setiap hari besar seperti lebaran, natal, dan tahun baru, serta kenaikan harga komoditas seperti minyak goreng, dan jugaantisipasi cuaca (Kemendagri, 18 Januari 2022).

Tabel 6.2. Nilai Ekspor Migas dan Nonmigas Indonesia (Juta US\$), 2019 – Triwulan II 2022

Ekspor	2019	2020	2021	Tw I 2022	Tw II 2022
Migas	11 789,3	8 251,1	12 247,4	3 301,1	4 478,7
Minyak Mentah	1 726,6	1 396,9	2 795,9	278,5	527,9
Hasil Minyak	1 801,6	1 456,5	1 996,8	1 041,6	1 540,4
Gas	8 261,1	5 397,7	7 454,7	1 981,0	2 410,4
Nonmigas	155 893,7	154 940,7	219 362,1	62 843,0	70 503,5
Sektor Pertanian	3 612,4	4 119,0	4 242,0	1 155,4	1 058,5
Sektor Industri	127 377,7	131 087,0	177 204,5	50 512,8	51 479,4
Sektor Tambang dan Lainnya	24 903,6	19 734,7	37 915,6	11 174,8	17 965,6
Jumlah	167 683,0	163 191,8	231 609,5	66 144,1	74 982,2

Sumber: Indikator Ekonomi, BPS

Realisasi ekspor nonmigas Indonesia di tahun 2021 mencapai US\$ 219,36 miliar, berkontribusi sebesar 94,71 persen dari total ekspor Indonesia. Pertumbuhan ekspor nonmigas secara keseluruhan mengalami pertumbuhan hingga 41,58 persen dibandingkan tahun 2020. Sektor industri sebagai sektor tumpuan ekspor Indonesia tumbuh hingga 35,18 persen di tahun 2021, nilai ekspornya mencapai US\$ 177,20 miliar. Sektor industri masih menjadi sektor penopang perekonomian Indonesia. Nilai ekspor pada sektor tersebut menyumbang sekitar 76,51 persen dari total ekspor Indonesia. Tingginya ekspor dari sektor industri terus didorong untuk memberikan nilai tambah yang lebih tinggi dan mengurangi ketergantungan pada sumber daya alam mentah. Capaian nilai ekspor menjadi salah satu indikator bahwa kinerja sektor industri di tengah pandemi Covid-19 secara keseluruhan masih baik, terlebih melihat capaian indikator lain seperti *Purchasing Managers Index* (PMI) manufaktur dan kontribusi terhadap PDB yang juga meningkat (Kemenperin, 29 Desember 2021).

Sektor nonmigas lainnya juga mengalami pertumbuhan nilai ekspor positif di tahun 2021. Bahkan, pertumbuhan nilai ekspor pada sektor tambang dan lainnya meningkat hingga 92,13 persen (*y-o-y*), dengan nilai mencapai US\$ 37,92 miliar. Tingginya pertumbuhan di sektor tersebut akibat melonjaknya harga komoditas batu bara di tahun 2021 setelah merosot akibat pandemi Covid-19 di tahun sebelumnya. Sektor pertanian juga mengalami pertumbuhan nilai ekspor positif, yaitu sebesar 2,99 persen. Meskipun pertumbuhannya tidak setinggi sektor-sektor lain, pertumbuhan nilai ekspor sektor pertanian terus naik beberapa tahun terakhir. Dapat dikatakan sektor tersebut *resilient* atau tahan melalui dampak pandemi Covid-19.

Sementara itu, kontribusi ekspor migas di tahun 2021 terhadap total ekspor sebesar 5,29 persen. Nilai ekspor migas di tahun 2021 sebesar US\$ 12,25 miliar, naik hingga 48,43 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Setelah terpuruk di tahun 2020 akibat pandemi Covid-19, ekspor migas kembali bangkit. Kinerja ekspor migas tumbuh positif ditopang oleh pertumbuhan nilai ekspor minyak mentah, hasil minyak, dan gas. Nilai ekspor minyak mentah di tahun 2021 mencapai US\$ 2,80 miliar, tumbuh sekitar dua kali lipat dibandingkan tahun 2020. Peningkatan ekspor minyak mentah tersebut dipengaruhi oleh naiknya harga minyak mentah di pasar global.

Nilai ekspor gas pada tahun 2021 tercatat hingga US\$ 7,45 miliar. Nilai tersebut naik hingga 38,11 persen apabila dibandingkan dengan nilai ekspor gas pada tahun sebelumnya. Meskipun nilainya meningkat, volume ekspor gas turun dari tahun ke tahun. Nilai ekspor gas secara total meningkat akibat naiknya harga gas di pasar global. Sama seperti lonjakan pada harga komoditas batu bara dan minyak, naiknya harga gas di pasar global salah satunya akibat pulihnya perekonomian global pasca pandemi Covid-19 (katadata.com dan cnbc.com).

Ekspor Hasil Industri Menjadi Tumpuan Ekspor Indonesia

Kopi masih menjadi komoditas unggulan di sektor pertanian Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara produsen kopi terbesar di dunia. Produksi kopi di Indonesia di tahun 2021 mencapai 774,6 ribu ton. Kopi Indonesia juga digemari di pasar internasional, dibuktikan dengan tingginya nilai ekspor komoditas kopi Indonesia. Nilai ekspor komoditas kopi di tahun 2021 mencapai US\$ 849,4 juta, atau mengalami kenaikan 4,97 persen dibanding tahun 2020. Kenaikan nilai ekspor kopi di tahun 2021 dipengaruhi oleh permintaan global untuk kopi yang sudah berangsur naik, setelah mengalami penurunan di tahun 2020 akibat pandemi Covid-19. Selain kopi, nilai ekspor komoditas tanaman obat, aromatik, dan rempah-rempah juga naik 23,80 persen menjadi US\$ 765,7 juta. Sedangkan komoditas buah-buahan, yang juga salah satu komoditas unggulan di sektor pertanian, kinerja ekspornya mengalami penurunan 10,18 persen di tahun 2021. Nilai ekspor komoditas buah-buahan tahun 2021 senilai US\$ 393,4 juta. Padahal, pertumbuhan nilai ekspor komoditas tersebut sempat naik 35,39 persen (*y-o-y*) di masa pandemi Covid-19 tahun 2020.

Dari sektor industri, setiap komoditasnya mengalami pertumbuhan nilai ekspor positif di tahun 2021. Pertumbuhan paling dominan didorong oleh pertumbuhan nilai ekspor komoditas hasil industri minyak kelapa sawit yang naik hingga 55,10 persen dibanding tahun sebelumnya. Nilai ekspor hasil industri minyak kelapa sawit tercatat US\$ 28,61 miliar di tahun 2021. Hasil olahan minyak kelapa sawit seperti *Crude Palm Oil* (CPO) memang menjadi salah satu komoditas unggulan ekspor Indonesia. Tetapi, kenaikan nilai ekspor di tahun 2021 bukan karena produksi dalam negeri yang meningkat melainkan

Tabel 6.3. Nilai Ekspor Indonesia Menurut Komoditas Penting (Juta US\$), 2019 – Triwulan II 2022

Komoditas Ekspor	2019	2020	2021	Tw I 2022	Tw II 2022
Ekspor Hasil Pertanian	3 612,4	4 119,0	4 237,5	1 155,4	1 058,5
Kopi	872,4	809,2	849,4	260,3	204,0
Tanaman Obat, Aromatik dan Rempah-rempah	592,5	618,5	765,7	181,1	165,1
Buah-buahan	323,5	438,0	393,4	98,1	50,4
Biji Kakao	80,6	75,8	56,3	13,2	12,1
Ikan Segar/Dingin Hasil Tangkap	125,1	125,8	118,5	27,0	27,0
Hasil Pertanian Lainnya	1 618,3	2 051,7	2 054,2	575,7	599,9
Ekspor Hasil Industri	127 377,7	131 087,0	177 204,5	50 512,8	51 479,4
Minyak Kelapa Sawit	15 574,4	18 444,0	28 606,0	6 674,8	5 833,9
Pakaian Jadi (Konveksi) dari Tekstil	7 072,2	5 856,5	6 909,4	2 198,4	1 936,0
Alat-alat Listrik	5 274,9	5 121,3	6 462,1	1 948,2	2 163,9
Karet Remah	3 426,1	2 900,9	3 893,6	959,2	1 015,2
Hasil Industri Logam Dasar	14 369,6	19 893,2	27 284,6	8 308,3	9 387,3
Ekspor Industri Lainnya	81 660,5	78 871,1	104 048,8	30 423,9	31 143,1
Ekspor Hasil Tambang (Tidak Termasuk Migas)	24 897,0	19 729,8	37 908,2	11 172,9	17 963,9
Batu Bara	18 957,2	14 534,0	26 538,2	7 587,9	13 558,9
Bijih Tembaga	1 280,1	2 412,2	5 386,2	2 126,4	2 471,9
Hasil Tambang Lainnya	4 659,7	2 783,6	5 983,8	1 458,6	1 933,1

Sumber: Indikator Ekonomi, BPS

karena harga rata-rata yang naik hingga 67 persen di pasar global dibandingkan tahun 2020. Sedangkan jika dilihat dari volume ekspornya, produk olahan minyak kelapa sawit hanya naik 0,6 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Volume ekspor yang hanya naik sedikit di tengah tingginya nilai jual di pasar internasional dipengaruhi oleh produksi dalam negeri yang stagnan, faktor cuaca, keterbatasan pupuk, serta kelangkaan tenaga kerja (bisnis.com, 28 Januari 2022).

Pertumbuhan nilai ekspor hasil industri logam dasar juga cukup signifikan. Di tahun 2021, pertumbuhannya mencapai 37,15 persen (*y-o-y*), mencatatkan nilai ekspor hingga US\$ 27,28 miliar. Hasil industri logam dasar mencakup besi/baja, logam dasar bukan besi, tembaga, aluminium, dan logam

dasar lainnya. Dari total nilai ekspor hasil industri logam dasar tersebut, nilai ekspor didominasi oleh komoditas besi/baja yang nilainya mencapai sekitar US\$ 20,95 miliar atau meningkat hampir dua kali lipat dibandingkan tahun 2020. Meningkatnya nilai ekspor komoditas tersebut akibat dari banyaknya investasi asing di sektor tersebut selama beberapa bulan terakhir.

Presiden Joko Widodo memprediksi peningkatan nilai ekspor komoditas besi/baja masih akan berlanjut. Diprediksi, nilai ekspor besi/baja pada tahun 2022 akan mencapai US\$ 28 miliar hingga US\$ 30 miliar (cnnindonesia.com, 27 Januari 2022). Bahkan, hasil industri besi/baja diharapkan berpeluang menggeser dominasi hasil minyak kelapa sawit yang selama ini menjadi komoditas tumpuan ekspor nonmigas. Tetapi, prospek tersebut juga perlu diperhatikan mengingat bahan baku industri besi/baja adalah bahan baku tidak terbarukan (bisnisindonesia.id, 1 Agustus 2021). Memasuki tahun 2022, realisasi ekspor hasil industri logam dasar tercatat senilai US\$ 8,31 miliar pada triwulan I dan naik menjadi US\$ 9,39 miliar pada triwulan II.

Melonjaknya harga komoditas ekspor juga berlaku untuk komoditas-komoditas hasil tambang, seperti batu bara dan bijih tembaga. Harga batu bara di pasar internasional meningkat hingga 85,63 persen dibanding tahun sebelumnya. Selain karena pemulihan ekonomi global pasca pandemi 2020, naiknya harga batu bara juga disebabkan oleh meningkatnya permintaan untuk pembangkit listrik dan lonjakan harga gas alam terutama saat musim dingin di Eropa. Lonjakan harga batu bara tersebut diprediksi akan berlanjut hingga tahun 2022 (cnbcindonesia.com, 2 Januari 2022). Tetapi, di tengah tingginya harga batu bara tersebut, pemerintah Indonesia sempat memberlakukan larangan ekspor batu bara yang berlaku selama bulan Januari 2022. Kebijakan tersebut diberlakukan akibat tidak terpenuhinya kebutuhan batu bara dalam negeri atau *Domestic Market Obligation (DMO)*. Namun demikian, hingga triwulan I 2022 nilai ekspor komoditas batu bara Indonesia sudah tercatat mencapai US\$ 7,59 miliar, atau naik hingga 70,61 persen dibanding periode yang sama tahun 2021. Bahkan pada triwulan II nilai ekspor batu bara masih meningkat hingga US\$ 13,56 miliar.

Tabel 6.4 menampilkan nilai ekspor Indonesia menurut golongan barang SITC atau *Standard International Trade Classification*. Golongan barang Bahan Bakar, Bahan Penyemir dsb (SITC 3) kembali mendominasi ekspor Indonesia tahun 2021. Pertumbuhan nilai ekspor golongan barang SITC 3 juga tertinggi dibanding golongan barang lain, yaitu 76,76 persen (*y-o-y*) dengan realisasi nilai ekspor mencapai US\$ 45,08 miliar. Tercakup dalam SITC 3 antara lain batu bara, minyak bumi dan produksinya, serta gas alam yang memang harganya sedang naik di pasar global setelah lesu di tahun sebelumnya akibat pandemi Covid-19.

Tabel 6.4. Nilai Ekspor Indonesia Menurut Golongan Barang SITC (Juta US\$), 2019 – Triwulan II 2022

SITC	Golongan Barang	2019	2020	2021	Tw I 2022	Tw II 2022
0	Bahan Makanan dan Binatang Hidup	13 225	14 565	16 944	4 398	4 442
1	Minuman dan Tembakau	1 332	1 244	1 253	332	353
2	Bahan Mentah	14 896	14 034	20 503	6 660	7 803
3	Bahan Bakar, Bahan Penyemir dsb	34 103	25 502	45 077	12 172	19 766
4	Minyak/Lemak Nabati dan Hewani	16 780	19 710	30 884	7 352	6 614
5	Bahan Kimia	13 079	12 659	18 706	5 483	6 295
6	Hasil Industri Menurut Bahan	26 409	28 591	43 799	12 858	14 141
7	Mesin dan Alat Pengangkutan	23 244	21 416	26 977	7 771	8 130
8	Hasil Industri Lainnya	20 984	19 805	25 846	8 770	7 159
9	Bahan dan Transaksi Khusus Lainnya	3 631	5 666	1 620	348	279
	Jumlah	167 683	163 192	231 609	66 144	74 982

Sumber: Indikator Ekonomi, BPS

Selain SITC 3, golongan barang yang mendominasi ekspor Indonesia adalah Hasil Industri Menurut Bahan (SITC 6) dengan nilai ekspor di tahun 2021 mencapai US\$ 43,80 miliar. Nilai tersebut naik sekitar 53,19 persen dibanding tahun 2020. Pertumbuhan nilai ekspor pada SITC 6 juga didorong oleh naiknya harga di pasar global untuk barang-barang hasil industri, seperti hasil industri besi, baja, dan tembaga (menurut Indeks Unit Value Ekspor tahun 2021, BPS).

Hampir semua golongan barang mengalami kenaikan nilai ekspor, kecuali golongan barang Bahan dan Transaksi Khusus Lainnya (SITC 9). Kinerja ekspor golongan barang tersebut turun hingga 71,41 persen dibanding tahun lalu, dengan nilai ekspor tahun 2021 sebesar US\$ 1,62 miliar. Padahal, nilai ekspor golongan barang SITC 9 naik di tahun 2020 lalu sempat naik hingga 56,05 persen dengan nilai ekspor US\$ 5,67 miliar. Termasuk dalam golongan barang SITC 9 antara lain koin (selain koin emas), bukan alat pembayaran yang sah dan emas non-moneter (tidak termasuk bijih emas dan konsentrasinya).

Penurunan nilai ekspor SITC 9 masih berlanjut hingga tahun 2022. Nilai ekspor golongan barang SITC 9 di triwulan I 2022 tercatat sebesar US\$ 348 juta, atau turun 29,55 persen dibandingkan triwulan I tahun 2021. Sementara itu, ekspor golongan barang yang lain masih tumbuh positif di

triwulan I 2022, dibandingkan dengan triwulan I 2021. Golongan barang yang mengalami pertumbuhan nilai ekspor tertinggi di triwulan I 2022 antara lain: Bahan Mentah (SITC 2) naik 62,68 persen, Hasil Industri Lainnya (SITC 8) naik 49,63 persen, dan Hasil Industri Menurut Bahan (SITC 6) naik 49,46 persen. Nilai ekspor golongan barang SITC 3 dan SITC 6 di triwulan II 2022 meningkat dibanding periode sebelumnya, dengan nilai ekspornya masing-masing sebesar US\$ 19,77 miliar dan US\$ 14,14 miliar.

Negara-Negara Tujuan Ekspor Indonesia

**Tabel 6.5. Nilai Ekspor Indonesia Menurut Negara Tujuan (Juta US\$),
2019 – Triwulan II 2022**

Negara Tujuan	2019	2020	2021	Tw I 2022	Tw II 2022
1. ASEAN	41 464,5	36 420,2	48 021,6	13 676,2	17 225,4
	(24,73)	(22,32)	(20,73)	(20,68)	(22,97)
(Malaysia)	8 801,8	8 098,8	11 971,0	3 528,5	4 297,6
	(5,25)	(4,96)	(5,17)	(5,33)	(5,73)
(Thailand)	6 218,4	5 110,3	7 088,0	1 928,8	2 359,6
	(3,71)	(3,13)	(3,06)	(2,92)	(3,15)
(Singapura)	12 916,7	10 661,8	11 635,8	3 445,1	4 425,5
	(7,70)	(6,53)	(5,02)	(5,21)	(5,90)
2. Tiongkok	27 961,9	31 781,8	53 765,5	13 081,4	15 857,2
	(16,68)	(19,48)	(23,21)	(19,78)	(21,15)
3. Jepang	16 003,3	13 664,7	17 872,7	5 607,2	6 228,2
	(9,54)	(8,37)	(7,72)	(8,48)	(8,31)
4. Asia Lainnya	35 679,2	32 641,1	45 594,3	14 794,2	17 662,4
	(21,28)	(20,00)	(19,69)	(22,37)	(23,56)
5. Amerika Serikat	17 844,6	18 622,5	25 793,0	7 789,0	6 974,1
	(10,64)	(11,41)	(11,14)	(11,78)	(9,30)
6. Amerika Lainnya	4 190,1	4 021,7	6 076,7	1 620,4	1 761,7
	(2,50)	(2,46)	(2,62)	(2,45)	(2,35)
7. Australia dan Oceania Lainnya	3 065,9	3 290,2	4 285,1	1 039,2	1 247,5
	(1,83)	(2,02)	(1,85)	(1,57)	(1,66)
8. Afrika	4 603,4	4 614,7	7 065,5	1 710,5	2 100,3
	(2,75)	(2,83)	(3,05)	(2,59)	(2,80)
9. Inggris ¹	1 351,5	1 283,4	1 477,1	376,8	411,6
	(0,81)	(0,79)	(0,64)	(0,57)	(0,55)

Lanjutan

Negara Tujuan	2019	2020	2021	Tw I 2022	Tw II 2022
10. Uni Eropa	14 616,7	13 080,4	18 002,0	5 168,5	5 197,1
	(8,72)	(8,02)	(7,77)	(7,81)	(6,93)
(Belanda)	3 205,	3 113,7	4 630,7	1 379,0	1 454,3
	(1,91)	(1,91)	(2,00)	(2,08)	(1,94)
(Jerman)	2 405,8	2 456,3	2 914,8	844,7	787,3
	(1,43)	(1,51)	(1,26)	(1,28)	(1,05)
11. Eropa Lainnya	2 253,4	3 771,1	3 656,1	1 280,6	316,8
	(1,34)	(2,31)	(1,58)	(1,94)	(0,42)
Jumlah	167 683,	163 191,8	231 609,5	66 144,1	74 982,2
	(100,00)	(100,00)	(100,00)	(100,00)	(100,00)

Catatan :¹ Sejak Januari 2020, Inggris bukan bagian dari Uni Eropa
Angka dalam kurung menunjukkan persentase terhadap total

Sumber : Indikator Ekonomi, BPS

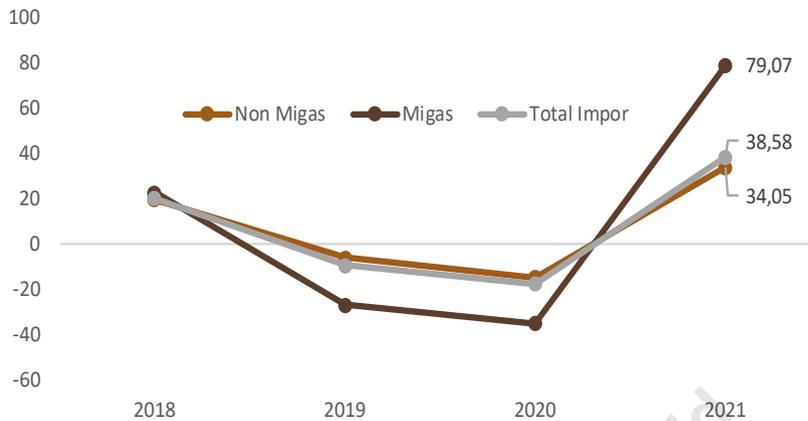
Tujuan ekspor Indonesia masih didominasi ke Negara Tiongkok, Amerika Serikat, dan Jepang. Tercatat pada 2021, ekspor dengan tujuan ketiga negara tersebut mencapai 42,07 persen dari total ekspor Indonesia. Sementara itu, nilai ekspor Indonesia ke Tiongkok di pada tahun 2021 tercatat US\$ 53,76 miliar, meningkat hingga 69,17 persen dibandingkan tahun 2020. Angka tersebut berkontribusi hingga 23,21 persen terhadap total ekspor Indonesia. Pertumbuhan nilai Ekspor ke Tiongkok terutama didorong oleh komoditas besi/baja, batubara, dan lignit (BRS BPS, 17 Januari 2022). Meningkatnya realisasi nilai ekspor Indonesia ke Tiongkok tersebut juga berpengaruh pada meningkatnya peringkat Indonesia di antara negara-negara ASEAN dalam perdagangan dengan Tiongkok. Indonesia menempati peringkat ketiga dari anggota ASEAN di tahun 2021 dalam mitra dagang Tiongkok, sedangkan di tahun 2020 Indonesia menempati peringkat keempat (republika.co.id, 2 Februari 2022).

Di sisi lain, nilai ekspor Indonesia ke Amerika Serikat dan Jepang juga mengalami pertumbuhan di tahun 2021. Nilai ekspor Indonesia ke Amerika Serikat di tahun 2021 mencapai US\$ 25,79 miliar, meningkat sebesar 38,50 persen (*y-o-y*). Angka tersebut berkontribusi sekitar 11,14 persen dari total ekspor Indonesia. Sedangkan, ekspor Indonesia ke Jepang sepanjang 2021 juga naik hingga 30,79 persen dengan nilai ekspor sebesar US\$ 17,87 miliar.

Kinerja Impor Indonesia Tumbuh Positif

Kegiatan impor di dalam negeri bermanfaat untuk memenuhi permintaan dalam negeri dan juga untuk menjaga stabilitas harga domestik. Di Indonesia sendiri, kebutuhan bahan baku industri masih memerlukan impor dari luar negeri. Impor tidak selalu berarti negatif, misalkan impor bahan baku yang digunakan dalam industri menunjukkan bahwa sektor industri tumbuh dan dapat memberikan nilai tambah lebih kepada perekonomian negara.

Gambar 6.3. Pertumbuhan Nilai Impor Indonesia (Persen), 2018 – 2021



Sumber: Indikator Ekonomi, BPS

Di tahun 2021, impor Indonesia tumbuh positif, menunjukkan bahwa aktivitas perekonomian di dalam negeri mulai pulih setelah melambat akibat pandemi Covid-19. Kinerja impor Indonesia kembali tumbuh positif hingga 38,58 persen di tahun 2021, setelah tumbuh negatif dalam dua tahun sebelumnya. Pertumbuhan nilai impor tersebut didominasi oleh impor migas yang mencapai 79,07 persen. Sedangkan, impor nonmigas juga tumbuh positif hingga 34,05 persen. Tingginya pertumbuhan nilai impor di tahun 2021 tersebut juga dipengaruhi oleh rendahnya capaian tahun lalu ketika masih awal pandemi Covid-19 (*low base effect*). Pertumbuhan impor migas juga dipengaruhi oleh harga minyak dan gas di pasar internasional yang melambung tinggi.

Tabel 6.6. Nilai Impor Migas dan Nonmigas Indonesia (Juta US\$), 2019 – Triwulan II 2022

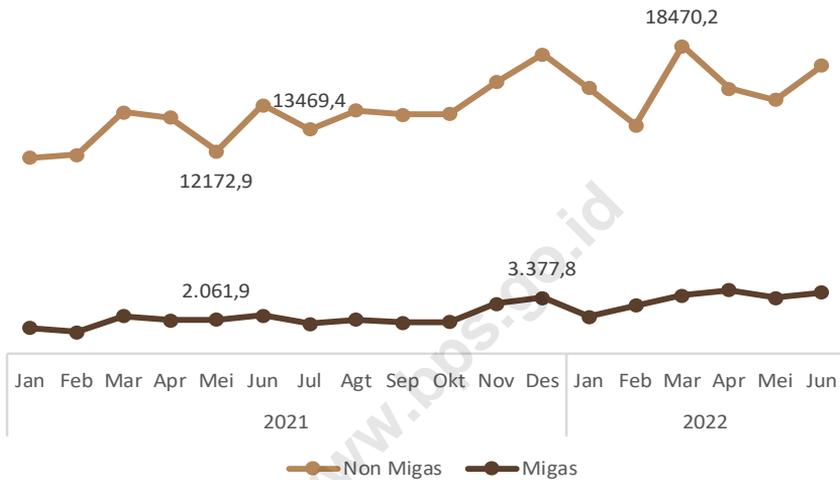
Impor	2019	2020	2021	Tw I 2022	Tw II 2022
Migas	21 885,3	14 256,8	25 529,1	8 623,7	10 840,5
Nonmigas	149 390,4	127 312,0	170 660,8	48 188,3	48 530,1
Jumlah	171 275,7	141 568,8	196 189,9	56 812,0	59 370,6

Sumber: Indikator Ekonomi, BPS

Sepanjang tahun 2021, nilai impor Indonesia mencapai US\$ 196,19 miliar, terdiri dari US\$ 25,53 miliar dari impor migas dan US\$ 170,66 miliar dari impor nonmigas. Impor nonmigas tersebut mendominasi hingga 86,99 persen dari total impor Indonesia. Sementara itu, kinerja impor Indonesia masih menunjukkan tren pertumbuhan positif memasuki tahun 2022. Hingga

triwulan I 2022, nilai impor mencapai US\$ 56,81 miliar atau meningkat 30,95 persen dibandingkan nilai impor di periode yang sama tahun sebelumnya. Sedangkan nilai impor pada triwulan II 2022 juga meningkat dan mencapai US\$ 59,37 miliar.

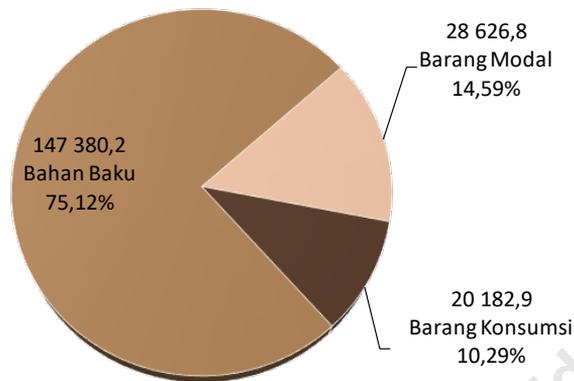
Gambar 6.4. Perkembangan Nilai Impor Migas dan Nonmigas (Juta US\$), Januari 2021 – Juni 2022



Sumber: Indikator Ekonomi, BPS

Secara bulanan, kinerja impor Indonesia naik di bulan-bulan akhir tahun 2021. Kinerja impor baik nonmigas maupun migas Indonesia mencapai puncaknya pada bulan Desember 2021. Pada periode waktu tersebut, impor migas tercatat senilai US\$ 3,38 miliar dan impor nonmigas senilai US\$ 17,97 miliar. Bahkan, kinerja impor pada periode waktu tersebut nilainya tercatat sebagai nilai impor bulanan tertinggi sepanjang sejarah (money.kompas.com, 17 Januari 2022). Kenaikan tersebut dipengaruhi oleh aktivitas ekonomi yang membaik ditengah kasus Covid-19 yang mulai melandai. Sebelumnya, pemberlakuan PPKM darurat Bulan Juli 2021 saat merebaknya Covid-19 varian delta berpengaruh pada penurunan kinerja impor Juli yang tercatat sebesar US\$ 15,26 miliar, turun 11,36 persen (*m-t-m*). Tetapi jika dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya, nilai impor masih tumbuh negatif hingga 45,86 persen. Kondisi perekonomian saat meningkatnya jumlah kasus Covid-19 masih lebih baik dibanding ketika awal-awal pandemi di tahun 2020. Memasuki tahun 2022, kinerja impor bulanan di Indonesia secara umum meningkat dibandingkan tahun 2021.

Gambar 6.5. Nilai Impor Indonesia Menurut Golongan Penggunaan Barang (Juta US\$), 2021



Sumber: Indikator Ekonomi, BPS

Dominasi impor bahan baku semakin meningkat. Di tahun 2021, impor bahan baku Indonesia mencapai US\$ 147,38 miliar atau berkontribusi 75,12 persen terhadap total impor Indonesia. Nilai tersebut naik hingga 42,80 persen dibandingkan tahun 2020. Sementara itu, nilai impor barang modal dan barang konsumsi di tahun 2021 masing-masing sebesar US\$ 28,63 miliar dan US\$ 20,18 miliar. Impor barang konsumsi tumbuh hingga 37,71 persen dibanding tahun lalu, dan berkontribusi hingga 10,29 persen terhadap total impor Indonesia. Sedangkan impor barang modal mengalami kenaikan 20,77 persen dan berkontribusi sekitar 14,59 persen terhadap total impor. Meningkatnya impor bahan baku dan barang modal di tahun 2021 menunjukkan geliat aktivitas ekonomi, khususnya di sektor industri di dalam negeri. Sedangkan peningkatan impor barang konsumsi juga mengindikasikan naiknya daya beli masyarakat setelah mengalami penurunan di saat awal-awal masa pandemi 2020.

Dilihat dari golongan barang SITC-nya, impor Indonesia didominasi oleh golongan barang Mesin dan Alat Pengangkutan (SITC 7). Nilai impor untuk SITC 7 di tahun 2021 mencapai US\$ 56,72 miliar, meningkat sebesar 21,35 persen dibanding tahun sebelumnya. Nilai tersebut berkontribusi hingga 21,35 persen terhadap total impor Indonesia pada tahun 2021, kontribusi tersebut paling tinggi dibanding golongan barang lainnya. Termasuk dalam SITC 7 antara lain komoditas mesin industri dan mesin/peralatan listik yang keduanya menyumbang cukup besar terhadap nilai impor Indonesia.

Tabel 6.7. Nilai Impor Indonesia Menurut Golongan Barang SITC (Juta US\$), 2019 – Triwulan II 2022

SITC	Golongan Barang	2019	2020	2021	Tw I 2022	Tw II 2022
0	Bahan Makanan dan Binatang Hidup	15 495	15 444	19 584	5 447	5 823
1	Minuman dan Tembakau	822	762	858	207	239
2	Bahan Mentah	9 059	7 298	11 286	3 037	3 352
3	Bahan Bakar, Bahan Penyemir dsb	23 478	15 778	28 838	9 383	12 181
4	Minyak/Lemak Nabati dan Hewani	218	192	301	88	115
5	Bahan Kimia	24 144	21 491	32 625	8 931	8 540
6	Hasil Industri Menurut Bahan	29 998	22 768	32 674	9 765	9 176
7	Mesin dan Alat Pengangkutan	55 878	46 743	56 723	16 664	16 427
8	Hasil Industri Lainnya	10 413	9 189	10 342	2 747	2 765
9	Bahan dan Transaksi Khusus Lainnya	1 771	1 903	2 959	543	752
	Jumlah	171 276	141 569	196 190	56 812	59 370

Sumber: Indikator Ekonomi, BPS

Dilihat dari pertumbuhannya, impor golongan barang Bahan Bakar, Bahan Penyemir dsb (SITC 3) mengalami kenaikan hingga 82,78 persen di tahun 2021, dengan nilai impor mencapai US\$ 28,86 miliar. Sementara itu, dilihat dari data volume impornya, golongan SITC 3 mengalami kenaikan namun hanya naik sebesar 21,74 persen dari tahun 2020. Komoditas yang termasuk dalam SITC 3 antara lain minyak bumi dan turunannya, batu bara, dan gas. Naiknya nilai impor di golongan barang tersebut tidak terlepas dari naiknya harga komoditas-komoditas tersebut di pasar dunia. Komoditas yang mendominasi SITC 3 adalah produk-produk hasil olahan Bahan Bakar Minyak (BBM), seperti pertalite, pertamax, premium, dan sejenisnya (cnbcindonesia.com, 3 Februari 2022). Walaupun menjadi salah satu negara penghasil minyak bumi, Indonesia masih bergantung pada impor untuk hasil olahan minyak bumi, seperti BBM dan LPG.

Negara Pemasok Barang Impor ke Indonesia

Tiga negara pemasok barang impor ke Indonesia tertinggi selama tahun 2021 adalah Tiongkok senilai US\$ 56,23 miliar, Singapura senilai 15,45 miliar, dan Jepang senilai US\$ 14,64 miliar. Kontribusi nilai impor dari ketiga negara tersebut mencapai 44,00 persen dari total impor Indonesia. Nilai impor dari

hampir seluruh negara mengalami kenaikan dibanding tahun 2020. Impor Indonesia dari Tiongkok didominasi oleh komoditas nonmigas, antara lain mesin dan alat elektronik. Nilai impor dari negara tersebut pada tahun 2021 mengalami peningkatan hingga 41,86 persen dari tahun sebelumnya.

Tabel 6.8. Nilai Impor Indonesia Menurut Negara Asal (Juta US\$), 2019 – Triwulan II 2022

Negara Asal	2019	2020	2021	Tw I 2022	Tw II 2022
1. ASEAN	39 791,3	29 832,8	39 951,4	12 503,3	12 941,9
	(23,23)	(21,07)	(20,36)	(22,01)	(21,80)
(Malaysia)	7 775,3	6 933,0	9 451,0	2 912,7	3 081,6
	(4,54)	(4,90)	(4,82)	(5,13)	(5,19)
(Thailand)	9 469,1	6 483,8	9 146,5	3 183,4	2 701,5
	(5,53)	(4,58)	(4,66)	(5,60)	(4,55)
(Singapura)	17 589,9	12 341,2	15 451,7	4 577,6	5 263,0
	(10,27)	(8,72)	(7,88)	(8,06)	(8,86)
2. Tiongkok	44 930,6	39 634,7	56 227,2	15 902,8	16 381,1
	(26,23)	(28,00)	(28,66)	(27,99)	(27,59)
3. Jepang	15 661,8	10 672,1	14 644,3	4 290,6	4 118,7
	(9,14)	(7,54)	(7,46)	(7,55)	(6,94)
4. Asia Lainnya	28 226,7	23 371,2	33 015,1	10 607,1	10 511,6
	(16,48)	(16,51)	(16,83)	(18,67)	(17,71)
5. Amerika Serikat	9 261,6	8 580,2	11 249,2	2 375,3	3 202,7
	(5,41)	(6,06)	(5,73)	(4,18)	(5,39)
6. Amerika Lainnya	6 452,6	6 778,4	7 732,7	2 359,6	2 746,9
	(3,77)	(4,79)	(3,94)	(4,15)	(4,63)
7. Australia dan Oceania Lainnya	6 481,2	5 559,2	10 408,8	2 367,4	2 766,5
	(3,78)	(3,93)	(5,31)	(4,17)	(4,66)
8. Afrika	4 086,1	2 566,0	6 301,8	2 146,7	2 726,2
	(2,39)	(1,81)	(3,21)	(3,78)	(4,59)
9. Inggris ¹	1 048,6	956,4	1 090,7	238,3	235,0
	(0,61)	(0,68)	(0,56)	(0,42)	(0,40)
10. Uni Eropa	11 452,3	9 228,4	11 095,9	2 753,6	2 749,4
	(6,69)	(6,52)	(5,66)	(4,85)	(4,63)
(Jerman)	3 476,5	3 023,9	3 187,6	855,4	882,3
	(2,03)	(2,14)	(1,62)	(1,51)	(1,49)
(Italia)	1 776,6	1 556,8	1 728,3	352,4	358,7
	(1,04)	(1,10)	(0,88)	(0,62)	(0,60)

Lanjutan

Negara Asal	2019	2020	2021	Tw I 2022	Tw II 2022
(Perancis)	1 424,3	1 358,4	1 275,6	318,4	359,6
	(0,83)	(0,96)	(0,65)	(0,56)	(0,61)
11. Eropa Lainnya	3 882,9	4 389,4	4 472,9	1 267,2	990,5
	(2,27)	(3,10)	(2,28)	(2,23)	(1,67)
Jumlah	171 275,7	141 568,8	196 190,	56 812,0	59 370,6
	(100,00)	(100,00)	(100,00)	(100,00)	(100,00)

Catatan : ¹ Sejak Januari 2020, Inggris bukan bagian dari Uni Eropa

Angka dalam kurung menunjukkan persentase terhadap total

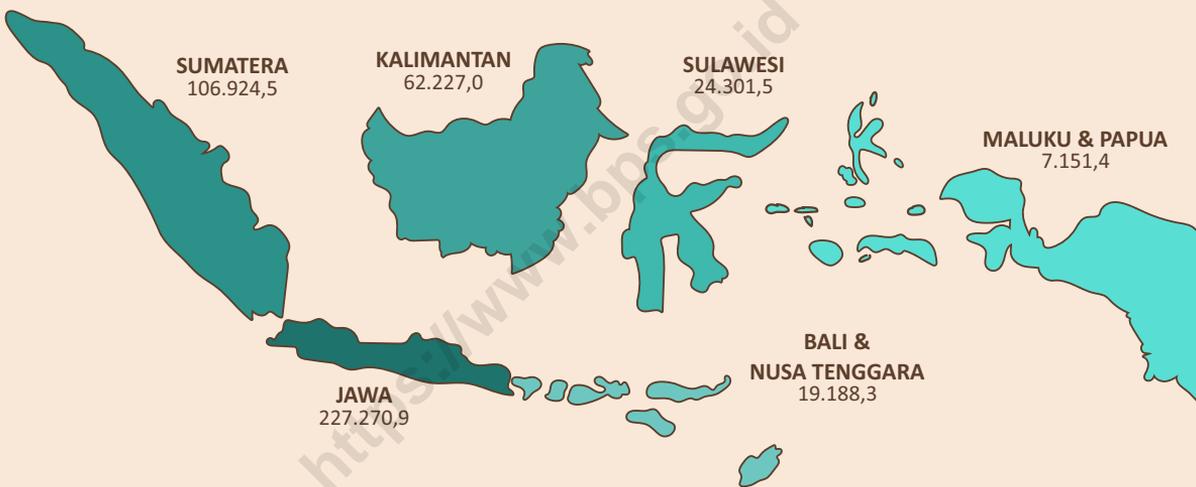
Sumber : Indikator Ekonomi, BPS

Di sisi lain, impor dari Jepang juga mengalami kenaikan cukup tinggi dibanding tahun lalu, mencapai 25,20 persen. Negara-negara tetangga di kawasan ASEAN juga menjadi negara importir ke Indonesia, dengan kontribusi 20,36 persen terhadap total ekspor. Negara Singapura merupakan negara pengimpor tertinggi dibanding negara ASEAN lainnya, dengan nilai kontribusi mencapai 7,88 persen. Nilai impor negara-negara ASEAN ke Indonesia pada tahun 2021 juga naik hingga 33,92 persen dibanding tahun 2020.

INVESTASI INDONESIA DAN PERDAGANGAN SAHAM



REALISASI INVESTASI PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI MENURUT PULAU TAHUN 2021 (Miliar Rupiah)



REALISASI INVESTASI PENANAMAN MODAL ASING MENURUT ASAL BENUA TAHUN 2021 (Juta USD)



AMERIKA

3.880,1



EROPA

3.453,0



ASIA

23.358,7



AUSTRALIA

236,3



AFRIKA

165,0

Investasi memiliki korelasi yang positif terhadap pembangunan karena investasi sebagai salah satu penerimaan atau pemasukan bagi negara. Peran investasi sangat terlihat dalam pemulihan ekonomi saat wabah Covid-19 melanda Indonesia tahun 2020 dan 2021. Pemerintah berharap dana investasi yang terkumpul dapat membantu kegiatan perekonomian dan pembangunan agar terus berjalan guna mendorong pertumbuhan ekonomi.

Berbagai usaha dilakukan pemerintah dalam mendorong kegiatan investasi di Indonesia, yaitu dengan mengeluarkan berbagai kebijakan yang intinya dapat memberikan kemudahan bagi investor dalam berinvestasi di Indonesia, seperti memberikan insentif pajak, bantuan kredit dan pinjaman, bahkan sampai diciptakannya Undang-Undang Cipta Kerja (*Omnibus Law*), pembentukan satgas khusus investasi luar negeri, dan kemudahan proses pengajuan izin usaha dan investasi di BKPM.

Salah satu hal yang tertuang dalam Undang-Undang Cipta Kerja yaitu mendorong dibentuknya Lembaga Pengelola Investasi (LPI) yang tujuannya dapat meningkatkan pertumbuhan investasi di sektor riil dan mampu membuka lapangan kerja baru. Harapannya, investasi yang semakin berkembang pada saat ini mampu membantu program pemerintah dalam pemulihan ekonomi dan pembangunan proyek-proyek strategis ke depannya.

Pemerintah yakin bahwa peningkatan investasi dapat memberikan andil yang besar terhadap pembangunan ekonomi. Selain itu, investasi juga memiliki peran sebagai salah satu komponen dari pendapatan nasional dan Produk Domestik Bruto (PDB) atau *Gross Domestic Product (GDP)*. Dengan demikian, apabila investasi mengalami kenaikan, maka PDB pun akan meningkat, begitu pula sebaliknya.

Kekuatan Investasi Dalam Negeri Didukung Berbagai Program Pemerintah

Sebelum pandemi, kondisi perekonomian Indonesia cukup baik, begitu pula dengan kinerja investasi. Banyak investor yang menanamkan modalnya agar investasi/modal yang dimiliki dapat terus berkembang. Berbagai macam kebijakan telah dikeluarkan pemerintah agar dapat membantu para investor maupun calon investor. Berkat kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah, maka kegiatan investasi di masa pandemi dalam 2 tahun terakhir masih terus berjalan sejalan dengan kegiatan perekonomian yang terjadi di dalam negeri. Kinerja pemerintah dalam usaha untuk dapat terus menggairahkan kegiatan investasi di dalam negeri agar tidak terpengaruh oleh terjangkit wabah Covid-19 dan investasi masih mampu memberi dampak positif bagi perkembangan perekonomian.

Pada intinya investasi yang terkumpul dapat direalisasikan pada proyek-proyek tertentu yang dapat menunjang kegiatan pembangunan di dalam negeri. Selain itu, investasi dapat membiayai proyek-proyek pembangunan strategis agar dapat tetap berjalan dan menciptakan lapangan kerja bagi tenaga kerja Indonesia.

Kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah dalam memberikan kemudahan bagi investor ternyata membuahkan hasil. Terlihat dari target investasi yang dipasang oleh pemerintah pada tahun 2019 sebesar Rp 792 triliun. Ternyata target tersebut berhasil dilampaui oleh BKPM yang mampu mengumpulkan investasi total (PMDN dan PMA) sebesar Rp 809,6 triliun. Investasi di dalam negeri sendiri mampu terkumpul sebanyak Rp 386,50 triliun atau mengalami peningkatan sebesar 17,62 persen dari tahun sebelumnya. Hasil investasi domestik yang dicapai di tahun 2019 berkontribusi sebesar 47,7 persen dari total investasi yang terkumpul dan sisanya sekitar 52,3 persen adalah investasi asing.

Tahun 2020 adalah tahun paling sulit dan itu dirasakan oleh semua negara akibat wabah Covid-19, diantaranya banyak usaha yang gulung tikar, pergerakan dan aktivitas manusia dibatasi. Masyarakat masih terus harus menerapkan protokol kesehatan dan pembatasan-pembatasan mobilitas penduduk masih terus dilakukan oleh pemerintah. Dalam kondisi yang mengancam kesehatan masyarakat tersebut pemerintah masih berusaha agar kegiatan perekonomian dapat berjalan dan masih bisa tumbuh. Salah satu usaha pemerintah adalah fokus pada kinerja investasi dengan terus mengembangkan kebijakan dan program di bidang investasi dalam melakukan percepatan kemudahan berusaha, pemberian kemudahan pinjaman dan insentif pajak, serta kemudahan-kemudahan lainnya yang dilakukan pemerintah di masa pandemi. Ternyata kebijakan dan program yang digulirkan pemerintah tersebut mampu menarik dan meyakinkan investor di dalam negeri untuk tetap berinvestasi. Terbukti dengan investasi yang terkumpul di tahun 2020 mencapai Rp 826,3 triliun, dimana nilai investasi tersebut sudah melebihi dari target yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp 817,2 triliun. PMDN sendiri mencapai nilai sebesar Rp 413,5 triliun. Tidak hanya kemudahan yang diperoleh para investor, keuntungan dan semakin berkembangnya modal mereka membuat para investor semakin yakin untuk terus menambah investasinya.

Pada akhir tahun 2020 sudah ditemukan vaksin Covid-19 dan sudah mulai dilakukan vaksinasi bagi penduduk di sepanjang tahun 2021 (dosis I dan II). Namun pemberian vaksin tidak serta merta menurunkan tingkat kematian dan penularan wabah tersebut, karena telah muncul varian baru yaitu delta. Program vaksinasi yang dilakukan di sepanjang tahun 2021 telah berhasil melampaui jumlah target vaksinasi. Namun keberhasilan tersebut tidak membuat Indonesia terbebas dari wabah Covid-19.

Selanjutnya, melalui UU No. 11 Tahun 2020 mengenai Cipta Kerja yang mulai disosialisasikan dan dijalankan, pemerintah terus mendorong agar pemerataan pertumbuhan ekonomi dapat berjalan di seluruh wilayah Indonesia dan penciptaan lapangan kerja yang merata di seluruh Indonesia. Kinerja yang dilakukan BKPM di tahun 2021 semakin bersemangat dan yakin, karena didukung dengan kebijakan program pemerintah yang masih fokus pada transformasi ekonomi sampai saat ini yaitu melalui hilirisasi industri.

BKPM mencatat realisasi investasi di tahun 2021 sebesar Rp 901,0 triliun. Nilai investasi yang terkumpul tersebut sudah melampaui dari target yang telah ditetapkan oleh pemerintah pada RPJMN yaitu sebesar Rp 858,1 triliun. Realisasi untuk PMDN sendiri di tahun 2021 mencapai Rp 447,06 triliun terjadi peningkatan 8,11 persen dibanding tahun 2020.

PMDN Menurut Sektor

Investasi domestik yang terkumpul di tahun 2019 dan sudah direalisasikan sebagian besar terserap di sektor industri sebesar 18,80 persen dari total investasi domestik, dengan nilai investasi domestik mencapai Rp 72,67 triliun yang tersebar di 7.709 proyek. Selanjutnya, sektor yang cukup dominan dalam menyerap investasi domestik adalah Sektor Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi sebesar 17,62 persen dari total investasi domestik dengan nilai investasi mencapai Rp 68,08 triliun dan tersebar di 1.423 proyek. Investasi Sektor Konstruksi menempati urutan ketiga dengan nilai investasi mencapai Rp 55,09 triliun dengan kontribusi mencapai 14,25 persen.

Di masa pandemi Covid-19, investasi domestik secara total mengalami peningkatan dibanding tahun 2019 yaitu naik hingga 7,00 persen. Namun kenaikan nilai investasi tidak diikuti semua sektor mengalami kenaikan, beberapa sektor mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Di tahun 2020 sektor yang mampu menyerap investasi domestik terbesar adalah Sektor Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi dengan nilai investasi mencapai Rp 93,28 triliun (22,56 persen) yang tersebar di 4.115 proyek. Sektor tersebut mengalami kenaikan sebesar 37,01 persen dibanding tahun sebelumnya. Sektor industri menempati urutan kedua dengan nilai investasi mencapai Rp 82,82 triliun yang tersebar di 18.300 proyek dengan kontribusi sebesar 20,03 persen dari total investasi domestik. Sektor Konstruksi menempati posisi ketiga dengan nilai investasi mencapai Rp 68,29 triliun (16,51 persen) yang tersebar di 6.549 proyek.

Pandemi Covid-19 di tahun 2021 belum berakhir, di tengah kondisi gelombang kedua pandemi dengan munculnya varian baru yang terus merebak, membuat pemerintah memberlakukan PPKM kembali dan kegiatan ekonomi mulai dibatasi kembali. Namun melihat kekuatan investasi Indonesia di tahun 2020 membuat pemerintah semakin optimis jika investasi masih dapat diandalkan dan berkembang. Kekuatan kinerja investasi domestik di tahun 2021 ternyata mampu bertahan di tengah kondisi yang terjadi saat itu. Terbukti dengan investasi domestik yang terkumpul di tahun 2021 mencapai Rp 447,06 triliun atau mengalami kenaikan sebesar 8,11 persen, kenaikan ini lebih tinggi dibanding tahun lalu. Walaupun kenaikan tersebut tidak diikuti semua sektor, bahkan sektor yang tahun lalu mampu menyerap investasi cukup besar di tahun 2021 malah mengalami penurunan. Sektor yang mengalami penurunan adalah Sektor Konstruksi dan Sektor Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi masing-masing turun sebesar 42,06 persen dan 34,35 persen. Penyerapan investasi tertinggi pada tahun 2021 adalah Sektor Industri dengan

nilai investasi mencapai Rp 94,70 triliun (21,18 persen). Sektor yang juga cukup tinggi menyerap investasi domestik adalah Sektor Perumahan, Kawasan Industri dan Pergudangan dengan nilai investasi mencapai Rp 85,50 triliun (19,12 persen) yang tersebar di 3.257 proyek.

Tabel 7.1. Perkembangan Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Menurut Sektor (Miliar Rupiah) Tahun 2019-2021

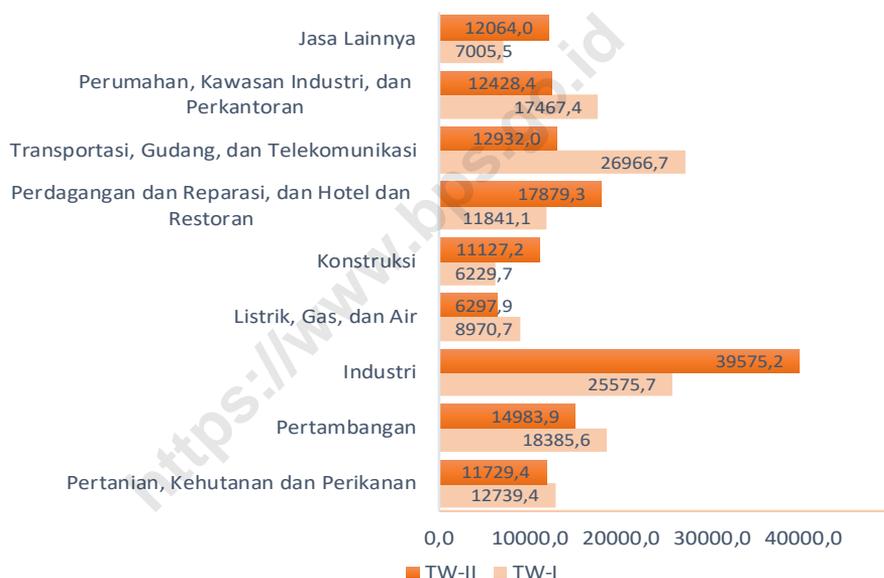
Sektor	2019		2020		2021	
	Proyek	Investasi	Proyek	Investasi	Proyek	Investasi
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1 979	53 213,0 (13,77)	4 675	33 824,9 (8,18)	3 712	37 249,5 (8,33)
Pertambangan	799	25 675,2 (6,64)	1 717	13 755,1 (3,33)	1 518	25 517,1 (5,71)
Industri	7 709	72 673,4 (18,80)	18 300	82 817,7 (20,03)	13 290	94 698,5 (21,18)
Listrik, Gas, dan Air	921	37 164,2 (9,62)	1 921	35 518,8 (8,59)	1 357	38 727,7 (8,66)
Konstruksi	1 690	55 090,8 (14,25)	6 549	68 289,3 (16,51)	11 011	39 569,4 (8,85)
Perdagangan dan Reparasi, dan Hotel dan Restoran	11 200	29 825,9 (7,72)	44 258	26 951,5 (6,52)	53 247	40 251,7 (9,00)
Transportasi, Gudang, dan Telekomunikasi	1 423	68 082,6 (17,62)	4 115	93 282,8 (22,56)	4 490	61 241,5 (13,70)
Perumahan, Kawasan Industri, dan Perkantoran proyek/Jasa Lainnya	1 728	27 796,5 (7,19)	4 347	44 852,8 (10,85)	3 257	85 497,8 (19,12)
	3 002	16 976,7 (4,39)	10 741	14 242,7 (3,44)	14 120	24 310,4 (5,44)
Jumlah	30 451	386 498,4 (100,00)	96 623	413 535,5 (100,00)	106 002	447 063,6 (100,00)

Sumber : Indikator Ekonomi

Memasuki tahun 2022, Indonesia masih diwarnai dengan gelombang baru kasus Covid-19 akibat penyebaran varian Omicron. Kasus harian domestik meningkat meskipun dengan tingkat kematian yang rendah. Dari sisi lain pemulihan ekonomi dan pengelolaan penerimaan negara di tahun 2022 tetap berjalan dan aktivitas manufaktur menunjukkan pemulihan. Melihat kekuatan investasi Indonesia di tahun 2021 membuat pemerintah semakin optimis jika investasi masih dapat berkembang. BKPM memasang target realisasi investasi dalam RPJM sebesar Rp 968 triliun (PMA + PMDN). Melihat kinerja investasi yang baik dan kuat dalam menghadapi wabah pandemi membuat Presiden Jokowi memasang target investasi 2022 bisa mencapai Rp 1.200 triliun (PMA + PMDN). Nilai investasi domestik yang terkumpul selama bulan Januari-Maret 2022 mencapai Rp 10,26 triliun yang tersebar di 15.173 proyek. Memasuki triwulan II (bulan April-Juni 2022) investasi PMDN yang terealisasi mengalami peningkatan sebesar 10,83 persen menjadi Rp 11,37 triliun dari triwulan sebelumnya yang tersebar di 9.864 proyek.

Dari Gambar 7.1 terlihat bahwa dalam triwulan pertama sebagian besar investasi domestik diserap oleh sektor Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi dengan nilai investasi mencapai Rp 26,97 triliun yang tersebar di 2.090 proyek. Posisi kedua adalah sektor Industri dengan nilai investasi mencapai Rp 25,58 triliun yang tersebar di 6.865 proyek. Wabah Covid-19 di triwulan 2 tahun 2022 memasuki pra pandemi dan menunjukkan arah pemulihan. Hal ini terlihat dari aktivitas manufaktur yang semakin kuat dan kegiatan ekonomi mulai bergerak menuju normal. Kinerja investasi domestik semakin menunjukkan kontribusinya. Sektor yang sangat kuat menyerap investasi domestik adalah sektor Industri, dimana dari triwulan sebelumnya mengalami kenaikan sebesar 54,74 persen menjadi Rp 39,58 triliun.

Gambar 7.1. Realisasi PMDN Menurut Sektor Tw I - Tw II 2022



PMDN Menurut Wilayah

Pergerakan investasi domestik yang terealisasi berdasarkan wilayah pada tahun 2019 menunjukkan bahwa Pulau Jawa masih menjadi wilayah yang dilirik oleh para investor domestik. Keunggulan Pulau Jawa karena sudah tersedianya infrastruktur yang sangat memadai. Investasi domestik yang terserap di Pulau Jawa mencapai 52,39 persen dari total investasi domestik dengan nilai investasi mencapai Rp 202,49 triliun. Berarti investasi di luar Pulau Jawa hanya sekitar 47,61 persen dari total investasi domestik. Selanjutnya, posisi kedua pulau yang mampu menyerap investasi domestik adalah Pulau Sumatera dengan nilai investasi domestik mencapai Rp 90,49 triliun atau sekitar 23,41 persen yang tersebar di 5.762 proyek. Investasi yg diserap di Pulau Kalimantan pada tahun 2019 mencapai Rp 52,70 triliun, atau sekitar 13,64 persen yang tersebar di 3.694 proyek.

Gangguan pandemi Covid-19 di tahun 2020 tidak begitu membawa dampak negatif pada kinerja investasi di Indonesia, terbukti dengan masih meningkatnya nilai investasi domestik yang terkumpul. Dampak Covid-19 berimbas pada penyerapan nilai investasi yang terjadi di Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi, dimana masing-masing turun sebesar 13,82 persen dan 12,46 persen dari tahun lalu. Investasi yang terserap di Pulau Jawa mengalami peningkatan 5,91 persen dari tahun sebelumnya yaitu menjadi Rp 214,45 triliun dengan kontribusi sekitar 51,86 persen yang tersebar di 58.826 proyek. Pulau Sumatera di tahun 2020 mampu menyerap investasi sebanyak Rp 111,62 atau sekitar 26,99 persen dari total investasi domestik.

Begitu banyak upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam mendorong peran investasi dalam pemulihan ekonomi Indonesia. Pemerintah juga telah memberikan berbagai kemudahan dalam berinvestasi di Indonesia. Fokus pemerintah saat ini adalah mampu mewujudkan investasi yang inklusif dan berkualitas yaitu adanya keseimbangan realisasi investasi antara Pulau Jawa dan di luar Pulau Jawa. Investasi yang terkumpul mampu meningkatkan nilai tambah dari sumber daya alam dan mineral, serta tumbuhnya sentra-sentra ekonomi baru di daerah. Oleh karena itu pemerintah menetapkan fokus pada pembangunan infrastruktur terutama di wilayah timur dan jaring pengaman sosial serta memiliki kebijakan-kebijakan inovatif guna menciptakan iklim investasi yang kondusif. Salah satu usaha pemerintah adalah dengan membangun tol Manado – Bitung yang ke depannya akan semakin menyuburkan prospek investasi serta pariwisata di wilayah Sulawesi Utara. Pada tahun 2021 meningkatnya nilai investasi domestik yang terealisasi diikuti pula dengan meningkatnya nilai investasi yang terserap di masing-masing pulau, kecuali Pulau Sumatera. Dari total investasi domestik yang terealisasi,

Tabel 7.2. Perkembangan Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Menurut Pulau (Miliar Rupiah), Tahun 2019-2021

Pulau	2019		2020		2021	
	Proyek	Investasi	Proyek	Investasi	Proyek	Investasi
Sumatera	5 762	90 491,8 (23,41)	18 988	111 623,2 (26,99)	20 444	106 924,5 (23,92)
Jawa	17 691	202 493,6 (52,39)	58 826	214 451,0 (51,86)	64 644	227 270,9 (50,84)
Bali & Nusa Tenggara	1 428	14 664,7 (3,79)	4 474	15 043,6 (3,64)	4 590	19 188,3 (4,29)
Kalimantan	3 694	52 704,9 (13,64)	8 818	45 422,0 (10,98)	9 346	62 227,0 (13,92)
Sulawesi	1 660	24 229,7 (6,27)	4 500	21 211,2 (5,13)	5 142	24 301,5 (5,44)
Maluku & Papua	216	1 913,7 (0,50)	1 017	5 784,5 (1,40)	1 836	7 151,4 (1,60)
Jumlah	30 451	386 498,4 (100,00)	96 623	413 535,5 (100,00)	106 002	447 063,6 (100,00)

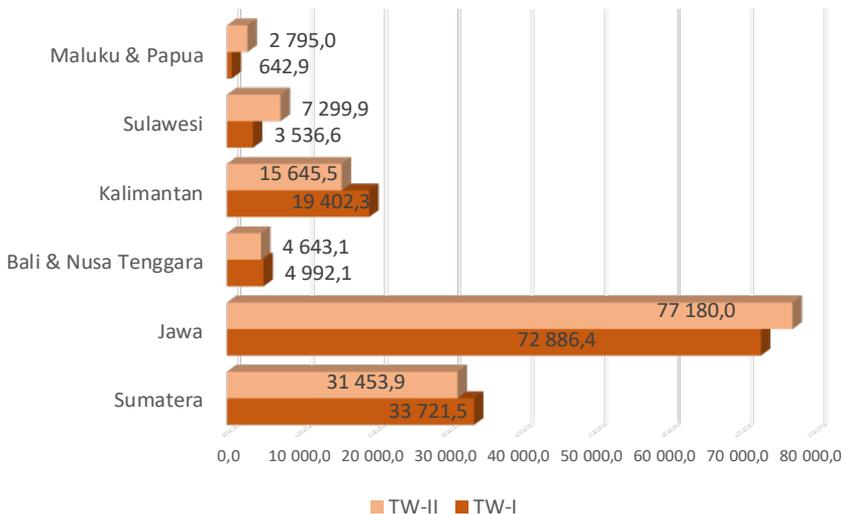
Sumber : Indikator Ekonomi

Pulau Sumatera hanya mampu menyerap sebesar 23,92 persen atau sekitar Rp 106,92 triliun dari investasi domestik. BKPM mencatat kontribusi investasi yang terserap di Pulau Jawa dari tahun ke tahun terus menurun. Di tahun 2021, dari investasi yang terkumpul 50,84 persennya terserap di Pulau Jawa dengan nilai investasi mencapai Rp 227,27 triliun.

Seiring dengan konsumsi swasta yang terus pulih di tengah mobilitas masyarakat yang membaik akibat pelonggaran (pembatasan kegiatan sosial) dan program vaksinasi serta booster, investasi diperkirakan akan terus meningkat. Namun investor lokal tidak mau mengambil risiko di saat kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya stabil, para investor lebih memilih melakukan investasi di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. BKPM mencatat capaian realisasi investasi domestik yang terserap di Pulau Jawa sepanjang bulan Januari-Maret 2022 sebesar Rp 72,89 triliun dengan kontribusi mencapai 53,91 persen. Realisasi PMDN yang masuk ke Pulau Sumatera di triwulan I 2022 sebesar Rp 33,72 triliun atau sekitar 24,94 persen dari total PMDN.

Kinerja investasi domestik di triwulan II 2022, menunjukkan bahwa Pulau Jawa masih menjadi incaran investor lokal terbukti dengan investasi yang terealisasi mencapai Rp 77,18 triliun atau mengalami peningkatan sebesar 5,89 persen dari triwulan sebelumnya (q to q). Usaha pemerintah dalam melakukan pemerataan pembangunan khususnya wilayah timur sebagai refleksi pemerataan ekonomi di Indonesia, mulai melihatkan hasil. Pada triwulan II 2022 pertumbuhan investasi di luar Jawa saat ini cukup stabil dan terus mengalami peningkatan secara signifikan, khususnya wilayah timur. Investasi domestik yang terealisasi di triwulan II 2022 di Pulau Sulawesi serta Pulau Maluku dan Papua masing-masing mencapai Rp 7,30 triliun dan Rp 2,80 triliun, dimana jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya terjadi kenaikan masing-masing sebesar 106,41 persen dan 334,75 persen.

Gambar 7.2. Realisasi PMDN Menurut Pulau Tw I - Tw II 2022



Cara Indonesia Menarik Penanam Modal Asing

Sebagai salah satu negara *emerging market*, Indonesia perlu menarik investasi asing karena investasi yang terkumpul dapat berguna bagi pemulihan perekonomian dan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia dan untuk dapat menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan.

Investasi yang kuat dan konsumsi yang stabil dengan permintaan yang bertumbuh maka Indonesia selalu memiliki kemampuan untuk bertahan. Dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia, Pemerintah menerapkan beberapa strategi untuk menarik investor khususnya investor asing antara lain dengan cara:

- Mengesahkan, selanjutnya mensosialisasikan dan mulai menjalankan UU Cipta kerja yang bertujuan untuk menciptakan iklim berusaha dan investasi yang berkualitas sehingga dapat menciptakan lapangan kerja baru di Indonesia.
- Mendirikan Lembaga Pengelola Investasi (LPI)
Strategi pemerintah untuk menarik investor untuk mau berinvestasi di Indonesia yaitu dengan mendirikan Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau *Indonesia Investment Authority* (INA). Pendirian LPI bertujuan untuk mendapatkan kepercayaan investor dengan adanya lembaga investasi dengan tata kelola yang baik.
- Mengeluarkan Daftar Prioritas Investasi (DPI)
Salah satu strategi pemerintah untuk menarik investor berinvestasi di Indonesia. Daftar Prioritas Investasi (DPI) terdiri dari tiga sektor, yaitu: Sektor prioritas, Sektor yang diperuntukkan bagi koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta Sektor dengan pembatasan tertentu
- Melalui *Online Single Submission* (OSS) sebagai sistem yang mengintegrasikan seluruh pelayanan perizinan berusaha. Dengan adanya OSS yang sifatnya menjadi sentralisasi perizinan dan semuanya dilakukan melalui *online*, perizinan menjadi semakin mudah.
- Menggerakkan Satgas Percepatan Investasi dan melakukan target investor. Melakukan promosi ke luar di tempat investor-investor yang menjadi target, dimana saat ini terdapat 8 *Indonesia Investment Promotion Centre* (IIPC).

Strategi yang diterapkan dan dijalankan oleh pemerintah ke depannya diharapkan dapat memberikan keyakinan, kepastian dan keamanan kepada investor tidak hanya investor lokal tapi juga investor asing/luar. Kebijakan pemerintah khususnya di bidang investasi dapat memberikan keberhasilan dan investasi dapat berjalan dan benar-benar dapat bermanfaat bagi pembangunan.

BKPM mencatat realisasi investasi asing yang terkumpul di tahun 2019 mencapai US\$ 28,21 miliar yang tersebar di 30.354 proyek. Di era pandemi Covid-19, BKPM berusaha menjaga investor asing agar tetap bertahan dan merasa nyaman berinvestasi di Indonesia. Kinerja BKPM ternyata mampu

meningkatkan realisasi investasi di tahun 2020 mencapai US\$ 28,67 miliar yang tersebar di 56.726 proyek. Investasi PMA di tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 1,62 persen dibanding tahun 2019. Masa pandemi tidak serta merta mengancam kegiatan investasi, bahkan kinerja investasi PMA berperan sebagai benteng pertahanan ekonomi.

Investasi PMA Menurut Sektor

Di tengah krisis kesehatan masyarakat akibat hantaman Covid-19, pemerintah dihadapkan pula pada krisis ekonomi. Langkah utama yang dilakukan pemerintah adalah mengendalikan laju penyebaran pandemi sekaligus berusaha mendorong perekonomian agar tetap berjalan dan tumbuh. Pemerintah dan BKPM berusaha menjaga investor asing agar tetap bertahan berinvestasi di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi di berbagai sektor ke depannya menjadi tantangan tersendiri, termasuk kinerja pasar modal.

Pada tahun 2019 realisasi PMA yang dapat dikumpulkan sebagian besar terserap di sektor industri sebesar US\$ 9,55 miliar (33,86 persen) yang tersebar di 9.874 proyek. Posisi kedua adalah sektor Listrik, Gas dan Air yang mampu menyerap investasi asing sebesar 20,99 persen dengan nilai investasi

Tabel 7.3. Perkembangan Realisasi Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) Menurut Sektor (Juta US\$) Tahun 2019-2021

Sektor	2019		2020		2021	
	Proyek	Investasi	Proyek	Investasi	Proyek	Investasi
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1 255	1 037,3 (3,68)	2 294	1 275,0 (4,45)	1 059	1 009,2 (3,25)
Pertambangan	758	2 256,3 (8,00)	1 199	2 005,1 (6,99)	486	3 817,0 (12,28)
Industri	9 874	9 551,1 (33,86)	19 359	13 202,4 (46,06)	8 654	15 803,7 (50,83)
Listrik, Gas, dan Air	646	5 921,2 (20,99)	846	4 613,9 (16,10)	444	2 938,6 (9,45)
Konstruksi	430	161,6 (0,57)	856	189,5 (0,66)	372	93,4 (0,30)
Perdagangan dan Reparasi, dan Hotel dan Restoran	10 171	1 047,1 (3,71)	18 582	875,2 (3,05)	9 575	896,0 (2,88)
Transportasi, Gudang, dan Telekomunikasi	805	4 727,8 (16,76)	1 588	3 580,4 (12,49)	821	3 159,2 (10,16)
Perumahan, Kawasan Industri, dan Perkantoran	1 308	2 888,5 (10,24)	2 209	2 191,4 (7,64)	1 323	2 186,3 (7,03)
Jasa Lainnya	5 107	617,9 (2,19)	9 793	733,3 (2,56)	4 537	1 189,7 (3,83)
Jumlah	30 354	28 208,8 (100,00)	56 726	28 666,3 (100,00)	27 271	31 093,1 (100,00)

Sumber : Indikator Ekonomi

mencapai US\$ 5,92 miliar. Sektor yang menyerap investasi asing di posisi ketiga adalah sektor Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi mencapai 16,76 persen dengan nilai investasi mencapai US\$ 4,73 miliar.

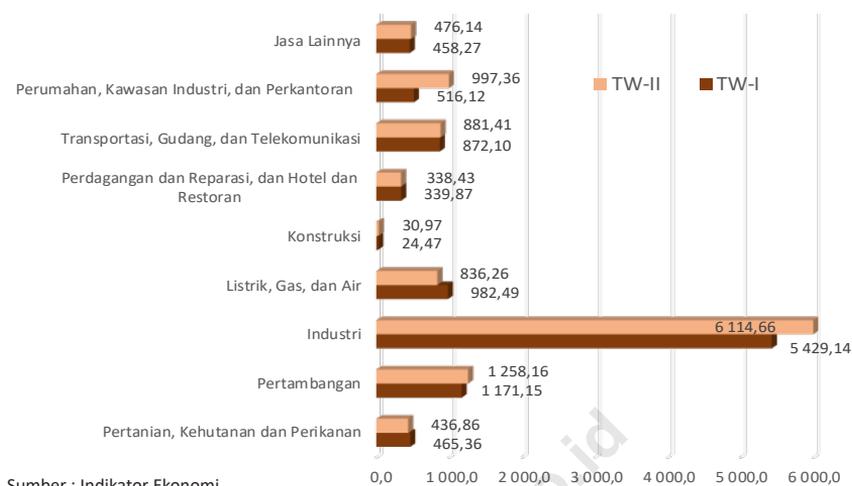
Hantaman Covid-19 di tahun 2020 tidak menurunkan kinerja investasi asing di Indonesia, bahkan sektor industri masih menjadi daya tarik tersendiri bagi para investor asing untuk menanamkan modalnya. Sektor Industri pada tahun 2020 mampu menyerap investasi asing sebesar 46,06 persen dari total PMA. Nilai investasi asing di sektor tersebut mencapai US\$ 13,20 miliar atau mengalami kenaikan sebesar 38,23 persen dibanding tahun lalu. Namun jika dilihat investasi yang terserap dimasing-masing sektor, sebagian besar sektor mengalami penurunan. Di peringkat kedua, sektor yang mengalami kenaikan tertinggi nilai investasi asing di tahun 2020 adalah sektor Pertanian yaitu mencapai 22,92 persen dengan nilai investasi sebesar US\$ 1,28 miliar (4,45 persen) yang tersebar di 2.294 proyek.

Kondisi investasi asing yang masuk ke Indonesia di tahun 2021 di saat pandemi masih berlangsung secara total menunjukkan peningkatan, yang berarti tidak menyurutkan minat investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Namun jika dilihat menurut sektor, para investor asing cenderung tidak mau mengambil risiko dan memilih sektor yang cukup kuat, menguntungkan dan menjanjikan, yaitu sektor Industri. Nilai investasi asing yang terserap di sektor Industri mengalami peningkatan 19,70 persen dibanding tahun lalu dengan nilai investasi mencapai US\$ 15,80 miliar. Sektor yang mengalami peningkatan investasi asing cukup tinggi dari tahun sebelumnya adalah sektor Pertambangan dan sektor Jasa Lainnya yang masing-masing meningkat 90,36 persen (US\$ 3,82 miliar) dan 62,24 persen (US\$1,19 miliar) dibanding tahun 2020. Kondisi ini memberikan harapan bagi Indonesia ke depannya dimana investasi asing dapat terus masuk ke Indonesia dan menjadi modal pendamping dalam pembangunan proyek-proyek infrastruktur.

Pertumbuhan yang kuat pada triwulan IV tahun 2021 memberikan sinyal positif prospek ekonomi di tahun 2022 dan meningkatkan keyakinan pelaku pasar terhadap pemulihan ekonomi Indonesia. Sektor Industri Pengolahan masih memegang peranan sangat penting dalam peningkatan realisasi investasi dan tetap menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi. Realisasi investasi asing yang terserap di Sektor Industri pada triwulan I 2022 mencapai US\$ 5,43 miliar atau sekitar 52,92 persen dari total investasi asing. Memasuki triwulan II 2022 sektor Industri masih menunjukkan keperkasannya terbukti dengan nilai investasi asing yang terserap mencapai US\$ 6,11 miliar atau meningkat 12,63 persen dibanding triwulan sebelumnya (q to q), dimana 53,78 persen investasi asing yang masuk terserap di sektor Industri.

Investasi PMA semakin meningkat dari triwulan sebelumnya, namun tidak diikuti kenaikan investasi yang terserap di setiap sektor. Selain sektor Industri, sektor yang juga mengalami kenaikan dari triwulan sebelumnya adalah sektor Perumahan, Kawasan Industri, dan Perkantoran; sektor Konstruksi; sektor Pertambangan; Sektor Jasa Lainnya; dan Sektor Transportasi, Gudang, dan Telekomunikasi, masing-masing naik sebesar 93,24 persen; 26,53 persen; 7,43 persen; 3,90 persen; dan 1,07 persen.

Gambar 7.3. Realisasi PMA Menurut Sektor Tw I - Tw II 2022



Investasi PMA Menurut Wilayah

Pulau Jawa masih menjadi wilayah yang paling diminati oleh investor asing, walaupun kontribusinya dari tahun ke tahun semakin menurun. Pada tahun 2019 investasi asing yang terserap di Pulau Jawa mencapai 54,86 persen dari total investasi asing, dengan nilai investasi asing sebesar US\$ 15,48 miliar, yang tersebar di 19.801 proyek. Sementara itu, sebanyak 45,14 persen tersebar di luar Pulau Jawa dengan nilai investasi asing yang terserap di Pulau Sumatera dan Pulau Sulawesi masing-masing sebesar 15,07 persen dan 12,40 persen.

Tabel 7.4. Perkembangan Realisasi Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) Menurut Pulau (Juta US\$) Tahun 2019-2021

Pulau	2019		2020		2021	
	Proyek	Nilai	Proyek	Nilai	Proyek	Nilai
Sumatera	3 809	4 251,3 (15,07)	6 665	6 188,8 (21,59)	3 138	5 368,6 (17,27)
Jawa	19 801	15 476,3 (54,86)	39 529	13 499,3 (47,09)	18 160	14 075,2 (45,27)
Bali & Nusa Tenggara	4 029	823,5 (2,92)	6 263	676,6 (2,36)	3 884	775,2 (2,49)
Kalimantan	1438	2 131,4 (7,56)	2 328	1 624,2 (5,67)	1 165	1 621,8 (5,22)
Sulawesi	918	3 497,2 (12,40)	1 393	3 513,4 (12,26)	669	4 897,5 (15,75)
Maluku & Papua	359	2 028,7 (7,19)	548	3 164,0 (11,04)	255	4 354,8 (14,01)
Jumlah	30 354	28 208,8 (100,00)	56 726	28 666,3 (100,00)	27 271	31 093,1 (100,00)

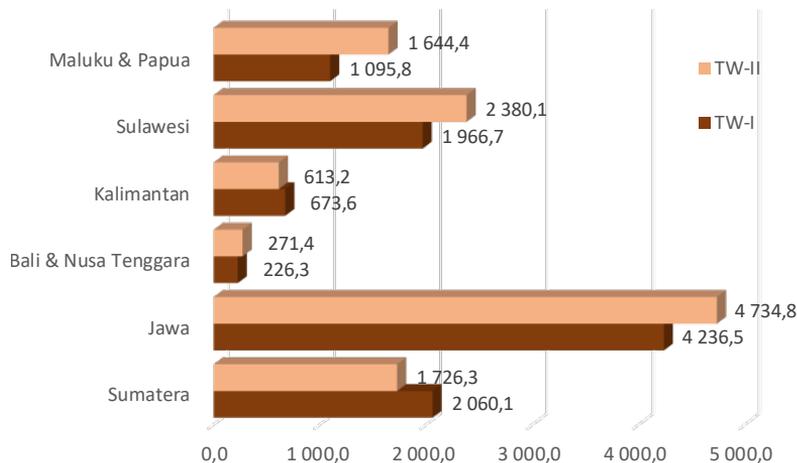
Sumber : Indikator Ekonomi

Dari investasi asing yang terkumpul di tahun 2020, Pulau Jawa masih menjadi incaran investor asing meskipun kontribusinya menurun. Investasi asing yang terserap di Pulau Jawa hanya sebesar 47,09 persen dengan nilai investasi mencapai US\$ 13,50 miliar atau turun sekitar 12,77 persen. Pulau yang menyerap investasi asing di tahun 2020 dan mengalami kenaikan adalah Pulau Sumatera yang mampu menyerap investasi asing sebesar US\$ 6,19 miliar (21,59 persen) dan mengalami kenaikan sekitar 45,57 persen. Selanjutnya adalah Pulau Sulawesi serta Pulau Maluku dan Papua yang masing-masing mengalami kenaikan sebesar 0,46 persen (US\$ 3,51 miliar) dan 55,96 persen (US\$ 3,16 miliar).

Investasi dapat membantu jalannya roda pembangunan perekonomian. Namun, kita tidak boleh hanya mengandalkan sepenuhnya kepada investasi yang menjadi motor perekonomian dan pembangunan negara ke depannya. Harapannya, investasi berperan sebagai modal pendamping dalam membantu mempercepat pekerjaan proyek-proyek tertentu bagi Indonesia.

Menginjak tahun 2022, wabah Covid-19 masih menyelimuti Indonesia. Namun kondisi ini tidak membuat kinerja investasi Indonesia melemah, masih mampu bertahan dan bergerak untuk mengajak investor asing tetap menanamkan modalnya di Indonesia. Pertumbuhan investasi di luar Jawa saat ini cukup stabil dan terus mengalami meningkat secara signifikan. Persebaran investasi pada triwulan I tahun 2022 di luar Pulau Jawa mencapai US\$ 6,02 triliun (58,70 persen), melebihi investasi di Pulau Jawa sebesar US\$ 4,24 triliun (41,30 persen). Investasi yang terserap di Pulau Sumatera pada triwulan I 2022 mencapai US\$ 2,06 triliun (20,08 persen). Investasi asing yang terealisasi di Pulau Sulawesi serta Pulau Maluku dan Papua masing-masing mencapai US\$ 1,97 miliar (19,17 persen) dan US\$ 1,10 miliar (10,68 persen), sedangkan Pulau Kalimantan dan Pulau Bali dan Nusa masih dibawah US\$ 1 miliar.

Gambar 7.4. Realisasi PMA Menurut Pulau Tw I - Tw II 2022



Sumber: BKPM

Investasi masih menjadi andalan pemerintah di saat pandemi karena kinerjanya masih menunjukkan pergerakan positif. Memasuki triwulan II tahun 2022 investor asing mulai banyak yang melirik atau menanamkan modalnya di luar Pulau Jawa, berbeda dengan investor domestik yang masih menanamkan modalnya di Pulau Jawa. Investasi yang terserap di Pulau Jawa mengalami kenaikan 11,76 persen dibanding triwulan I 2021. Kenaikan investasi di triwulan II 2021 juga terjadi di Pulau Maluku dan Papua, Pulau Sulawesi, serta Pulau Bali dan Nusa Tenggara, masing-masing naik sebesar 50,07 persen, 21,02 persen, dan 19,95 persen. Nilai investasi yang terserap di Pulau Sulawesi mencapai Rp 2,38 triliun (20,93 persen) dan investasi yang terserap di Pulau Sumatera mencapai Rp 1,73 triliun (15,18 persen).

Kebijakan dan program-program yang dibuat pemerintah di bidang investasi dirancang agar ke depannya investasi yang terkumpul baik PMDN maupun PMA dapat semakin berkualitas dan merata ke luar Pulau Jawa, dimana investor tidak hanya berpusat di Pulau Jawa saja. Pembangunan infrastruktur yang sudah dilakukan dan yang sedang dilakukan di luar Pulau Jawa diharapkan mampu membawa investor asing merasa nyaman berinvestasi ke daerah-daerah yang selama ini belum dieksplorasi secara maksimal. Usaha pemerintah dalam pembangunan infrastruktur di luar Pulau Jawa, seperti pembangunan trans Sumatera, trans Kalimantan, trans Maluku dan trans Papua mulai terlihat dengan masuknya investasi asing ke luar Pulau Jawa. Pulau yang mulai dilirik investor asing adalah Pulau Sumatera dan wilayah Timur Indonesia (Maluku Utara dan Papua).

Pemerintah berharap, pembentukan Lembaga Pengelola Investasi (LPI) sebagai amanat dari Undang-Undang Cipta Kerja dapat mendorong meningkatnya arus modal yang masuk ke Indonesia, mendorong tumbuhnya investasi di sektor riil, dan membuka lapangan kerja baru. Tersedianya lapangan kerja baru dapat mengurangi tingkat pengangguran dan mendorong percepatan pemulihan ekonomi Indonesia.

Investasi PMA Menurut Negara Asal

Investasi asing yang masuk ke Indonesia pada tahun 2019 sebagian besar berasal dari negara-negara yang berada di Benua Asia. Negara asal investor yang menanamkan modalnya di Indonesia paling besar adalah Negara Singapura, diikuti oleh Negara Tiongkok, Jepang dan Hongkong. Dari ke 4 negara tersebut diperoleh realisasi PMA sebesar US\$ 18,46 miliar atau sekitar 65,43 persen dari total realisasi PMA yang masuk ke Indonesia tahun 2019. Negara Belanda menduduki peringkat ke 5 yang menanamkan modalnya di Indonesia dengan nilai investasi mencapai US\$ 2,60 miliar.

Tahun 2020 menjadi tahun yang sulit bagi semua negara yang terkena hantaman wabah Covid-19, termasuk Indonesia. Negara Tiongkok sebagai wilayah pertama ditemukannya wabah Covid-19 ternyata tidak menyurutkan kegiatan investor dari negara tersebut untuk berinvestasi ke Indonesia di saat pandemi. Investasi asing yang masuk dari Negara Tiongkok pada tahun 2020

masih mengalami kenaikan dari tahun 2019 yaitu sekitar 2,06 persen dengan nilai mencapai US\$ 4,84 miliar. Kenaikan investasi asing tertinggi dari negara di Benua Asia adalah Negara Korea Selatan yang mencapai 72,11 persen dengan nilai investasi mencapai US\$ 1,84 miliar. Investasi asing tertinggi berasal dari Negara Singapura dengan nilai investasi mencapai US\$ 9,78 miliar yang mengalami kenaikan sebesar 50,23 persen dari tahun lalu. Lima negara di Benua Asia yang menanamkan modalnya di Indonesia paling besar adalah Singapura, Tiongkok, Hongkong, Jepang, dan Korea Selatan, dimana negara-negara tersebut mengalami kenaikan cukup tinggi di tahun 2020 kecuali Negara Jepang turun hingga 39,97 persen dengan nilai investasi hanya US\$ 2,59 miliar.

Sepanjang tahun 2021 ini, negara-negara yang berada di Benua Asia yang nilai investasinya paling tinggi di Indonesia mengalami penurunan investasi yaitu sebesar 3,86 persen. Investasi dari Negara tetangga Singapura, Jepang, Tiongkok dan Korea Selatan mengalami penurunan kecuali negara Hongkong. Investasi dari negara Hongkong yang masuk ke Indonesia di tahun 2021 mencapai US\$ 4,61 miliar atau naik sekitar 30,36 persen. Walaupun

Tabel 7.5. Perkembangan Realisasi Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) Menurut Negara Asal (Juta US\$) Tahun 2019-2021

Negara	2019		2020		2021	
	Proyek	Nilai	Proyek	Nilai	Proyek	Nilai
AMERIKA/AMERICA	2 556	2 139,1	3 590	1 566,1	1 591	3 880,1
U.S.A.	788	989,3	1 471	749,7	824	2 537,2
Amerika Lainnya / Rest Of America	1 768	1 149,8	2 119	816,4	767	1 342,9
EROPA/EUROPE	5 286	3 655,5	9 275	2 232,5	5 096	3 453,0
Belanda / Netherlands	1 345	2 596,8	2 537	1 422,4	1 243	1 761,6
Inggris / United Kingdom	757	142,1	1 386	192,8	705	322,9
Swiss / Switzerland	324	150,7	554	130,9	281	599,8
Perancis/France	723	167,4	1 079	25,1	709	145,8
Jerman / Germany	533	189,3	1 008	143,6	515	182,3
Eropa Lainnya / Rest of Europe	1 604	409,2	2 711	317,7	1 643	440,5
A S I A	20 869	21 567,4	41 310	24 297,4	19 295	23 358,7
Singapura / Singapore	7 020	6 509,6	15 088	9 779,1	6 934	9 390,1
Jepang / Japan	3 835	4 310,9	8 817	2 588,0	3 623	2 263,2
Tiongkok / China	2 130	4 744,5	3 027	4 842,4	1 806	3 160,4
Korea Selatan / South Korea	2 952	1 070,2	5 468	1 841,9	2 511	1 640,2
Hongkong	1 508	2 891,0	2 789	3 535,9	1 418	4 609,3
Asia Lainnya / Rest of Asia	3 424	2 041,1	6 121	1 710,0	3 003	2 295,5
AUSTRALIA	1 247	519,9	1 908	390,1	1 014	236,3
Australia	1 049	348,3	1 562	348,6	839	195,2
Australia Lainnya / Rest of Australia	198	171,7	346	41,6	175	41,1
AFRIKA/AFRICA	396	326,9	643	180,2	275	165,0
Nigeria	26	0,2	10	0,1	3	0,7
Afrika Lainnya / Rest Of Africa	370	326,6	633	180,1	272	164,3
J U M L A H / T O T A L	30 354	28 208,8	56 726	28 666,3	27 271	31 093,1

Sumber: Indikator Ekonomi

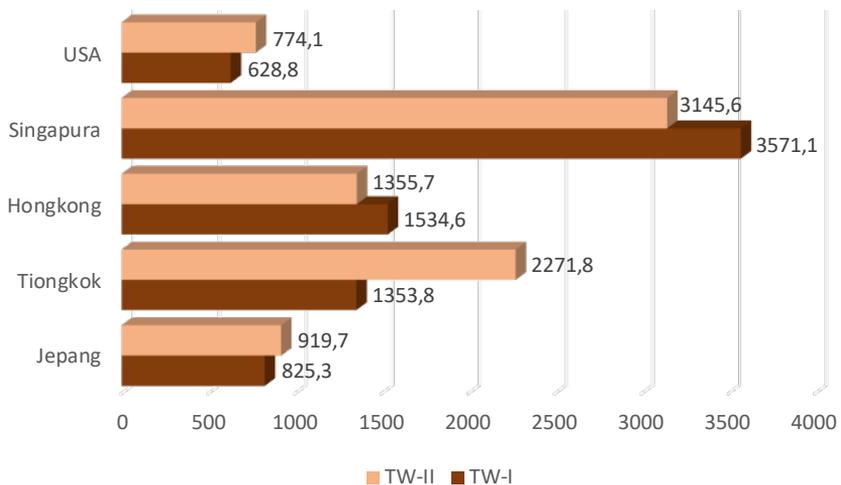
mengalami penurunan investasi dari negara yang berada di Benua Asia, total investasi dari negara-negara tersebut mencapai US\$ 23,36 miliar atau sekitar 75,13 persen dari total PMA yang masuk ke Indonesia. Investasi yang berasal dari negara-negara di Benua Eropa mengalami kenaikan di tahun 2021. Kenaikan yang sangat signifikan adalah investasi yang masuk dari negara Amerika Serikat di tahun 2021 mencapai 238,42 persen dibanding investasi di tahun 2020 dengan nilai mencapai US\$ 2,54 miliar.

Berdasarkan negara asal investor di tahun 2022, investasi asing yang masuk ke Indonesia sebagian besar didominasi negara-negara yang berasal dari benua Asia, yaitu lebih dari 70 persen dari total PMA yang masuk. Namun terlihat dalam dua triwulan terakhir, Amerika Serikat masuk ke dalam 5 besar negara asal PMA yang membuktikan adanya diversifikasi sumber negara asal yang tidak hanya terfokus pada wilayah yang ada di Benua Asia saja.

Pada triwulan I 2022, negara asal terbesar investasi asing yang masuk ke Indonesia, adalah Negara Singapura dengan investasi mencapai US\$ 3,57 miliar (34,81 persen), Hongkong dengan nilai US\$ 1,53 miliar (14,96 persen), Tiongkok dengan nilai investasi mencapai US\$ 1,35 miliar (13,20 persen), Jepang dengan nilai investasi mencapai US\$ 0,83 miliar (8,04 persen). Salah satu negara di luar Benua Asia dengan nilai investasi yang cukup besar adalah Amerika Serikat dengan nilai investasi mencapai US\$ 0,63 miliar (6,13 persen).

Investasi asing yang masuk ke Indonesia di triwulan II tahun 2022 masih didominasi negara-negara di Benua Asia. Negara Singapura masih menjadi yang tertinggi walaupun investasi dari investor Singapura yang masuk ke Indonesia mengalami penurunan dibanding triwulan I 2022. Pada triwulan II 2022, penurunan investasi dari Negara Singapura sebesar 11,92 persen yaitu hanya sebesar US\$ 3,15 miliar. Penurunan investasi asing juga terjadi dari Negara Hongkong, turun sebesar 11,66 persen atau hanya mampu berinvestasi

Gambar 7.5 Realisasi PMA Menurut Negara Asal Tw I - TW II 2022



Sumber : Indikator Ekonomi

sebesar US\$ 1,36 miliar. Investasi asing yang berasal dari Negara Tiongkok, Jepang, dan Amerika Serikat mengalami peningkatan dengan nilai investasi masing-masing sebesar US\$ 2,27 miliar, US\$ 0,92 miliar, dan US\$ 0,77 miliar. Harapan wabah Covid-19 segera berlalu tidak hanya di Indonesia tetapi juga di negara-negara mitra dagang Indonesia dan negara-negara asal investasi yang masuk di Indonesia sehingga ke depannya mampu meningkatkan kegiatan ekspor dan kinerja investasi ke depan.

Perdagangan Saham Di Bursa Efek Indonesia

Pasar Modal merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik surat utang (obligasi), ekuiti (saham), reksa dana, instrumen derivatif maupun instrumen lainnya. Menurut Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagai sarana bagi pendanaan usaha atau sebagai sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan dana dari masyarakat pemodal (investor). Dana yang diperoleh dari pasar modal dapat digunakan untuk pengembangan usaha, ekspansi, penambahan modal kerja dan lain-lain. Selain itu juga pasar modal menjadi sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi pada instrumen keuangan seperti saham, obligasi, reksa dana, dan lain-lain. Instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar modal merupakan instrumen jangka panjang (jangka waktu lebih dari 1 tahun).

Awal pandemi Covid-19 yang berasal dari Wuhan Tiongkok di tahun 2019 belum berimbas pada perdagangan saham di bursa efek Indonesia. Pergerakan perdagangan saham sangat dinamis hingga tahun 2019. Jumlah saham yang diperdagangkan mencapai 3,56 triliun lembar saham dengan nilai transaksi mencapai Rp 2.230,92 triliun. Peningkatan jumlah investor dan pertumbuhan pasar modal menunjukkan kepercayaan investor dan pelaku pasar.

Para investor juga harus siap dengan risiko atau kondisi seperti yang terjadi saat pandemi di tahun 2020 dimana semua sektor terkena imbasnya tak terkecuali pasar modal. Jumlah saham yang diperdagangkan terjadi penurunan sekitar 22,73 persen menjadi 2,75 triliun lembar saham dengan nilai transaksi Rp 2.228,80 triliun atau turun sebesar 0,10 persen. Hal ini mencerminkan sebagian besar perilaku investor cenderung *wait and see*, menunggu waktu yang tepat untuk melakukan transaksi.

Pandemi Covid-19 belum berakhir di tahun 2021 dan program penanganan Covid-19 terus berjalan. Vaksinasi terus dilakukan membuat kasus harian mulai menurun. Aktivitas ekonomi mulai menggeliat dan berjalan sejak triwulan III dan IV tahun 2021. Kepercayaan masyarakat dalam melakukan aktivitas ekonomi juga mulai kembali berjalan mendorong kegiatan manufaktur dan lainnya bergerak menandakan mulai pulihnya aktivitas dan konsumsi masyarakat. Kinerja perbankan dan pasar modal berjalan baik, membuat investor pasar modal meningkat. Tahun 2021 merupakan puncak

kejayaan pasar modal di Indonesia dimana jumlah saham dan nilai transaksi pada tahun tersebut menjadi capaian yang tertinggi dalam empat tahun terakhir. Kinerja positif pasar modal menunjukkan bahwa jumlah saham yang diperdagangkan meningkat hampir 2 kali lipat dari tahun 2020 yaitu mencapai 5,10 triliun lembar saham dengan nilai transaksi mencapai Rp 3.302,93 triliun.

Perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia setiap bulan di tahun 2022 menunjukkan bahwa di bulan Januari hingga Maret 2022, jumlah saham yang diperdagangkan mengalami peningkatan, begitu juga dengan nilai transaksinya. Namun, jumlah saham yang diperdagangkan di bulan April 2022 sampai dengan bulan Mei 2022 terus mengalami penurunan, begitu pula dengan nilai transaksinya yang juga terus menurun. Tercatat pada bulan Mei 2022, jumlah saham yg diperdagangkan hanya mencapai 330,61 miliar lembar saham dengan nilai transaksi hanya sebesar Rp 281,79 triliun.

Pemerintah terus berkomitmen untuk memperbaiki iklim investasi di Indonesia, salah satunya melalui implementasi Undang-Undang Cipta Kerja. Hal ini dilakukan untuk mendorong peningkatan jumlah IPO di pasar modal Indonesia. Jumlah emiten setiap tahun terus mengalami kenaikan, dari 650 emiten di tahun 2016 meningkat menjadi 804 emiten di tahun 2019. Jumlah emiten terus bertambah di tahun 2020 sudah mencapai 849 emiten dan di tahun 2021 sudah ada sebanyak 902 emiten.

Keberadaan jumlah emiten di tahun 2022 menunjukkan peningkatan setiap bulannya. Pada awal tahun 2022 di bulan Januari ada penambahan 5 emiten baru dari bulan sebelumnya menjadi 907 emiten. Selanjutnya di bulan Februari dan Maret 2022 dimana masing-masing ada penambahan 4 dan 5

Tabel 7.6. Transaksi dan Indeks Saham di Bursa Efek Indonesia, 2016-2022 (Januari-Mei)

Periode	Jumlah saham yang diperdagangkan (miliar lembar)	Nilai transaksi (miliar rupiah)	Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)	Jumlah Emiten	Emisi saham (miliar lembar)	Nilai emisi (triliun rupiah)
2016	1 925,42	1 844 588	5 297	650	317 493	810
2017	2 844,85	1 809 592	6 356	688	611 290	907
2018	2 536,28	2 040 086	6 195	745	4 651 479	959
2019	3 562,37	2 230 919	6 300	804	4 832 407	1 003
2020	2 752,47	2 228 798	5 979	849	6 291 282	1 026
2021	5 096,45	3 302 932	6 581	902	6 721 396	1 285
2022						
Januari	415,15	256 484	6 631	907	6 727 294	1 286
Februari	442,34	248 751	6 888	911	6 750 536	1 291
Maret	534,79	375 567	7 071	916	6 796 591	1 306
April	482,98	356 509	7 229	920	6 803 965	1 315
Mei	330,61	281 786	7 149	921	6 805 215	1 315

Sumber: IDX Annually Statistics dan SEKI

emiten baru sehingga menjadi 911 emiten di bulan Februari 2022 dan 916 emiten di bulan Maret 2022. Penambahan emiten terus berlanjut di bulan April dan Mei 2022 masing-masing menjadi 920 emiten dan 921 emiten.

Ekonomi Indonesia sempat lumpuh akibat pandemi Covid-19. Namun, kinerja di pasar modal Indonesia masih berjalan dan masih banyak investor yang menanamkan investasinya. Pada 2019 lalu, emisi saham tercatat sebesar 4.832,41 triliun lembar dengan nilai emisi mencapai Rp 1.003 triliun. Kondisi Covid-19 yang terjadi selama tahun 2020 dan 2021 tidak membawa pengaruh negatif pada emisi saham dan nilai emisinya terus mengalami kenaikan setiap tahunnya yang terlihat pada Tabel 7.6. Pada tahun 2021, tercatat emisi saham mencapai 6.721,40 triliun lembar dengan nilai emisi mencapai Rp 1.285 triliun.

Bertambahnya jumlah emiten diikuti dengan jumlah dan nilai emisi saham yang dikeluarkan oleh para emiten yang terus meningkat setiap bulannya di tahun 2022. Pada awal tahun 2022, tercatat ada sebanyak 6.727,29 triliun lembar dengan nilai mencapai Rp 1.286 triliun. Emisi saham di bulan Mei 2022 mencapai 6.805,22 triliun lembar dengan nilai emisi mencapai Rp 1.315 triliun.

Sementara itu, IHSG pada tahun 2019 ditutup dengan nilai 6300. Adanya pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia pada tahun 2020 membawa dampak negatif pada IHSG. Terjadi koreksi besar-besaran Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada tahun 2020 yang ditutup pada level 5979.

Perlahan ekonomi Indonesia mulai bangkit setelah pandemi melanda walaupun belum sepenuhnya terbebas dari wabah Covid-19. Ekonomi Indonesia mulai bergerak naik mengejar ketertinggalan, aktivitas masyarakat sudah agak dilonggarkan tetapi protokol kesehatan masih tetap dijalankan. Kegiatan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia menunjukkan arus modal asing kembali masuk ke Indonesia. Kondisi tersebut membuat IHSG di lantai bursa tahun 2021 ditutup di level 6 581.

Memasuki tahun 2022 perbaikan di sektor riil mulai terlihat didukung dengan perbaikan sektor keuangan. Arus modal asing kembali masuk ke negara berkembang sehingga mendorong IHSG meningkat setiap bulannya. Perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Januari 2022 sangat bergairah membuat IHSG berada di level 6631. IHSG di bulan Februari–April 2022 terus mengalami kenaikan setiap bulannya. Namun di bulan Mei 2022, IHSG terkoreksi atau mengalami penurunan menjadi 7149 dibanding bulan April sebesar 7 229.

Investasi Asing yang Masuk ke Indonesia

Indonesia masih menjadi tujuan para investor asing untuk menanamkan modalnya. Faktor utama yang menjadi salah satu daya tarik investor asing karena Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dan menjanjikan. Faktor utama yang menjadi salah satu faktor penting investor asing melirik Indonesia

adalah sumber daya alam yang sangat melimpah. Banyak faktor yang menarik dan menguntungkan apabila investor asing melakukan investasi di Indonesia. Salah satunya adalah sektor pariwisata, dimana Indonesia memiliki alam yang sangat indah dan cantik. Hal tersebut yang biasanya menjadi pertimbangan utama para investor asing memilih untuk melakukan Investasi di Indonesia.

Peran investor asing di pasar saham Indonesia masih penting terutama dalam menggerakkan IHSG. Peralpnya, pola investasi investor asing yang biasanya *buy and hold* dinilai akan lebih menyeimbangkan transaksi aktif di pasar saham beriringan dengan tren trading investor lokal. Perdagangan saham di Indonesia tidak terlepas dari peran investor asing. Pada tahun 2019, jumlah saham yang dibeli oleh pihak asing sebanyak 329,57 miliar lembar saham dengan nilai beli mencapai Rp 642,95 triliun, sedangkan jumlah saham yang dijual mencapai 441,43 miliar lembar dengan nilai jual mencapai Rp 682,82 triliun. Terjadinya pandemi tahun 2020 tidak mempengaruhi minat investor asing untuk membeli saham yang mencapai 375,17 miliar lembar saham dengan nilai beli Rp 677,32 triliun. Namun ada juga investor asing yang menjual sahamnya yaitu sebanyak 432,90 miliar lembar dengan nilai jual mencapai Rp 725,13 triliun.

Sepanjang 2021, perekonomian global dihadapkan pada berbagai tantangan seperti kenaikan harga energi, *disrupsi supply chain*, krisis *Evergrande* Tiongkok, serta risiko yang memengaruhi arus modal Indonesia seperti *tapering off The FED* dan potensi kenaikan suku bunga acuan AS. Kondisi tersebut ternyata tidak memengaruhi para investor asing untuk membeli saham pasar modal Indonesia dan jumlahnya lebih banyak dibandingkan tahun 2020 yaitu sebanyak 521,72 miliar lembar dengan nilai mencapai Rp 850,81 triliun. Namun banyak juga investor asing yang menjual sahamnya yaitu mencapai 567,60 miliar lembar dengan nilai jual hanya mencapai Rp 812,83 triliun.

Memasuki tahun 2022 pemulihan ekonomi Indonesia berjalan baik. Selain itu, Indonesia juga diuntungkan dengan terjadinya perang Rusia dan Ukraina yang membuat terjadinya kenaikan ekspor Indonesia sejak awal tahun dan membuat neraca dagang Indonesia surplus. Kebijakan pemerintah yang cukup proaktif dalam memanfaatkan momentum membuat pemulihan ekonomi Indonesia sudah berjalan dengan baik. Pada bulan Januari 2022, volume saham yang dibeli oleh pihak asing sebanyak 40,43 miliar lembar dengan nilai mencapai Rp 81,47 triliun, sedangkan volume saham yang dijual oleh pihak asing mencapai 48,12 miliar lembar dengan nilai sebesar Rp 75,37 triliun. Memasuki bulan ketiga yaitu Maret 2022 terjadi kenaikan yang sangat tinggi hampir dua kali lipat, dimana saham yang dibeli oleh pihak asing adalah yang tertinggi mencapai 80,33 miliar lembar dengan nilai mencapai Rp 135,32 triliun. Volume saham yang dijual oleh pihak asing juga cukup tinggi mencapai 96,35 miliar lembar dengan nilai sebanyak Rp 126,87 triliun.

Perdagangan saham yang dibeli oleh pihak asing di bulan April dan Mei 2022 terjadi penurunan setiap bulannya, tetapi harga beli saham di bulan April naik dibanding bulan Maret dan menurun di bulan Mei. Volume saham yang

dijual oleh pihak asing pada bulan April dan Mei menurun, sedangkan nilai jual saham yang dijual pada bulan April turun dibanding bulan Maret dan naik pada bulan Mei dibanding bulan April 2022.

Pihak asing yang melakukan transaksi jual beli saham di bulan Juni dan Juli 2022 terlihat bahwa volume saham yang dibeli lebih banyak dari volume saham yang dijual. Namun jika dilihat nilai transaksi yang dilakukan di bulan Juni-Juli 2022 menunjukkan bahwa nilai beli saham oleh pihak asing lebih rendah dibanding nilai jualnya.

Hal-hal yang harus diwaspadai di tahun 2022 adalah penyebaran Covid-19 dengan varian baru omicron, kenaikan inflasi, *tapering off*, dan kondisi negara-negara lain yang mengalami kelangkaan energi yang ini mungkin akan mengganggu ekspor Indonesia. Kinerja pasar modal masih berjalan cukup baik di tahun 2022, ditandai dengan jumlah investor pasar modal yang terus meningkat. Jika dilihat berdasarkan porsi kepemilikan aset pasar modal Indonesia lebih didominasi oleh investor domestik, kondisi ini bisa mengurangi risiko eksternal. Selain itu juga mayoritas investor pasar modal Indonesia didominasi investor dengan kategori usia di bawah 30 tahun. Kategori ini memiliki literasi keuangan dan digital yang relatif tinggi sehingga lebih cepat menyerap informasi baru di pasar modal.

Tabel 7.7. Jumlah dan Nilai Perdagangan Saham yang Dilakukan oleh Investor Asing di Bursa Efek Indonesia, 2018-2022 (Januari-Juli)

Periode	Volume (Juta lembar)		Nilai (Miliar Rupiah)	
	Beli	Jual	Beli	Jual
2018	297 835	327 492	688 492	672 323
2019	329 565	441 427	642 946	682 816
2020	375 165	432 902	677 316	725 129
2021	521 724	567 600	850 807	812 833
2022				
Januari	40 427	48 124	81 467	75 372
Februari	41 299	47 650	83 001	65 494
Maret	80 333	96 351	135 318	126 871
April	67 627	62 224	140 645	100 528
Mei	47 220	54 106	103 114	106 664
Juni	74 835	72 620	103 071	110 550
Juli	68 125	51 720	68 570	70 820

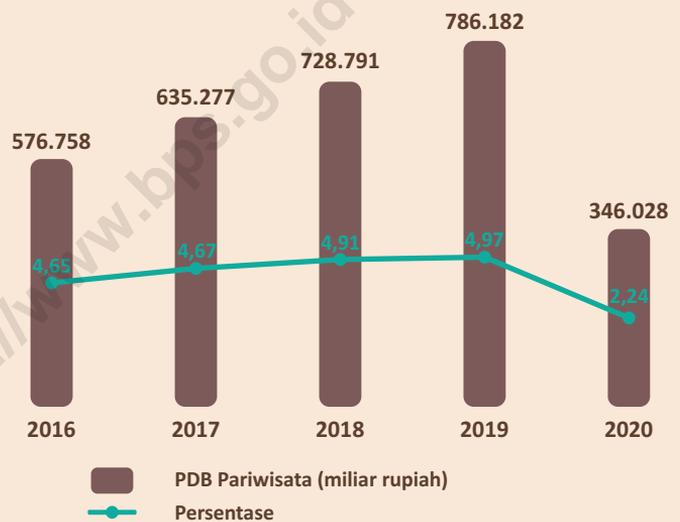
Sumber: IDX Annually Statistics, , IDX Monthly Statistics

PARIWISATA



Kontribusi Pariwisata terhadap PDB Nasional pada tahun 2020 turun menjadi 2,24 persen

KONTRIBUSI PARIWISATA TERHADAP PDB NASIONAL



JUMLAH KUNJUNGAN WISMAN MENURUT KEBANGSAAN (ribu kunjungan)



Pada Tahun 2021, terdapat 480,72 ribu kunjungan wisman berkebangsaan Malaysia ke Indonesia

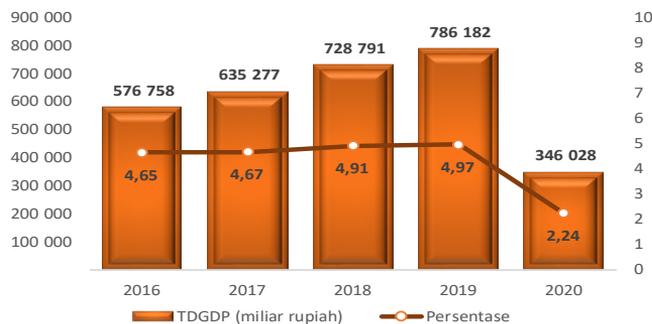


Situasi Pariwisata di Tengah Pemulihan Ekonomi

Pariwisata merupakan salah satu sektor penggerak ekonomi yang terus mengalami peningkatan kontribusi hingga 2019. Adanya pandemi Covid-19 yang menghantam pada tahun 2020 menyebabkan kontraksi ekonomi secara masif di berbagai lini dan pariwisata menjadi salah satu sektor yang paling terdampak. Pembatasan sosial berskala global dan nasional menyebabkan penutupan akses keluar masuk negara dan wilayah yang menyebabkan wisatawan mancanegara maupun wisatawan domestik tidak dapat berwisata. Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat kinerja sektor pariwisata terhadap perekonomian yaitu Produk Domestik Bruto Langsung Pariwisata atau *Tourism Direct Gross Domestic Product* (TDGDP). TDGDP merefleksikan jumlah nilai tambah bruto yang dihasilkan industri pariwisata sebagai respon terhadap konsumsi pariwisata internal. Secara global, persentase TDGDP dunia menunjukkan penurunan dari 4,00 persen pada tahun 2019 menjadi 1,80 persen pada tahun 2020. Hal yang sama juga terjadi di kawasan Asia Pasifik dengan penurunan dari 4,40 persen menjadi 1,80 persen (Badan Pusat Statistik, 2022). Regulasi berupa pembatasan mobilitas penduduk yang terjadi hampir di seluruh dunia untuk menahan laju penyebaran Covid-19 telah menimbulkan kelumpuhan pada sektor-sektor yang menopang kinerja pariwisata seperti transportasi, penyediaan akomodasi dan makan minum, serta industri.

Industri pariwisata di Indonesia mencakup beberapa lapangan usaha, diantaranya penyediaan jasa akomodasi bagi wisatawan, penyediaan jasa makan dan minum, dan penyediaan jasa angkutan (rel, angkutan darat, angkutan air, angkutan udara) untuk penumpang. Sebelum pandemi, TDGDP Indonesia menunjukkan tren positif dengan meningkat selama periode 2016-2019 (Badan Pusat Statistik, 2022). Namun pada tahun 2020 akibat hantaman pandemi Covid-19, TDGDP Indonesia tercatat sebesar Rp 346,03 juta triliun. Nilai ini adalah setengah dari capaian TDGDP tahun 2019 sebesar Rp 786,18 triliun. Persentase kontribusi pariwisata juga mengalami penurunan signifikan 2,73 persen poin, dari 4,97 persen pada 2019 menjadi 2,24 persen di tahun 2020.

Gambar 8.1. Perkembangan Kontribusi Pariwisata Terhadap PDB Indonesia, 2016-2020



Sumber: Badan Pusat Statistik

Pemerintah Indonesia pada April 2020 mengeluarkan kebijakan berupa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sejak kasus positif pertama diumumkan pada 2 Maret 2020 dan kasus terkonfirmasi positif Covid-19 mengalami kenaikan signifikan dalam waktu cepat. Adanya PSBB berarti pemerintah pusat dan daerah menutup akses masuk wisatawan untuk menekan laju penyebaran Covid-19. Hal ini berimbas pada kelesuan sektor pariwisata karena tidak adanya pemasukan ekonomi dari usaha-usaha penopang pariwisata seperti transportasi, akomodasi, dan restoran yang mengandalkan kedatangan wisatawan domestik maupun mancanegara. Meskipun pemerintah sempat melakukan relaksasi ekonomi pada akhir triwulan II 2020 yang diikuti PSBB masa transisi (*new normal*) untuk mendorong peningkatan ekonomi di triwulan III dan IV, hal ini tidak cukup kuat menahan kontraksi ekonomi secara keseluruhan di tahun 2020, termasuk di dalamnya kontraksi sektor penopang pariwisata yang signifikan.

Pemerintah terus berupaya mendorong pemulihan ekonomi nasional di tahun 2021 termasuk pembangunan pariwisata melalui kebijakan yang berfokus pada pengembangan destinasi super prioritas, pengembangan aspek 3A (atraksi, aksesibilitas, dan amenitas), pendekatan *stourynomics tourism* yang mengangkat budaya dan kearifan lokal, serta mendorong kerjasama pemerintah dengan badan usaha untuk membangun pusat-pusat hiburan (Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2020). Promosi dan partisipasi pelaku usaha swasta dalam mendorong pemulihan pariwisata juga semakin digencarkan. Guna mengatasi situasi yang semakin sulit, pemerintah akhirnya melonggarkan kebijakan pembatasan mobilitas dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Hal ini penting mengingat keterbukaan aksesibilitas menuju destinasi wisata akan meningkatkan aktivitas pendukung pariwisata dan mendongkrak pendapatan yang dihasilkan dari sektor pariwisata.

Dari 17 kategori lapangan usaha di Indonesia, dua lapangan usaha yang berkaitan erat dengan pariwisata yaitu lapangan usaha kategori H (Transportasi dan Pergudangan) dan kategori I (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum). Kedua lapangan usaha ini menjadi penopang utama pariwisata. Laju pertumbuhan ekonomi triwulanan lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan dan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum selalu menunjukkan pertumbuhan positif hingga 2019. Namun pada tahun 2020 di triwulan kedua setelah pandemi Covid-19 melanda, performa ekonomi kedua lapangan usaha ini terkontraksi cukup signifikan, dimana kinerja lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan terkontraksi 30,78 persen dan lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum terkontraksi 22,01 persen dibandingkan triwulan yang sama tahun sebelumnya. Pelonggaran akses mobilitas penduduk pada akhir triwulan kedua 2020 melalui PSBB transisi membuka kesempatan penduduk kembali menjalani aktivitas ekonomi meskipun dengan penyesuaian yang mengikuti perkembangan kasus Covid-19. Kontraksi ekonomi masih dialami lapangan usaha transportasi dan akomodasi pada triwulan ketiga dan keempat 2020 dibandingkan triwulan yang sama tahun 2019 meskipun tidak sedalam kontraksi yang terjadi di triwulan kedua.

Gambar 8.2. Laju Pertumbuhan Ekonomi Triwulanan (y-o-y), 2019-2022



Sumber: Badan Pusat Statistik

Pada triwulan pertama 2021, lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan terkontraksi sebesar 13,09 persen dan lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum terkontraksi -7,27 persen. Pada dua minggu pertama Januari 2021, pemerintah masih terus memberlakukan penutupan sementara akses masuk WNA ke Indonesia yang tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2021. Selain itu, pemerintah menghimbau beberapa wilayah di Jawa dan Bali dengan tingkat mobilitas penduduk tinggi yang berpotensi menimbulkan penularan virus Covid-19 untuk mengatur Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Beberapa kriteria pembatasan yang diatur antara lain membatasi jumlah penduduk bekerja di tempat bekerja sebesar 25 persen dari kapasitas (kecuali sektor esensial yang tetap beroperasi seperti biasa), kegiatan penyediaan makan dan minum untuk layanan makan minum di tempat sebesar 25 persen, dan pembatasan jam operasional untuk pusat perbelanjaan/mall hanya sampai pukul tujuh malam. Aturan ini diterapkan jika daerah yang dimaksud masih belum menunjukkan indikator pengendalian Covid-19 yang rendah.

Dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2021 pada Februari, terjadi pelanggaran kegiatan penyediaan makan dan minum untuk layanan makan minum di tempat sebesar 50 persen, dan pembatasan jam operasional untuk pusat perbelanjaan/mall hingga pukul sembilan malam. PPKM diberlakukan berdasarkan hasil penilaian dan pemantauan parameter terkait pengendalian Covid-19, seperti tingkat kematian akibat Covid-19, tingkat kesembuhan, jumlah kasus aktif, dan tingkat BOR. Regulasi yang masih ketat terkait aktivitas ekonomi di tempat umum menyebabkan capaian ekonomi dari lapangan usaha Transportasi dan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yang menopang pariwisata nasional masih mencatatkan pertumbuhan negatif di triwulan pertama 2021 dibandingkan triwulan pertama 2020.

Pada triwulan kedua 2021, laju pertumbuhan Transportasi dan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum naik signifikan dibandingkan capaian triwulan kedua 2020 saat awal pandemi melanda dan ekonomi merosot tajam. Seiring perlambatan kenaikan kasus Covid-19 dan pelaksanaan vaksinasi yang mulai masif ke masyarakat luas pada triwulan II 2021, pemerintah mulai melonggarkan pembatasan dan berimbas pada kenaikan mobilitas dan aktivitas ekonomi di berbagai lini, termasuk transportasi dan akomodasi makan minum.

Munculnya varian baru Covid-19 yaitu varian Delta yang terdeteksi masuk ke Indonesia pada awal Mei 2021 dan mulai merebak pada triwulan ketiga menyebabkan pemerintah kembali memberlakukan aturan ketat pembatasan mobilitas. Hal ini berdampak pada penurunan ekonomi termasuk transportasi dan akomodasi pada triwulan ketiga 2021 (yoy). Pertumbuhan ekonomi triwulan keempat 2021 pada lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan serta Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum mencatatkan pertumbuhan positif dibandingkan triwulan keempat 2020. Kenaikan laju pertumbuhan ekonomi pada sektor pendukung pariwisata pada triwulan IV 2021 ditandai dengan pemerintah yang mulai membuka kembali sektor pariwisata dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi nasional dengan menerbitkan Surat Edaran pada Oktober 2021 melalui Kementerian Luar Negeri. Salah satunya yaitu mengatur ulang mekanisme mobilitas perjalanan internasional dengan menentukan pintu masuk melalui bandar udara di Bali dan Kepulauan Riau (pelabuhan) yang sementara terbatas untuk 19 negara.

Secara kumulatif, laju pertumbuhan Transportasi dan Pergudangan serta Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum berhasil mencatatkan kinerja positif pada 2021 meskipun belum sebaik periode sebelum pandemi. Hal ini dipengaruhi penyesuaian regulasi yang mengikuti perkembangan terkini dari situasi Covid-19 di Indonesia dan berimbas pada belum pulihnya tingkat kepercayaan wisatawan untuk melakukan perjalanan. Perbaikan industri pariwisata pada tahun 2021 tidak lepas dari kerja keras pemerintah dalam mendorong pemulihan pariwisata melalui berbagai program seperti *Bangga Berwisata di Indonesia*, *Bangga Buatan Indonesia*, dan *Indonesia Care/I Do Care*. Program *Cleanliness, Health, Safety, And Environmental Sustainability (CHSE)* yang menjadi bagian dari *Indonesia Care/I Do Care* merupakan prinsip penyelenggaraan kegiatan wisata untuk menerapkan kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan. Sertifikasi CHSE menjadi protokol standar pelayanan yang diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan wisatawan mancanegara dan domestik untuk datang berkunjung ke Indonesia. Disamping itu, pemerintah juga memberi bantuan bagi usaha pariwisata dan insentif bagi para pelaku sektor pariwisata, pengalokasian dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk mendukung pengembangan kawasan strategis pariwisata nasional, dan pemberian hibah pariwisata. Hibah pariwisata ini diperuntukkan bagi 101 kabupaten/kota yang merupakan ibukota provinsi yang berada di 10 destinasi pariwisata prioritas dan 5 destinasi super prioritas, daerah yang masuk dalam 100 *calendar of event*, destinasi branding, dan

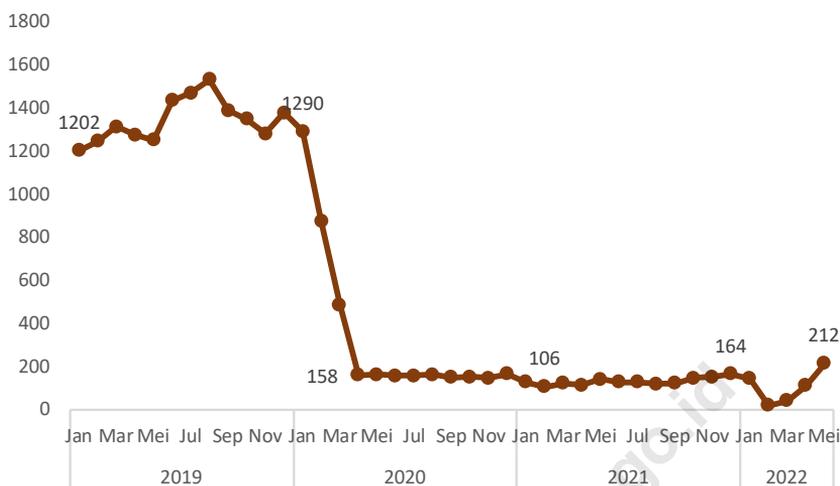
daerah dengan kontribusi pendapatan bersumber dari pajak hotel dan restoran minimal 15 persen dari total Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun anggaran 2019. Hibah ini diharapkan mampu membantu Pemerintah Daerah dan usaha pariwisata (industri, hotel, dan restoran) yang mengalami penurunan pendapatan akibat pandemi Covid-19 (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2021).

Momentum kebangkitan sektor penopang pariwisata terlihat sejak triwulan pertama 2022. Lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan mencatatkan pertumbuhan positif di level 15,79 persen dan lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum tumbuh 6,56 persen dibandingkan triwulan yang sama tahun sebelumnya. Capaian ini menunjukkan ekonomi yang semakin pulih seiring pandemi Covid-19 yang terkendali dan kebijakan pelonggaran mobilitas mendorong aktivitas ekonomi berjalan menuju normal. Masyarakat semakin optimis terhadap situasi terkini dan minat wisatawan untuk kembali berwisata semakin naik.

Pandemi Covid-19 yang terjadi sejak Maret 2020 telah memberikan dampak signifikan bagi seluruh aspek kehidupan. Guncangan ekonomi tak terhindarkan akibat perlambatan aktivitas ekonomi global dan regional. Regulasi yang ditetapkan pemerintah dalam rangka memutus mata rantai penyebaran Covid-19 nyatanya juga berimbas pada penurunan aktivitas ekonomi pariwisata. Gambar 8.3 menunjukkan pada 2019 sebelum pandemi terjadi, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara menunjukkan tren positif dimana jumlah kunjungan per bulan berada di rentang 1,2-1,6 juta kunjungan. Secara kumulatif, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara tahun 2019 sebanyak 16,11 juta kunjungan. Pada triwulan I 2020 terjadi penurunan signifikan dari 1,29 juta kunjungan pada Januari menjadi hanya 158 ribu kunjungan pada April 2020. Hal ini merupakan dampak dari regulasi awal berupa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang ditetapkan pemerintah dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020. Jika dihitung selama triwulan II-IV 2020, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara turun sekitar 88,63 persen dibanding periode yang sama pada tahun 2019. Dari sisi global, beberapa negara menerapkan *lockdown* atau penguncian wilayah yang berarti penutupan akses keluar masuk penduduk ke negara tersebut. Begitu pula regulasi di Indonesia yang membatasi mobilitas penduduk untuk masuk dan keluar wilayah Indonesia. Bahkan di penghujung tahun 2020 dengan ditemukannya varian baru Covid-19 di Inggris, pemerintah menutup sementara akses masuk Warga Negara Asing (WNA) ke Indonesia yang menyebabkan turunnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara. Secara kumulatif selama tahun 2020, tercatat sebanyak 4,05 juta kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia. Angka ini menurun 74,84 persen dibanding total kunjungan wisatawan mancanegara pada tahun 2019.

Pada tahun 2021, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara belum mengalami perubahan signifikan sejak pandemi dengan rentang 105-164 ribu kunjungan per bulan. Secara kumulatif selama 2021, jumlah kunjungan

Gambar 8.3. Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Indonesia (Ribu Kunjungan), 2019-2022



Catatan: Bulan Februari-Mei 2022 adalah angka sementara

Sumber: Kementerian Hukum dan HAM (Direktorat Jendral Imigrasi) serta MPD

wisatawan mancanegara sebesar 1,56 juta kunjungan. Jumlah ini menurun 61,57 persen dibandingkan tahun 2020 dan menurun 90,33 persen jika dibandingkan dengan periode sebelum pandemi terjadi tahun 2019. Hal ini dipengaruhi beberapa kali adanya aturan pembatasan atau penutupan penerbangan internasional di Indonesia bagi wisatawan mancanegara untuk menekan laju kenaikan kasus Covid-19 dan memicu penurunan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara.

Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara kembali tertahan di triwulan pertama tahun 2022. Hal ini berkaitan dengan ditemukannya varian baru Covid-19 yaitu Omicron pada November 2021 di Afrika Selatan dan telah menyebar di lebih dari 110 negara, termasuk Indonesia dengan kasus pertama ditemukan pada 16 Desember 2021. Pemerintah melalui Menteri Kesehatan mengeluarkan Surat Edaran untuk pencegahan dan pengendalian Covid-19 varian Omicron dengan membatasi akses pintu masuk dari perjalanan luar negeri yang menyebabkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara sempat merosot di awal tahun 2022. Guna menjaga momentum pertumbuhan ekonomi terutama pariwisata yang sedang menggeliat, pemerintah kembali membuka akses penerbangan internasional dengan protokol ketat seperti telah melakukan vaksinasi, menunjukkan hasil negatif Covid-19, dan memberlakukan karantina bagi pelaku perjalanan. Dengan pelonggaran mobilitas ini, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia pada Mei 2022 berhasil menembus angka 212 ribu kunjungan. Jumlah ini meningkat 91,19 persen dibandingkan bulan sebelumnya atau meningkat 52,28 persen dibanding Mei 2021.

Tabel 8.1. Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara yang Datang ke Indonesia Menurut Pintu Masuk Utama (Kunjungan), 2019-2022

Tahun	Pintu Masuk					Jumlah
	Pintu Udara Soekarno-Hatta (Jakarta)	Pintu Udara Ngurah Rai (Bali)	Pintu Udara Juanda (Surabaya)	Pintu Laut (Batam)	Lainnya	
2019	2 419 196	6 239 543	243 899	1 947 943	5 256 373	16 106 954
2020	435 139	1 059 198	35 035	295 336	2 228 215	4 052 923
2021	119 063	43	689	2 582	1 435 153	1 557 530
Januari	1 238	2	20	260	124 995	126 515
Februari	5 958	12	69	157	99 592	105 788
Maret	10 188	3	52	343	109 393	119 979
April	15 471	9	106	191	96 979	112 756
Mei	12 775	8	160	245	126 245	139 433
Juni	13 448	1	181	250	112 964	126 844
Juli	5 466	0	52	153	121 578	127 249
Agustus	1 071	0	10	149	117 303	118 533
September	4 081	0	2	129	115 888	120 100
Oktober	13 700	2	37	158	132 240	146 137
November	18 971	6	0	234	131 366	150 577
Desember	16 696	0	0	313	146 610	163 619
2022 ^x						
Jan	14 073	0	0	240	129 265	143 578
Feb	15 406	1 293	0	329	1 427	18 455
Mar	23 320	14 617	57	995	1 801	40 790
Apr	36 061	58 315	1 468	8 136	7 077	111 057
Mei	57 844	115 553	4 598	16 741	17 596	212 332

Catatan : x Mulai Bulan Februari - Mei 2022, tidak tersedia data kunjungan wisatawan mancanegara di wilayah perbatasan yang tidak ada pintu imigrasi

Sumber : Kementerian Hukum dan HAM (Direktorat Jendral Imigrasi) serta MPD

Jika dilihat melalui pintu masuk wisatawan mancanegara, empat pintu masuk utama yang menerima kunjungan wisatawan mancanegara terbanyak yaitu pintu udara Soekarno-Hatta di Jakarta, pintu udara Ngurah Rai di Bali, pintu udara Juanda di Jawa Timur, dan pintu laut di Batam. Pada tahun 2019 sebelum terjadi pandemi, sekitar 38,74 persen wisatawan mancanegara masuk ke Indonesia melalui pintu udara Ngurah Rai di Bali, 15,02 persen masuk melalui pintu udara Soekarno-Hatta di Jakarta, 12,09 persen masuk melalui pintu laut Batam, 1,51 persen masuk melalui pintu udara Juanda di Surabaya, dan sisanya 32,63 persen melalui pintu masuk lainnya. Saat pandemi terjadi pada 2020, terdapat penurunan jumlah kunjungan wisatawan yang masuk melalui empat pintu utama ini.

Sepanjang tahun 2021, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara yang masuk di empat pintu masuk utama kembali mengalami penurunan dibanding tahun 2020. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara yang masuk ke Indonesia melalui pintu udara Soekarno-Hatta tercatat hanya sebesar 119 ribu kunjungan atau 7,64 persen dari total kunjungan wisman tahun 2021. Kontraksi yang paling jelas terlihat yaitu jumlah kunjungan wisatawan mancanegara yang masuk melalui pintu udara Ngurah Rai dari 6,24 juta kunjungan pada 2019, menurun menjadi 1,06 juta kunjungan pada 2020, dan di tahun 2021 tercatat hanya 43 kunjungan atau menurun hingga nyaris 100 persen. Hal ini disebabkan pandemi Covid-19 masih berlangsung dan adanya pembatasan kunjungan masuk wisatawan seiring diterapkannya PPKM di Bali untuk menekan penyebaran Covid-19.

Sejak Maret hingga Mei 2022, terjadi kenaikan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara yang masuk melalui empat pintu utama, baik melalui pintu udara Soekarno-Hatta, pintu udara Ngurah Rai, pintu udara Juanda, maupun pintu laut di Batam. Bahkan pada Maret 2022, kunjungan wisatawan mancanegara yang masuk melalui Ngurah Rai tercatat tumbuh hingga seribu persen dibandingkan jumlah kunjungan sebulan sebelumnya. Tren positif kenaikan kunjungan wisatawan mancanegara melalui Bali terus berlangsung hingga Mei 2022 dimana dari total kunjungan wisatawan mancanegara yang masuk ke Indonesia, sekitar 54,42 persennya masuk melalui pintu udara Ngurah Rai.

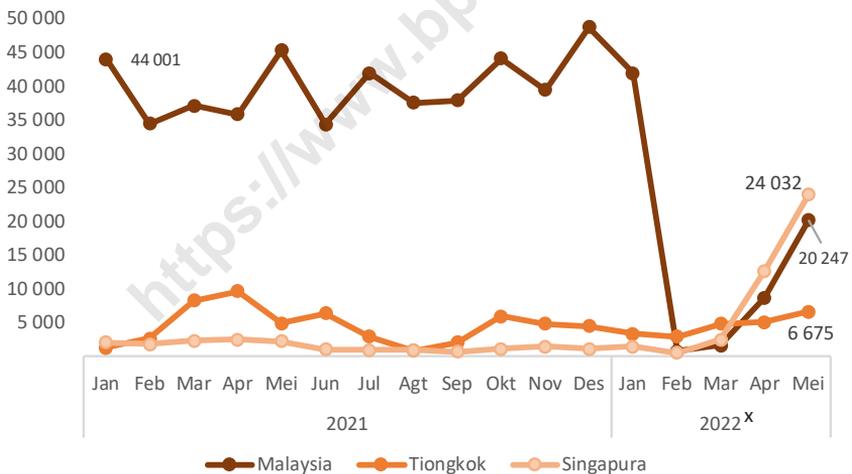
Tabel 8.2. Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara yang Datang ke Indonesia Menurut Kebangsaan (Kunjungan), 2019-2021

Negara	Wisman (Orang)		
	2019	2020	2021
Malaysia	2 980 753	980 118	480 723
Singapura	1 934 445	280 492	18 704
Jepang	519 623	92 228	5 952
Korea Selatan	388 316	75 562	9 497
Taiwan	207 490	35 680	1 398
Tiongkok	2 072 079	239 768	54 713
Australia	1 386 803	256 291	3 196
Amerika Serikat	457 832	91 782	21 962
Jerman	277 653	46 361	3 429
Belanda	215 287	53 495	12 229
Inggris	397 624	69 997	5 177
Lainnya	5 269 049	1 831 149	940 550
Jumlah	16 106 954	4 052 923	1 557 530

Sumber: Kementerian Hukum dan HAM (Direktorat Jendral Imigrasi) dan Hasil MPD

Penurunan jumlah kedatangan wisatawan mancanegara secara keseluruhan pada 2021 diikuti penurunan jumlah wisatawan dari berbagai kebangsaan. Malaysia adalah negara asal wisatawan mancanegara tertinggi diantara negara anggota ASEAN lainnya. Jumlah kedatangan wisatawan dari Malaysia menurun setengahnya dari 980,12 ribu wisatawan pada tahun 2020 menjadi 480,72 ribu wisatawan pada tahun 2021. Jumlah kunjungan wisatawan dari beberapa negara juga mengalami penurunan signifikan bahkan di atas 90 persen seperti Singapura, Jepang, Taiwan, Australia, Jerman, dan Inggris. Tiongkok yang merupakan mitra ekonomi utama Indonesia juga mencatatkan penurunan jumlah kunjungan wisatawan sebesar 77,18 persen dibanding tahun 2020. Penurunan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dari berbagai bangsa ini dipengaruhi kebijakan negara asal dan tujuan dimana pemerintah Indonesia selama tahun 2021 sempat memberlakukan kebijakan berupa larangan masuk bagi wisatawan mancanegara dan hanya membuka izin bagi wisatawan dari negara-negara tertentu yang telah memenuhi standar ketentuan WHO.

Gambar 8.4. Perkembangan Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara Dari Beberapa Kebangsaan, 2021-2022



Catatan :^x Mulai Bulan Februari - Mei 2022, tidak tersedia data kunjungan wisatawan mancanegara di wilayah perbatasan yang tidak ada pintu imigrasi

Sumber : Kementerian Hukum dan HAM (Direktorat Jendral Imigrasi) dan Hasil MPD

Selama 2021, jumlah kunjungan wisatawan berkebangsaan Malaysia ke Indonesia setiap bulannya berkisar antara 34-49 ribu wisatawan. Jumlah ini jauh lebih tinggi dibanding kunjungan wisatawan berkebangsaan Singapura antara 0,72-2,55 ribu wisatawan dan Tiongkok sebesar 0,89-9,64 ribu wisatawan setiap bulannya. Secara kumulatif Januari hingga Desember 2021, jumlah kunjungan wisatawan berkebangsaan Malaysia berkontribusi sekitar 30,86 persen dari total kunjungan seluruh wisatawan mancanegara ke Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kondisi geografis antara Indonesia dan Malaysia yang berbatasan langsung sehingga memberi kemudahan kunjungan

wisatawan Malaysia untuk masuk ke Indonesia, baik melalui jalur darat, laut, maupun udara.

Pada triwulan I 2022 tepatnya bulan Februari, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara kembali anjlok di tengah kenaikan kasus terkonfirmasi positif Covid-19 varian Omicron. Namun pemerintah kembali membuka pintu masuk penerbangan luar negeri sehingga jumlah kunjungan wisatawan mancanegara kembali meningkat per Maret 2022. Pada Mei 2022, tercatat jumlah kunjungan wisatawan dari Tiongkok, Malaysia, dan Singapura masing-masing sebanyak 24,03 ribu, 20,25 ribu, dan 6,68 ribu wisatawan.

Salah satu moda transportasi yang digunakan untuk melakukan perjalanan wisata adalah melalui jalur udara. Saat pemerintah memberlakukan pembatasan secara ketat akses masuk penerbangan luar negeri, penerbangan domestik menjadi tumpuan utama angkutan udara. Gambar 8.5 menunjukkan jumlah keberangkatan penumpang penerbangan domestik yang cukup berfluktuatif pada tahun 2021. Imbas munculnya varian Delta menyebabkan penerbangan domestik kembali jatuh di triwulan ketiga 2021. Jumlah keberangkatan penumpang penerbangan domestik pada Juli 2021 tercatat sebanyak 955 ribu orang atau turun hingga 71,70 persen dibanding bulan sebelumnya (Juni 2021) sebanyak 3,52 juta orang. Setelah perkembangan kasus terkonfirmasi positif varian Delta menunjukkan situasi melandai, penerbangan domestik kembali bangkit per September 2021 hingga akhir tahun 2021.

Secara kumulatif Januari-Desember 2021, jumlah penumpang yang berangkat pada penerbangan domestik sebesar 30,07 juta orang. Angka ini menurun 7,18 persen dibandingkan kumulatif tahun 2020 sebanyak 32,39 juta orang. Kinerja penerbangan domestik yang berkontraksi pada tahun

Gambar 8.5. Jumlah Keberangkatan Penumpang Penerbangan Domestik (Ribu Orang), 2020-2022



Sumber: Indikator Ekonomi, Badan Pusat Statistik

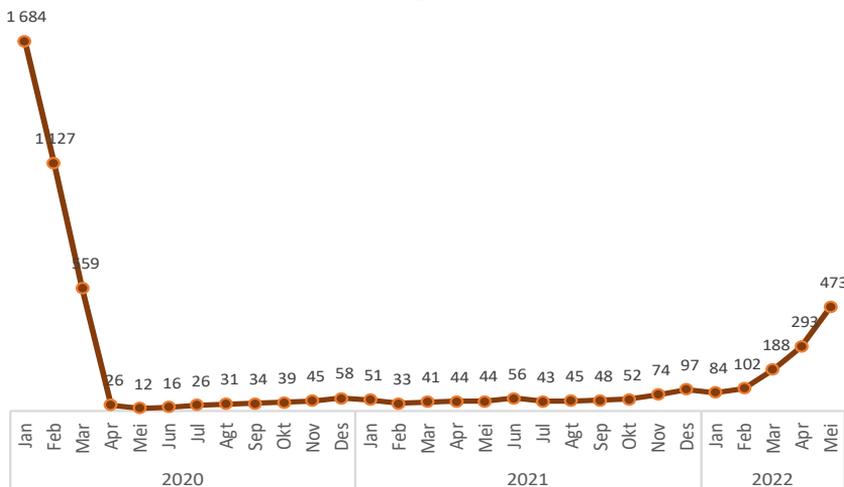
2021 dipengaruhi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di beberapa wilayah yang menyebabkan pelayanan rute penerbangan domestik terhenti sementara.

Kemunculan varian baru Omicron di awal 2022 membuat keberangkatan penerbangan domestik sempat berkontraksi, meskipun tidak sedalam awal pandemi 2020 dan medio 2021. Pada Mei 2022, jumlah keberangkatan penumpang penerbangan domestik mencatatkan hasil positif sebesar 5,28 juta orang atau tumbuh 40,41 persen dari April 2022 sebesar 3,76 juta orang. Secara kumulatif Januari hingga Mei 2022, jumlah keberangkatan penumpang pada penerbangan domestik tercatat sebanyak 19,76 juta orang atau 63,13 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.

Sektor pariwisata ditopang salah satunya melalui transportasi udara dari penerbangan internasional. Adanya pandemi berdampak pada banyak negara yang menerapkan *lockdown* atau pembatasan perjalanan yang mengakibatkan akses antarnegara tertutup. Imbas dari penutupan akses ini adalah tidak tersedianya rute penerbangan internasional dan kedatangan penumpang dari luar negeri yang merosot tajam sejak April 2020. Munculnya varian baru (Delta) pada 2021 membuat situasi belum stabil dan jumlah keberangkatan penumpang pada penerbangan internasional belum menunjukkan perkembangan yang signifikan.

Sejalan dengan penerbangan domestik yang berkontraksi di tahun 2021, jumlah penumpang keberangkatan penerbangan luar negeri juga mengalami hal yang sama. Jumlah penumpang yang berangkat pada penerbangan internasional menurun signifikan dari 3,66 juta orang pada tahun 2020 menjadi hanya 628 ribu orang. Dengan demikian, selama Januari

Gambar 8.6. Jumlah Keberangkatan Penumpang Penerbangan Internasional (Ribu Orang), 2020-2022



Sumber: Indikator Ekonomi, Badan Pusat Statistik

hingga Desember 2021 jumlah keberangkatan penumpang pada penerbangan internasional anjlok 82,83 persen. Rendahnya jumlah penumpang pada penerbangan internasional salah satunya dipengaruhi jumlah kunjungan wisatawan mancanegara yang juga mengalami kelesuan sepanjang 2021.

Tak ingin kehilangan momentum pemulihan ekonomi pada tahun 2022, pemerintah kembali melonggarkan pergerakan penduduk dengan membuka penerbangan internasional di tengah merebaknya varian baru Covid-19 yaitu Omicron. Hal ini berdampak pada jumlah keberangkatan penumpang pada penerbangan internasional per Februari 2022 yang menunjukkan tren positif. Pada Mei 2022, keberangkatan penumpang pada penerbangan internasional mencapai 473 ribu orang. Angka ini tumbuh 61,56 persen dibanding April 2022, atau tumbuh 965,09 persen dibanding Mei 2021. Secara kumulatif dari Januari hingga Mei 2022, jumlah keberangkatan penumpang pada penerbangan internasional tercatat sebanyak 1,14 juta orang atau tumbuh 436,55 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.

Ketersediaan akomodasi, kamar, dan tempat tidur yang memadai menjadi komponen penting dalam menunjang kebangkitan sektor pariwisata disamping keterbukaan transportasi. Sebagian besar provinsi di Indonesia menunjukkan peningkatan penyediaan akomodasi, kamar, dan tempat tidur pada hotel berbintang pada tahun 2021 dibanding tahun 2020. Jumlah akomodasi meningkat di 19 provinsi, jumlah ketersediaan kamar meningkat di 29 provinsi, dan jumlah ketersediaan tempat tidur yang tersedia meningkat di 21 provinsi. Peningkatan ketersediaan akomodasi dan fasilitas pada hotel berbintang merupakan bentuk upaya antisipatif dan optimisme pelaku usaha dalam menyongsong perbaikan situasi terkait pandemi dan adanya pelonggaran pembatasan yang dapat mendorong geliat pariwisata.

Bali mencatatkan kenaikan jumlah akomodasi hotel berbintang tertinggi dibanding provinsi-provinsi lain di Indonesia. Sebanyak 23 akomodasi bertambah di Provinsi Bali selama 2021. Sebaliknya, Kepulauan Riau mengalami penurunan paling signifikan. Jumlah akomodasi hotel berbintang di provinsi ini berkurang sebanyak 15 akomodasi, dari 116 akomodasi pada 2020 menjadi 101 akomodasi pada 2021.

Penyediaan fasilitas penunjang sektor pariwisata di Provinsi Bali cukup menunjukkan performa positif di tahun 2021. Selain kenaikan akomodasi, Provinsi Bali juga tercatat sebagai provinsi dengan penambahan jumlah kamar dan tempat tidur pada hotel berbintang terbanyak di antara provinsi-provinsi lainnya. Jumlah kamar pada hotel berbintang di Bali meningkat hingga 18.958 kamar dan tempat tidur yang tersedia bertambah 8.432 tempat tidur dibandingkan tahun 2020.

DKI Jakarta mencatatkan pertumbuhan negatif tertinggi pada penyediaan kamar dan tempat tidur pada hotel berbintang. Jumlah kamar yang disediakan pada hotel berbintang berkurang 2.586 kamar dan tempat

Tabel 8.3. Jumlah Akomodasi, Kamar, dan Tempat Tidur yang Tersedia pada Hotel Berbintang Menurut Provinsi, 2020-2021

Provinsi	Akomodasi		Kamar		Tempat Tidur	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021
Aceh	24	26	1 441	1 927	3 270	3 107
Sumatera Utara	139	145	12 006	12 251	18 563	18 192
Sumatera Barat	79	86	3 202	5 225	7 159	8 052
Riau	96	93	6 587	8 527	11 801	12 304
Jambi	36	37	1 193	2 644	2 988	3 987
Sumatera Selatan	79	77	5 385	6 618	10 052	9 112
Bengkulu	15	17	668	1 053	1 385	1 582
Lampung	27	28	1 658	2 858	3 858	4 138
Kep. Bangka Belitung	55	51	3 601	3 346	5 792	5 030
Kepulauan Riau	116	101	4 473	11 784	16 216	16 263
DKI. Jakarta	396	384	55 129	52 543	73 246	68 868
Jawa Barat	514	521	51 125	50 053	78 493	77 539
Jawa Tengah	323	333	23 747	27 348	40 772	42 558
DI. Yogyakarta	162	168	7 806	16 293	25 457	25 777
Jawa Timur	285	283	21 453	30 119	43 375	43 042
Banten	129	126	4 315	12 398	17 755	18 627
B a l i	380	403	27 344	46 302	54 762	63 194
Nusa Tenggara Barat	60	63	4 425	4 997	7 047	7 562
Nusa Tenggara Timur	34	34	2 071	2 628	4 172	4 088
Kalimantan Barat	44	48	2 794	4 936	6 401	6 982
Kalimantan Tengah	19	20	1 450	1 673	2 257	2 340
Kalimantan Selatan	60	60	4 754	4 782	6 915	6 836
Kalimantan Timur	70	70	5 069	7 554	10 228	10 486
Kalimantan Utara	7	7	342	411	364	593
Sulawesi Utara	40	50	1 283	4 903	5 147	7 092
Sulawesi Tengah	11	13	867	993	1 322	1 428
Sulawesi Selatan	151	147	5 227	11 887	17 347	17 641
Sulawesi Tenggara	23	25	1 601	1 819	2 562	2 789
Gorontalo	8	7	525	590	993	926
Sulawesi Barat	7	3	425	109	632	148
Maluku	20	22	1 298	1 272	1 812	1 780
Maluku Utara	9	11	575	664	955	999
Papua Barat	19	19	1 099	1 362	2 128	2 037
Papua	38	43	1 934	3 193	4 044	4 573

Sumber: Statistik Indonesia 2022, Badan Pusat Statistik

tidur berkurang 4.378 tempat tidur dibandingkan ketersediaan pada 2020. Hal ini dipengaruhi pemberlakuan PPKM Jawa-Bali untuk meredam lonjakan kasus Covid-19. Adanya PPKM berarti akses antarwilayah diperketat, aktivitas bekerja dibatasi, pembatasan aktivitas perdagangan terkait jam buka tutup dan jumlah pengunjung untuk supermarket dan pasar tradisional, pusat perbelanjaan ditutup sementara, dan tempat makan hanya menyediakan jasa layanan *take away* atau melalui layanan antar.

Okupansi Hotel Berbintang Meningkat dengan Lama Menginap Semakin Pendek

Regulasi yang diberlakukan dalam rangka menghadapi situasi Covid-19 menyebabkan dampak signifikan pada beberapa indikator pariwisata seperti kunjungan wisatawan, tingkat penghunian kamar/okupansi, dan lama menginap. Sempat terpukul pandemi 2020, Tingkat Penghunian Kamar (TPK) atau okupansi pada hotel berbintang secara keseluruhan tahun 2021 menunjukkan perbaikan. Tingkat okupansi yang semakin tinggi dapat menjadi indikator peningkatan pemakaian kamar yang tersedia pada hotel berbintang dan akomodasi hotel berbintang semakin diminati wisatawan. Hal ini tampak dari tingkat okupansi secara nasional yang berhasil naik 2,47 persen poin, dari 33,79 persen pada tahun 2020 menjadi 36,26 persen pada tahun 2021. Dari 34 provinsi di Indonesia, sebanyak 27 provinsi mencatatkan kenaikan okupansi hotel berbintang pada tahun 2021. Provinsi dengan tingkat okupansi tertinggi yaitu Provinsi Kalimantan Timur (51,23 persen). Namun jika ditinjau dari kenaikan tingkat okupansi, Provinsi Papua mencatatkan kenaikan tertinggi (14,37 persen poin) dari 31,01 persen pada tahun 2020 menjadi 45,38 persen pada tahun 2021. Sementara itu, provinsi dengan tingkat okupansi terendah adalah Provinsi Bali sekaligus mencatatkan penurunan paling signifikan (-10,77 poin), dari 23,85 persen pada tahun 2020 menjadi 13,09 persen pada tahun 2021.

Di tengah kelesuan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara selama tahun 2021, tingkat okupansi hotel berbintang tetap dapat tumbuh positif dengan ditopang dari kunjungan wisatawan domestik. Hal ini menunjukkan

Tabel 8.4. Tingkat Penghunian Kamar pada Hotel Berbintang Menurut Provinsi (Persen), 2017-2021

Provinsi	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Aceh	48,58	43,58	43,18	27,38	29,85
Sumatera Utara	55,22	56,87	48,86	30,70	37,65
Sumatera Barat	55,03	56,18	56,00	35,34	42,13
Riau	47,24	48,71	48,69	32,38	39,57
Jambi	46,10	43,44	45,49	34,40	38,33
Sumatera Selatan	60,16	58,88	53,99	40,75	48,83
Bengkulu	58,35	58,91	64,06	39,40	38,61

Lanjutan

Provinsi	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021 ^x
Lampung	56,08	59,55	60,31	44,04	43,59
Kep. Bangka Belitung	39,40	40,02	36,07	23,32	23,11
Kepulauan Riau	52,84	57,33	52,31	27,05	25,54
DKI. Jakarta	67,66	66,65	59,71	41,22	45,16
Jawa Barat	56,80	58,76	54,47	36,22	39,58
Jawa Tengah	49,17	45,49	47,46	29,31	31,98
DI. Yogyakarta	59,06	57,24	58,91	35,96	40,26
Jawa Timur	56,54	55,82	57,20	36,09	40,98
Banten	54,47	54,11	51,57	34,27	41,24
B a l i	64,24	64,72	61,13	23,85	13,08
Nusa Tenggara Barat	47,91	43,85	42,23	27,94	33,36
Nusa Tenggara Timur	54,67	56,62	52,17	30,80	34,57
Kalimantan Barat	47,43	53,34	47,74	32,13	41,03
Kalimantan Tengah	57,74	59,59	56,71	38,77	43,55
Kalimantan Selatan	48,57	54,99	50,72	38,54	41,63
Kalimantan Timur	50,39	51,34	57,70	40,60	51,23
Kalimantan Utara	31,60	43,01	46,10	34,63	45,65
Sulawesi Utara	62,62	67,51	64,40	36,65	42,46
Sulawesi Tengah	60,56	47,26	50,13	36,94	40,36
Sulawesi Selatan	45,75	50,75	51,03	38,28	38,06
Sulawesi Tenggara	39,37	48,31	41,34	30,17	37,84
Gorontalo	46,19	46,90	49,74	32,25	43,84
Sulawesi Barat	38,41	46,67	49,91	31,50	25,94
Maluku	40,20	39,21	38,10	34,37	39,27
Maluku Utara	51,00	46,13	50,44	31,63	43,30
Papua Barat	59,03	54,20	51,16	38,24	46,28
Papua	56,68	53,28	50,34	31,01	45,38
Indonesia	56,69	58,75	54,81	33,79	36,26

Sumber: www.bps.go.id

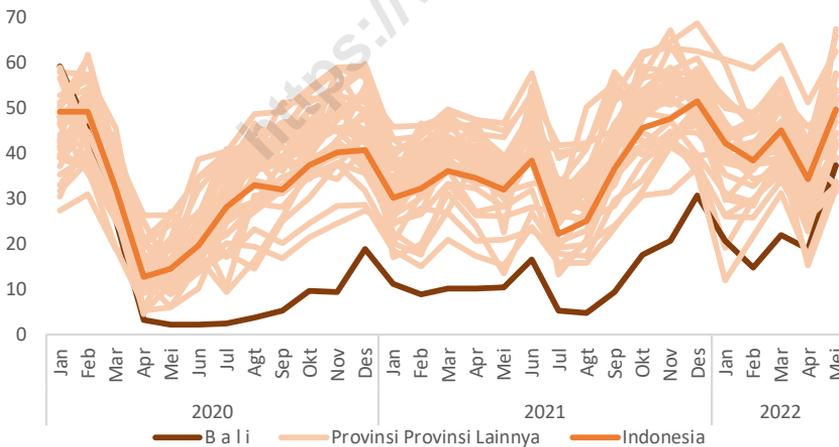
bahwa wisatawan domestik berperan penting sebagai jaring pengaman keberlangsungan sektor pariwisata di tengah anjloknya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara akibat pembatasan atau penutupan perjalanan internasional.

Jika ditinjau secara bulanan menurut provinsi, tingkat okupansi pada hotel berbintang secara nasional mengalami perkembangan cukup baik pada

triwulan I dan II 2021. Kontraksi cukup dalam terjadi pada triwulan III 2021 tepatnya bulan Juli-Agustus seiring merebaknya varian baru Covid-19 yaitu varian Delta dan diterapkannya PPKM. Dengan kebijakan PPKM yang kembali diberlakukan pada Juli 2021, tingkat okupansi hotel berbintang secara nasional turun 16,17 persen poin dibanding bulan sebelumnya menjadi 22,38 persen. Setelah terkontraksi pada medio 2021, tingkat okupansi pada hotel berbintang secara perlahan kembali naik hingga akhir tahun 2021 dan triwulan kedua 2022.

Bali merupakan provinsi dengan penurunan okupansi yang paling signifikan. Sebagai provinsi dengan kontribusi pariwisata terhadap ekonomi daerah yang cukup dominan, penurunan jumlah kunjungan wisatawan telah memberikan dampak buruk terhadap usaha akomodasi dan transportasi di Bali. Hal ini menyebabkan penurunan kontribusi lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan serta Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yang tadinya menyumbang sekitar sepertiga dari perekonomian di Bali menjadi hanya sekitar seperlima di tahun 2021 (Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, 2022). Tingkat hunian kamar di Bali anjlok dari level di atas 50 persen sebelum pandemi menjadi hanya 3,22 persen pada April 2020. Tingkat okupansi di Bali pada tahun 2020 mencatatkan posisi tertinggi pada bulan Desember 2020 di level 19 persen atau jauh di bawah rata-rata tingkat okupansi nasional di level 40,79 persen.

Gambar 8.7. Perkembangan Tingkat Penghunian Kamar pada Hotel Berbintang Menurut Provinsi (Bulanan), 2020-2022



Sumber: www.bps.go.id

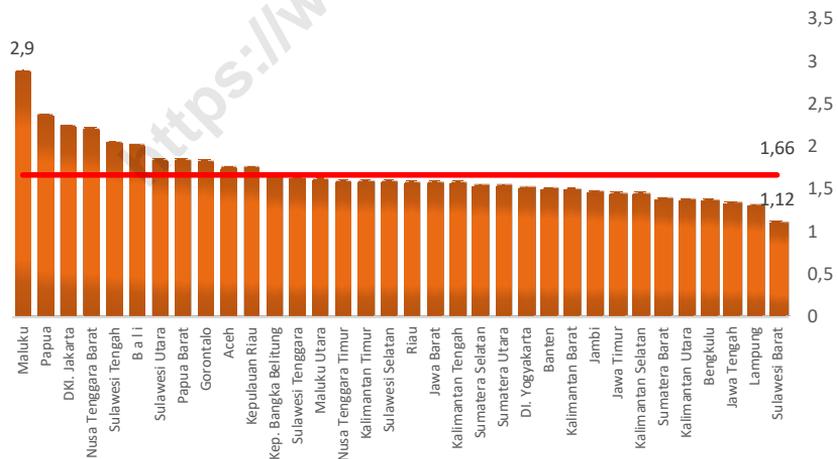
Provinsi Bali adalah provinsi dengan kontraksi pariwisata paling dalam saat pandemi. Selama tahun 2021, tingkat okupansi di Bali adalah yang terendah dibanding provinsi-provinsi lainnya. Tingkat okupansi bulanan tertinggi di Provinsi Bali dicapai pada bulan Desember 2021 sebesar 30,67 persen, bertepatan dengan perayaan libur Natal dan tahun baru. Pada momen

ini, pemerintah melonggarkan mobilitas penduduk dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Kemudahan akses dalam melakukan perjalanan ini berhasil mendorong aktivitas wisata dan berimbas pada kenaikan okupansi pada hotel berbintang.

Penurunan jumlah kunjungan wisatawan pada triwulan pertama 2022 berimbas pada penurunan tingkat okupansi pada hotel berbintang. Tingkat okupansi di Bali sejak awal pandemi hingga pertengahan 2022 masih berada di bawah garis rata-rata nasional. Namun pada Mei 2022, tingkat okupansi di Bali menunjukkan performa positif dengan berada di level 37,35 persen, jauh lebih tinggi dibanding periode yang sama tahun 2021. Pemulihan pariwisata di Bali diperkirakan membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk mencapai level sama seperti sebelum pandemi.

Secara nasional, rata-rata lama menginap tamu pada hotel berbintang tahun 2021 sebesar 1,66 hari. Hal ini berarti setiap tamu, baik tamu asing maupun tamu Indonesia, secara rata-rata menginap di hotel berbintang dalam waktu dua hari pada tahun 2021. Provinsi dengan rata-rata tertinggi lama menginap tamu pada hotel berbintang yaitu Maluku (2,90 hari) dan yang terendah yaitu Sulawesi Barat (1,12 hari).

Gambar 8.8. Rata-rata Lama Menginap Tamu pada Hotel Berbintang Menurut Provinsi, 2021



Sumber: www.bps.go.id

Rata-rata lama menginap di Provinsi Maluku yang tinggi ditopang dari lama menginap tamu Indonesia yang lebih tinggi dibandingkan tamu asing. Kondisi ini berbeda dengan mayoritas provinsi lainnya dimana lama menginap tamu asing menyumbang rata-rata lama menginap yang lebih tinggi dibanding tamu domestik. Sehingga, saat jumlah kunjungan wisatawan mancanegara terpuruk di tahun 2021, kehadiran tamu Indonesia mampu menjadi andalan

untuk menopang pemasukan hotel berbintang di Maluku. Wilayah yang mengandalkan tamu asing untuk akomodasi berbintang seperti Sulawesi Barat akhirnya juga mengalami penurunan rata-rata lama menginap tamu secara keseluruhan seiring jumlah wisatawan mancanegara yang mengalami penurunan.

Prospek Pariwisata Pada 2022

Indonesia telah menghadapi tantangan berat sejak pandemi terjadi pada 2020. Pembatasan sosial dalam lingkup global dan nasional berdampak besar pada aktivitas ekonomi, termasuk sektor pariwisata yang ditopang dari usaha akomodasi dan transportasi. Regulasi yang ditetapkan pemerintah dalam upaya membatasi pergerakan masyarakat beberapa kali mengalami perubahan, seperti PSBB, PSBB transisi, PPKM darurat, dan yang terakhir yaitu PPKM empat level. Kebijakan ini menjadi upaya pemerintah untuk menjaga pandemi Covid-19 agar tetap terkendali dan tidak menimbulkan dampak yang lebih masif.

Pada fase pertama setelah pengumuman pandemi atau pada tahun 2020, pemerintah masih berfokus pada penanganan kesehatan. Selanjutnya, pemerintah berfokus pada pemulihan ekonomi secara bertahap, termasuk pembangunan ekonomi pariwisata yang sebelumnya terpuruk. Salah satu dampak pandemi pada sektor pariwisata adalah pergeseran paradigma pembangunan pariwisata dari pariwisata berbasis kuantitas (*quantity tourism*) menjadi pariwisata berkelanjutan dan berbasis kualitas (*quality and sustainability tourism*). Tren pariwisata ke depan akan mengarah pada *more personalized, customized, localized, and smaller in size* (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 2022). Hal ini sejalan dengan apa yang dirilis oleh *United Nations World Tourism Organization* (UNWTO) dimana terjadi pergeseran tren wisata akibat pandemi. Wisatawan mencari destinasi wisata yang lebih dekat, wisata yang menawarkan konsep keberlanjutan dan keaslian wilayah setempat, dan wisata alam dan pedesaan yang menawarkan pengalaman di alam terbuka (UNWTO, 2022).

Arus wisatawan antarnegara yang terbatas saat pandemi telah menggeser tumpuan ke arah wisatawan domestik. Wisata alam semakin populer sebagai destinasi wisata untuk menghilangkan kejenuhan akibat kebijakan pembatasan aktivitas di luar rumah yang sempat diterapkan pemerintah. Selain itu, wisata alam menawarkan ruang terbuka yang luas dan memungkinkan penerapan *physical distancing* bagi wisatawan untuk mengurangi risiko penularan Covid-19. Selain itu, wisatawan akan cenderung menghindari destinasi wisata yang sudah populer dan selalu ramai dikunjungi banyak orang menuju destinasi wisata lokal dalam jarak dekat yang dapat ditempuh dengan kendaraan pribadi. Jarak dan lama waktu berwisata diperkirakan semakin pendek (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 2020).

Penanganan pandemi di Indonesia merupakan salah satu aspek yang memengaruhi persepsi dan sentimen wisatawan mancanegara untuk berwisata ke Indonesia (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 2020). Oleh karenanya, menjaga kesehatan masyarakat agar Covid-19 tetap terkendali merupakan faktor kunci dalam membuka kepercayaan wisatawan mancanegara kembali berkunjung ke Indonesia. Cakupan vaksinasi yang semakin meluas dan pelonggaran regulasi terkait pembatasan akses masuk Indonesia diharapkan mendorong pemulihan pariwisata yang semakin membaik di 2022. Pariwisata domestik terus diperkuat dengan membuka semakin banyak destinasi wisata yang memiliki potensi pasar besar. Peningkatan aktivitas pariwisata domestik membuka semakin banyak perjalanan yang memperkuat ekonomi pariwisata pada tahun 2022 (UNWTO, 2022). Namun demikian, Indonesia tetap harus waspada terhadap risiko global seperti ketegangan geopolitik antara Rusia dan Ukraina pada awal 2022 yang dapat memengaruhi pemulihan pariwisata internasional.

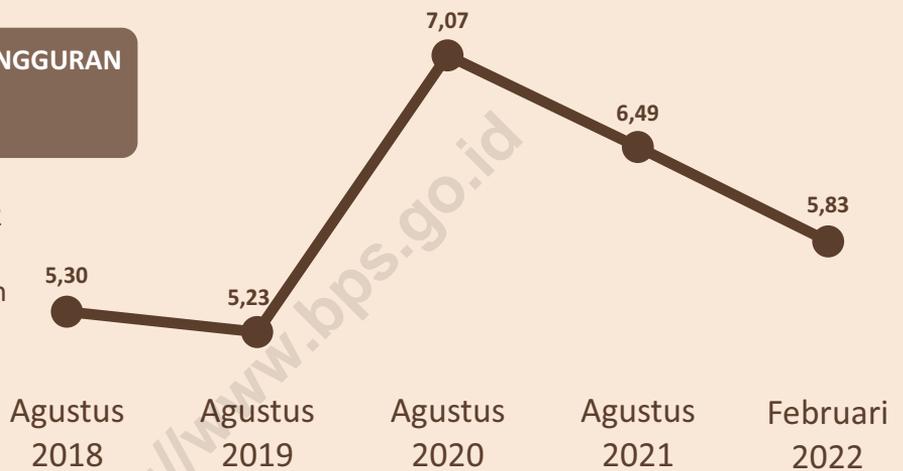
Pada Mei 2022, *World Economic Forum (WEF)* merilis *Travel & Tourism Development Index (TTDI)* tahun 2021 sebagai salah satu ukuran daya saing pariwisata secara global. TTDI merupakan hasil penyesuaian dan pengembangan pengukuran daya saing pariwisata sebelumnya yaitu *Travel and Tourism Competitiveness Index (TTCI)*. Pandemi yang terjadi pada 2020 hingga saat ini menyebabkan adanya TTCI yang berevolusi menjadi TTDI agar tetap dapat merepresentasikan keberlanjutan dan ketahanan pariwisata ke depan. TTDI mengukur faktor dan kebijakan yang dapat mendorong sektor perjalanan dan pariwisata tumbuh berkelanjutan dan tangguh guna memberikan kontribusi terhadap pembangunan negara. Hasil penilaian WEF tahun 2021 menunjukkan Indonesia berada di peringkat 32 dari 117 negara dengan rata-rata nilai 4,4. Capaian peringkat ini melebihi target kinerja yang tertuang dalam Rencana Strategis Deputi Bidang Kebijakan Strategis Kemenparekraf tahun 2021 untuk peringkat Indonesia dalam TTCI yaitu 36-39 (Deputi Bidang Kebijakan Strategis Kemenparekraf 2020-2024). Hasil ini dapat menjadi tolok ukur pemerintah untuk lebih meningkatkan pengelolaan sektor pariwisata nasional semakin berdaya saing global dengan mewujudkan pariwisata berkelanjutan. Pembangunan pariwisata dapat dicapai antara lain melalui standar CHSE, kebijakan dalam mengatur keterbukaan internasional, infrastruktur transportasi dan penunjang, sumber daya alam dan budaya, dan lingkungan yang berkelanjutan.

KETENAGAKERJAAN



TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (persen)

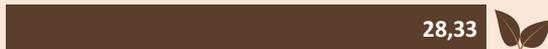
TPT Februari 2022 turun 0,66 persen poin dibandingkan Agustus 2021



LAPANGAN USAHA UTAMA PENYERAP TENAGA KERJA PADA AGUSTUS 2021 (persen)

Sektor Pertanian masih menjadi penyumbang terbesar dalam menyerap tenaga kerja

Pertanian



Perdagangan & Reparasi



Industri Pengolahan



Akomodasi & Makan Minum



Konstruksi



Sebuah paradigma lama mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi akan diikuti oleh pertumbuhan lainnya, begitu juga sebaliknya. Paradigma ini tidak sepenuhnya benar, tidak juga sepenuhnya salah. Melemahnya kinerja ekonomi yang terjadi selama masa pandemi Covid-19 membuktikan bahwa perekonomian yang masih bergantung pada aktivitas fisik, berdampak kepada seluruh aspek kehidupan, termasuk pada aspek ketenagakerjaan.

Tenaga kerja memiliki peranan penting dalam perekonomian di suatu wilayah. Sesuai dengan teori klasik Adam Smith, pertumbuhan ekonomi bertumpu pada peningkatan populasi yang berdampak pada bertambahnya output dan hasil. Namun, hal ini justru memberikan masalah tersendiri pada aspek ketenagakerjaan. Ketimpangan jumlah penduduk yang sangat tinggi, tidak dibarengi dengan tersedianya lapangan pekerjaan, akibatnya berbagai masalah muncul seperti kemiskinan dan pengangguran. Masalah-masalah ini memiliki berbagai dampak sosial yang cukup serius di masyarakat.

Pada dasarnya, berbagai permasalahan ketenagakerjaan yang ada saat ini bermuara pada ketersediaan lapangan kerja yang memadai dan berkualitas. Penciptaan lapangan kerja perlu menjadi salah satu fokus utama dalam menyelesaikan masalah ketenagakerjaan. Namun, upaya penciptaan lapangan kerja masih menjadi tantangan yang cukup besar di Indonesia terutama di masa pandemi Covid-19 saat ini. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah dengan merumuskan Undang-undang Cipta Kerja. Undang-undang ini diharapkan dapat menyederhanakan, menyinkronkan dan memangkas regulasi yang menghambat penciptaan lapangan kerja.

Angkatan Kerja di Indonesia

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor produksi utama dalam kegiatan produksi. Tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas akan mendorong perekonomian suatu bangsa. Ketersediaan sumber daya manusia digambarkan melalui jumlah angkatan kerja. Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (berumur 15 tahun atau lebih) yang bekerja atau mempunyai pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Selain itu, angkatan kerja dapat menggambarkan jumlah penduduk yang berpotensi untuk terlibat dalam kegiatan produksi.

Jumlah angkatan kerja di Indonesia selalu meningkat setiap tahunnya selama periode 2018-2021. Jumlah angkatan kerja pada Agustus 2018 sebesar 133,36 juta orang, kemudian meningkat menjadi 140,15 juta orang pada tahun 2021. Laju pertumbuhan jumlah angkatan kerja di Indonesia sebesar 1,67 persen setiap tahunnya selama periode 2018-2021. Besarnya angkatan kerja dapat menjadi modal untuk mendorong pembangunan ekonomi. Namun, tingginya jumlah angkatan kerja ini harus sejalan dengan tersedianya lapangan pekerjaan. Penyerapan tenaga kerja yang optimal dapat berdampak positif terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Selain meningkatkan

lapangan pekerjaan, kualitas dan kompetensi tenaga kerja juga penting untuk ditingkatkan. Tenaga kerja yang berkualitas dan kompeten akan meningkatkan produktivitas yang berdampak pada meningkatnya perekonomian.

Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, jumlah angkatan kerja di Indonesia masih didominasi oleh laki-laki. Pada Agustus 2018, jumlah angkatan kerja laki-laki sebesar 82,05 juta orang. Jumlah ini terus mengalami peningkatan hingga pada Agustus 2021 tercatat jumlah angkatan kerja laki-laki sebesar 84,99 juta orang. Meskipun jumlahnya selalu mengalami peningkatan, ternyata secara persentase jumlah angkatan kerja laki-laki justru mengalami penurunan. Persentase angkatan kerja laki-laki pada Agustus 2018 sebesar 61,53 persen, kemudian mengalami penurunan menjadi 60,64 persen pada Agustus 2021. Meskipun mengalami penurunan, masih terdapat kesenjangan gender antara angkatan kerja laki-laki dengan angkatan kerja perempuan. Perbandingan angkatan kerja laki-laki dan perempuan adalah 3:2 pada tahun 2021.

Selama periode 2018-2021, jumlah penduduk yang bekerja mengalami kenaikan. Pada Agustus 2018, jumlah penduduk yang bekerja tercatat sebesar 126,28 juta orang dan meningkat menjadi 131,05 juta orang pada Agustus 2021. Meskipun mengalami kenaikan dalam 4 tahun terakhir, ternyata jumlah penduduk yang bekerja sempat mengalami penurunan pada tahun 2020 jika dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2019 jumlah penduduk yang bekerja tercatat sebesar 128,76 juta orang, kemudian menurun sebesar 0,23 persen menjadi 128,45 juta orang pada tahun 2020. Hal ini disebabkan karena adanya pembatasan aktivitas sosial pada masa pandemi Covid-19. Pembatasan aktivitas sosial untuk menahan penyebaran virus menyebabkan banyak perusahaan menutup usaha dan mengalami kebangkrutan. Hal ini berdampak pada pengurangan jumlah tenaga kerja hingga pemutusan hubungan kerja (PHK) secara besar-besaran terutama pada sektor yang paling terdampak pandemi.

Hal yang sama juga berlaku pada penduduk laki-laki yang bekerja. Meskipun sempat mengalami penurunan pada tahun 2020, penduduk berjenis kelamin laki-laki yang bekerja mengalami peningkatan kembali pada Agustus 2021 menjadi 79,26 juta orang. Kemudian pada Februari 2022 mengalami peningkatan kembali menjadi 82,26 juta orang. Peningkatan penduduk yang bekerja ini merupakan dampak dari kebijakan pembatasan masyarakat yang mulai dilonggarkan. Aktivitas masyarakat perlahan pulih kembali. Pusat bisnis dan pertokoan yang sempat tutup selama kebijakan pembatasan masyarakat, perlahan mulai beraktivitas kembali.

Selain penduduk yang bekerja, indikator lain yang sangat penting untuk melihat kondisi ketenagakerjaan adalah penduduk yang berstatus pengangguran. Tingginya jumlah angkatan kerja yang tidak dibarengi dengan luasnya lapangan pekerjaan dapat berdampak pada meningkatnya angka pengangguran. Pada Agustus 2018, jumlah penduduk yang berstatus

pengangguran sebanyak 7,07 juta orang, kemudian meningkat sedikit pada Agustus 2019 menjadi 7,10 juta orang. Peningkatan yang sangat besar terjadi pada tahun 2020, yaitu pada masa pandemi Covid-19 mulai mewabah di Indonesia. Penduduk yang berstatus pengangguran pada Agustus 2020 tercatat sebesar 9,77 juta orang atau meningkat sebesar 37,49 persen jika dibandingkan tahun sebelumnya. Meskipun demikian, penduduk yang berstatus pengangguran berhasil ditekan sehingga mengalami penurunan pada Agustus 2021 menjadi sebesar 9,10 juta orang. Pada Februari 2022 jumlah pengangguran berhasil ditekan kembali menjadi sebesar 8,40 juta orang.

Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, jumlah pengangguran berjenis kelamin laki-laki mengalami peningkatan selama tahun 2018-2021. Pada Agustus 2018, jumlah pengangguran berjenis kelamin laki-laki tercatat sebesar 4,38 juta orang, kemudian meningkat menjadi 5,73 juta orang pada Agustus 2021. Hal yang sama juga terjadi pada pengangguran perempuan. Pada Agustus 2018, pengangguran berjenis kelamin perempuan tercatat sebesar 2,70 juta orang dan meningkat menjadi 3,37 juta orang pada Agustus 2021.

Tabel 9.1. Jumlah Angkatan Kerja Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kelamin, 2018-2022

Tahun	Jenis Kelamin	Angkatan Kerja			Bukan Angkatan Kerja
		Bekerja	Pengangguran	Jumlah	
2018 (Agustus)	L	77 675 311	4 377 777	82 053 088	17 039 717
	P	48 606 875	2 695 608	51 302 483	47 731 265
	L+P	126 282 186	7 073 385	133 355 571	64 770 982
2019 (Agustus)	L	79 357 851	4 385 795	83 743 646	16 846 705
	P	49 397 420	2 718 629	52 116 049	48 478 614
	L+P	128 755 271	7 104 424	135 859 695	65 325 319
2020 (Agustus)	L	77 755 026	6 268 364	84 023 390	17 933 872
	P	50 699 158	3 499 390	54 198 548	47 816 650
	L+P	128 454 184	9 767 754	138 221 938	65 750 522
2021 (Agustus)	L	79 263 314	5 731 458	84 994 772	18 313 469
	P	51 787 209	3 370 594	55 157 803	48 242 255
	L+P	131 050 523	9 102 052	140 152 575	66 555 724
2022 (Februari)	L	82 262 190	5 541 773	87 803 963	17 167 285
	P	53 349 705	2 860 380	56 210 085	47 362 753
	L+P	135 611 895	8 402 153	144 014 048	64 530 038

Sumber : Publikasi Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia, BPS

Selain dari angkatan kerja, kondisi ketenagakerjaan di Indonesia dapat dilihat melalui tiga indikator pokok, yaitu Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dan Tingkat Kesempatan Kerja (TKK). Tiga indikator pokok ini dapat menggambarkan kondisi ketenagakerjaan

di Indonesia dan dapat menjadi dasar bagi Pemerintah untuk menentukan kebijakan.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) berguna untuk mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara/wilayah. Selama tahun 2018-2021, TPAK mengalami sedikit peningkatan dan masih berkisar pada angka 67 persen. Pada Agustus 2018, TPAK tercatat sebesar 67,31 persen dan sedikit mengalami peningkatan setiap tahunnya hingga pada Agustus 2021, TPAK tercatat sebesar 67,80 persen. Meningkatnya TPAK mengindikasikan adanya peningkatan pasokan tenaga kerja (*labour supply*). Pada Februari 2022, TPAK meningkat menjadi 69,06 persen.

Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, TPAK laki-laki cenderung lebih tinggi dibandingkan TPAK perempuan. Berbeda dengan TPAK total yang mengalami peningkatan, TPAK laki-laki cenderung mengalami penurunan selama tahun 2019-2021. Pada Agustus 2018, TPAK laki-laki tercatat sebesar 82,80 persen. Meskipun sempat mengalami peningkatan pada Agustus 2019 menjadi 83,25 persen, TPAK laki-laki mengalami penurunan menjadi 82,41 persen pada Agustus 2020. Kemudian pada tahun berikutnya TPAK laki-laki kembali mengalami penurunan hingga mencapai 82,27 persen. Sedangkan hal yang berbeda terjadi pada TPAK perempuan. TPAK perempuan mengalami peningkatan setiap tahunnya selama tahun 2018-2021. Pada Agustus 2018, TPAK perempuan tercatat sebesar 51,80 persen dan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya hingga pada Agustus 2021 TPAK perempuan tercatat sebesar 53,34 persen.

Indikator berikutnya yang juga menggambarkan kondisi ketenagakerjaan adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). TPT merupakan persentase jumlah penduduk pengangguran terhadap jumlah angkatan kerjanya. Indikator ini menunjukkan kemampuan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap persediaan (*supply*) tenaga kerja yang ada. Dampak pandemi Covid-19 yang terjadi cukup memukul kondisi ketenagakerjaan di Indonesia. TPT masih mengalami tren penurunan hingga tahun 2019. Pada Agustus 2019, TPT tercatat sebesar 5,23 persen atau turun 0,07 persen poin dibandingkan Agustus 2018. Namun tren penurunan ini terhenti akibat pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia. Pada Agustus 2020, TPT mengalami peningkatan yang cukup tinggi menjadi 7,07 persen atau meningkat sebesar 1,84 persen poin dibandingkan kondisi Agustus 2019. Kemudian pada Agustus 2021, TPT berhasil ditekan menjadi 6,49 persen dan kembali mengalami penurunan pada Februari 2022 sebesar 5,83 persen.

Jika dilihat berdasarkan jenis kelaminnya, TPT laki-laki cenderung lebih tinggi dibandingkan TPT perempuan. Pada Agustus 2018, TPT laki-laki tercatat sebesar 5,34 persen, kemudian sempat mengalami peningkatan pada Agustus 2020 menjadi sebesar 7,46 persen dan mengalami penurunan kembali pada Agustus 2021 menjadi sebesar 6,74 persen. Hal yang sama juga terjadi pada

TPT perempuan. Pada Agustus 2018, TPT perempuan tercatat sebesar 5,25 persen. Peningkatan tertinggi juga terjadi pada Agustus 2020. Pada saat itu, TPT perempuan tercatat sebesar 6,46 persen. Kemudian TPT perempuan mengalami penurunan menjadi 6,11 persen pada Agustus 2021.

Selanjutnya adalah Tingkat Kesempatan Kerja (TKK). TKK berguna untuk mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang bekerja. Indikator ini menggambarkan peluang penduduk yang termasuk dalam angkatan kerja untuk mendapatkan pekerjaan. Pada Agustus 2021, TKK Indonesia sebesar 93,51 persen. Hal ini berarti, dari 100 penduduk yang termasuk dalam angkatan kerja, terdapat 93 sampai 94 orang yang bekerja. Nilai ini lebih rendah dibandingkan kondisi sebelum pandemi Covid-19 dimana nilai TKK pada Agustus 2019 mencapai 94,77 persen.

Jika dilihat menurut jenis kelamin, selama tahun 2018-2021 TKK laki-laki dan TKK perempuan tidak jauh berbeda. TKK perempuan hanya lebih besar sedikit dibanding TKK laki-laki setiap tahunnya. Pada Agustus 2018, TKK laki-laki tercatat sebesar 94,66 persen. Meskipun sempat mengalami kenaikan pada Agustus 2019, TKK laki-laki mengalami penurunan pada Agustus 2020 dengan nilai sebesar 92,54 persen. Setelah itu TKK mengalami kenaikan kembali pada Agustus 2021 menjadi 93,26 persen. Hal yang sama juga terjadi pada TKK perempuan, TKK perempuan sempat mengalami penurunan pada Agustus 2020 dengan nilai sebesar 93,54 persen, kemudian mengalami kenaikan kembali pada Agustus 2021.

Tabel 9.2. Indikator Ketenagakerjaan Menurut Jenis Kelamin, 2018-2022

Jenis Kelamin	2018 (Agustus)	2019 (Agustus)	2020 (Agustus)	2021 (Agustus)	2022 (Februari)
TPAK					
Laki-laki	82,80	83,25	82,41	82,27	83,65
Perempuan	51,80	51,81	53,13	53,34	54,27
Total	67,31	67,53	67,77	67,80	69,06
TPT					
Laki-laki	5,34	5,24	7,46	6,74	6,31
Perempuan	5,25	5,22	6,46	6,11	5,09
Total	5,30	5,23	7,07	6,49	5,83
TKK					
Laki-laki	94,66	94,76	92,54	93,26	93,69
Perempuan	94,75	94,78	93,54	93,89	94,91
Total	94,70	94,77	92,93	93,51	94,17

Sumber : Publikasi Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia, BPS

Selain menurut jenis kelamin, ketiga indikator ketenagakerjaan tersebut juga dapat dilihat berdasarkan daerah tempat tinggal. TPAK sebagai indikator untuk melihat besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi ternyata memiliki nilai yang lebih besar di perdesaan dibanding perkotaan. Selama tahun 2018-2021, TPAK perdesaan berkisar pada angka 70 persen. Sedangkan TPAK perkotaan berkisar pada angka 65-66 persen. Pada Agustus 2021, TPAK perkotaan tercatat sebesar 66,15 persen atau meningkat sebesar 0,24 persen poin dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan TPAK perdesaan pada Agustus 2021 tercatat sebesar 70,03 persen atau turun sebesar 0,17 persen poin dibandingkan tahun sebelumnya.

Selanjutnya pada indikator TPT, pada tahun 2018-2021 jika dibandingkan antar wilayah nilai TPT perkotaan lebih tinggi dibandingkan daerah perdesaan. Selama tahun 2018-2020 terjadi kenaikan angka TPT perkotaan yang cukup tinggi, yaitu saat awal masa pandemi Covid-19 (Agustus 2020). Pada saat itu, Tahun 2018 TPT perkotaan tercatat sebesar 6,44 persen, meningkat sebesar 2,54 persen poin di tahun 2020 menjadi 8,98 persen. Hal yang sama juga terjadi pada daerah perdesaan, angka TPT perdesaan pada tahun 2018 tercatat 3,97 persen dan pada Agustus 2020 tercatat sebesar 4,71 persen atau meningkat sebesar 0,79 persen poin. Pada Agustus 2021, TPT perkotaan dan TPT perdesaan masing-masing sebesar 8,32 persen dan 4,17 persen, mengalami penurunan dibanding tahun 2020.

Selama tahun 2018-2021, indikator TKK di daerah perdesaan cenderung lebih tinggi dibandingkan perkotaan. Hal ini berarti penduduk angkatan kerja

Tabel 9.3. Indikator Ketenagakerjaan Menurut Daerah Tempat Tinggal, 2018-2022

Daerah Tempat Tinggal	2018 (Agustus)	2019 (Agustus)	2020 (Agustus)	2021 (Agustus)	2022 (Februari)
TPAK					
Perkotaan	65,17	66,06	65,91	66,15	66,56
Perdesaan	70,00	69,42	70,20	70,03	72,28
Total	67,31	67,53	67,77	67,80	69,06
TPT					
Perkotaan	6,44	6,29	8,98	8,32	7,61
Perdesaan	3,97	3,92	4,71	4,17	3,72
Total	5,30	5,23	7,07	6,49	5,83
TKK					
Perkotaan	93,56	93,71	91,02	91,68	92,39
Perdesaan	96,03	96,08	95,29	95,83	96,28
Total	94,70	94,77	92,93	93,51	94,17

Sumber : Publikasi Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia, BPS

di daerah pedesaan cenderung lebih mudah untuk mendapatkan pekerjaan dibandingkan penduduk angkatan kerja di perkotaan. TKK perkotaan pada Agustus 2021 tercatat sebesar 91,68 persen. Sedangkan TKK pedesaan pada Agustus 2021 sebesar 95,83 persen.

Kondisi Ketenagakerjaan di Provinsi

Setiap wilayah tentunya memiliki kondisi geografis dan karakteristik masyarakat yang berbeda. Hal ini secara tidak langsung berpengaruh terhadap kehidupan masyarakatnya. Tidak hanya terhadap kondisi sosial budaya, namun juga berpengaruh terhadap kondisi ketenagakerjaan di wilayah tersebut. Masyarakat yang tinggal di wilayah dengan kondisi geografis dataran tinggi, tentunya memiliki karakteristik ketenagakerjaan yang berbeda dengan masyarakat di wilayah kondisi geografis dataran rendah dan perairan. Oleh karena itu, kebijakan terkait ketenagakerjaan perlu dirancang sedemikian rupa pada tingkat regional agar sesuai dengan karakteristik ketenagakerjaannya.

Pada Agustus 2021, terdapat 19 provinsi dengan nilai TPAK berada di atas TPAK nasional. Provinsi dengan TPAK tertinggi adalah Provinsi Papua dengan TPAK sebesar 78,29 persen. Sedangkan provinsi dengan TPAK terendah adalah Provinsi Sulawesi Utara, yaitu sebesar 62,15 persen. Pada Februari 2022, Provinsi Papua kembali memiliki TPAK terbesar dibandingkan provinsi lainnya, yaitu sebesar 80,23 persen. Di tahun yang sama, Provinsi Sulawesi Utara juga menjadi provinsi dengan TPAK terendah, yaitu sebesar 61,97 persen.

Selanjutnya, jika melihat pada indikator TKK terdapat 26 provinsi dengan nilai TKK di atas TKK nasional pada Agustus 2021. Selama tahun 2018-2019, Provinsi Bali menjadi provinsi dengan TKK tertinggi. Kemudian pada tahun berikutnya provinsi dengan TKK tertinggi adalah Provinsi Sulawesi Barat dengan TKK sebesar 96,68 persen. Selanjutnya terdapat pergeseran kembali dimana pada Agustus 2021, Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Gorontalo menjadi provinsi dengan TKK tertinggi, yaitu sebesar 96,99 persen. Sedangkan untuk TKK terendah, pada tahun 2018-2019 Provinsi Banten memiliki nilai TKK terendah dibandingkan provinsi lainnya. Selanjutnya pada Agustus 2020, provinsi dengan TKK terendah adalah Provinsi DKI Jakarta dengan nilai sebesar 89,05 persen. Di tahun berikutnya terdapat pergeseran kembali untuk provinsi dengan TKK terendah, yaitu Provinsi Kepulauan Riau dengan TKK sebesar 90,09 persen pada Agustus 2021.

Selanjutnya indikator yang juga penting dalam menggambarkan kondisi ketenagakerjaan adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Pada Agustus 2021 terdapat 8 provinsi yang berada di atas TPT Nasional. Sebelum pandemi Covid-19 mewabah, Provinsi Banten memiliki nilai TPT terbesar dibanding provinsi lainnya. Namun setelah pandemi Covid-19 mulai mewabah, tepatnya pada Agustus 2020 tercatat bahwa Provinsi DKI Jakarta menjadi provinsi dengan TPT tertinggi dibandingkan provinsi lainnya, yaitu sebesar 10,95 persen. Kenaikan TPT di Provinsi DKI Jakarta juga menjadi yang terbesar, tercatat pada

Agustus 2020 di provinsi ini terjadi kenaikan TPT sebesar 4,41 persen poin dibanding Agustus 2019. Tingginya kenaikan TPT di Provinsi DKI Jakarta tidak terlepas dari dampak Pandemi Covid-19 yang menyebabkan banyak orang kehilangan pekerjaannya. Meskipun demikian, pemulihan di Provinsi ini juga termasuk yang paling baik. Tercatat pada Agustus 2021, penurunan TPT di DKI Jakarta adalah yang terbesar dibandingkan provinsi lainnya, yaitu sebesar 2,45 persen poin, sehingga TPT Provinsi DKI Jakarta pada Agustus 2021 menjadi sebesar 8,50 persen. Pada periode yang sama, TPT tertinggi terdapat di Provinsi Kepulauan Riau, yaitu sebesar 9,91 persen.

Tabel 9.4. Indikator Ketenagakerjaan Menurut Provinsi, 2018-2022

Provinsi	TPAK					TKK					TPT				
	2018 (Agt)	2019 (Agt)	2020 (Agt)	2021 (Agt)	2022 (Feb)	2018 (Agt)	2019 (Agt)	2020 (Agt)	2021 (Agt)	2022 (Feb)	2018 (Agt)	2019 (Agt)	2020 (Agt)	2021 (Agt)	2022 (Feb)
Aceh	64,04	63,13	65,10	63,78	64,15	93,66	93,83	93,41	93,70	94,03	6,34	6,17	6,59	6,30	5,97
Sumatera Utara	71,97	70,37	68,67	69,10	70,45	94,45	94,61	93,09	93,67	94,53	5,55	5,39	6,91	6,33	5,47
Sumatera Barat	67,56	67,88	69,01	67,72	68,00	94,34	94,62	93,12	93,48	93,83	5,66	5,38	6,88	6,52	6,17
Riau	65,24	64,94	65,24	65,03	65,98	94,02	94,24	93,68	95,58	95,60	5,98	5,76	6,32	4,42	4,40
Jambi	68,21	65,79	67,79	67,17	68,86	96,27	95,94	94,87	94,91	95,30	3,73	4,06	5,13	5,09	4,70
Sumatera Selatan	68,45	67,67	68,65	68,77	69,33	95,73	95,47	94,49	95,02	95,26	4,27	4,53	5,51	4,98	4,74
Bengkulu	70,27	70,09	71,73	69,75	71,49	96,65	96,74	95,93	96,35	96,61	3,35	3,26	4,07	3,65	3,39
Lampung	69,62	69,06	70,16	69,35	72,51	95,96	95,97	95,33	95,31	95,69	4,04	4,03	4,67	4,69	4,31
Kep. Bangka Belitung	67,26	67,10	66,89	65,88	70,16	96,39	96,42	94,75	94,97	95,82	3,61	3,58	5,25	5,03	4,18
Kepulauan Riau	64,33	64,69	66,28	68,27	66,48	91,96	92,50	89,66	90,09	91,98	8,04	7,50	10,34	9,91	8,02
DKI Jakarta	62,92	63,90	63,81	62,63	62,27	93,35	93,46	89,05	91,50	92,00	6,65	6,54	10,95	8,50	8,00
Jawa Barat	62,84	64,99	64,53	64,95	66,31	91,77	91,96	89,54	90,18	91,65	8,23	8,04	10,46	9,82	8,35
Jawa Tengah	68,81	68,85	69,43	69,58	72,04	95,53	95,56	93,52	94,05	94,25	4,47	4,44	6,48	5,95	5,75
D.I. Yogyakarta	73,12	72,72	71,12	73,52	74,68	96,63	96,82	95,43	95,44	96,27	3,37	3,18	4,57	4,56	3,73
Jawa Timur	69,56	69,61	70,33	70,00	70,99	96,09	96,18	94,16	94,26	95,19	3,91	3,82	5,84	5,74	4,81
Banten	62,95	63,83	64,48	63,79	65,08	91,53	91,89	89,36	91,02	91,47	8,47	8,11	10,64	8,98	8,53
Bali	76,56	73,77	74,32	73,54	77,14	98,60	98,43	94,37	94,63	95,16	1,40	1,57	5,63	5,37	4,84
Nusa Tenggara Barat	66,68	69,47	70,45	70,57	70,25	96,42	96,72	95,78	96,99	96,08	3,58	3,28	4,22	3,01	3,92
Nusa Tenggara Timur	71,75	70,34	73,11	73,78	73,66	97,15	96,86	95,72	96,23	96,70	2,85	3,14	4,28	3,77	3,30
Kalimantan Barat	68,86	68,51	68,83	68,45	69,74	95,82	95,65	94,19	94,18	95,14	4,18	4,35	5,81	5,82	4,86
Kalimantan Tengah	69,69	69,29	68,40	68,67	66,94	96,09	95,96	95,42	95,47	95,80	3,91	4,04	4,58	4,53	4,20
Kalimantan Selatan	69,74	68,77	69,33	69,26	69,64	95,65	95,82	95,26	95,05	95,80	4,35	4,18	4,74	4,95	4,20
Kalimantan Timur	64,55	65,96	65,50	65,49	66,22	93,59	94,06	93,13	93,17	93,23	6,41	5,94	6,87	6,83	6,77
Kalimantan Utara	66,87	65,59	66,51	66,24	64,52	94,89	95,51	95,03	95,42	95,38	5,11	4,49	4,97	4,58	4,62
Sulawesi Utara	63,09	63,94	63,42	62,15	61,97	93,39	93,99	92,63	92,94	93,49	6,61	6,01	7,37	7,06	6,51
Sulawesi Tengah	69,76	67,80	69,44	68,73	70,86	96,63	96,89	96,23	96,25	96,33	3,37	3,11	3,77	3,75	3,67
Sulawesi Selatan	63,93	63,80	63,40	64,73	65,85	95,06	95,38	93,69	94,28	94,25	4,94	4,62	6,31	5,72	5,75
Sulawesi Tenggara	69,75	69,11	69,83	70,09	66,31	96,81	96,48	95,42	96,08	96,14	3,19	3,52	4,58	3,92	3,86
Gorontalo	67,94	67,38	66,46	65,94	67,78	96,30	96,24	95,72	96,99	96,75	3,70	3,76	4,28	3,01	3,25
Sulawesi Barat	69,27	69,89	70,19	70,27	68,90	96,99	97,02	96,68	96,87	96,89	3,01	2,98	3,32	3,13	3,11
Maluku	63,87	63,97	65,07	65,75	63,08	93,05	93,31	92,43	93,07	93,56	6,95	6,69	7,57	6,93	6,44
Maluku Utara	65,73	65,05	64,28	64,70	66,71	95,37	95,19	94,85	95,29	95,02	4,63	4,81	5,15	4,71	4,98
Papua Barat	67,30	67,71	69,55	70,34	69,59	93,55	93,57	93,20	94,16	94,22	6,45	6,43	6,80	5,84	5,78
Papua	79,02	76,93	72,16	78,29	80,23	97,00	96,49	95,72	96,67	96,40	3,00	3,51	4,28	3,33	3,60
Indonesia	67,31	67,53	67,77	67,80	69,06	94,70	94,77	92,93	93,51	94,17	5,30	5,23	7,07	6,49	5,83

Sumber : Publikasi Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia, BPS

Sebagai provinsi yang mengandalkan potensi pariwisata, Provinsi Bali menjadi provinsi kedua yang paling terdampak pandemi Covid-19. Pada tahun 2018-2019, Provinsi Bali masih menjadi provinsi dengan TPT terendah se-Indonesia. Namun pasca pandemi Covid-19 mulai mewabah, TPT di Provinsi Bali meningkat tajam. Pada Agustus 2020 tercatat terjadi kenaikan TPT di Provinsi Bali sebesar 4,06 persen poin dibanding tahun sebelumnya. TPT Provinsi Bali yang sebelumnya berkisar pada angka 1 persen, kini meningkat menjadi 5,63 persen. Kemudian pada Agustus 2021, TPT di Provinsi Bali tercatat sebesar 5,37 persen. Namun menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Ayupijaya, M (2020), selain dampak negatif yang ditimbulkan akibat pandemi Covid-19, terdapat dampak positif lain yang ditimbulkan, yaitu adanya upaya percepatan transformasi digital dalam pekerjaan.

Menggantikan Provinsi Bali, pada Agustus 2020 Provinsi Sulawesi Barat menjadi provinsi dengan TPT terendah se-Indonesia. Tercatat TPT pada provinsi ini sebesar 3,32 persen. Selanjutnya pada Agustus 2021, TPT terendah diduduki oleh Provinsi Gorontalo dengan nilai sebesar 3,01 persen.

Tingkat Pendidikan Tenaga Kerja

Sebagai modal penting dalam pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang andal dan kompetitif, tenaga kerja harus memiliki kemampuan dan kapasitas yang memadai. Kemampuan dan kapasitas seorang tenaga kerja perlu dibangun melalui pendidikan yang baik. Rendahnya tingkat pendidikan pekerja berpengaruh dalam kualitas dari pekerja itu sendiri. Hal itu dapat menyebabkan pekerja tidak mampu untuk bersaing di pasar tenaga kerja.

Selama tahun 2018-2021, tenaga kerja di Indonesia masih didominasi oleh pekerja dengan tingkat pendidikan SD ke bawah. Masih mendominasinya pekerja dengan pendidikan rendah menandakan kualitas pekerja di Indonesia masih sangat rendah. Namun, selama periode tersebut, pekerja dengan tingkat pendidikan SD ke bawah cenderung menurun. Pada Agustus 2018, pekerja dengan tingkat pendidikan SD ke bawah sebesar 40,82 persen dan terus mengalami penurunan hingga Agustus 2021 tercatat sebesar 37,69 persen pekerja lulusan SD ke bawah.

Tabel 9.5. Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan, 2018-2022

Tingkat Pendidikan	2018 (Agustus)	2019 (Agustus)	2020 (Agustus)	2021 (Agustus)	2022 (Februari)
SD ke bawah	40,82	39,83	38,89	37,69	39,10
SMP	18,04	17,85	18,27	17,76	18,12
SMA	28,98	29,95	30,51	31,73	30,18
Diploma I/II/III	2,77	2,69	2,70	2,64	2,68
Universitas	9,38	9,69	9,63	10,18	9,92

Sumber : Publikasi Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia, BPS

Selanjutnya persentase terbesar kedua terdapat pada pekerja dengan tingkat pendidikan SMA. Pada tahun 2018-2021, persentase pekerja ini cenderung mengalami kenaikan setiap tahunnya. Pada Agustus 2018, pekerja dengan tingkat pendidikan SMA sebesar 28,98 persen dan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya hingga pada Agustus 2021 tercatat sebesar 31,73 persen. Kemudian persentase terendah terdapat pada pekerja dengan tingkat pendidikan Diploma I/II/III, yaitu sebesar 2,64 persen pada Agustus 2021.

Berbagai upaya juga terus dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kualitas pekerja di Indonesia. Berbagai upaya tersebut antara lain mengadakan pelatihan kerja, meningkatkan kualitas pendidikan, mengadakan latihan kerja bagi para tenaga kerja, serta meningkatkan kualitas dan keterampilan tenaga ahli dalam mengajar atau memberi materi pada calon tenaga kerja. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas pekerja yang juga akan berpengaruh pada produktivitas.

Peralihan Sektor Pekerjaan di Masa Pandemi

Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan hingga saat ini masih menjadi sektor yang memberikan lapangan pekerjaan terbesar di Indonesia. Pada tahun 2018-2021, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan masih memberikan kontribusi terbesar dalam menyerap tenaga kerja di Indonesia. Pada Agustus 2018, sektor ini tercatat mampu menyerap 28,97 persen tenaga kerja dan mengalami penurunan pada Agustus 2019 menjadi sebesar 27,53 persen.

Selain menjadi sektor utama dalam penyerapan tenaga kerja, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan juga termasuk kuat selama masa pandemi Covid-19. Pada Agustus 2020, sektor ini justru mampu menyerap tenaga kerja sampai 29,76 persen, atau meningkat sebesar 2,22 persen poin jika dibandingkan tahun sebelumnya. Kemudian pada Agustus 2021, sektor ini mampu menyerap 28,33 persen tenaga kerja di Indonesia.

Selanjutnya, sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor menjadi sektor kedua terbesar dalam menyerap tenaga kerja di Indonesia. Pada tahun 2018-2021, kontribusi sektor ini dalam menyerap tenaga kerja cenderung mengalami peningkatan. Pada Agustus 2018, sektor ini mampu menyerap tenaga kerja sebesar 18,58 persen, kemudian terus mengalami peningkatan setiap tahunnya hingga pada tahun 2021 sektor ini mampu menyerap 19,64 persen tenaga kerja di Indonesia.

Tahun 2020 merupakan tahun yang sulit akibat wabah Covid-19, hampir semua sektor mengalami dampak negatif, hanya sektor-sektor tertentu yang mampu bertahan dan masih mampu menyerap tenaga kerja selain sektor pertanian. Sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor mampu menyerap tenaga kerja, dimana ada kenaikan sebesar 0,46 persen poin dibanding sebelum Covid-19, menjadi 19,23 persen. Hal ini berarti, pada masa pandemi Covid-19, sektor ini menjadi salah satu sektor

Tabel 9.6. Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan, 2018-2022

Lapangan Pekerjaan Utama	2018 (Agt)	2019 (Agt)	2020 (Agt)	2021 (Agt)	2022 (Feb)
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	28,97	27,53	29,76	28,33	29,96
B. Pertambangan dan Penggalian	1,16	1,11	1,05	1,10	1,17
C. Industri Pengolahan	14,68	14,91	13,61	14,27	13,77
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0,27	0,28	0,24	0,22	0,23
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,38	0,39	0,38	0,43	0,39
F. Konstruksi	6,70	6,74	6,28	6,33	6,04
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	18,58	18,77	19,23	19,64	19,03
H. Transportasi dan Pergudangan	4,35	4,39	4,35	4,15	4,21
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,15	6,65	6,65	7,01	7,11
J. Informasi dan Komunikasi	0,72	0,72	0,73	0,76	0,81
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	1,44	1,38	1,21	1,22	1,11
L. Real Estate	0,31	0,31	0,31	0,27	0,33
M,N. Jasa Perusahaan	1,33	1,51	1,40	1,54	1,43
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,77	3,84	3,56	3,70	3,42
P. Jasa Pendidikan	4,88	4,98	4,69	4,95	4,89
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,49	1,54	1,56	1,68	1,76
R,S,T,U. Jasa lainnya	4,82	4,94	4,99	4,41	4,34

Sumber :Publikasi Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia (diolah), BPS

pilihan bagi masyarakat untuk bekerja. Sejalan dengan hal tersebut, hasil survei yang dilakukan oleh *Danareksa Research Institute (DRI)* menyatakan sektor perdagangan menjadi pilihan favorit masyarakat untuk mencari pekerjaan baru selama pandemi Covid-19 (ekonomi.bisnis.com, 2021).

Upah Pekerja

Menurut Pasal 1 angka 30 Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU 13/2013), upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Sebagai faktor produksi yang menjalankan kegiatan produksi, tenaga kerja perlu diberikan upah sesuai dengan pekerjaan yang dilakukannya. Pemberian upah ini dapat mendorong pekerja untuk bekerja lebih produktif dalam kegiatan produksi.

Untuk melindungi kepentingan pekerja, pemerintah menetapkan upah minimum yang berfungsi sebagai jaring pelindung agar tidak ada pekerja yang dibayar lebih rendah dari batas upah minimum yang ditetapkan. Upah minimum

di setiap daerah akan berbeda-beda tergantung karakteristik dan tingkat harga yang berlaku. Pemerintah provinsi menetapkan upah minimum yang berlaku dengan mempertimbangkan tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2009-2022, rata-rata Upah Minimum Provinsi (UMP) terus mengalami kenaikan. Pertumbuhan rata-rata UMP terbesar terjadi pada tahun 2014, yaitu tumbuh sebesar 22,17 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia pada awal 2020 memberikan dampak yang luar biasa bagi perekonomian. Tidak sedikit perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) untuk dapat bertahan pada situasi yang sulit tersebut. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan surat edaran untuk mengatur penetapan upah minimum pada masa pandemi Covid-19. Penyesuaian tersebut dilakukan untuk dapat melindungi pekerja maupun perusahaan agar dapat bertahan pada situasi sulit pada masa pandemi. Dampaknya, rata-rata UMP pada tahun 2021 hanya tumbuh sebesar 0,57 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2021 rata-rata UMP di Indonesia sebesar Rp 2,69 juta.

Pada tahun 2021, Indonesia berhasil keluar dari resesi ekonomi. Pada kuartal II 2021, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat 7,07 persen jika dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya (*y-o-y*). Pertumbuhan ekonomi ini menandakan kondisi ekonomi yang sudah mulai membaik dibandingkan tahun sebelumnya. Rata-rata UMP juga mengalami pertumbuhan sebesar 1,41 persen pada tahun 2022. Pertumbuhan ini jauh lebih besar dibandingkan pertumbuhan yang terjadi pada tahun 2021.

Tabel 9.7. Rata-Rata UMP (Ribu Rupiah) dan Pertumbuhan Rata-Rata UMP (Persen), 2009–2022

Tahun	Rata-Rata UMP	Pertumbuhan Rata-Rata UMP (%)
2009	841,53	13,24
2010	908,82	8,00
2011	988,83	8,80
2012	1 088,90	10,12
2013	1 296,91	19,10
2014	1 584,39	22,17
2015	1 790,34	13,00
2016 ^r	1 967,57	9,90
2017 ^r	2 074,15	5,42
2018	2 268,87	9,39
2019	2 455,66	8,23
2020	2 672,37	8,82
2021	2 687,72	0,57
2022	2 725,50	1,41

Catatan : r Angka revisi

Sumber : Kementerian Ketenagakerjaan RI (diolah)

<https://satudata.kemnaker.go.id/data>

Berdasarkan Tabel 9.8, dapat dilihat bahwa terjadi penurunan rata-rata upah pekerja pada tahun 2020 dan 2021. Pada tahun 2020, rata-rata upah pekerja hanya sebesar Rp 2,45 juta atau turun sebesar 6,90 persen dibandingkan tahun 2019. Kemudian pada tahun 2021 rata-rata upah pekerja sebesar Rp 2,44 juta atau turun sebesar 0,37 persen.

Tabel 9.8. Distribusi Pekerja* Menurut Upah dan Daerah Tempat Tinggal (Persen), 2018-2022

Daerah Tempat Tinggal	Upah (Rp)				Rata-Rata Upah (Rp)
	< 1 000 000	1 000 000 - 1 499 999	1 500 000 - 1 999 999	2 000 000 +	
Tahun 2018 (Agt)					
Perkotaan	14,54	11,40	14,42	59,64	2 930 707
Perdesaan	28,55	16,52	17,96	36,97	1 851 062
Total	19,52	13,22	15,68	51,58	2 546 849
Tahun 2019 (Agt)					
Perkotaan	13,52	10,75	13,75	61,99	3 006 230
Perdesaan	27,10	15,59	16,53	40,78	1 962 576
Total	18,35	12,48	14,74	54,43	2 634 525
Tahun 2020 (Agt)					
Perkotaan	16,52	11,74	13,73	58,01	2 797 912
Perdesaan	30,78	15,21	15,95	38,06	1 841 889
Total	21,66	13,00	14,53	50,80	2 452 818
Tahun 2021 (Agt)					
Perkotaan	16,12	11,98	13,72	58,19	2 763 749
Perdesaan	29,32	15,44	15,83	39,40	1 860 717
Total	20,80	13,21	14,46	51,53	2 443 727
Tahun 2022 (Feb)					
Perkotaan	14,64	10,83	13,46	61,07	2 973 350
Perdesaan	25,41	15,72	16,16	42,71	1 940 853
Total	18,47	12,57	14,42	54,54	2 606 237

Catatan: *Pekerja adalah buruh/karyawan/pegawai, pekerja bebas di pertanian dan pekerja bebas di nonpertanian
Sumber: Publikasi Keadaan Pekerja di Indonesia, BPS (diolah)

Jika dilihat berdasarkan daerah tempat tinggal, pekerja yang menerima upah Rp 2 juta ke atas paling banyak di daerah perkotaan. Persentase pekerja yang menerima upah Rp 2 juta ke atas di perkotaan pada tahun 2021 tercatat sebesar 58,19 persen. Sedangkan di daerah perdesaan hanya sebesar 39,40 persen. Kemudian pada Februari 2022 terjadi kenaikan distribusi untuk yang menerima upah Rp 2 juta ke atas. Di daerah perkotaan, terdapat 61,07 persen pekerja yang menerima upah Rp 2 juta ke atas, kenaikan ini juga terjadi di perdesaan yaitu sebesar 42,71 persen.

Selanjutnya, jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, pekerja laki-laki menerima upah yang lebih tinggi dibandingkan pekerja perempuan. Pada tahun 2021, terdapat 56,56 persen pekerja laki-laki yang menerima upah Rp 2 juta ke atas, sedangkan pekerja perempuan hanya sebesar 41,44 persen. Rata-

Tabel 9.9. Distribusi Pekerja* Menurut Upah dan Jenis Kelamin (Persen), 2018-2022

Daerah Tempat Tinggal	Upah (Rp)				Rata- Rata Upah (Rp)
	< 1 000 000	1 000 000 - 1 499 999	1 500 000 - 1 999 999	2 000 000 +	
Tahun 2018 (Agt)					
Laki-laki	13,01	12,95	17,15	56,90	2 729 220
Perempuan	32,94	13,78	12,66	40,63	2 171 325
Total	19,52	13,22	15,68	51,58	2 546 849
Tahun 2019 (Agt)					
Laki-laki	12,17	11,91	15,77	60,15	2 835 977
Perempuan	30,86	13,62	12,66	42,87	2 227 119
Total	18,35	12,48	14,74	54,43	2 634 525
Tahun 2020 (Agt)					
Laki-laki	15,62	12,73	15,65	56,00	2 620 832
Perempuan	33,93	13,54	12,26	40,26	2 111 992
Total	21,66	13,00	14,53	50,80	2 452 818
Tahun 2021 (Agt)					
Laki-laki	14,84	12,94	15,66	56,56	2 599 801
Perempuan	32,75	13,74	12,07	41,44	2 130 899
Total	20,80	13,21	14,46	51,53	2 443 727
Tahun 2022 (Feb)					
Laki-laki	11,77	11,44	15,31	61,48	2 813 641
Perempuan	32,11	14,88	12,62	40,40	2 183 752
Total	18,47	12,57	14,42	54,54	2 606 237

Catatan : * Pekerja adalah buruh/karyawan/pegawai, pekerja bebas di pertanian dan pekerja bebas di non pertanian

Sumber : Publikasi Keadaan Pekerja di Indonesia, BPS (diolah)

rata upah yang diterima oleh pekerja laki-laki pada tahun 2021 juga lebih tinggi dibandingkan pekerja perempuan. Pekerja laki-laki rata-rata menerima upah sebesar Rp 2,60 juta, sedangkan pekerja perempuan sebesar Rp 2,13 juta.

Jika dilihat perkembangannya, pada tahun 2021 rata-rata upah pekerja juga mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Namun penurunan rata-rata upah pekerja ini hanya pada pekerja laki-laki saja, rata-rata upah pekerja laki-laki mengalami penurunan sebesar 0,80 persen dibandingkan tahun sebelumnya, sedangkan pada pekerja perempuan terdapat kenaikan sebesar 0,90 persen.

Pertumbuhan Ekonomi Dan Penyerapan Tenaga Kerja

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat. Salah satu faktor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah Sumber Daya Manusia (SDM)/tenaga kerja. Tenaga kerja yang produktif akan menghasilkan barang dan jasa yang dapat berdampak pada tumbuhnya perekonomian di suatu wilayah. Ketersediaan

tenaga kerja juga menjadi salah satu faktor yang penting dalam pembangunan ekonomi. Namun, tersedianya tenaga kerja harus didukung dengan tersedianya lapangan pekerjaan yang memadai. Dengan begitu, tenaga kerja yang tersedia dapat diserap secara optimal untuk mendukung pembangunan ekonomi.

Ketersediaan lapangan kerja sangat erat kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi. Hal ini karena pertumbuhan ekonomi mengindikasikan adanya ekspansi ekonomi yang terjadi di suatu wilayah. Dengan adanya ekspansi ekonomi, maka secara tidak langsung permintaan tenaga kerja sebagai faktor produksi akan meningkat. Oleh karena itu, laju pertumbuhan ekonomi akan mendorong laju pertumbuhan kesempatan kerja. Hubungan antara keduanya digambarkan melalui elastisitas kesempatan kerja. Elastisitas kesempatan kerja adalah perbandingan antara laju pertumbuhan kesempatan kerja dan laju pertumbuhan ekonomi yang digambarkan melalui nilai Produk Domestik Bruto (PDB).

Angka elastisitas kesempatan kerja diartikan bahwa setiap kenaikan PDB mampu meningkatkan kesempatan kerja. Selama tahun 2019-2021, elastisitas kesempatan kerja di Indonesia sebesar 1,15. Angka tersebut

Tabel 9.10. Elastisitas Tenaga Kerja Menurut Kategori Lapangan Usaha, 2019-2021

Lapangan Usaha	Rata-Rata Laju		Elastisitas Kesempatan Kerja
	Kesempatan Kerja (%)	Pertumbuhan PDB (%)	
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,34	1,80	1,30
B. Pertambangan dan Penggalian	0,52	0,98	0,53
C. Industri Pengolahan	-1,32	0,18	-7,38
D. Pengadaan Listrik dan Gas	-11,55	1,52	-7,57
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,85	4,95	1,18
F. Konstruksi	-2,22	-0,27	8,34
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3,20	0,35	9,20
H. Transportasi dan Pergudangan	-1,90	-6,35	0,30
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,55	-3,44	-1,03
J. Informasi dan Komunikasi	4,10	8,69	0,47
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	-5,13	2,40	-2,14
L. Real Estate	-6,12	2,55	-2,40
M,N. Jasa Perusahaan	1,89	-2,40	-0,78
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-1,00	-0,18	5,62
P. Jasa Pendidikan	0,59	1,35	0,43
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,27	11,01	0,48
R,S,T,U. Jasa lainnya	-4,75	-1,04	4,57
Jumlah	0,89	0,77	1,15

Sumber : Diolah dari Sakernas dan PDB

berarti setiap satu persen kenaikan PDB mampu meningkatkan 1,15 persen kesempatan kerja.

Jika dilihat berdasarkan lapangan usaha, pada tahun 2019-2021 terdapat 11 lapangan usaha yang memiliki elastisitas kesempatan kerja positif, sedangkan 6 lainnya memiliki elastisitas kesempatan kerja negatif. Lapangan usaha dengan elastisitas terbesar terdapat pada sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor dengan elastisitas sebesar 9,20 persen. Hal ini berarti, setiap 1 persen kenaikan PDB di kategori lapangan usaha tersebut, akan meningkatkan 9,20 persen kesempatan kerja. Tingginya elastisitas kesempatan kerja pada sektor ini menunjukkan bahwa sektor perdagangan merupakan salah satu sektor yang mampu menyelamatkan perekonomian. Sektor ini mampu menjadi pilihan bagi masyarakat untuk bekerja selama masa pandemi.

Selanjutnya, elastisitas kesempatan kerja terbesar kedua terdapat pada sektor konstruksi. Pada sektor ini elastisitas kesempatan kerja sebesar 8,34 persen. Hal ini berarti setiap kenaikan 1 persen PDB di sektor ini, akan meningkatkan 8,34 persen kesempatan kerja. Sektor berikutnya antara lain sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib (5,62 persen), sektor jasa lainnya (4,57 persen), sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan (1,30 persen), sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang (1,18 persen), sektor pertambangan dan penggalian (0,53 persen), sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (0,48 persen), sektor informasi dan komunikasi (0,47 persen), sektor jasa pendidikan (0,43 persen), dan sektor transportasi dan pergudangan (0,30 persen).

Sektor pengadaan listrik dan gas menjadi sektor dengan elastisitas kesempatan kerja yang bernilai negatif terbesar, yaitu sebesar -7,57 persen. Angka ini berarti setiap kenaikan PDB sebesar 1 persen pada sektor pengadaan listrik dan gas, maka akan mengurangi 7,57 persen kesempatan kerja pada sektor tersebut. Sektor lain yang bernilai negatif pada tahun 2019-2021 antara lain sektor industri pengolahan (-7,38 persen), sektor real estate (-2,40 persen), sektor jasa keuangan dan asuransi (-2,14 persen), sektor penyediaan akomodasi dan makan minum (-1,03 persen), dan sektor jasa perusahaan (-0,78 persen).

Produktivitas Tenaga Kerja di Indonesia

Salah satu masalah dalam ketenagakerjaan adalah rendahnya produktivitas dari tenaga kerja. Produktivitas adalah kemampuan tenaga kerja dalam menghasilkan barang produksi. Semakin produktif tenaga kerja, maka semakin besar pula output yang dihasilkan. Saat ini, produktivitas tenaga kerja di Indonesia termasuk rendah dibandingkan negara lain. Berdasarkan data *International Labour Organization* (ILO), produktivitas tenaga kerja di Indonesia hanya berada di urutan ke 107 dari 185 negara. Rendahnya produktivitas tenaga kerja ini mendorong pemerintah dalam merumuskan UU Cipta Kerja.

Undang-undang ini diharapkan dapat menyederhanakan, menyinkronkan dan memangkas regulasi yang menghambat penciptaan lapangan kerja.

Pada tahun 2019-2021, produktivitas tenaga kerja di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup baik. Meskipun sempat mengalami penurunan pada tahun 2020, produktivitas tenaga kerja mampu meningkat kembali di tahun 2021. Pada tahun 2019, produktivitas tenaga kerja tercatat sebesar Rp 122,97 juta per tenaga kerja, sempat mengalami penurunan pada

Tabel 9.11. Produktivitas Menurut Provinsi (Juta Rupiah per Penduduk yang Bekerja), 2019-2021

Provinsi	2019	2020	2021
Aceh	72,75	70,50	78,34
Sumatera Utara	114,03	118,57	122,21
Sumatera Barat	96,84	93,79	97,91
Riau	257,54	241,21	267,78
Jambi	128,93	118,95	133,80
Sumatera Selatan	113,05	112,05	117,61
Bengkulu	71,95	71,07	77,88
Lampung	85,22	82,86	86,81
Kep. Bangka Belitung	107,98	107,92	122,52
Kepulauan Riau	270,69	250,10	253,48
DKI Jakarta	580,42	595,03	615,23
Jawa Barat	96,27	96,33	99,04
Jawa Tengah	77,35	76,90	79,66
DI Yogyakarta	64,87	65,08	67,03
Jawa Timur	111,53	109,69	116,67
Banten	119,16	112,83	116,86
Bali	102,12	92,52	90,01
Nusa Tenggara Barat	52,50	51,83	52,74
Nusa Tenggara Timur	40,81	39,07	39,48
Kalimantan Barat	86,77	87,05	93,18
Kalimantan Tengah	113,73	115,46	126,26
Kalimantan Selatan	88,26	85,99	91,29
Kalimantan Timur	385,10	358,77	404,08
Kalimantan Utara	301,65	304,27	327,28
Sulawesi Utara	113,30	116,58	126,55
Sulawesi Tengah	126,69	130,21	161,99
Sulawesi Selatan	124,26	125,91	131,05
Sulawesi Tenggara	102,35	100,98	104,79
Gorontalo	71,82	73,39	75,81
Sulawesi Barat	70,19	68,22	73,33
Maluku	60,87	59,64	60,65
Maluku Utara	71,94	76,28	92,07
Papua Barat	193,15	181,92	175,89
Papua	105,74	117,59	124,67
Indonesia	122,97	120,15	129,50

Sumber: Diolah dari Sakernas dan PDB

tahun 2020 menjadi Rp 120,15 juta per tenaga kerja dan pada tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi Rp 129,50 juta per tenaga kerja.

Jika dilihat berdasarkan wilayahnya, Provinsi DKI Jakarta menjadi provinsi dengan produktivitas tertinggi di Indonesia. Pada tahun 2021, produktivitas pada provinsi ini tercatat sebesar Rp 615,23 juta per tenaga kerja. Kemudian disusul oleh Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara dengan produktivitas tenaga kerja masing-masing sebesar Rp 404,08 juta dan Rp 327,28 juta per tenaga kerja.

Pada tahun 2021, hampir seluruh provinsi di Indonesia mengalami kenaikan produktivitas, hanya Provinsi Bali dan Papua Barat saja yang mengalami penurunan produktivitas tenaga kerja. Pada Provinsi Bali, produktivitas tenaga kerja tercatat sebesar Rp 90,01 juta per tenaga kerja, atau turun 2,71 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Selanjutnya pada Provinsi Papua Barat, produktivitas tenaga kerja pada tahun 2021 tercatat sebesar Rp 175,89 juta per tenaga kerja, atau turun sebesar 3,32 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Kenaikan produktivitas tertinggi di tahun 2021 terjadi di Provinsi Sulawesi Tengah, Maluku Utara dan Kepulauan Bangka Belitung. Di Provinsi Sulawesi Tengah, produktivitas tenaga kerja tercatat sebesar Rp 161,99 juta atau meningkat sebesar 24,41 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Kemudian di Provinsi Maluku Utara dan Kepulauan Bangka Belitung, produktivitas tenaga kerja masing-masing sebesar Rp 92,07 juta dan Rp 122,52 juta atau mengalami peningkatan masing-masing sebesar 20,71 persen dan 13,53 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Jika dilihat dari kategorinya, real estate masih menjadi lapangan usaha dengan produktivitas tenaga kerja tertinggi pada tahun 2021. Pada lapangan usaha ini tercatat produktivitas sebesar Rp 1.315,40 juta per tenaga kerja. Selanjutnya lapangan usaha yang memiliki produktivitas tertinggi kedua terdapat pada lapangan usaha pertambangan dan penggalian dengan nilai produktivitas sebesar Rp 1.055,58 juta per tenaga kerja.

Pada tahun 2021, hampir seluruh lapangan usaha mengalami kenaikan produktivitas. Kenaikan terbesar terjadi pada lapangan usaha pertambangan dan penggalian, jasa lainnya, dan real estate dengan kenaikan masing-masing sebesar 43,67 persen, 14,53 persen, dan 14,11 persen. Sementara itu, pada tahun 2021 terdapat enam lapangan usaha yang mengalami penurunan produktivitas tenaga kerja. Lapangan usaha dengan penurunan produktivitas tertinggi yaitu jasa perusahaan dengan produktivitas pada tahun 2021 sebesar Rp 149,27 juta atau menurun sebesar 8,85 persen dibandingkan tahun 2020. Selanjutnya adalah lapangan usaha pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang dengan produktivitas pada tahun 2021 sebesar Rp 21,37 juta atau menurun sebesar 7,17 persen.

**Tabel 9.12. Produktivitas Menurut Kategori Lapangan Usaha
(Juta Rupiah per Penduduk yang Bekerja), 2019-2021**

Kategori Lapangan Usaha	2019	2020	2021
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	56,78	55,33	60,70
B. Pertambangan dan Penggalian	804,95	734,74	1055,58
C. Industri Pengolahan	162,50	175,49	174,75
D. Pengadaan Listrik dan Gas	509,07	592,13	667,96
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	21,38	23,02	21,37
F. Konstruksi	196,16	204,88	213,62
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	85,27	80,78	85,50
H. Transportasi dan Pergudangan	155,85	123,34	132,20
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	51,41	46,14	44,91
J. Informasi dan Komunikasi	680,13	745,59	750,11
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	378,21	446,79	460,75
L. Real Estate	1088,02	1152,71	1315,40
M,N. Jasa Perusahaan	156,60	163,77	149,27
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	115,53	126,95	120,51
P. Jasa Pendidikan	81,41	91,13	85,70
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	88,13	100,30	103,29
R,S,T,U. Jasa lainnya	48,55	47,21	54,07

Sumber: Diolah dari Sakernas dan PDB

Pekerja Sektor Informal Masih Mendominasi

Hingga saat ini, struktur tenaga kerja di Indonesia masih didominasi oleh pekerja di sektor Informal. Sektor informal masih menjadi pilihan bagi masyarakat karena sektor ini lebih mudah untuk dimasuki dan diciptakan. Sektor formal lebih mengutamakan keahlian dan keterampilan dalam bekerja, sedangkan sektor formal lebih menekankan pada latar belakang pendidikan. Sektor informal juga menjadi alternatif pilihan bagi masyarakat apabila belum mendapatkan pekerjaan formal.

Pada tahun 2018-2022, pekerja di sektor informal masih mendominasi struktur tenaga kerja di Indonesia. Pada Agustus 2018, pekerja di sektor informal tercatat sebesar 71,95 juta dan mengalami sedikit penurunan pada Agustus 2019. Pandemi Covid-19 yang terjadi pada Tahun 2020 menyebabkan banyak pekerja yang mengalami PHK, akibatnya pada tahun ini jumlah pekerja di sektor formal justru mengalami penurunan. Sementara itu, jumlah pekerja di sektor informal justru mengalami kenaikan. Pada Agustus 2020 jumlah pekerja di sektor informal tercatat sebesar 77,68 juta atau meningkat sebesar 7,97 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Sebaliknya, pekerja di sektor formal justru turun sebesar 10,62 persen menjadi 50,77 juta pekerja. Pada tahun berikutnya, pekerja baik di sektor formal maupun informal mengalami kenaikan, seiring dengan pemulihan ekonomi yang terjadi di Indonesia.

Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, pada tahun 2021 terjadi peningkatan pekerja formal baik pada laki-laki maupun perempuan. Pekerja laki-laki di sektor formal meningkat sebesar 3,58 persen menjadi 34,40 juta. Sedangkan pekerja perempuan di sektor formal meningkat sebesar 6,73 persen menjadi 18,75 juta. Sementara itu, di sektor informal peningkatan pekerja hanya terjadi pada laki-laki saja, sedangkan pekerja perempuan mengalami penurunan. Pada tahun 2021, pekerja laki-laki di sektor informal mengalami peningkatan sebesar 0,72 persen menjadi 44,87 juta. Sedangkan pekerja perempuan di sektor informal mengalami penurunan sebesar 0,28 persen menjadi 33,04 juta.

Tabel 9.13. Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Sektor Formal/Informal dan Jenis Kelamin, 2018–2022

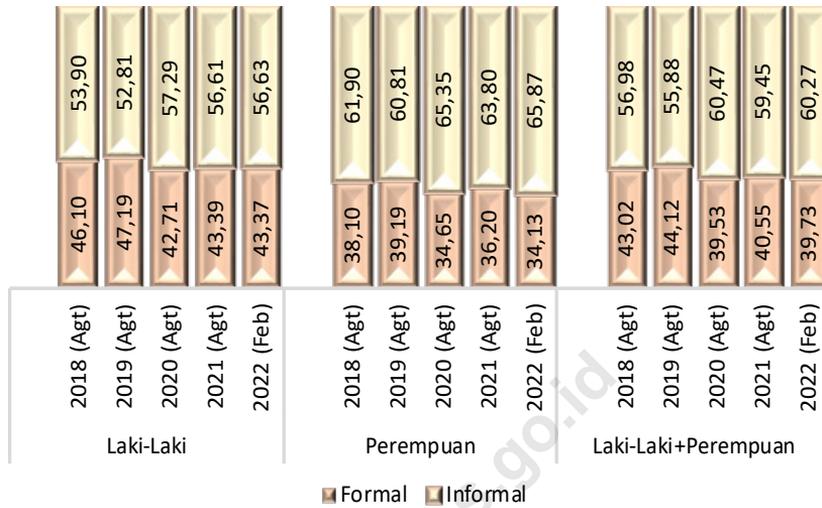
Jenis Kelamin	Formal	Informal
Tahun 2018 (Agt)		
Laki-Laki	35 808 711	41 866 600
Perempuan	18 519 350	30 087 525
Laki-Laki+Perempuan	54 328 061	71 954 125
Tahun 2019 (Agt)		
Laki-Laki	37 445 385	41 912 466
Perempuan	19 358 922	30 038 498
Laki-Laki+Perempuan	56 804 307	71 950 964
Tahun 2020 (Agt)		
Laki-Laki	33 206 582	44 548 444
Perempuan	17 565 267	33 133 891
Laki-Laki+Perempuan	50 771 849	77 682 335
Tahun 2021 (Agt)		
Laki-Laki	34 395 107	44 868 207
Perempuan	18 746 971	33 040 238
Laki-Laki+Perempuan	53 142 078	77 908 445
Tahun 2022 (Feb)		
Laki-Laki	35 900 994	46 871 590
Perempuan	18 408 084	35 521 232
Laki-Laki+Perempuan	54 309 078	82 392 822

Sumber : Diolah dari Survei Angkatan Kerja Nasional

Jika dilihat berdasarkan komposisinya, terdapat penurunan pekerja formal yang cukup drastis pada tahun 2020. Pekerja di sektor formal pada tahun 2019 mencapai 44,12 persen, kemudian mengalami penurunan yang cukup besar pada tahun 2020 menjadi 39,53 persen. Hal ini berarti, pada masa pandemi terjadi pergeseran pekerja dari sektor formal ke sektor informal. Hingga tahun 2021, pekerja di sektor informal masih mendominasi struktur tenaga kerja di Indonesia.

Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, pekerja perempuan lebih mendominasi sektor informal dibandingkan pekerja laki-laki. Pada tahun 2021, pekerja laki-laki yang bekerja di sektor informal sebesar 56,61 persen. Sedangkan pekerja perempuan mencapai 63,80 persen. Hal ini berarti, kecenderungan perempuan untuk bekerja di sektor informal lebih tinggi dibandingkan laki-laki.

Gambar 9.1. Persentase Pekerja Sektor Formal dan Informal Menurut Jenis Kelamin, 2018-2022



Sumber : Diolah dari Survei Angkatan Kerja Nasional

DAFTAR PUSTAKA

- Analisis.kontan.co.id. 4 Maret 2021. Memaknai Kontraksi Ekonomi Indonesia. Diakses pada 24 Agustus 2022, dari <https://analisis.kontan.co.id/news/memaknai-kontraksi-ekonomi-indonesia>
- Angkasa, B., & Pontoh, R. S. Desember 2021. Analisis Dampak Wabah Covid-19 terhadap Tingkat Pengangguran di Indonesia. In Prosiding Seminar Nasional Statistika | Departemen Statistika FMIPA Universitas Padjadjaran (Vol. 10, pp. 15-15).
- Asian Development Bank. 2021. Asian Development Outlook 2021: Financing A Green Inclusive Recovery. Metro Manila: Asian Development Bank.
- Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2022. Indikator Kesejahteraan Meningkat, Bukti Pemulihan Ekonomi Berkualitas. SP – 2 /BKF/2022.
- Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 7 Februari 2022. Laju Pemulihan Ekonomi Menguat Meskipun Penuh Tantangan (Siaran Pers SP - 10/KLI/2021, pp.).
- Badan Kebijakan Fiskal. 2020. Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2021, Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi. Diakses pada 07 Juli 2022, dari https://fiskal.kemenkeu.go.id/files/kemppkf/file/kem_ppkf_2021.pdf
- Badan Kebijakan Fiskal. 2021. Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2022, Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural. Diakses pada 07 Juli 2022, dari https://fiskal.kemenkeu.go.id/files/kemppkf/file/kem_ppkf_2022.pdf
- Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. 15 Juli 2022. [bali.bps.go.id](https://bali.bps.go.id/indicator/52/165/2/distribusi-pdrb-triwulanan-provinsi-bali-menurut-lapangan-usaha.html). Diakses pada 15 Juli 2022, dari <https://bali.bps.go.id/indicator/52/165/2/distribusi-pdrb-triwulanan-provinsi-bali-menurut-lapangan-usaha.html>
- Badan Pusat Statistik. 2021. Berita Resmi Statistik Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Agustus 2021. No.84/11/Th. XXIV, 05 November 2021.
- Badan Pusat Statistik. 2021. Berita Resmi Statistik Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan IV-2020. No. 13/02/Th. XXIV, 5 Februari 2021.
- Badan Pusat Statistik. 2022. Indikator Ekonomi Desember 2021. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. 2022. Indikator Ekonomi Juni 2022. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. 2022. Produk Domestik Bruto Indonesia Menurut Pengeluaran, 2017-2021. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. 2022. Tourism Satellite Account Indonesia 2016-2020. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

- Bank Indonesia. 2022. Laporan Perekonomian Indonesia 2021. Jakarta: Bank Indonesia.
- Bank Indonesia. 2020. Majalah Bank Indonesia Bicara Edisi 84: 4 Langkah BI untuk Pemulihan Ekonomi. Diakses pada 11 Juli 2022, dari https://www.bi.go.id/id/publikasi/E-Magazine/Documents/BICARA_84_4_Langkah_BI_Untuk_Pemulihan_Ekonomi.pdf.
- Bank Indonesia. 2022. Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia – Juni 2022. Diakses pada 1 Agustus 2022, dari <https://www.bi.go.id/id/statistik/ekonomi-keuangan/seki/Pages/SEKI-JUNI-2022.aspx>
- Bank Indonesia. 1 Juli 2021. Harga Pangan Dorong Deflasi IHK Juni 2021. Diakses pada 26 Agustus 2022, dari https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_2315721.aspx
- Bank Indonesia. 31 Agustus 2021. Laporan Perekonomian Provinsi Sulawesi Tengah Agustus 2021. Palu: Bank Indonesia.
- Bank Indonesia. 2 Februari 2022. Inflasi IHK Januari 2022 Tercatat Rendah. Diakses pada 26 Agustus 2022, dari https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_243322.aspx
- Beritasatu.com. 28 Desember 2021. Pertumbuhan Sektor Informasi dan Komunikasi di Atas Ekonomi Nasional. Diakses pada 28 Mei 2022, dari <https://www.beritasatu.com/archive/872595/pertumbuhan-sektor-informasi-dan-komunikasi-di-atas-ekonomi-nasional>
- Bisnis.com. 14 Juni 2022. Ekonom Prediksi Neraca Dagang Susut Jadi US\$5,01 Miliar pada Mei 2022. Diakses pada 19 Juni 2022, dari <https://ekonomi.bisnis.com/read/20220614/9/1543402/ekonom-prediksi-neraca-dagang-susut-jadi-us501-miliar-pada-mei-2022>
- Bisnis.com. 28 Januari 2022. Volume Ekspor CPO Naik Tipis Imbas Pasokan Terbatas. Diakses pada 24 Juni 2022, dari <https://ekonomi.bisnis.com/read/20220128/12/1494451/volume-ekspor-cpo-naik-tipis-imbaspasokan-terbatas>
- Bisnisindonesia.id. 1 Agustus 2021. Besi & Baja, Jagoan Masa Depan Ekspor Nonmigas. Diakses pada 24 Juni 2022, dari <https://bisnisindonesia.id/article/besi-baja-jagoan-masa-depan-ekspor-nonmigas>
- BKPM. 2022. Realisasi Investasi PMA & PMDN Triwulan II (Apr-Jun) 2022. Diakses pada 18 Agustus 2022, dari <https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/siaran-pers/readmore/2413001/68601>
- BPS Provinsi DKI Jakarta. 5 November 2020. Keadaan Ketenagakerjaan Provinsi DKI Jakarta Agustus 2020. Berita Resmi Statistik No. 22/11/31/Th.XXII, 5 November 2020.
- BPS. 2022. Indikator Ekonomi Maret 2022. Jakarta: BPS.
- BPS. 2022. Indikator Ekonomi Juni 2022. Jakarta: BPS.
- BPS. 2022. Statistik Perdagangan Luar Negeri Impor 2021 Jilid I. Jakarta: BPS.

- BPS. <https://www.bps.go.id/indicator/54/132/1/produksi-tanaman-perkebunan.html>
- BRS BPS. 17 Januari 2021. Perkembangan Ekspor dan Impor Indonesia, Desember 2021. diakses pada 27 Juni 2022, dari <https://www.bps.go.id/pressrelease/2022/01/17/1917/ekspor-desember-2021-mencapai-us-22-38-miliar-dan-impor-desember-2021-senilai-us-21-36-miliar.html>
- BRS BPS. 1 April 2021. Perkembangan Indeks Harga Konsumen, Maret 2022. diakses pada 12 Agustus 2022, dari <https://www.bps.go.id/pressrelease/2022/04/01/1859/inflasi-terjadi-pada-maret-2022-sebesar-0-66-persen--inflasi-tertinggi-terjadi-di-merauke-sebesar-1-86-persen-.html>
- BRS BPS. 2 Juni 2021. Perkembangan Indeks Harga Konsumen, Mei 2022. diakses pada 12 Agustus 2022, dari <https://www.bps.go.id/pressrelease/2022/06/02/1861/inflasi-terjadi-pada-mei-2022-sebesar-0-40-persen--inflasi-tertinggi-terjadi-di-tanjung-pandan-sebesar-2-24-persen-.html>
- BRS BPS. 1 Agustus 2021. Perkembangan Indeks Harga Konsumen, Juli 2022. diakses pada 12 Agustus 2022, dari <https://www.bps.go.id/pressrelease/2022/08/01/1863/inflasi-terjadi-pada-juli-2022-sebesar-0-64-persen--inflasi-tertinggi-terjadi-di-kendari-sebesar-2-27-persen-.html>
- Bursa Efek Indonesia. 2021. IDX Statistics 2021. Jakarta: Bursa Efek Indonesia.
- Bursa Efek Indonesia. 2022. IDX Monthly Statistics April 2022. Jakarta: Bursa Efek Indonesia.
- Bursa Efek Indonesia. 2022. IDX Monthly Statistics February 2022. Jakarta: Bursa Efek Indonesia.
- Bursa Efek Indonesia. 2022. IDX Monthly Statistics January 2022. Jakarta: Bursa Efek Indonesia.
- Bursa Efek Indonesia. 2022. IDX Monthly Statistics June 2022. Jakarta: Bursa Efek Indonesia.
- Bursa Efek Indonesia. 2022. IDX Monthly Statistics March 2022. Jakarta: Bursa Efek Indonesia.
- Bursa Efek Indonesia. 2022. IDX Monthly Statistics May 2022. Jakarta: Bursa Efek Indonesia.
- Cnbc.com. 8 Oktober 2021. Natural gas prices are skyrocketing around the world. Here's why the U.S. may not suffer as much. Diakses pada 22 Juni 2022, dari <https://www.cnbc.com/2021/10/08/natural-gas-prices-are-skyrocketing-globally-what-it-means-for-the-us.html>
- Cnbcindonesia.com. 15 Desember 2021. Sektor Tambang Picu Pertumbuhan Pesat Ekonomi Papua. Diakses pada 21 Juni 2022, dari <https://www.cnbcindonesia.com/news/20211215190356-4-299609/sector-tambang-picu-pertumbuhan-pesat-ekonomi-papua>

- Cnbcindonesia.com. 2 Januari 2022. Batu Bara di 2021 Superior, 2022 Gimana? Diakses pada 24 Juni 2022, dari <https://www.cnbcindonesia.com/market/20220102102248-17-303835/batu-bara-di-2021-superior-2022-gimana>
- Cnbcindonesia.com. 3 Februari 2022. Harga Minyak Nanjak, Impor BBM RI Meroket 74% di 2021!. Diakses pada 29 Juni 2022, dari <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220203181212-4-312718/harga-minyak-nanjak-impor-bbm-ri-meroket-74-di-2021>
- Cnbcindonesia.com. 8 Maret 2022. Dua Tahun Pandemi, Ekonomi Bali Ngenes Sekali. Diakses pada 25 Mei 2022, dari <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220308120609-4-320904/dua-tahun-pandemi-ekonomi-bali-ngenes-sekali>
- Cnnindonesia.com. 27 Januari 2022. Jokowi Proyeksi Ekspor Besi dan Baja Naik Jadi US\$ 30 M Tahun Ini. Diakses pada 24 Juni 2022, dari <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220127195849-532-752197/jokowi-proyeksi-ekspor-besi-dan-baja-naik-jadi-us-30-m-tahun-ini>
- Daerah.sindonews.com. 25 Juni 2021. Industri Nikel di Maluku Utara Pacu Pergerakan Ekonomi. Diakses pada 23 Mei 2022, dari <https://daerah.sindonews.com/read/465772/174/industri-nikel-di-maluku-utara-pacu-pergerakan-ekonomi-1624579585>
- Databoks.katadata.co.id. 26 Januari 2022. Daftar Negara dengan Produktivitas Pekerja Tertinggi di Dunia pada 2022, Bagaimana Indonesia? Diakses pada 8 Juli 2022, dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/01/26/daftar-negara-dengan-produktivitas-pekerja-tertinggi-di-dunia-pada-2022-bagaimana-indonesia>
- Databoks.katadata.co.id. 24 Februari 2022. Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Tumbuh 10,46% pada 2021. Diakses pada 20 Mei 2022, dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/24/sektor-jasa-kesehatan-dan-kegiatan-sosial-tumbuh-1046-pada-2021>
- Databoks.katadata.co.id. 7 November 2021. Pekerja Berpendidikan SD ke Bawah Mendominasi di Indonesia pada Agustus 2021. Diakses pada 7 Juli 2022, dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/11/07/pekerja-berpendidikan-sd-ke-bawah-mendominasi-di-indonesia-pada-agustus-2021>
- Databoks.katadata.co.id. Maret 2022. Nilai Ekspor Gas Indonesia Naik 38,6% pada 2021. Diakses pada 22 Juni 2022, dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/07/nilai-ekspor-gas-indonesia-naik-386-pada-2021#:~:text=Ekspor%20gas%20Indonesia%20mencatatkan%20kinerja,meningkat%20sejak%202016%20hingga%202018>
- Deputi Bidang Kebijakan Strategis Kemenparekraf 2020-2024. (n.d.). Rencana Strategis Deputi Bidang Kebijakan Strategis Kemenparekraf 2020-2024.
- Detik.com. 12 Mei 2022. 4 Teori Pertumbuhan Ekonomi Menurut Para Ahli. Diakses pada 9 Juli 2022, dari <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6073440/4-teori-pertumbuhan-ekonomi-menurut-para-ahli>

- Dewi, A. 22 Mei 2021. Penanggulangan Pandemi Covid-19 Melalui Program Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19. Diakses pada 22 Juni 2022, dari Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran: <https://anggaran.kemenkeu.go.id/in/post/penanggulangan-pandemi-covid-19-melalui-program-pengadaan-vaksin-dan-pelaksanaan-vaksinasi-covid-19>
- Ekonomi.bisnis.com. 2 Januari 2020. Inflasi 2019 Rendah, Bagaimana Andil Pemerintah? Diakses pada 18 Agustus 2022, dari <https://ekonomi.bisnis.com/read/20200102/9/1186323/inflasi-2019-rendah-bagaimana-andil-pemerintah>
- Ekonomi.bisnis.com. 1 April 2021. BPS Catat Inflasi Maret 2021 0,08 Persen. Diakses pada 22 Agustus 2022, dari <https://ekonomi.bisnis.com/read/20210401/9/1375433/bps-catat-inflasi-maret-2021-008-persen>
- Ekonomi.bisnis.com. 16 April 2021. Sektor Perdagangan Jadi Favorit Pencari Kerja saat Pandemi. Diakses pada 7 Juli 2022, dari <https://ekonomi.bisnis.com/read/20210416/12/1382088/sektor-perdagangan-jadi-favorit-pencari-kerja-saat-pandemi>
- <https://dikti.kemdikbud.go.id/wp-content/uploads/2020/10/Booklet-UU-Cipta-Kerja.pdf>
- <https://pen.kemenkeu.go.id/in/page/data-realisasi>
- <https://vaksin.kemkes.go.id/#/vaccines>
- Jaya, I. 23 Desember 2021. Penguatan Sistem Kesehatan dalam Pengendalian COVID-19. Diakses pada 22 Juni 2022, dari <http://p2p.kemkes.go.id/penguatan-sistem-kesehatan-dalam-pengendalian-covid-19/>
- Kantor Staf Presiden. 24 Maret 2021. Jalan Trans Maluku Dibangun untuk Pemerataan dan Keadilan Sosial. Diakses pada 1 Agustus 2022, dari <https://ksp.go.id/jalan-trans-maluku-dibangun-untuk-pemerataan-dan-keadilan-sosial.html>
- Katadata.co.id. 9 Mei 2022. Ekonomi Maluku Utara Melesat 29,6%, Papua Barat Minus 1%. Diakses pada 20 Mei 2022, dari <https://katadata.co.id/agustiyanti/finansial/6278c02a37384/ekonomi-maluku-utara-melesat-29-6-papua-barat-minus-1>
- Kemendagri. 18 Januari 2022. Outlook Perdagangan 2022, Mendag: Kita Jaga Momentum Pertumbuhan Ekspor dan Kendalikan Inflasi (Siaran Pers).
- Kemendagri. 2021. Laporan Analisis Outlook Kinerja Ekspor Dalam Rangka Penyusunan Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Perdagangan Tahun 2022. Jakarta: Kemendag.
- Kemendagri. 7 November 2021. Cetak Rekor Baru, Surplus Neraca Perdagangan Oktober 2021 Tertinggi Sepanjang Sejarah (Siaran Pers).
- Kemenkeu.go.id. 18 Januari 2022. Kinerja Ekspor Impor Indonesia Terus Membaik. Diakses pada 28 Juni 2022, dari <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/kinerja-ekspor-impor-indonesia-terus-membaik/>

- Kemenperin. 29 Desember 2021. Tahun 2021, Menperin: Sektor Industri Masih Jadi Penopang Utama Ekonomi. Diakses pada 22 Juni 2022, dari <https://kemenperin.go.id/artikel/23048/Tahun-2021,-Menperin:-Sektor-Industri-Masih-Jadi-Penopang-Utama-Ekonomi>
- Kementerian Keuangan. 2021. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2020.
- Kementerian Keuangan. 2022. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2021.
- Kementerian Keuangan. 2021. Reformasi Struktural Adalah Syarat agar Potensi Ekonomi Indonesia Optimal. Diakses pada 11 Juli 2022, dari <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/menkeu-reformasi-struktural-adalah-syarat-agar-pot>
- Kementerian Keuangan. 2021. Sinergi Kuat KSSK jadi Kunci Stabilitas Sistem Keuangan. Diakses pada 08 Juli 2022, dari <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/sinergi-kuat-kssk-jadi-kunci-stabilitas-sistem-keu>
- Kementerian Keuangan. 2022. Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ASEAN+3 Perkuat Kerjasama Regional untuk Hadapi Risiko Global. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika. 15 Agustus 2020. Diakses pada 22 Juni 2022, dari <https://www.kominfo.go.id/content/detail/28599/menparekraf-pemulihan-ekonomi-pariwisata-secara-umum-jadi-fokus-di-2021/0/berita>
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. 27 September 2021. Diakses pada 22 Juni 2022, dari <https://ekon.go.id/publikasi/detail/3332/pemerintah-dorong-pemulihan-sektor-pariwisata-dan-ekonomi-kreatif>
- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. 20 Januari 2022. Diakses pada 22 Juni 2022, dari <https://pedulicovid19.kemenparekraf.go.id/devisa-pariwisata-ditargetkan-capai-rp2431-triliun/>
- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. 2020. Tren Pariwisata 2021. Jakarta: Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- Kompas.com. 20 Juni 2021. Tahun 2021, Ekonomi Indonesia Diproyeksi Hanya Tumbuh 4,7 Persen. Diakses pada 24 Agustus 2022, dari <https://money.kompas.com/read/2021/06/20/090400726/tahun-2021-ekonomi-indonesia-diproyeksi-hanya-tumbuh-4-7-persen?page=all>.
- Kompas.com. 30 Juni 2021. Ekonomi Sektor Informal: Pengertian, Ciri-Ciri, Istilah, dan Perannya. Diakses pada 9 Juli 2022, dari <https://www.kompas.com/skola/read/2021/06/30/102821969/ekonomi-sektor-informal-pengertian-ciri-ciri-istilah-dan-perannya>
- Kompas.com. 31 Maret 2021. Jenis-Jenis Pekerjaan Berdasarkan Letak Geografis. Diakses pada 20 Juni 2022, dari <https://www.kompas.com/skola/read/2021/03/31/151122769/jenis-jenis-pekerjaan-berdasarkan-letak-geografis?page=all>

- Kontan.co.id. 10 Januari 2022. Berangsur Pulih, LPEI Catat Ekspor Kopi Indonesia Hanya Minus 1,9% di November 2021. Diakses pada 24 Juni 2022, dari <https://industri.kontan.co.id/news/berangsur-pulih-lpei-catat-ekspor-kopi-indonesia-hanya-minus-19-di-november-2021>
- Kontan.co.id. 29 Januari 2022. Melebihi target, realisasi investasi sepanjang 2019 capai Rp 809,6 triliun. Diakses pada 1 Agustus 2022, dari <https://nasional.kontan.co.id/news/melebihi-target-realisasi-investasi-sepanjang-2019-capai-rp-8096-triliun#:~:text=Nah%2C%20untuk%20tahun%20ini%2C%20BKPM,44%25%20dari%20realisasi%20investasi%202019.>)
- Kumparan.com. 12 November 2021. Tiga Peran Pemerintah dalam Perekonomian di Suatu Negara. Diakses pada 11 Agustus 2022, dari <https://kumparan.com/berita-update/tiga-peran-pemerintah-dalam-perekonomian-di-suatu-negara-1wu6WcXiEDB/3>
- Medcom.id. 13 November 2020. Produktivitas Tenaga Kerja Indonesia di Bawah Rata-rata ASEAN. Diakses pada 8 Juli 2022, dari <https://www.medcom.id/nasional/politik/GNIq60gb-produktivitas-tenaga-kerja-indonesia-di-bawah-rata-rata-asean>
- Mediaindonesia.com. 2 Juni 2021. BPS: Inflasi Mei 2021 Sebesar 0,32%. Diakses pada 19 Agustus 2022, dari <https://mediaindonesia.com/ekonomi/408967/bps-inflasi-mei-2021-sebesar-032>
- Merdeka.com. 1 Juli 2021. Indonesia Alami Deflasi 0,16 Persen di Juni 2021. Diakses pada 19 Agustus 2022, dari <https://www.merdeka.com/uang/indonesia-alami-deflasi-016-persen-di-juni-2021.html>
- Merdeka.com. 21 Maret 2022. 3 Tantangan Ekonomi Dunia di 2022, Suku Bunga The Fed Hingga Perang Rusia-Ukraina. Diakses pada 30 Juni 2022, dari <https://www.merdeka.com/uang/3-tantangan-ekonomi-dunia-di-2022-suku-bunga-the-fed-hingga-perang-rusia-ukraina.html>
- Money.kompas.com. 17 Januari 2022. Impor RI Desember 2021 Tembus 21,36 Miliar Dollar AS, Rekor Tertinggi Sepanjang Sejarah. Diakses pada 1 Juli 2022, dari <https://money.kompas.com/read/2022/01/17/132436926/impor-ri-desember-2021-tembus-2136-miliar-dollar-as-rekor-tertinggi-sepanjang?page=all>
- Nasional.kontan.co.id. 16 Januari 2022. Airlangga: Pemulihan Sektor Industri akan Berdampak ke Perekonomian Nasional. Diakses pada 28 Mei 2022, dari <https://nasional.kontan.co.id/news/airlangga-pemulihan-sektor-industri-akan-berdampak-ke-perekonomian-nasional>
- Pasaribu, M. 19 April 2022. Hasil Kerja Keras APBN pada Masa Pandemi Covid-19. Diakses pada 22 Juni 2022, dari <https://opini.kemenkeu.go.id/article/read/hasil-kerja-keras-apbn-pada-masa-pandemi-covid-19>
- Pratiwi, Y. R. 24 Februari 2022. Diakses pada 22 Juni 2022, dari <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-banjarmasin/baca-artikel/14769/Pemulihan-Perekonomian-Indonesia-Setelah-Kontraksi-Akibat-Pandemi-Covid-19.html>

- Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian Setjen DPR RI. 2022. Tantangan Menuju Konsolidasi Fiskal Tahun 2023. Ekonomi dan Keuangan Budget Issue Brief, Vol 02 (Ed 3), Vol 02, Ed 3. Diakses pada 06 Juli 2022 dari bib-public-98.pdf (dpr.go.id)
- Puspasari, R. 2022. APBN 2021 Telah Bekerja Keras dan Berkinerja Positif dalam Pengendalian. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Republika.co.id. 2 Februari 2022. Indonesia Surplus Perdagangan dengan China pada 2021. Diakses pada 27 Juni 2022, dari <https://www.republika.co.id/berita/r6oiwq383/indonesia-surplus-perdagangan-dengan-china-pada-2021>
- Sulaeman. 17 Februari 2022. Merdeka.com. Diakses pada 04 Juli 2022, dari <https://www.merdeka.com/uang/lima-strategi-bank-indonesia-antisipasi-normalisasi-kebijakan-the-fed.html>
- Tempo.co. 12 Desember 2021. Berikut Poin-poin Aturan Baru Kemendag yang Diklaim Memudahkan Ekspor Impor. Diakses pada 30 Juni 2022, dari https://bisnis.tempo.co/read/1538596/berikut-poin-poin-aturan-baru-kemendag-yang-diklaim-memudahkan-ekspor-impor?page_num=2
- UNCTAD. Februari 2022. Global Trade Update. Diakses pada 29 Juni 2022, dari https://unctad.org/system/files/official-document/ditcinf2022d1_en.pdf.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- UNWTO. 2 Agustus 2022. Diakses pada 22 Juni 2022, dari <https://www.unwto.org/impact-assessment-of-the-covid-19-outbreak-on-international-tourism>
- UU Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022
- UU Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021
- Voaindonesia.com. 5 Agustus 2021. Indonesia Sudah Keluar Dari Jebakan Resesi Ekonomi. Diakses pada 7 Juli 2022, dari <https://www.voaindonesia.com/a/indonesia-sudah-keluar-dari-jebakan-resesi-ekonomi/5991857.html>
- WHO. 2020. Coronavirus disease 2019 (COVID-19). Situation Report - 51.
- World Bank. 1 Juli 2022. New World Bank Country Classifications by Income Level: 2022-2023. Diakses pada 8 Juli 2022, dari <https://blogs.worldbank.org/opendata/new-world-bank-country-classifications-income-level-2022-2023>
- World Bank. 2021. World Bank Country and Lending Groups. Diakses pada 22 Juni 2022, dari <https://blogs.worldbank.org/opendata/new-world-bank-country-classifications-income-level-2021-2022>

Wuryandani, D. 2020. Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2020 dan Solusinya. Vol. XII, No. 15/1/Puslit/Agustus/2020.

www.adb.org/outlook

www.pen.kemenkeu.go.id/in/page/data-realisasi

<https://www.bps.go.id>

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



BADAN PUSAT STATISTIK

Jl. dr. Sutomo No 6-8 Jakarta 10710

Telp: (021) 3841195, 3842508, 3810291-4 Fax: (021) 3857046

Email: bpsHQ@bps.go.id Homepage: <http://www.bps.go.id>

ISSN 1858-0963

